**PEMERINTAH PROVINSI BALI**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan tahun anggaran (TA) 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan catatan atas laporan keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

## BAB I
## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Arus Kas pemerintah daerah.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).

### 1.3 Sistematika Penyajian CaLK

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi CaLK adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penyajian CaLK

**Bab II Informasi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Indikator Target Kinerja APBD**

2.1 Ekonomi Makro
  2.1.1 Tingkat Kemiskinan
  2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
  2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)
  2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
  2.1.6 Inflasi
  2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

2.4.1. Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025
1. Pendidikan
2. Infrastruktur Pelayanan Publik

2.4.2. Bidang Pengawasan dan APIP Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Pengawasan
3. Kemiskinan ekstrem
4. Stunting
5. Inflasi

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
3.4 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025
3.5 Analisis Solvabilitas Keuangan Daerah

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

4.1 Entitas pelaporan, entitas akuntansi keuangan daerah, BLUD, dan perusahaan daerah
4.1.1 Entitas Pelaporan
4.1.2 Entitas Akuntansi
4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD
4.4 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
4.4.1 Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan
4.4.2 Kebijakan akuntansi pendapatan
4.4.3 Kebijakan akuntansi beban dan belanja
4.4.4 Kebijakan akuntansi transfer
4.4.5 Kebijakan akuntansi pembiayaan
4.4.6 Kebijakan akuntansi kas dan setara kas
4.4.7 Kebijakan akuntansi piutang
4.4.8 Kebijakan akuntansi persediaan
4.4.9 Kebijakan akuntansi investasi
4.4.10 Kebijakan akuntansi aset tetap
4.4.11 Kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
4.4.12 Kebijakan akuntansi properti investasi
4.4.13 Kebijakan akuntansi dana cadangan
4.4.14 Kebijakan akuntansi aset lainnya
4.4.15 Kebijakan akuntansi kewajiban
4.4.16 Kebijakan akuntansi ekuitas
4.4.17 Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan
4.4.18 Kebijakan akuntansi laporan keuangan konsolidasian

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan-LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Penerimaan Pembiayaan
5.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
5.1.5 SiLPA
5.2 Pos-pos LP-SAL
5.2.1 LP-SAL awal periode
5.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
5.2.3 SAL Tahun Berjalan
5.2.4 LP-SAL akhir periode

5.3 Pos-pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan-LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Surplus Non Operasional
5.4.4 Defisit Non Operasional
5.4.5 Surplus (Defisit)-LO
5.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Perubahan Ekuitas
5.6.3 Ekuitas Akhir
5.7 Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja
5.8 Pengungkapan Informasi Untuk Kejadian Setelah Tahun Pelaporan

**Bab VI Penjelasan atas Informasi NonKeuangan Pemerintah Daerah**

**Bab VII Penutup**

# BAB II
# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
3. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)**

| No | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/turun 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Tingkat Kemiskinan (%) | 4,25 | 4,00 | 3,72 | Turun 0,28 persen poin |
| 2 | Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang) | 193,78 | 184,43 | 173,24 | Turun 11,19 ribu orang |
| 3 | Tingkat Kemiskinan Nasional (%) | 9,36 | 9,03 | 8,47 | Turun 0,56 persen poin |
| 4 | Peringkat Provinsi | 1 | 1 | 1 | Tetap |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen. Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

**Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)**

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali | 0,553 | 0,499 | 0,560 | Naik 0,061 poin |
| 2 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional | 1,528 | 1,461 | 1,365 | Turun 0,096 poin |
| 3 | Peringkat Provinsi | 1 | 1 | 2 | Turun 1 peringkat |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Kedalaman kemiskinan ($P_1$) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 merupakan rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.Pada periode Maret 2025, indikator ini meningkat 0,061 poin yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun perubahan tingkat kemiskinan secara persentase mungkin relatif terbatas, beban ekonomi yang ditanggung penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga mereka berada pada posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Secara peringkat, Provinsi Bali menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat pertama pada Maret 2025.

**Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)**

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi | 0,102 | 0,090 | 0,117 | Naik 0,027 poin |
| 2 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional | 0,377 | 0,347 | 0,319 | Turun 0,028 poin |
| 3 | Peringkat Provinsi | 1 | 1 | 3 | Turun 2 peringkat |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan ($P_2$) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang

relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)**

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%) | 2,69 | 1,79 | 1,49 | Turun 0,30 persen poin |
| 2 | Tingkat Pengangguran Nasional (%) | 5,32 | 4,91 | 4,85 | Turun 0,06 persen poin |
| 3 | Peringkat Provinsi | 3 | 2 | 1 | Naik 1 peringkat |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)**

| No | Gini Rasio | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Provinsi | 0,362 | 0,361 | 0,353 | Turun 0,008 poin |
| 2 | Tingkat Nasional | 0,388 | 0,379 | 0,375 | Turun 0,004 poin |
| 3 | Peringkat Provinsi | 21 | 25 | 24 | Naik 1 peringkat |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang (60 ≤ IPM < 70)
3. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

| No | Indeks Pembangunan Manusia | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembrana | 74,80 | 75,32 | 75,94 | Naik 0,62 poin |
| 2 | Tabanan | 77,87 | 78,83 | 79,70 | Naik 0,87 poin |
| 3 | Badung | 83,00 | 83,73 | 84,27 | Naik 0,54 poin |
| 4 | Gianyar | 79,69 | 80,23 | 80,96 | Naik 0,73 poin |
| 5 | Klungkung | 74,18 | 75,15 | 75,89 | Naik 0,74 poin |
| 6 | Bangli | 71,99 | 72,51 | 73,22 | Naik 0,71 poin |
| 7 | Karangasem | 70,09 | 70,91 | 71,89 | Naik 0,98 poin |
| 8 | Buleleng | 74,87 | 75,35 | 76,06 | Naik 0,71 poin |
| 9 | Denpasar | 84,68 | 85,11 | 85,63 | Naik 0,52 poin |
| 10 | Provinsi Bali | 78,01 | 78,63 | 79,37 | Naik 0,74 poin |
| 11 | Indonesia/Nasional | 74,39 | 75,02 | 75,90 | Naik 0,88 poin |
| 12 | Peringkat Provinsi | 5 | 5 | 5 | Tetap |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia "tinggi" (70 ≤ IPM < 80).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia "tinggi" atau "sangat tinggi". Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan "sangat tinggi" (IPM ≥ 80) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96.Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan "tinggi" (70 ≤ IPM < 80).

### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali**

| No | Uraian | Kabupaten/Kota | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp) | | | |
| | Jembrana | 9,49 | 9,97 | |
| | Tabanan | 15,47 | 16,24 | |
| | Badung | 35,55 | 37,67 | |
| | Gianyar | 18,87 | 19,90 | |
| | Klungkung | 6,04 | 6,35 | |
| | Bangli | 4,67 | 4,88 | |
| | Karangasem | 11,18 | 11,66 | |
| | Buleleng | 23,28 | 24,45 | |
| | Denpasar | 36,00 | 38,00 | |
| | Provinsi Bali | 159,46 | 168,20 | 177,99 |
| | Indonesia | 12.301,45 | 12.920,53 | 13.580,52 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | | | |
| | Jembrana | 3,66 | 4,98 | |
| | Tabanan | 3,56 | 4,94 | |
| | Badung | 11,29 | 5,94 | |
| | Gianyar | 5,06 | 5,47 | |
| | Klungkung | 4,70 | 5,08 | |
| | Bangli | 3,50 | 4,54 | |
| | Karangasem | 3,10 | 4,33 | |
| | Buleleng | 3,64 | 5,04 | |
| | Denpasar | 5,69 | 5,55 | |
| | Provinsi Bali | 5,72 | 5,48 | 5,82 |
| | Indonesia | 5,05 | 5,03 | 5,11 |
| 3 | Peringkat Provinsi (Nasional) | | | |
| | Jembrana | 5 | 6 | |
| | Tabanan | 7 | 7 | |
| | Badung | 1 | 1 | |

| No | Uraian | Kabupaten/Kota | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| | Gianyar | 3 | 3 | |
| | Klungkung | 4 | 4 | |
| | Bangli | 8 | 8 | |
| | Karangasem | 9 | 9 | |
| | Buleleng | 6 | 5 | |
| | Denpasar | 2 | 2 | |
| 4 | Peringkat Nasional | 5 | 5 | 5 |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (*c-to-c*), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRT menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

**Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali**

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%) | - | 2,44 | 2,70 |
| 2 | Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%) | - | 1,98 | 2,37 |
| 3 | Tingkat Inflasi Singaraja (%) | 4,31 | 1,93 | 2,51 |
| 4 | Tingkat Inflasi Denpasar (%) | 2,54 | 2,69 | 3,45 |
| 5 | Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%) | - | 2,34 | 2,91 |
| 6 | Tingkat inflasi Nasional (%) | 2,61 | 1,57 | 2,92 |
| 7 | Peringkat Provinsi (Denpasar) | 2 | 1* | |
| 8 | Peringkat Nasional (Bali) | - | 4** | |

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2023, 2024, 2025*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara *year-on-year*. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/*service*, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

*(dalam juta rupiah)*

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Jembrana** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.381.630,98 | 3.815.640,37 | 4.141.691,04 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 130.296,98 | 134.832,81 | 138.575,66 |
| | 3. Industri Pengolahan | 826.377,27 | 888.418,27 | 945.522,88 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 23.839,96 | 24.216,47 | 25.084,01 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 11.363,43 | 11.894,25 | 12.678,26 |
| | 6. Konstruksi | 1.590.389,71 | 1.623.412,95 | 1.731.285,22 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 1.648.399,89 | 1.711.991,78 | 1.868.153,35 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 2.281.484,63 | 2.505.118,37 | 2.709.891,52 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.915.053,52 | 2.112.996,33 | 2.388.520,45 |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 962.912,12 | 1.006.944,06 | 1.055.413,30 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 642.046,66 | 731.776,53 | 761.241,97 |
| | 12. Real Estate | 711.528,20 | 724.717,33 | 765.120,79 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 131.173,23 | 142.718,57 | 154.756,54 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib | 407.500,36 | 426.835,69 | 467.846,28 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 326.228,55 | 337.600,10 | 367.359,95 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 375.560,11 | 386.767,10 | 423.768,00 |
| | 17. Jasa Lainnya | 247.491,35 | 259.128,71 | 279.402,59 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **15.613.276,95** | **16.845.009,69** | **18.236.311,81** |
| **2** | **Tabanan** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.723.710,40 | 6.169.684,07 | 6.544.710,10 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 280.999,77 | 288.304,05 | 287.542,23 |
| | 3. Industri Pengolahan | 1.518.608,39 | 1.686.305,21 | 1.845.916,91 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 31.261,63 | 33.476,61 | 36.057,13 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 39.832,49 | 42.378,80 | 44.707,24 |
| | 6. Konstruksi | 2.501.179,21 | 2.591.319,38 | 2.720.233,84 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 2.319.825,21 | 2.440.374,29 | 2.670.692,96 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 424.495,67 | 470.216,05 | 522.952,09 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.743.839,60 | 5.530.900,57 | 6.257.232,77 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 1.480.998,95 | 1.544.631,17 | 1.632.906,46 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.158.586,29 | 1.337.744,33 | 1.389.559,59 |
| | 12. Real Estate | 1.290.459,70 | 1.335.134,83 | 1.454.084,93 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 283.012,53 | 313.062,58 | 346.454,80 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.964.653,99 | 2.008.567,44 | 2.208.824,14 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 470.255,13 | 487.272,02 | 521.642,77 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 693.729,77 | 716.370,05 | 774.924,53 |
| | 17. Jasa Lainnya | 606.245,20 | 654.056,26 | 725.400,47 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **25.531.693,93** | **27.649.797,71** | **29.983.842,96** |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Badung** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.152.829,32 | 4.418.709,58 | 4.724.545,49 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 176.424,08 | 175.537,09 | 173.694,91 |
| | 3. Industri Pengolahan | 2.447.355,08 | 2.609.050,99 | 2.827.515,10 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 98.010,62 | 101.104,90 | 107.551,09 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 133.721,84 | 144.254,69 | 151.350,92 |
| | 6. Konstruksi | 5.831.279,10 | 5.936.588,64 | 6.313.728,28 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 4.740.948,09 | 5.023.681,41 | 5.481.307,85 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 19.128.495,84 | 21.326.037,51 | 22.903.154,51 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 16.877.404,33 | 19.318.413,47 | 21.746.704,50 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 4.216.549,63 | 4.474.419,94 | 4.670.822,90 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.043.883,80 | 2.441.594,87 | 2.559.973,49 |
| | 12. Real Estate | 2.278.749,26 | 2.370.020,26 | 2.499.935,42 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 508.423,39 | 564.326,22 | 617.979,22 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2.184.119,45 | 2.458.991,02 | 2.835.975,21 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 1.980.372,32 | 2.004.091,16 | 2.176.087,85 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 986.583,93 | 1.022.096,32 | 1.115.884,41 |
| | 17. Jasa Lainnya | 611.145,40 | 674.808,97 | 756.959,08 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **68.396.295,48** | **75.063.727,04** | **81.663.170,23** |
| **4** | **Gianyar** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.675.839,89 | 3.891.726,30 | 4.097.613,73 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 400.329,48 | 419.974,31 | 446.764,85 |
| | 3. Industri Pengolahan | 3.702.588,93 | 3.987.517,87 | 4.318.455,53 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 35.993,58 | 39.498,26 | 43.094,17 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 36.914,45 | 39.844,01 | 41.417,63 |
| | 6. Konstruksi | 3.748.697,89 | 3.811.078,29 | 4.165.576,79 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 2.519.746,62 | 2.699.847,80 | 2.930.152,53 |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 278.927,26 | 312.035,20 | 334.028,93 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6.809.142,28 | 7.853.299,40 | 9.035.673,50 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 2.022.467,54 | 2.185.675,15 | 2.233.785,69 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.470.144,23 | 1.616.080,27 | 1.681.268,34 |
| | 12. Real Estate | 1.348.206,25 | 1.369.136,50 | 1.461.391,24 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 407.992,81 | 448.403,69 | 484.994,43 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.603.134,89 | 1.736.920,82 | 1.964.488,96 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 694.994,47 | 735.679,20 | 811.178,34 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.127.533,03 | 1.186.379,33 | 1.281.571,56 |
| | 17. Jasa Lainnya | 646.762,67 | 713.502,61 | 785.414,50 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **30.529.416,27** | **33.046.599,01** | **36.116.870,72** |
| **5** | **Klungkung** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.184.286,74 | 2.429.551,82 | 2.558.267,67 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 295.100,52 | 312.759,48 | 327.505,29 |
| | 3. Industri Pengolahan | 951.253,24 | 1.024.071,76 | 1.128.859,59 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 12.862,85 | 14.893,69 | 15.921,51 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 19.316,40 | 20.615,55 | 21.776,40 |
| | 6. Konstruksi | 1.007.661,23 | 1.050.024,51 | 1.116.707,55 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 875.010,35 | 917.712,34 | 1.025.417,10 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 255.309,30 | 308.267,67 | 367.963,82 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.208.761,79 | 1.455.499,58 | 1.698.243,26 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 913.977,88 | 964.968,84 | 1.004.260,18 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 474.210,75 | 530.410,20 | 545.072,07 |
| | 12. Real Estate | 232.428,12 | 244.020,72 | 257.461,87 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 103.802,93 | 117.940,92 | 131.392,14 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 553.753,78 | 587.891,46 | 649.815,91 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 230.940,31 | 243.654,61 | 268.964,66 |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 484.075,44 | 501.955,32 | 561.731,87 |
| | 17. Jasa Lainnya | 269.463,75 | 291.246,90 | 324.367,98 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **10.072.215,38** | **11.015.485,37** | **12.003.728,87** |
| **6** | **Bangli** | | | |
| | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.159.462,75 | 2.305.078,49 | 2.474.801,64 |
| | Pertambangan dan Penggalian | 139.860,70 | 141.074,92 | 147.613,01 |
| | Industri Pengolahan | 681.839,42 | 706.341,00 | 732.702,34 |
| | Pengadaan Listrik dan Gas | 3.481,68 | 3.643,35 | 3.985,19 |
| | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 4.879,57 | 4.899,17 | 5.228,93 |
| | Konstruksi | 675.513,40 | 685.416,40 | 724.129,51 |
| | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 807.988,58 | 831.315,69 | 908.822,95 |
| | Transportasi dan Pergudangan | 89.153,81 | 97.253,93 | 99.497,80 |
| | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 964.649,92 | 1.138.978,65 | 1.303.066,09 |
| | Informasi dan Komunikasi | 354.235,97 | 374.687,21 | 388.929,34 |
| | Jasa Keuangan dan Asuransi | 257.966,62 | 298.905,38 | 314.377,46 |
| | Real Estate | 241.140,91 | 247.720,41 | 259.701,91 |
| | Jasa Perusahaan | 42.964,87 | 47.956,89 | 53.280,99 |
| | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 895.256,27 | 956.295,79 | 1.050.067,30 |
| | Jasa Pendidikan | 181.363,75 | 186.771,51 | 204.525,22 |
| | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 124.989,83 | 130.919,24 | 139.178,71 |
| | Jasa Lainnya | 283.561,43 | 308.344,91 | 345.094,27 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **7.908.309,48** | **8.465.602,94** | **9.155.002,66** |
| **7** | **Karangasem** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.883.332,90 | 5.136.046,48 | 5.408.960,39 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 676.062,20 | 732.501,48 | 768.391,65 |
| | 3. Industri Pengolahan | 774.052,10 | 812.244,50 | 885.278,65 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 19.350,10 | 19.583,50 | 21.122,88 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 24.557,10 | 26.065,36 | 26.777,51 |
| | 6. Konstruksi | 1.318.015,90 | 1.388.940,76 | 1.463.968,91 |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi,l dan Sepeda Motor | 1.082.719,70 | 1.083.924,05 | 1.214.909,76 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 3.070.993,40 | 3.239.840,33 | 3.539.433,97 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.739.410,30 | 1.963.789,48 | 2.237.371,58 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 653.175,20 | 688.430,29 | 732.728,13 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.062.929,80 | 1.194.490,15 | 1.228.541,66 |
| | 12. Real Estate | 754.932,90 | 796.748,39 | 846.901,34 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 152.030,40 | 166.652,96 | 185.064,57 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.365.395,50 | 1.470.849,27 | 1.637.060,85 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 467.122,00 | 505.366,70 | 539.687,91 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 442.879,10 | 472.299,19 | 507.147,23 |
| | 17. Jasa Lainnya | 487.816,80 | 512.555,10 | 561.058,93 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **18.974.775,40** | **20.210.327,99** | **21.804.405,92** |
| **8** | **Buleleng** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 8.004.808,88 | 8.445.133,84 | 9.027.020,79 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 327.936,72 | 346.694,92 | 363.273,69 |
| | 3. Industri Pengolahan | 2.364.120,60 | 2.671.661,09 | 2.952.350,42 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 67.514,94 | 72.171,29 | 77.326,99 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 42.908,86 | 42.068,50 | 43.865,09 |
| | 6. Konstruksi | 3.541.541,69 | 3.716.363,13 | 3.979.787,81 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 4.727.916,99 | 5.023.231,19 | 5.552.965,40 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 454.042,28 | 508.734,02 | 560.652,59 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6.198.370,94 | 7.069.183,70 | 8.084.796,84 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 2.198.163,88 | 2.266.618,36 | 2.369.033,57 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.931.174,90 | 2.257.241,86 | 2.347.322,29 |
| | 12. Real Estate | 1.763.266,42 | 1.852.223,07 | 1.964.574,23 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 281.872,31 | 303.807,00 | 331.904,81 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, | 2.001.994,79 | 2.129.695,24 | 2.362.569,42 |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | | | |
| | 15. Jasa Pendidikan | 2.726.839,41 | 2.849.266,95 | 3.124.219,73 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 927.592,07 | 972.804,27 | 1.042.221,84 |
| | 17. Jasa Lainnya | 791.295,42 | 860.853,44 | 936.629,31 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **38.351.361,10** | **41.387.751,87** | **45.120.514,82** |
| **9** | **Kota Denpasar** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.949.625,79 | 3.778.610,97 | 3.837.463,68 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | - | - | - |
| | 3. Industri Pengolahan | 3.875.731,94 | 4.206.282,45 | 4.487.141,40 |
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 347.657,68 | 409.059,32 | 430.414,00 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 136.499,25 | 134.263,81 | 144.638,45 |
| | 6. Konstruksi | 6.689.585,29 | 6.820.641,59 | 7.409.557,07 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 6.041.481,81 | 6.453.315,98 | 7.107.080,77 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 1.773.632,76 | 1.918.713,85 | 2.083.262,79 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 14.328.513,00 | 16.682.509,16 | 18.728.527,81 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 2.844.638,21 | 2.975.124,08 | 3.105.158,31 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.210.391,02 | 5.023.714,55 | 5.257.465,91 |
| | 12. Real Estate | 2.457.089,19 | 2.496.708,08 | 2.685.199,57 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 1.225.422,18 | 1.345.518,35 | 1.506.743,23 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2.997.349,63 | 3.254.187,63 | 3.626.833,14 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 6.587.509,19 | 6.992.708,13 | 7.617.190,71 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.636.171,17 | 1.700.830,67 | 1.848.932,38 |
| | 17. Jasa Lainnya | 999.003,56 | 1.108.025,10 | 1.223.512,19 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **60.100.301,67** | **65.300.213,72** | **71.099.121,41** |
| **10** | **Provinsi Bali** | | | |
| | 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 37.744.646,70 | 40.069.823,24 | 42.528.777,42 |
| | 2. Pertambangan dan Penggalian | 2.436.619,10 | 2.549.557,56 | 2.652.258,09 |
| | 3. Industri Pengolahan | 17.115.768,99 | 18.664.578,60 | 20.185.046,24 |

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 640.751,91 | 717.467,90 | 760.528,38 |
| | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 446.923,22 | 458.724,81 | 483.368,76 |
| | 6. Konstruksi | 26.805.931,83 | 27.563.207,76 | 29.253.400,09 |
| | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | 24.560.349,18 | 25.893.433,87 | 28.450.847,02 |
| | 8. Transportasi dan Pergudangan | 27.658.642,39 | 30.622.899,07 | 33.055.658,92 |
| | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 54.672.739,87 | 63.866.219,32 | 72.199.795,23 |
| | 10. Informasi dan Komunikasi | 15.517.170,16 | 16.101.487,08 | 16.908.037,19 |
| | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 13.277.201,87 | 15.455.369,56 | 16.104.962,56 |
| | 12. Real Estate | 11.055.527,30 | 11.449.017,85 | 12.112.517,64 |
| | 13. Jasa Perusahaan | 3.159.502,42 | 3.445.130,35 | 3.819.555,00 |
| | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 13.902.185,23 | 14.955.848,50 | 16.666.176,67 |
| | 15. Jasa Pendidikan | 13.669.131,84 | 14.244.438,05 | 15.509.082,88 |
| | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6.809.768,37 | 7.085.731,87 | 7.682.945,41 |
| | 17. Jasa Lainnya | 4.909.174,98 | 5.296.623,87 | 5.775.986,60 |
| | **PDRB ADH Berlaku** | **274.382.035,36** | **298.439.559,26** | **324.148.944,10** |

*Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali*

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

### 2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

   a. Pajak Daerah

      Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

      1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
      2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

      Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

   b. Retribusi Daerah

      Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

      1) Retribusi jasa umum;

      2) Retribusi jasa usaha; dan

      3) Retribusi perizinan tertentu.

   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

   a. Transfer Pemerintah Pusat

      Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

      1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
      2) Insentif Fiskal.

   b. Transfer Antar Daerah

      Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

   a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;

   b. Dana Darurat; dan

   c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

   Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

   a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
   b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
   c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
   d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
   e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
   f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce* (*e-commerce*);
   g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
   h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;

i. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
   1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
   2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
   3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
   4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
   5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
   6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
   7) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

### 2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 8 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonisdengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal

Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan: UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata

Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Transportasi

Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

### 2.3.1 Belanja Wajib *(Mandatory Spending)* dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

#### 2.3.1.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025

Belanja wajib *(mandatory spending)* adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan poin 5 hal khusus lainnya pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 . Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

**1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan**

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir E.1.a. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.603.057.858.136,00 atau 35,11% dari total belanja daerah sebesar Rp7.412.970.277.983,60, dengan realisasi mencapai Rp2.168.726.863.718,05 atau 33,09% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp6.555.001.412.634,62. Dengan demikian, alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
    1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
    2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
    3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
    4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
    5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
d. Angka harapan lama sekolah (HLS)
    HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
    1) Pengadaan ajang gelar karya/*expo* siswa SMK dengan tema "Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya"
    2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
    1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*
    Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
    2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
    Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
    3) Aplikasi kelas virtual
    Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja wajib fungsi pendidikan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

**2. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik**

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.138.615.498.744,00 atau 35,24% dari total anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp6.068.805.441.963,60 dengan realisasi sebesar Rp1.788.117.115.228,62 atau 33,68% dari total realisasi anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp5.308.662.002.331,59.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar Belanja Transfer. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

### 2.3.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

**1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD TA 2025 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan
Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Angka Partisipasi Sekolah.
2) Literasi dan Numerasi.
3) Kekhususan SMK.
4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan
Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.
Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana;
e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.
2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

f. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

**2. Kebijakan Tematik Pengawasan**

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
4) Reviu laporan keuangan;
5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

**3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem**

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
   1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
   2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ektrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
   1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
   2) Mengintegrasikan program penangulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
   3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
e. Menurunkan beban pengeluaran masayarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat

g. "Ngrombo"/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

**4. Kebijakan Tematik Stunting**

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
   1) Penggerakan Aksi Bergizi
      Sasaran : Pelajar putri
      Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
      Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
   2) Penggerakan Bumil Sehat
      Sasaran : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
      Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
      Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
   3) Penggerakan Posyandu Aktif
      Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
      Kegiatan : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
      Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
   4) Penggerakan Cegah Stunting
      Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu

Kegiatan : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)

5) Jambore Kader

Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)

Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi ( 200 orang ) 20 Agustus 2024

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

**5. Kebijakan Tematik Inflasi**

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
   Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
   Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
   1) Menjadi *off taker* pertanian khususnya beras
   2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
d. Pengembangan aplikasi SiGapura
   1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
   2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
   3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
   4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
   1) Bantuan benih/bibit
   2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
   3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
   4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
   5) Penanganan kerawanan pangan
   6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi

7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi

f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian

g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)

h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
4) Menghitung CBPP Provinsi Bali

i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp7.010.000.000

j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

k. Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

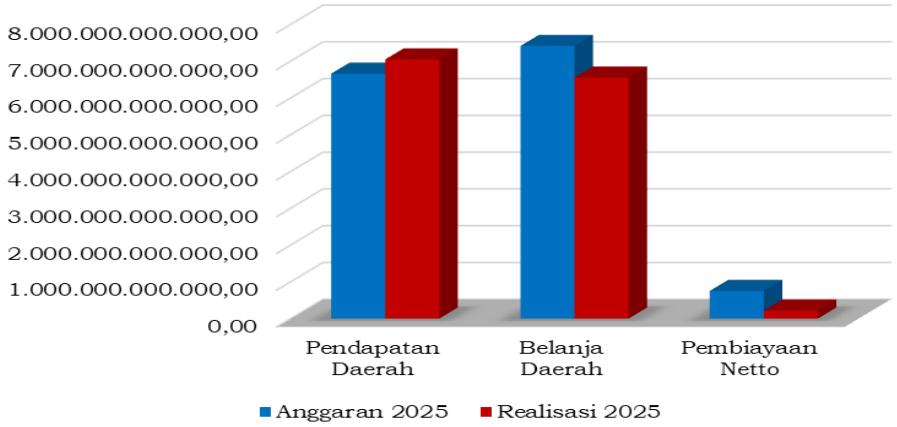
# BAB III
# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencanan Provinsi Bali TA 2025, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2025.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD TA 2025**

| No | Uraian | | 2025 | | | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % | Realisasi |
| 1 | Pendapatan Daerah | 6.027.724.313.823,00 | 6.660.624.025.310,00 | 7.048.315.869.271,64 | 105,82 | 7.824.598.583.907,83 |
| 2 | Belanja Daerah | 6.827.385.005.313,20 | 7.412.970.277.983,60 | 6.554.652.991.551,62 | 88,42 | 7.293.051.849.998,07 |
| 3 | Surplus (Defisit) | (799.660.691.490,20) | (752.346.252.673,60) | 493.662.877.720,02 | (65,61) | 531.546.733.909,76 |
| 4 | Penerimaan Pembiayaan | 1.201.125.499.578,20 | 1.153.811.060.761,60 | 620.675.986.790,62 | 53,79 | 342.650.523.381,56 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 401.464.808.088,00 | 401.464.808.088,00 | 401.464.798.088,00 | 99,99 | 250.464.798.088,00 |
| 6 | Pembiayaan Netto | 799.660.691.490,20 | 752.346.252.673,60 | 219.211.188.702,62 | 29,13 | 92.185.725.293,56 |
| **SiLPA/SiKPA** | | - | - | **712.874.066.422,64** | - | **623.732.459.203,32** |




**Gambar 3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

Pada komponen pendapatan, target anggaran TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp215.392.168.290,00 atau 3,13%. Penetapan target pendapatan dimaksud merupakan hasil penyesuaian terhadap capaian kinerja realisasi pendapatan pada TA 2024. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi pendapatan TA 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp776.282.714.636,19 atau 9,92%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemberlakuan pemungutan opsen oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang efektif berlaku mulai 5 Januari 2025.

Selain itu, terdapat penerimaan pada rekening penampungan sebesar Rp6.468.000,00 yang belum masuk ke RKUD, terdiri atas penerimaan retribusi non pajak sebesar Rp318.000,00 dan pungutan wisatawan asing sebesar Rp6.150.000,00. Hal tersebut sesuai dengan Surat Kepala BPKAD kepada PT Bank BPD Bali Nomor:B.31.900/8226/PAPKD/BPKAD perihal Pelimpahan Saldo Rekening Penampungan ke RKUD Provinsi Bali. Berdasarkan ketentuan tersebut, penerimaan non tunai sampai dengan pukul 15.00 WITA dilimpahkan ke RKUD pada hari yang sama setelah dilakukan rekonsiliasi,

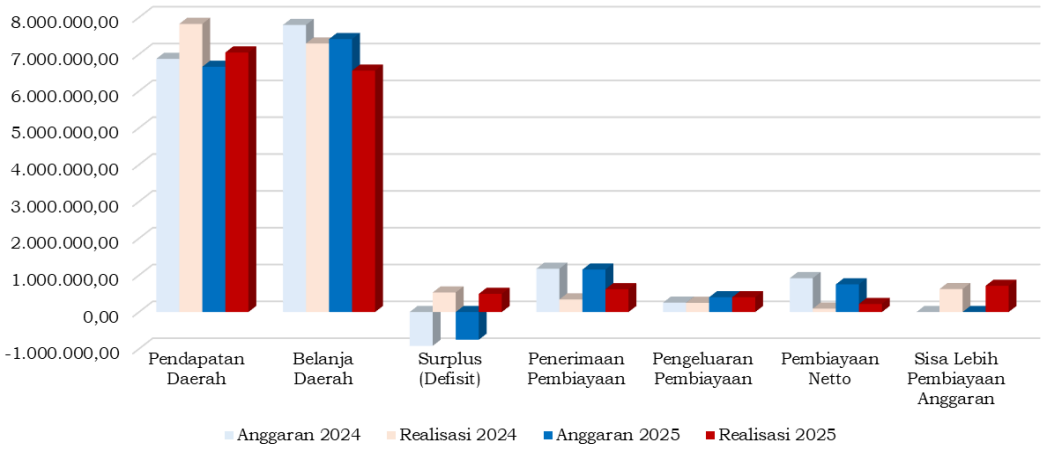
sedangkan transaksi setelah pukul 15.00 WITA dilimpahkan dan diakui sebagai penerimaan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun penerimaan tunai setelah pukul 15.00 WITA tetap dilayani untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat dan hasil penerimaannya dilimpahkan pada hari yang sama.

Pada komponen belanja, target anggaran TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp382.711.452.820,40 atau 4,91% dibandingkan TA 2024. Selaras dengan penurunan tersebut, realisasi belanja juga mengalami penurunan sebesar Rp738.398.858.446,45 atau 10,12%. Capaian realisasi belanja dimaksud merupakan hasil pelaksanaan kebijakan pengendalian belanja daerah sebagaimana diatur dalam:

1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025; dan
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 7505 Tahun 2025 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sebagai implikasi dari penurunan target dan realisasi pendapatan serta belanja, pada TA 2025 Pemerintah Provinsi Bali mengalami surplus sebesar Rp493.662.877.720,02 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp752.346.252.673,60. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan TA 2024 yang mengalami surplus sebesar Rp531.546.733.909,76, Pemerintah Provinsi Bali mengalami penurunan surplus sebesar Rp37.883.856.189,74 atau 7,13%. Di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan netto TA 2025 sebesar Rp219.211.188.702,62 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp92.185.725.293,56, atau meningkat sebesar Rp127.025.463.409,06 (137,79%) yang mencerminkan adanya penguatan pada komponen pembiayaan daerah.

Dengan adanya pelampauan realisasi pendapatan serta belum optimalnya realisasi belanja dan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp712.874.066.422,64. Saldo SiLPA tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya serta memberikan ruang fiskal dalam pengelolaan APBD secara berkelanjutan.




**Gambar 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 dan 2025 (Dalam Juta Rupiah)**

### 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang dan fungsi terkait, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan TA 2025 Sesuai Bidang dan Fungsi**

| Urusan/Dinas Pelaksana | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **356.739.830.983,00** | **416.872.037.624,00** | **380.568.909.605,18** | **91,29** |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.350.000.000,00 | 2.502.000.000,00 | 3.219.031.137,00 | 128,66 |
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.350.000.000,00 | 2.502.000.000,00 | 3.219.031.137,00 | 128,66 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 305.219.038.983,00 | 355.577.845.624,00 | 323.840.560.469,83 | 91,07 |
| Dinas Kesehatan | 305.219.038.983,00 | 355.577.845.624,00 | 323.840.560.469,83 | 91,07 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 49.161.432.000,00 | 58.782.832.000,00 | 53.499.957.998,35 | 91,01 |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 49.161.432.000,00 | 58.782.832.000,00 | 53.499.957.998,35 | 91,01 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 100 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 100 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **9.559.798.814,00** | **13.826.873.754,00** | **19.692.839.420,00** | **142,42** |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 4.704.320.000,00 | 6.104.320.000,00 | 9.216.531.880,00 | 150,98 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 4.704.320.000,00 | 6.104.320.000,00 | 9.216.531.880,00 | 150,98 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 843.394.814,00 | 936.135.194,00 | 1.379.932.893,00 | 147,41 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 843.394.814,00 | 936.135.194,00 | 1.379.932.893,00 | 147,41 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 1.219.380.000,00 | 1.235.183.760,00 | 1.230.889.120,00 | 99,65 |
| Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1.219.380.000,00 | 1.235.183.760,00 | 1.230.889.120,00 | 99,65 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 268.064.000,00 | 3.425.664.000,00 | 4.205.771.316,00 | 122,77 |
| Dinas Perhubungan | 268.064.000,00 | 3.425.664.000,00 | 4.205.771.316,00 | 122,77 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 5.040.000,00 | 5.048.400,00 | 5.056.800,00 | 100,17 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.040.000,00 | 5.048.400,00 | 5.056.800,00 | 100,17 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.519.600.000,00 | 2.120.522.400,00 | 3.654.657.411,00 | 172,35 |
| Dinas Kebudayaan | 2.519.600.000,00 | 2.120.522.400,00 | 3.654.657.411,00 | 172,35 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **330.853.785.200,00** | **503.193.321.600,00** | **371.903.089.794,00** | **73,91** |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5.824.750.000,00 | 3.162.272.000,00 | 2.845.771.794,00 | 89,99 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 5.824.750.000,00 | 3.162.272.000,00 | 2.845.771.794,00 | 89,99 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 325.005.275.200,00 | 500.005.275.200,00 | 369.027.025.200,00 | 73,8 |
| Dinas Pariwisata | 325.005.275.200,00 | 500.005.275.200,00 | 369.027.025.200,00 | 73,8 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 23.760.000,00 | 25.774.400,00 | 30.292.800,00 | 117,53 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 23.760.000,00 | 25.774.400,00 | 30.292.800,00 | 117,53 |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **194.046.695.885,00** | **253.753.839.112,00** | **253.753.839.116,43** | **100** |
| SEKRETARIAT DAERAH | 194.046.695.885,00 | 253.753.839.112,00 | 253.753.839.116,43 | 100 |
| Sekretariat Daerah | 194.046.695.885,00 | 253.753.839.112,00 | 253.753.839.116,43 | 100 |

| Urusan/Dinas Pelaksana | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **5.136.524.202.941,00** | **5.472.977.953.220,00** | **6.022.397.191.336,03** | **110,04** |
| KEUANGAN | 5.126.774.182.941,00 | 5.450.595.698.220,00 | 5.999.049.184.828,15 | 110,06 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 2.464.954.781.000,00 | 2.631.978.390.704,00 | 3.114.961.811.957,15 | 118,35 |
| Badan Pendapatan Daerah | 2.661.819.401.941,00 | 2.818.617.307.516,00 | 2.884.087.372.871,00 | 102,32 |
| KEPEGAWAIAN | 9.690.020.000,00 | 22.322.255.000,00 | 23.285.006.507,88 | 104,31 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9.690.020.000,00 | 22.322.255.000,00 | 23.285.006.507,88 | 104,31 |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.000.000,00 | 105 |
| Badan Penghubung | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.000.000,00 | 105 |
| **Jumlah** | **6.027.724.313.823,00** | **6.660.624.025.310,00** | **7.048.315.869.271,64** | **105,82** |

Secara garis besar realisasi pendapatan daerah TA 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp7.048.315.869.271,64 atau 105,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.660.624.025.310,00. Pelampauan target pendapatan secara signifikan terdapat pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan nilai pelampauan sebesar Rp548.801.907.691,15. Penjelasan atas pelampauan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, satuan kerja pengampunya adalah Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), berikut penjelasannya:
   kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap selama TA 2025.
   a. Alokasi anggaran pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp2.818.617.307.516,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp2.884.087.372.871,00 atau 102,32%. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena terdapat
      1) Adanya pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan sanksi PKB, yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan dan mendorong percepatan pembayaran pajak, termasuk dari wajib pajak yang sebelumnya menunda kewajibannya. Selain itu, perbaikan tata kelola dan standar pelayanan turut mempermudah proses administrasi, khususnya pada layanan BBNKB.
      2) Teradapat faktor sektoral seperti dinamika konsumsi BBM yang berdampak pada PBBKB serta skema bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak, khususnya Pajak Air Permukaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penerapan Pajak Alat Berat sebagai jenis pajak baru yang didukung upaya pemungutan melalui pendataan dan sosialisasi secara langsung, turut memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan.
   b. Alokasi anggaran pendapatan pada BPKAD adalah sebesar Rp2.631.978.390.704,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.115.310.233.040,15 atau 118,36%. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena pada UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Provinsi Bali, terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp572.522.807.759,34 yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melalui mekanisme sewa kantin, sewa rumah dinas, kerja sama pemanfaatan, serta sewa tanah. Adapun peningkatan penerimaan yang signifikan pada TA 2025 terutama dipengaruhi oleh transaksi:
      1) Pemerintah Provinsi Bali menjalin kerja sama pemanfaatan sebagian lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 di Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, seluas 93.900 m² dengan PT Bali Budaya Semesta (PT BBS). Kerja sama ini dituangkan dalam perjanjian tanggal 25 November 2025 dan merupakan tindak lanjut penyelesaian kewajiban sebelumnya. Seluruh tunggakan sebesar Rp1.478.423.445,00 telah dibayarkan dan diterima pada Tahun Anggaran 2025, serta PT BBS juga membayar Kontribusi Tetap sebesar Rp58.380.000.000,00, sehingga total penerimaan yang dicatat pada Tahun Anggaran 2025 adalah Rp59.858.423.445,00. Perjanjian berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, dengan kewajiban tambahan berupa bagi hasil pendapatan;

sebagian lahan juga ditetapkan sebagai area konservasi untuk kegiatan adat dan keagamaan.

2) Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan kerja sama pemanfaatan lahan HPL seluas kurang lebih 398.990 m² di Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung dengan PT Bali Destinasi Lestari (PT BDL). Kerja sama ini merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya, disertai penyelesaian seluruh tunggakan sebesar Rp59.884.028.378,98 yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, PT BDL telah membayar Kontribusi Tetap Tahap I sebesar Rp425.137.500.000,00, sehingga total penerimaan yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp485.021.528.378,98. Perjanjian berlaku selama 50 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, dengan pembayaran kontribusi tetap secara bertahap serta kewajiban bagi hasil sesuai ketentuan perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut terkait tinggi dan rendahnya capaian realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.1

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja TA 2025 Sesuai Bidang dan Fungsi**

| Urusan/Dinas Pelaksana | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **3.337.624.744.113,20** | **3.520.856.142.702,00** | **3.201.713.301.583,32** | **90,94** |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.967.787.362.425,00 | 1.933.617.545.947,00 | 1.777.415.518.705,08 | 91,92 |
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 1.967.787.362.425,00 | 1.933.617.545.947,00 | 1.777.415.518.705,08 | 91,92 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 781.519.501.055,00 | 824.305.230.667,00 | 738.426.340.010,96 | 89,58 |
| Dinas Kesehatan | 781.519.501.055,00 | 824.305.230.667,00 | 738.426.340.010,96 | 89,58 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 448.787.822.747,20 | 628.054.997.990,00 | 560.089.093.023,00 | 89,18 |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 448.787.822.747,20 | 628.054.997.990,00 | 560.089.093.023,00 | 89,18 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5.834.476.430,00 | 9.413.522.655,00 | 9.082.513.069,00 | 96,48 |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 5.834.476.430,00 | 9.413.522.655,00 | 9.082.513.069,00 | 96,48 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 95.440.747.191,00 | 88.013.652.729,00 | 81.788.222.089,28 | 92,93 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 58.799.817.568,00 | 54.221.190.392,00 | 51.274.052.587,00 | 94,56 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 36.640.929.623,00 | 33.792.462.337,00 | 30.514.169.502,28 | 90,3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 38.254.834.265,00 | 37.451.192.714,00 | 34.911.614.686,00 | 93,22 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 38.254.834.265,00 | 37.451.192.714,00 | 34.911.614.686,00 | 93,22 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.365.918.287.388,00** | **1.223.925.556.519,40** | **1.056.667.378.480,82** | **86,33** |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 43.287.730.758,00 | 38.653.418.294,00 | 35.389.729.546,00 | 91,56 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 43.287.730.758,00 | 38.653.418.294,00 | 35.389.729.546,00 | 91,56 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6.337.626.086,00 | 6.164.276.173,00 | 5.819.472.354,00 | 94,41 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 6.337.626.086,00 | 6.164.276.173,00 | 5.819.472.354,00 | 94,41 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.201.538.334,00 | 3.826.074.609,00 | 3.575.843.109,00 | 93,46 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.201.538.334,00 | 3.826.074.609,00 | 3.575.843.109,00 | 93,46 |

| Urusan/Dinas Pelaksana | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 382.727.700,00 | 6.113.479.700,00 | 5.401.666.900,00 | 88,36 |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 382.727.700,00 | 6.113.479.700,00 | 5.401.666.900,00 | 88,36 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 13.802.616.799,00 | 26.170.073.897,00 | 18.036.515.634,00 | 68,92 |
| Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 13.802.616.799,00 | 26.170.073.897,00 | 18.036.515.634,00 | 68,92 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 589.682.750,00 | 326.704.025,00 | 251.916.305,00 | 77,11 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 589.682.750,00 | 326.704.025,00 | 251.916.305,00 | 77,11 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 21.716.072.927,00 | 25.462.526.208,00 | 23.571.748.392,00 | 92,57 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 21.716.072.927,00 | 25.462.526.208,00 | 23.571.748.392,00 | 92,57 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 678.793.860,00 | 474.711.630,00 | 449.103.561,00 | 94,61 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 678.793.860,00 | 474.711.630,00 | 449.103.561,00 | 94,61 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 49.702.791.659,00 | 105.533.390.688,40 | 87.159.981.563,00 | 82,59 |
| Dinas Perhubungan | 49.702.791.659,00 | 105.533.390.688,40 | 87.159.981.563,00 | 82,59 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 390.721.502.885,00 | 246.563.487.674,00 | 147.170.475.702,93 | 59,69 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 390.721.502.885,00 | 246.563.487.674,00 | 147.170.475.702,93 | 59,69 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 24.807.715.448,00 | 23.029.940.683,00 | 21.169.609.316,61 | 91,92 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 24.807.715.448,00 | 23.029.940.683,00 | 21.169.609.316,61 | 91,92 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 20.171.142.940,00 | 17.908.672.989,00 | 15.603.611.923,00 | 87,13 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20.171.142.940,00 | 17.908.672.989,00 | 15.603.611.923,00 | 87,13 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 87.877.531.032,00 | 95.056.488.300,00 | 86.090.475.071,97 | 90,57 |
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 87.877.531.032,00 | 95.056.488.300,00 | 86.090.475.071,97 | 90,57 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 431.471.640,00 | 281.847.820,00 | 258.982.763,00 | 91,89 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 431.471.640,00 | 281.847.820,00 | 258.982.763,00 | 91,89 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 410.712.320,00 | 324.157.405,00 | 292.239.835,00 | 90,15 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 410.712.320,00 | 324.157.405,00 | 292.239.835,00 | 90,15 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 701.436.428.796,00 | 627.091.215.311,00 | 605.571.938.378,31 | 96,57 |
| Dinas Kebudayaan | 218.972.308.088,00 | 139.904.538.062,00 | 121.965.580.613,31 | 87,18 |
| Dinas Pemajuan Masyarakat Adat | 482.464.120.708,00 | 488.131.768.362,00 | 484.460.425.891,00 | 99,25 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 610.598.328,00 | 368.970.632,00 | 335.937.754,00 | 91,05 |
| Sekretariat Daerah | 610.598.328,00 | 368.970.632,00 | 335.937.754,00 | 91,05 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 751.603.126,00 | 576.120.481,00 | 518.130.372,00 | 89,93 |

| Urusan/Dinas Pelaksana | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 |
| Sekretariat Daerah | 751.603.126,00 | 576.120.481,00 | 518.130.372,00 | 89,93 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **226.986.014.137,00** | **244.456.310.296,20** | **216.351.605.081,00** | **88,5** |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 36.174.908.553,00 | 36.095.008.934,20 | 31.271.062.999,00 | 86,64 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 36.174.908.553,00 | 36.095.008.934,20 | 31.271.062.999,00 | 86,64 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 24.438.350.368,00 | 31.605.924.583,00 | 20.370.258.023,00 | 64,45 |
| Dinas Pariwisata | 24.438.350.368,00 | 31.605.924.583,00 | 20.370.258.023,00 | 64,45 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 95.045.589.675,00 | 106.576.529.099,00 | 99.721.755.396,00 | 93,57 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 95.045.589.675,00 | 106.576.529.099,00 | 99.721.755.396,00 | 93,57 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 47.181.527.728,00 | 44.619.832.805,00 | 41.301.879.031,00 | 92,56 |
| Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 47.181.527.728,00 | 44.619.832.805,00 | 41.301.879.031,00 | 92,56 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 115.499.500,00 | 76.085.500,00 | 51.779.671,00 | 68,05 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 115.499.500,00 | 76.085.500,00 | 51.779.671,00 | 68,05 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 21.094.346.865,00 | 19.376.085.557,00 | 17.794.358.745,00 | 91,84 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 21.094.346.865,00 | 19.376.085.557,00 | 17.794.358.745,00 | 91,84 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 2.910.906.648,00 | 6.081.959.018,00 | 5.817.007.349,00 | 95,64 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2.910.906.648,00 | 6.081.959.018,00 | 5.817.007.349,00 | 95,64 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 24.884.800,00 | 24.884.800,00 | 23.503.867,00 | 94,45 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 24.884.800,00 | 24.884.800,00 | 23.503.867,00 | 94,45 |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **527.944.226.153,00** | **609.900.735.686,00** | **443.288.401.324,00** | **72,68** |
| SEKRETARIAT DAERAH | 249.802.493.765,00 | 317.370.561.909,00 | 257.841.020.279,00 | 81,24 |
| Sekretariat Daerah | 249.802.493.765,00 | 317.370.561.909,00 | 257.841.020.279,00 | 81,24 |
| SEKRETARIAT DPRD | 278.141.732.388,00 | 292.530.173.777,00 | 185.447.381.045,00 | 63,39 |
| Sekretariat DPRD | 278.141.732.388,00 | 292.530.173.777,00 | 185.447.381.045,00 | 63,39 |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **1.284.139.017.906,00** | **1.730.639.132.703,00** | **1.557.639.746.449,10** | **90** |
| PERENCANAAN | 29.056.451.327,00 | 25.908.334.842,00 | 21.337.890.034,52 | 82,36 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 29.056.451.327,00 | 25.908.334.842,00 | 21.337.890.034,52 | 82,36 |
| KEUANGAN | 1.170.373.606.034,00 | 1.605.271.382.984,00 | 1.448.431.278.460,36 | 90,23 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 983.522.472.624,00 | 1.437.785.645.405,00 | 1.292.171.362.033,45 | 89,87 |
| Badan Pendapatan Daerah | 186.851.133.410,00 | 167.485.737.579,00 | 156.259.916.426,91 | 93,3 |
| KEPEGAWAIAN | 50.015.636.589,00 | 60.321.528.772,00 | 53.881.894.165,22 | 89,32 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 50.015.636.589,00 | 60.321.528.772,00 | 53.881.894.165,22 | 89,32 |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1.518.830.394,00 | 1.232.466.689,00 | 988.115.399,00 | 80,17 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.518.830.394,00 | 1.232.466.689,00 | 988.115.399,00 | 80,17 |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 23.285.290.479,00 | 26.887.596.102,00 | 23.375.100.232,00 | 86,94 |
| Badan Riset dan Inovasi Daerah | 23.285.290.479,00 | 26.887.596.102,00 | 23.375.100.232,00 | 86,94 |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG | 9.889.203.083,00 | 11.017.823.314,00 | 9.625.468.158,00 | 87,36 |
| Badan Penghubung | 9.889.203.083,00 | 11.017.823.314,00 | 9.625.468.158,00 | 87,36 |

| Urusan/Dinas Pelaksana | Anggaran Induk | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **38.664.248.243,00** | **35.944.174.832,00** | **34.015.253.758,00** | **94,63** |
| INSPEKTORAT DAERAH | 38.664.248.243,00 | 35.944.174.832,00 | 34.015.253.758,00 | 94,63 |
| Inspektorat | 38.664.248.243,00 | 35.944.174.832,00 | 34.015.253.758,00 | 94,63 |
| **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **46.108.467.373,00** | **47.248.225.245,00** | **44.977.304.875,38** | **95,19** |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 46.108.467.373,00 | 47.248.225.245,00 | 44.977.304.875,38 | 95,19 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 46.108.467.373,00 | 47.248.225.245,00 | 44.977.304.875,38 | 95,19 |
| **Jumlah** | **6.827.385.005.313,20** | **7.412.970.277.983,60** | **6.554.652.991.551,62** | **88,42** |

Realisasi belanja daerah TA 2025 mencapai Rp6.554.652.991.551,62 atau sebesar 88,42% dari target Rp7.412.970.277.983,60, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan cukup efektif meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Kondisi tersebut antara lain terjadi pada urusan komunikasi dan informatika dengan realisasi sebesar 59,69% serta sisa anggaran Rp99.393.011.971,07, yang dipengaruhi oleh belum terealisasinya pengadaan tanah karena kompleksitas tahapan, belum tercapainya kesepakatan dengan pemilik, serta pelaksanaan yang dilakukan secara selektif dan berhati-hati; terhadap sisa anggaran dimaksud akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan pelaksanaan.

Selain itu, pada urusan Sekretariat DPRD realisasi mencapai 63,39% dengan sisa anggaran Rp107.082.792.732,00, belum optimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga frekuensi dan volume kegiatan menurun, perbedaan harga aktual dibandingkan asumsi dalam perencanaan anggaran, serta sebagian kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme alternatif atau dijadwalkan kembali, sehingga realisasi perjalanan dinas tercatat sebesar 25,03% dari pagu. Adapun perjalanan dinas luar negeri pada TA 2025 tidak direalisasikan karena usulan tidak memperoleh persetujuan sehubungan dengan kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui alternatif yang tidak memerlukan perjalanan luar negeri.

Penjelasan lebih lanjut terkait tinggi dan rendahnya capaian realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.2

### 3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan Perangkat Daerah dengan PPKD setiap bulannya dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

### 3.4 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

Dalam pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025, terdapat 2 (dua) kali perubahan dan penyesuaian belanja karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti diterbitkannya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, menindaklanjuti Surat Sekjen Kemendagri Nomor: 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 Hal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK T.A. 2024 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta adanya

kebutuhan anggaran belanja yang bersifat mendesak maka secara garis besarnya Pergeseran dan Perubahan Anggaran terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025.
   Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :
   a. Pergeseran antar objek belanja dalam satu jenis belanja pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja prioritas dan mendesak yaitu pergeseran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan
   b. Penyesuaian terhadap belanja yang didanai dari DAK Non Fisik Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025.
   Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu:
   a. Pergeseran anggaran belanja yang didanani dari DAK Fisik Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
   b. Pergeseran anggaran yang didanai dari Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali; dan
   c. Pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas pada beberapa perangkat daerah.
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 yang dilakukan dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu entitas pelaporan melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

## 3.5 Analisis Solvabilitas Keuangan Daerah

Analisis solvabilitas keuangan daerah merupakan bagian dari informasi keuangan daerah yang digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Analisis solvabilitas keuangan daerah meliputi:

1. Solvabilitas operasional,
2. Solvabilitas jangka pendek, dan
3. Solvabilitas jangka panjang.

### 3.5.1 Solvabilitas operasional

Solvabilitas operasional digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai belanja operasional yang bersumber dari pendapatan operasional. Rasio solvabilitas operasional dihitung dengan membandingkan pendapatan operasional setelah dikurangi pendapatan DAK operasional dengan beban operasional, sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

Berikut disajikan analisis solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.5.1 Hasil Analisis Solvabilitas operasional TA 2025 dan TA 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Total pendapatan LO | 10.085.025.980.851,22 | 9.377.513.158.571,52 |
| DAK LO | 711.768.494.204,00 | 702.037.944.052,00 |
| total beban LO | 6.059.034.551.978,29 | 7.400.208.014.848,32 |
| **Hasil Analisis** | **1,55** | **1,17** |
| **Batas Hasil** | **1,2** | **1,2** |

Berdasarkan hasil perhitungan, solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 1,55, meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapatan operasional (setelah dikurangi DAK operasional) pada

Tahun 2025 mampu membiayai beban operasional sebesar 155%, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 117%.

Dibandingkan dengan batas hasil (*benchmark*) solvabilitas sebesar 1,2, kinerja solvabilitas operasional pada Tahun 2025 berada di atas standar minimum, yang mengindikasikan kondisi keuangan operasional yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai beban operasionalnya tanpa ketergantungan berlebih pada sumber pendanaan bersifat earmarked (terikat) seperti DAK operasional.

Peningkatan rasio solvabilitas operasional tersebut dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan pendapatan operasional Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, dan
2. Penurunan total beban operasional pada Tahun 2025, yang mencerminkan pengendalian belanja operasional yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kinerja solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 berada dalam kondisi sangat baik, mencerminkan struktur keuangan daerah yang semakin kuat, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

### 3.5.2 Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas jangka pendek dihitung dengan membandingkan aset lancar berupa Kas dan Setara Kas serta Investasi Jangka Pendek dengan Kewajiban Jangka Pendek, sebagaimana disajikan dalam Neraca.

Berikut disajikan analisis solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.5.2 Hasil Analisis Solvabilitas Jangka Pendek TA 2025 dan TA 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Kas dan setara kas | 712.874.066.422,64 | 623.732.459.203,32 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Kewajiban Lancar (Jangka Pendek) | 924.101.597.721,97 | 707.808.146.491,09 |
| **Hasil Analisis** | **0,77** | **0,88** |
| **Batas Hasil** | **1,5** | **1,5** |

Berdasarkan hasil perhitungan, solvabilitas jangka pendek Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 0,77, mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 0,88. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aset lancar berupa kas dan setara kas yang tersedia pada Tahun 2025 hanya mampu menutup sekitar 77% dari kewajiban jangka pendek, sedangkan pada Tahun 2024 mampu menutup sekitar 88%.

Apabila dibandingkan dengan batas hasil (*benchmark*) sebesar 1,5, rasio solvabilitas jangka pendek pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024 berada di bawah standar, yang mengindikasikan bahwa secara struktur neraca, likuiditas jangka pendek Pemerintah Provinsi Bali masih berada dalam kategori perlu penguatan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan signifikan kewajiban jangka pendek pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, dan
2. Kenaikan kas dan setara kas yang relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kewajiban lancar, serta tidak adanya investasi jangka pendek sebagai penyangga likuiditas tambahan.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Bali memiliki posisi kas yang cukup besar secara nominal, namun secara rasio likuiditas jangka pendek masih diperlukan penguatan manajemen kas dan pengendalian kewajiban lancar, agar kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

### 3.5.3 Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui dukungan aset tetap yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membandingkan kewajiban jangka panjang terhadap total aset tetap sebagaimana disajikan dalam Neraca.

Berikut disajikan analisis solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.5.3 Hasil Analisis Solvabilitas Jangka Panjang TA 2025 dan TA 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Total aset tetap | 14.009.192.786.281,11 | 10.422.663.292.333,20 |
| kewajiban jangka panjang | 612.828.715.702,65 | 855.640.130.142,49 |
| **Hasil Analisis** | **22,86** | **12,18** |
| **Batas Hasil** | **2,0** | **2,0** |

Berdasarkan hasil perhitungan, solvabilitas jangka panjang Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 22,86, meningkat secara signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 12,18. Nilai tersebut menunjukkan bahwa total aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2025 mencapai sekitar 22,86 kali kewajiban jangka panjang, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 12,18 kali.

Apabila dibandingkan dengan batas hasil (*benchmark*) sebesar 2,0, rasio solvabilitas jangka panjang pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024 berada jauh di atas standar, yang mengindikasikan kondisi struktur keuangan jangka panjang yang sangat kuat dan sehat. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas aset tetap daerah sangat memadai dalam menjamin pemenuhan kewajiban jangka panjang serta menjaga stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan rasio solvabilitas jangka panjang tersebut dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan nilai total aset tetap pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, dan
2. Penurunan kewajiban jangka panjang, yang menunjukkan perbaikan struktur pembiayaan jangka panjang daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki daya dukung aset yang sangat kuat terhadap kewajiban jangka panjang, sehingga kesinambungan fiskal daerah berada dalam kondisi yang stabil dan berkelanjutan, serta risiko fiskal jangka panjang berada pada tingkat yang rendah.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki fundamental fiskal yang kuat dan berkelanjutan, dengan kapasitas operasional dan jangka panjang yang sangat baik. Tantangan utama berada pada aspek likuiditas jangka pendek, yang dapat diperbaiki melalui penguatan manajemen kas, pengendalian kewajiban lancar, serta optimalisasi struktur pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

## 4.1 Entitas Pelaporan, Entitas Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 entitas akuntansi yang meliputi 29 Perangkat Daerah dan 1 Perangkat Daerah yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

### 4.1.1 Entitas Pelaporan

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan perangkat daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

### 4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
   a. Tenaga Kerja
   b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   c. Perhubungan
   d. Komunikasi dan Informatika
   e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   f. Penanaman Modal
   g. Kebudayaan
   h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
   a. Kelautan dan Perikanan
   b. Pariwisata
   c. Pertanian
   d. Kehutanan
   e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
   a. Sekretariat Daerah
   b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
   a. Perencanaan
   b. Keuangan
   c. Kepegawaian
   d. Pendidikan dan Pelatihan
   e. Penelitian dan Pengembangan
   f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
   a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
   a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

### 4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

#### 4.1.3.1 UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang didistribusikan kepada para *off taker* (Perumdam Kabupaten/Kota) tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 5 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

a. SPAM Telagawaja dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.

b. SPAM Guyangan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.

c. SPAM Burana dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Adapun unit SPAM yang sudah dihibahkan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali:

a. SPAM Petanu dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 10 September 2019, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

b. SPAM Penet dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Juli 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja PD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum

"Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional."

b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;

2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;

3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;

4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;

5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;

7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;

8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:

a. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Regional di Wilayah Provinsi Bali;
b. Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
c. Percepatan cakupan pelayanan air minum;
d. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau *off taker* (PDAM Kab/Kota) maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

a. SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
b. SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
c. SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya, Iseh dan Bangol yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.
d. SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
e. SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola dua IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

#### 4.1.3.2 UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan

Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa *booster* baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 – 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

   a. Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah

      "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945".

   b. Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

      Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok: UPTD Pengelolaan Air Limbah memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pengelolaan air limbah untuk Domestik terwujudnya Bali sebagai daerah pariwisata budaya yang bersih, sehat, nyaman, dan lestari.

   b. Fungsi:

      1) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah domestik;

      2) menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan Sistem Pengolahan Air Limbah domestik;

      3) mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu;

      4) melayani permohonan sambungan pipa air limbah domestik dan wilayah pelayanannya;

      5) mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah domestik pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan;

      6) memberikan sosialisasi rencana-rencana Pemerintah kepada Daerah masyarakat di Bidang Pembangunan Sistem Jaringan Air Limbah domestik dan pengolahannya;

      7) menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah domestik dan pendapatan lain yang sah sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang undangan; dan

      8) menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

#### 4.1.3.3 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas-tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas meningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali

Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (Bapelkesmas) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD Bapelkesmas mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD Bapelkesmas beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

   a. Visi UPTD Bapelkesmas

      "UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

   b. Misi UPTD Bapelkesmas

      1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
      2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
      3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
      4) Mengambangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   Tugas pokok UPTD Bapelkesmas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

   a. Kepala UPTD Bapelkesmas mempunyai tugas :

      1) Menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;
      2) Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
      3) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
      4) Merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
      5) Merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
      6) Menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;
      7) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
      8) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
      9) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
      10) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
      11) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
      12) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan;
      13) Mengoreksi pengendalian mutu pelatihan;

14) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
15) Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
16) Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
17) Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
18) Memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
19) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

b. Kepala Subbagian tata Usaha mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
4) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
7) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
8) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
9) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
10) Melaksanakan pengawasan keuangan;
11) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
12) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
13) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
14) Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
15) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
16) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
17) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
18) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
19) Memberikan masukan penilaian kinerja;
20) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
21) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
22) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

c. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
7) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
8) Memberikan masukan penilaian kinerja;
9) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

d. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
7) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
8) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
9) Memberikan masukan penilaian kinerja;
10) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### 4.1.3.4 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

   a. Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

      “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

      “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”.

   b. Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

      Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM.

   b. Fungsi :

      1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;

      2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan

      3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

#### 4.1.3.5 UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya “Verpleeghuis voor krankzinnigen op Bangli” dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1

Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Moto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

"Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih".

b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:

1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;

2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;

3) Memanfaatkan validitas dan *update* informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;

4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan

2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

b. Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;

2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;

3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;

4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;

5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;

9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;

10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan

11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

#### 4.1.3.6 UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI), berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan *General Agreement of Development Cooperation* (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut *Australia Bali Memorial Eye Centre* (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BPRSI resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

   a. Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

      Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Bali Mandara Nomor B.39.700/01/DEWAS/RSM.BM tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah "Menjadi Rumah Sakit yang Unggul dan Berkelas Dunia Dalam Pelayanan Kesehatan Mata Tahun 2026".

   b. Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

      1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat;

      2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata dan penelitian dibidang kesehatan mata; dan

      3) Menyediakan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif didukung oleh sarana dengan teknologi mutakhir.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok

      1) Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan

      2) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

   b. Fungsi

      1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;

      2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;

      3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;

      4) Penyelenggaraan pelayanan medik;

      5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

      6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

      7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

      8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;

      9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan

      10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

#### 4.1.3.7 UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan empat pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

   Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksana Teknis RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 November 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

   Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

   a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

      "Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

   b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

      1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
      2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
      3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
      4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan
      5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok

      1) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;

4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;

5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;

9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan

10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

#### 4.1.3.8 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

4. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas- tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang laboratorium kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi:

1) Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan teknis laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

2) Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan laboratorium serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan

3) Sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan. Visi dan Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

5. Visi dan Misi dan Motto UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

a. Visi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa “Menjadi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan professional, memberikan pelayanan prima melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam rangka mewujudkan Bali Era Baru”.

b. Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

1) Menerapkan sistem manajemen mutu secara professional

2) Memberikan pelayanan prima yang professional kepada masyarakat bidang laboratorium kesehatan

3) Memberikan pelayanan informasi kualitas kesehatan masyarakat

4) Meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan

5) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan secara berkelanjutan

6) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

c. Motto UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa "Pelayanan Tepat dan Akurat"

Visi, Misi dan Motto tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa.

6. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

Tugas pokok UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa. sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;

2) Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja

3) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran / pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

b. Merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja

1) Menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;

2) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;

3) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4) Menyelenggarakan pelayanan laboratorium yang berkualitas;

5) Menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan

6) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

7) Menyelenggarakan sistem informasi laboratorium kesehatan dan alat kesehatan;

8) Menyelenggarakan rujukan pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan jika diperlukan;

9) Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;

10) Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

11) Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;

12) Memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

13) Melaksanakan sistem pengendalian intern;

14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

c. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;

2) Menyusun perjanjian kinerja;

3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
4) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masingmasing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6) Mengelola urusan keuangan UPTD;
7) Mengelola urusan logistik UPTD;
8) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; • Mengelola dokumen UPTD;
9) Mengelola urusan kepegawaian UPTD;
10) Mengelola informasi, produk hukum, kehumasan dan keprotokolan UPTD;
11) Melakukan koordinasi dengan Seksi, Unit fungsional dan pejabat fungsional terkait;
12) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
13) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
14) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
15) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelolan permasalahan dan inovasi-inovasi;
16) Memberikan masukan penilaian kinerja;
17) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
20) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
21) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
22) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelolan permasalahan dan inovasi-inovasi;
23) Memberikan masukan penilaian kinerja;
24) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
25) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD

d. Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian tata Usaha;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan membagi peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana
6) Menyelenggarakan pelayanan Laboratorium Kesehatan dalam Gedung UPTD maupun luar Gedung UPTD;
7) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis laboratorium
8) Menyelenggarakan kegiatan pemantapan mutu internal/ekternal;
9) Memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penelitian laboratorium kesehatan;
10) Mengelola survei kepuasan masyarakat dan keluhan pelanggan
11) Mengelola kegiatan akreditasi laboratorium;
12) Memfasilitasi penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium
13) Melakukan advokasi dalam menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium
14) Memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Seksi
15) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
16) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelola resiko, permasalahan dan inovasi-inovasi;
17) Memberikan masukan penilaian kinerja;
18) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

e. Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5) Menyiapkan penyusunan rencana pelayanan serta pengembangan dan mutu pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan
6) Berkoordinasi dengan petugas teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pelayanan pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
7) Melakukan advokasi dalam menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
8) Menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan dalam Gedung UPTD dan atau luar gedung UPTD;
9) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
10) Memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penelitian pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
11) Mengelola survei kepuasan masyarakat dan keluhan pelanggan dalam pelayanan pemeliharaan, pengujian dankalibrasi alat Kesehatan;
12) Memfasilitasi penanganan peralatan dan bahan penunjang pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

13) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

14) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelolan permasalahan dan inovasi-inovasi;

15) Memberikan masukan penilaian kinerja;

16) Melaksanakan sistem pengendalian intern;

17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### 4.1.3.9 Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

1. Gambaran Umum

Pendirian RSU Dharma Yadnya pada tahun 1986 digagas oleh mantan Gubernur Bali Prof. Dr. IB Mantra (Alm). Beliau bercita-cita agar masyarakat Bali memiliki rumah sakit besar yang pengelolaannya berbasis keagamaan yaitu Agama Hindu sebagaimana mayoritas agama penduduk Bali. Berdirinya rumah sakit ini diawali dengan status sebagai klinik yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai poliklinik Gawat Darurat. Klinik Dharma Yadnya sejak didirikan menjadi tujuan pertama dari pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Denpasar Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum mendapat penanganan tingkat lanjutan di rumah sakit rujukan. Klinik Dharma Yadnya berlokasi di jalan utama yang menghubungkan Denpasar dengan Gianyar dan sangat dekat dengan jalan baypass I.B Mantra, yang menghubungkan kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Karangasem, yang merupakan akses mudah menuju ke RSU Dharma Yadnya. Melihat kemudahan akses tersebut, RSU Dharma Yadnya sangat memungkinkan menjadi unggulan layanan Traumatologi di wilayah timur Bali. Pelayanan Haemodialisa RSU Dharma Yadnya setiap harinya selalu ramai dengan pasien-pasien untuk melakukan cuci darah, kondisi ini menjadi dasar pemikiran manajemen untuk memilih pelayanan Haemodialis sebagai unggulan dalam pelayanannya. Lebih lanjut dari unggulan tersebut, dengan meningkatnya kasus penyakit ginjal merupakan peluang untuk membuat layanan unggulan Ginjal dimana kasus penyakit besar yang mendasarinya juga adalah Hipertensi dan DM. RSU Dharma Yadnya merupakan rumah sakit umum kelas C yang beroperasi dengan kapasitas 100 tempat tidur dan satu-satunya rumah sakit yang bernaung di bawah Yayasan Hindu di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

Pada akhir tahun 2023 RSU Dharma Yadnya menghibahkan asetnya ke Pemerintah Provinsi Bali. Seluruh pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam Perubahan Kesatu Naskah Hibah RSU Dharma Yadnya Nomor B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025 tentang Hibah Aset dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Milik Yayasan Dharma Usada Rsi Markandeya tertanggal 10 Juni 2025. Per 1 Juli 2025 RSU Dharma Yadnya secara resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di bawah Pemerintah Provinsi Bali sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 518/04-E/HK/2025. Dalam operasionalnya RSU Dharma Yadnya sangat berkomitmen untuk dapat berperan dalam era baru Bali maju dengan mengedepankan unggulan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan berstandar internasional dapat terwujud sebagaimana visi dan misinya.

2. Visi dan Misi dan Motto

Visi Rumah Sakit yaitu Menjadi Pusat Pelayanan Unggulan dengan Mengedepankan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Berstandar Internasional di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, Rumah Sakit memiliki misi, yakni:

a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
b. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja;
c. Menyelenggarakan penelitian dibidang Kesehatan dalam Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
d. Menyelenggarakan pengabdian Masyarakat dibidang Kesehatan untuk mewujudkan Krama Bali Sehat niskala dan sakala berlandaskan DHARMA.

Moto Rumah Sakit yaitu "Melayani berlandaskan DHARMA" yang memiliki makna dan arti, sebagai berikut:

D : disiplin, adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri serta menunaikan kewajiban dengan teratur dan patuh terhadap aturan, norma, atau tata tertib;

H : humanis, adalah sebuah pemikiran dan perbuatan yang mengedepankan nilai dan martabat manusia;

A : aman, memberikan rasa aman terhadap pasien, keluarga, petugas kesehatan dan lingkungan

R : responsif, adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan sesuai terhadap kebutuhan pasien, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya;

M : mandiri, adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengambil keputuan, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri; dan

A : akuntabel, merupakan pertanggungjawaban secara terukur dalam pelaksanaan tugas-tugas baik secara terukur baik secara kuantitas serta kualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok RSU Dharma Yadnya :

a. RSDY mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

b. RSDY sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Fungsi RSU Dharma Yadnya
RSU Dharma Yadnya mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;

d. penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;

e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

h. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas, dan pemasaran;

i. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan akuntansi; dan

j. penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

### 4.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

#### 4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Saguna berada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha di tempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat , kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

1. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
2. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
3. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
4. Kegiatan Pengolahan Limbah;
5. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (*Real Estate*); dan
6. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan Keuangan, laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan Keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

1. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
2. Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

**4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta Nomor 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Kemudian status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali) (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan Nomor 6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, SH., Notaris di Denpasar, mengubah anggaran das2ar perseroan menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

1. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
2. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
4. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
5. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

**4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT Jamkrida Bali)**

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Penjaminan yang Sehat, Kompetitif, Terpercaya dan Berkembang dalam Penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Menuju Terciptanya Struktur Perekonomian Daerah Bali yang Seimbang dan Mantap”. Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

1. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (*share holders*); dan
3. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (*Stakeholder*).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum *bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

**4.1.4.4 PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)**

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pusat Kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District*/ CBD); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; *Meeting Incentive Convention and Exhibition* (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (Transit Oriented Development/ TOD); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Dasar Hukum pendirian PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Namun sampai Laporan ini dibuat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) masih dalam tahap pembangunan.

#### 4.1.4.5 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Perusahan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi telah memiliki pedoman melakukan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, *Responsibility, Independence* dan Keadilan.

Perusahan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga menggunakan konsep *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang mengedepankan konsep suatu kegiatan usaha dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu Environmental (Lingkungan) Perumda KBS memanfaatkan kendaraan listrik sebagai alat bantu transportasi, *Social* (sosial) Perumda KBS mengembangkan produk di bidang pariwisata digital dengan filosofi yang diambil dari kearifan budaya dengan cara melakukan edukasi digitalisasi terpadu kepada masyarakat luas dengan menyelenggarakan event workshop, *Governance* (Tata Kelola) salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam penerapan aktivitas perusahan menggunakan Eats dan microsoft untuk mendukung dari adanya ESG. Kerthi Bali Santhi *Employe Activity Tracking System* (KBS EATS) Suatu Aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Perumda KBS untuk mempermudah operasional karyawan dalam melakukan kegiatan kerja yang meliputi absensi online, pengajuan lembur, perhitungan payroll atau penggajian secara otomatis, dan pengawasan kinerja pegawai.

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan-Laporan Operasional (LO) dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### 4.4 Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
    a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
    b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
    c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
    d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
    e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
    f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
    g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
    a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
    b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.

4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
   a. Aset;
   b. Kewajiban;
   c. Ekuitas;
   d. Pendapatan-LRA;
   e. Belanja;
   f. Transfer;
   g. Pembiayaan;
   h. Saldo Anggaran Lebih;
   i. Pendapatan-LO;
   j. Beban; dan
   k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui dengan ketentuan :

1. diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
3. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
4. dalam transaksi *online* atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan Pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus

digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
2. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
    a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
    b. Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan-LO. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
5. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
6. Khusus Pendapatan-LO pada PD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya Pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
7. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
8. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer-LO.

9. Mutasi aset antar PD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi PD penerima.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam LRA menyebutnya dengan belanja, sedangkan LO menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle).*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah atau kas di Bendahara Pengeluaran.

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai Belanja Dibayar Dimuka.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
3. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
4. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
5. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Satdikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
6. Penyaluran Hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

<u>Pengukuran</u>

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap selain tanah, dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme LS dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan UP setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

### 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

1. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya Penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah provinsi.
2. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

1. Beban Transfer
    a. Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
    b. Beban Bantuan Keuangan
        1) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
        2) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
        3) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pendapatan Transfer-LO
    a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
        1) Dana Perimbangan
            a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
            b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
            c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
            d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
        2) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
    b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

        Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
        1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

4. Pendapatan Transfer-LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LRA

2) Dana Intensif Daerah (DID)-LRA

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
3. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah Beban Transfer.
4. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
2. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

### 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh UP yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo Rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara Kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal Neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

### 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan
    a. Piutang Pajak Daerah;
    b. Piutang Retribusi Daerah;
    c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
    d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Perikatan
    a. Pemberian Pinjaman;
    b. Penjualan;
    c. Kemitraan; dan
    d. Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan
    a. Piutang Dana Bagi Hasil;
    b. Piutang Dana Alokasi Umum;
    c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
    d. Piutang Transfer Lainnya;
    e. Piutang Bagi Hasil;
    f. Piutang Transfer Antar Daerah; dan
    g. Piutang Kelebihan Transfer.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

   a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan

   b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

1. Piutang Dana Bagi Hasil

   Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Piutang Dana Alokasi Umum

   Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut peraturan presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus

   Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

4. Piutang Transfer Lainnya

   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan

   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

5. Piutang Bagi Hasil

   Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.

6. Piutang Transfer Antar Daerah

   Transfer Antar Daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut surat keputusan kepala daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

7. Piutang Kelebihan Transfer

   Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

   Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

   a. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi) TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan);

   b. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut; dan

   c. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

<u>Pengukuran</u>

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur Piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas Piutang didasarkan pada kondisi Piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas Piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan Piutang, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas Piutang.

### 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang Pakai Habis

   Digunakan untuk mencatat Aset Lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

2. Barang Tak Habis Pakai

   Digunakan untuk mencatat Barang Tak Habis Pakai dalam bentuk komponen pipa.

3. Barang Bekas Dipakai

   Digunakan untuk mencatat Barang Bekas Dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan Persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam Aset Lain-Lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

1. Metode Perpetual

   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memutakhirkan nilai Persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama PD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di rumah sakit dan bahan material untuk pemeliharaan Aset Tetap di Dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

2. Metode Periodik

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai Persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan PD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

### 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

1. Investasi Jangka Pendek

   Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Investasi Jangka Panjang

   Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

   a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan

b. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
   a. Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
      1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
   a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b. Investasi nonpermanen:
      1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
      3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
   c. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
      1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
         a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
            (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
            (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
            (4) Penerima dana kooperatif.
         b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
            (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
            (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
            (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

2) Dana bergulir dengan *executing agency*:

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau

(4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

3) Dana bergulir dengan *channeling agency*:

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

d. Besaran Penyisihan dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;

2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;

3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau Aset Lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

   Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan

   d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

### 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

   Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

   Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

   Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
5. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
6. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/Aset Lainnya.

1. Komponen Biaya

   a. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

   b. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; dan

   c. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

   Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

   Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

   Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

   Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Kapitalisasi Aset Tetap

   a. Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi;

**Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap**

| No | Uraian | Nilai Kapitalisasi |
|---|---|---|
| 1 | Tanah | |
| 1.1 | Tanah | 1 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | |
| 2.1 | Alat Besar | 100.000.000 |
| 2.2 | Alat Angkutan | 1.000.000 |
| 2.3 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 500.000 |
| 2.4 | Alat Pertanian | 500.000 |
| 2.5 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 500.000 |
| 2.6 | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 500.000 |
| 2.7 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 500.000 |
| 2.8 | Alat Laboratorium | 500.000 |
| 2.9 | Alat Persenjataan | 500.000 |
| 2.10 | Komputer | 500.000 |
| 2.11 | Alat Eksplorasi | 500.000 |
| 2.12 | Alat Pengeboran | 500.000 |
| 2.1 | Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 500.000 |
| 2.2 | Alat Bantu Eksplorasi | 500.000 |
| 2.3 | Alat Keselamatan Kerja | 500.000 |
| 2.4 | Alat Peraga | 500.000 |
| 2.5 | Peralatan Proses/Produksi | 500.000 |
| 2.6 | Rambu - Rambu | 20.000.000 |
| 2.7 | Peralatan Olah Raga | 500.000 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 20.000.000 |
| 3.2 | Monumen | 20.000.000 |
| 3.3 | Bangunan Menara | 20.000.000 |
| 3.4 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 20.000.000 |
| 4 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 1 |
| 4.2 | Bangunan Air | 1 |
| 4.3 | Instalasi | 1 |
| 4.4 | Jaringan | 1 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | |
| 5.1 | Bahan Perpustakaan | 100.000 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 500.000 |
| 5.3 | Hewan | 500.000 |
| 5.4 | Biota Perairan | 0 |
| 5.5 | Tanaman | 500.000 |
| 5.6 | Barang Koleksi Non Budaya | 500.000 |

| No | Uraian | Nilai Kapitalisasi |
|---|---|---|
| 5.7 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 20.000.000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | |
| 6.1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan. | |
| 6.1.1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan | 20.000.000 |
| 6.1.2 | Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1 |

b. Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah peraturan gubernur ini diundangkan, maupun terhadap Aset Tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya; dan

c. Khusus Aset Tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan *output* berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

7. Pengeluaran setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

8. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat Aset Tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat Aset Tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi Aset Tetap, dibagi dengan masa manfaat Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat Aset Tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan

beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.

2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.

3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan Aset Tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

9. Aset Bersejarah

Aset Bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

11. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal Aset Tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

### 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi

kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

### 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Definisi

   a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan.

   b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

   c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

   d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

   e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

      1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

      2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

   a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi Properti Investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi

Properti Investasi.

b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

c. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa Aset Tetap.

d. Berikut adalah contoh Properti Investasi:

   1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

   2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

   3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

   4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan

   5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan Properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

   1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

   2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

   3) Properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

   4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap; dan

7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:

1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan

2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki Properti Investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti Investasi tersebut tidak memenuhi definisi Properti Investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai Properti Investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersial. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai Properti Investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

j. Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti Investasi diklasifikasikan dalam Aset Nonlancar.
2. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

### 4.4.13 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan Dana Cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

1. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4. Sumber Dana Cadangan; dan

5. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Dana Cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan Dana Cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

### 4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan Aset Lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

a. Goodwill

*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Lisensi dan Franchise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

d. Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

e. *Software*

*Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

f. Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

g. Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tak Berwujud yang ada.

4. Aset Lain-Lain

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.

5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

<u>Pengukuran</u>

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   a. Sewa

      Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

   b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

      Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

   c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

      BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

   d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

      BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

   Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

   a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

   b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

      3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

   Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

   a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

   b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.

   c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

   d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

a. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan

b. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

5. Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (*Goodwill*) dan Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

### 4.4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos Kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions)*

   Dalam transaksi tanpa pertukaran, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang Kewajiban Jangka Pendek bersangkutan. Penghapusan Kewajiban Jangka Panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO. Penghapusan Kewajiban Jangka Panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang Kewajiban Jangka Panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila Kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran Kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos Kewajiban.

Pengukuran Kewajiban atau Utang Jangka Pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran Kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

   Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

   Utang Transfer adalah Kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

   Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

   Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau Utang Jangka Panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

### 4.4.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   a. Koreksi kesalahan mendasar dari persen yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
   b. Perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
4. Ekuitas akhir.

<u>Pengakuan</u>

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

1. Surplus-LO pada periode pelaporan;
2. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan Kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
3. Koreksi pengurangan saldo awal Akumulasi Penyisihan Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya; dan
4. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

1. Defisit-LO pada periode pelaporan;
2. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan Kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
3. Koreksi penambahan saldo awal Akumulasi Penyisihan Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya; dan
4. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

### 4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

   Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

   a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

      Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, maupun Beban.

   b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

      Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

2. Kesalahan berulang

   Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

### 4.4.18 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan PD/Unit Kerja PD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

# BAB V

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam 1 (satu) periode pelaporan. Secara lebih rinci, pos-pos dalam LRA Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran (TA) 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

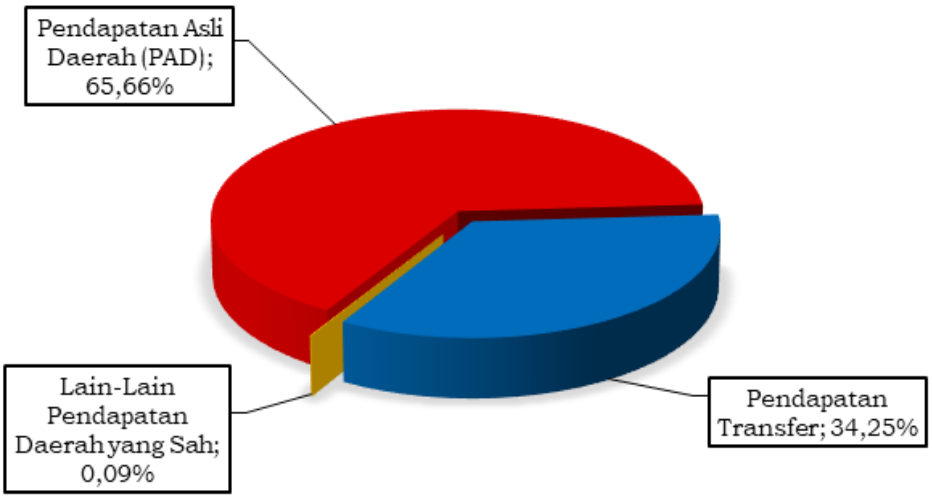
### 5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini adalah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1 Rincian Pendapatan Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4.216.263.422.941,00 | 4.628.083.379.382,63 | 109,76 | 5.535.429.679.670,83 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.438.603.330.369,00 | 2.414.142.690.695,00 | 98,99 | 2.283.418.060.237,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.757.272.000,00 | 6.089.799.194,01 | 105,77 | 5.750.844.000,00 |
| **Jumlah** | **6.660.624.025.310,00** | **7.048.315.869.271,64** | **105,82** | **7.824.598.583.907,83** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp776.282.714.636,19) atau -9,92%. Komposisi realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 ditunjukkan pada Gambar 5.1.




**Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

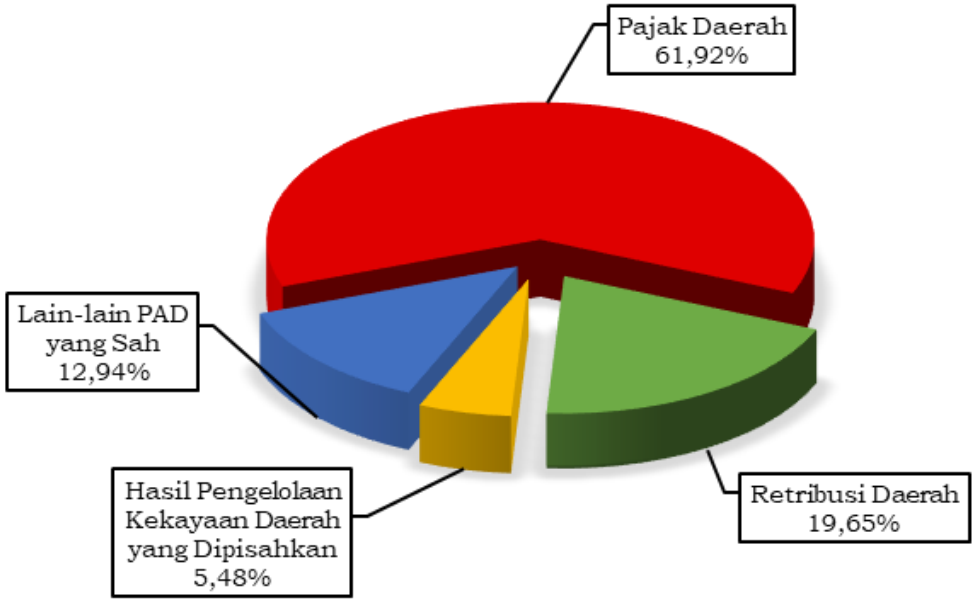
#### 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

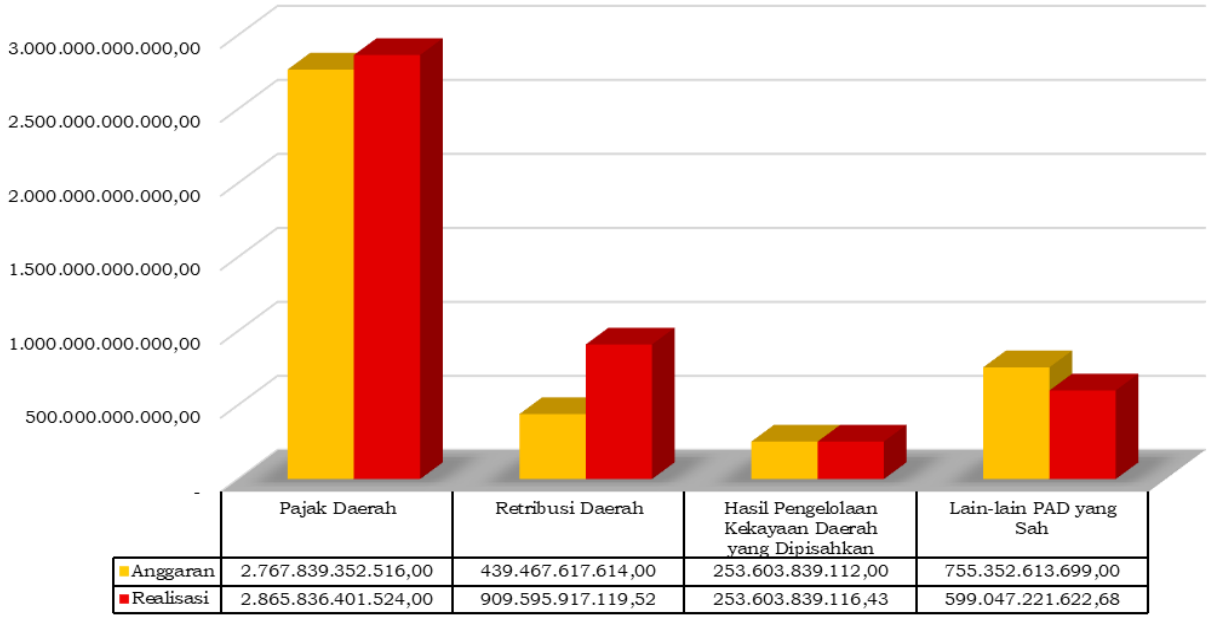
**Tabel 5.1.1.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pajak Daerah | 2.767.839.352.516,00 | 2.865.836.401.524,00 | 103,54 | 4.520.332.643.486,00 |
| Retribusi Daerah | 439.467.617.614,00 | 909.595.917.119,52 | 206,97 | 338.039.879.379,28 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 253.603.839.112,00 | 253.603.839.116,43 | 100,00 | 197.369.947.623,03 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 755.352.613.699,00 | 599.047.221.622,68 | 79,30 | 479.687.209.182,52 |
| **Jumlah** | **4.216.263.422.941,00** | **4.628.083.379.382,63** | **109,76** | **5.535.429.679.670,83** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp907.346.300.288,20) atau -16,39%. Komposisi realisasi PAD TA 2025 dan capaian realisasi PAD terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.2 dan 5.3.




**Gambar 5.2 Komposisi Realisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**




**Gambar 5.3 Capaian Realisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

#### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.1 Rincian Pajak Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.002.357.827.000,00 | 1.069.465.642.900,00 | 106,69 | 1.844.964.341.717,00 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 748.070.632.825,00 | 798.076.710.700,00 | 106,68 | 1.694.519.308.500,00 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 639.365.501.000,00 | 630.972.809.013,00 | 98,68 | 639.365.501.400,00 |
| Pajak Air Permukaan | 4.000.000.000,00 | 5.276.815.548,00 | 131,92 | 4.486.924.224,00 |
| Pajak Rokok | 354.875.391.691,00 | 343.585.515.178,00 | 96,81 | 336.996.567.645,00 |
| Pajak Alat Berat | 90.000.000,00 | 147.095.900,00 | 163,43 | 0,00 |
| Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 19.080.000.000,00 | 18.311.812.285,00 | 95,97 | 0,00 |
| **Jumlah** | **2.767.839.352.516,00** | **2.865.836.401.524,00** | **103,54** | **4.520.332.643.486,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.654.496.241.962,00) atau -36,60%.

#### 5.1.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berikut ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.1.1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| PKB-Mobil Penumpang-Sedan | 13.861.802.693,00 | 14.665.225.100,00 | 105,79 | 27.214.938.300,00 |
| PKB-Mobil Penumpang-Jeep | 69.661.761.329,00 | 79.599.249.800,00 | 114,26 | 135.243.958.900,00 |
| PKB-Mobil Penumpang-Minibus | 480.632.154.563,00 | 531.666.094.500,00 | 110,61 | 901.273.780.700,00 |
| PKB-Mobil Bus-Microbus | 11.438.541.173,00 | 11.573.630.500,00 | 101,18 | 20.014.575.800,00 |
| PKB-Mobil Bus-Bus | 1.277.609.935,00 | 1.202.467.700,00 | 94,11 | 2.318.928.800,00 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 66.366.560.623,00 | 70.663.084.900,00 | 106,47 | 123.338.497.600,00 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | 35.337.817.811,00 | 36.591.241.200,00 | 103,54 | 66.665.556.000,00 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Truck | 19.785.591.048,00 | 19.941.276.100,00 | 100,78 | 34.825.750.000,00 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van | 821.521.376,00 | 2.089.655.400,00 | 254,36 | 3.274.264.800,00 |
| PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 303.151.483.965,00 | 301.455.634.200,00 | 99,44 | 530.759.509.017,00 |
| PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | 22.982.484,00 | 18.083.500,00 | 78,68 | 34.581.800,00 |
| **Jumlah** | **1.002.357.827.000,00** | **1.069.465.642.900,00** | **106,69** | **1.844.964.341.717,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp775.498.698.817,00) atau -42,03%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 105,79% pada TA 2025;
   b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 114,26% pada TA 2025;

c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 110,61% pada TA 2025;
d. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,47% pada TA 2025;
e. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 254,36% pada TA 2025; dan
f. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 78,68% pada TA 2025.

2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,69% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat kebijakan keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok PKB yang mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan pada Pasal 2 sebagai berikut.
         a) Kendaraan bermotor sampai dengan 200 cc sebesar 14,35%;
         b) Kendaraan bermotor di atas 200 cc sebesar 12,15%; dan
         c) Kendaraan bermotor tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 39,76%.

         Kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan atau mengurangi beban masyarakat dan mendorong kepatuhan pembayaran PKB, sehingga turut andil dalam mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran untuk melakukan pelunasan pada tahun berjalan serta meningkatkan ketepatan waktu pembayaran.
      2) Terdapat program pembebasan sanksi PKB yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025 sampai dengan 22 November 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 18 September 2025. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk segera melakukan pelunasan kewajiban, dikarenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran diberikan pembebasan selama periode program. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan intensitas pembayaran dan berkontribusi terhadap penerimaan PKB pada akhir tahun (Triwulan IV).

      Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Diberlakukannya pemungutan Opsen PKB oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 turut mengubah struktur pemungutan PKB. Opsen PKB dipungut secara bersamaan sebagai pungutan tambahan atas pokok PKB, sehingga sebagian pungutan terkait PKB dicatat sebagai opsen yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nilai realisasi PKB yang tercatat pada periode saat ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya; dan
      2) Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2025 memberlakukan tarif PKB melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu 1,055% untuk kendaraan sampai dengan 200 cc dan 1,2% untuk kendaraan di atas 200 cc. Tarif tersebut lebih rendah dibandingkan ketentuan pada peraturan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif 1,5% untuk kendaraan roda dua/tiga di bawah 250 cc kepemilikan pertama dan 1,75% untuk kendaraan roda dua/tiga 250 cc ke atas kepemilikan pertama maupun kendaraan roda empat atau lebih kepemilikan pertama. Perubahan penetapan tarif tersebut berpotensi memengaruhi besaran penerimaan PKB.
   b. Terdapat sejumlah inovasi dalam pelaksanaan pemungutan PKB, di antaranya:
      1) Layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) *Drive-Thru* Gelis yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar PKB secara cepat, mudah, dan efisien. Hal ini didukung dengan fleksibilitas waktu operasional di luar jam kerja seperti *shift* malam yang berlaku mulai Januari 2024, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Dengan adanya perluasan layanan, semakin banyak Wajib Pajak yang

terdorong untuk memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya meningkatkan realisasi penerimaan PKB; dan

2) Inovasi layanan berupa Samsat Keliling dan Samsat Kerumah Tinggal (Kerti) yang memungkinkan Wajib Pajak membayar PKB di lokasi-lokasi yang lebih dekat dan fleksibel melalui mobil layanan keliling yang menjangkau berbagai wilayah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 254,36% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerimaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh karakteristik objek pajak Blind Van di Bali yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan logistik, katering, angkutan barang, dan operasional pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari kontribusi terbesar yang berasal dari PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi sebesar Rp2.074.012.600,00 atau sekitar 99,25% dari total realisasi. Selain itu, penerimaan sebagian besar terkonsentrasi pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van dapat melampaui target anggaran pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingginya realisasi pada tahun sebelumnya yang secara umum didorong oleh program relaksasi dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

3. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

#### 5.1.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berikut ini adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.2.1 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan | 2.900.663.900,00 | 3.745.351.600,00 | 129,12 | 6.947.410.000,00 |
| BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | 30.288.333.351,00 | 33.980.088.000,00 | 112,18 | 70.725.181.500,00 |
| BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | 301.870.504.870,00 | 264.228.211.400,00 | 87,53 | 685.876.893.300,00 |
| BBNKB-Mobil Bus-Microbus | 15.995.108.727,00 | 14.003.791.600,00 | 87,55 | 36.146.981.000,00 |
| BBNKB-Mobil Bus-Bus | 778.837.782,00 | 1.311.674.600,00 | 168,41 | 1.657.870.000,00 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 38.284.251.878,00 | 51.861.632.000,00 | 135,46 | 86.484.578.100,00 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | 11.038.598.929,00 | 11.523.692.300,00 | 104,39 | 25.223.364.000,00 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck | 12.563.255.314,00 | 16.160.541.200,00 | 128,63 | 28.440.048.000,00 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van | 0,00 | 1.938.885.100,00 | 0,00 | 3.453.580.000,00 |
| BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 334.322.009.756,00 | 399.315.902.500,00 | 119,44 | 749.498.266.600,00 |
| BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | 29.068.318,00 | 6.940.400,00 | 23,87 | 65.136.000,00 |
| **Jumlah** | **748.070.632.825,00** | **798.076.710.700,00** | **106,68** | **1.694.519.308.500,00** |

Tabel di atas menunjukkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp896.442.597.800,00) atau -52,90%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 129,12% pada TA 2025;
b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 112,18% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp36.745.093.500,00) pada TA 2025;
c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus dengan penurunan signifikan sebesar (Rp421.648.681.900,00) pada TA 2025;
d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus dengan penurunan signifikan sebesar (Rp22.143.189.400,00) pada TA 2025;
e. BBNKB-Mobil Bus-Bus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 168,41% pada TA 2025;
f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 135,46% pada TA 2025;
g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck dengan penurunan signifikan sebesar (Rp13.699.671.700,00) pada TA 2025;
h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 128,63% pada TA 2025;
i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025;
j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 119,44% pada TA 2025; dan
k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 23,87% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp58.195.600,00) pada TA 2025.

2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,68% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat kebijakan keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok BBNKB yang mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) yaitu keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok BBNKB sebesar 24 persen. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan atau mengurangi beban masyarakat dan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pengurangan pokok BBNKB tersebut berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan proses balik nama atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor pada periode berlakunya kebijakan, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan penyelesaian kewajiban BBNKB; dan
      2) Terdapat perbaikan tata kelola pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan di Bali pada tanggal 24 Februari 2025. Standar tersebut mencakup penetapan standar pelayanan pada layanan Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan Pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BNKB II). Hal tersebut berpotensi mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan balik nama kendaraan bermotor, sehingga dapat mendorong kelancaran proses administrasi BBNKB.

      Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Diberlakukannya pemungutan Opsen BBNKB oleh Kabupaten/Kota sebagai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 turut mengubah struktur pemungutan BBNKB; dan
      2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan sebagai pungutan tambahan atas BBNKB. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nilai realisasi BBNKB yang tercatat menjadi berbeda apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

4. Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

#### 5.1.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berikut ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.3.1 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| PBBKB-Bahan Bakar Solar | 118.887.922.398,00 | 121.653.714.200,00 | 102,32 | 140.444.400.359,00 |
| PBBKB-Bahan Bakar Lainnya | 520.477.578.602,00 | 509.319.094.813,00 | 97,85 | 498.921.101.041,00 |
| **Jumlah** | **639.365.501.000,00** | **630.972.809.013,00** | **98,68** | **639.365.501.400,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.392.692.387,00) atau -1,31%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. PBBKB-Bahan Bakar Solar memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 102,32% pada TA 2025; dan
   b. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya memiliki persentase capaian yang lebih rendah dari anggaran sebesar 97,85% pada TA 2025
2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 98,68% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Penerimaan PBBKB relatif bergantung terhadap perkembangan penjualan atau penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen atau pengguna. PBBKB dipungut pada saat terjadi penyerahan BBM oleh penyedia kepada konsumen, sehingga perubahan pada volume penyaluran atau penjualan BBM dapat memengaruhi besaran penerimaan PBBKB;
      2) Struktur bagi hasil PBBKB berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan 70% kepada Kabupaten/Kota dan sisanya menjadi bagian Provinsi, turut memengaruhi besaran penerimaan PBBKB yang masuk ke kas daerah Pemerintah Provinsi Bali;
      3) Terdapat penguatan agenda transportasi melalui pengembangan penggunaan energi alternatif seperti Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, yang turut memengaruhi preferensi konsumsi energi sektor transportasi. Perkembangan tersebut dapat berdampak pada konsumsi BBM kendaraan bermotor, sehingga dapat berimplikasi pada penerimaan PBBKB; dan
      4) Terdapat kebijakan insentif berupa pengurangan pokok PBBKB berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2025 sebesar 60% yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2025. Hal tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan PBBKB pada TA 2025.

3. Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

#### 5.1.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan

Berikut ini adalah Pajak Air Permukaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.4.1 Rincian Pajak Air Permukaan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pajak Air Permukaan | 4.000.000.000,00 | 5.276.815.548,00 | 131,92 | 4.486.924.224,00 |
| **Jumlah** | **4.000.000.000,00** | **5.276.815.548,00** | **131,92** | **4.486.924.224,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Air Permukaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp789.891.324,00 atau 17,60%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Air Permukaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Air Permukaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 131,92% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat strategi pengawasan yang diterapkan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Permukaan. Upaya tersebut berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
         a) Intensifikasi dilakukan dengan memperkuat pengendalian atas wajib pajak yang telah terdaftar, antara lain melalui pemantauan kepatuhan pelaporan dan pembayaran, penertiban administrasi pemungutan, serta pemutakhiran data pemanfaatan air permukaan untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan; dan
         b) Ekstensifikasi dilakukan melalui penelusuran dan pendataan terhadap pelaku usaha atau pengguna air permukaan yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak, termasuk pembaruan basis data objek dan subjek pajak.
      2) Terdapat upaya optimalisasi pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi pengguna air permukaan, khususnya wisata air, perhotelan, dan restoran yang membutuhkan ketersediaan air untuk mendukung operasional layanan. Hal tersebut berpotensi meningkatkan intensitas pemanfaatan air permukaan dan memperluas basis objek pemungutan, sehingga turut mendukung peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan.
2. Pengenaan Pajak Air Permukaan didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Permukaan dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

#### 5.1.1.1.1.5 Pajak Rokok

Berikut ini adalah Pajak Rokok yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.5.1 Rincian Pajak Rokok**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pajak Rokok | 354.875.391.691,00 | 343.585.515.178,00 | 96,81 | 336.996.567.645,00 |
| **Jumlah** | **354.875.391.691,00** | **343.585.515.178,00** | **96,81** | **336.996.567.645,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Rokok TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.588.947.533,00 atau 1,95%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Rokok TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Rokok memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 96,81% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Penerimaan Pajak Rokok mengikuti realisasi Cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Apabila penerimaan Cukai Rokok mengalami penurunan atau lebih rendah, maka penerimaan Pajak Rokok yang dibagihasilkan kepada daerah dapat ikut menurun;
      2) Kebijakan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2025 relatif tidak mengalami kenaikan, sebagaimana pengaturan tarif cukai yang berlaku ditetapkan melalui:
         a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/0.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya; dan
         b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

      Sementara itu, tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga besaran Pajak Rokok yang diterima daerah mengikuti perkembangan realisasi cukai rokok.
      3) Pajak Rokok yang tercatat sebagai bagian Provinsi bersifat terbatas karena mekanisme bagi hasil, yaitu 70 persen dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota dan sisanya menjadi bagian Provinsi. Dengan komposisi ini, setiap penurunan penerimaan Pajak Rokok akan tercermin pada besaran yang masuk ke kas daerah Provinsi;

   Walau demikian, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat upaya dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Rokok berupa dukungan dan koordinasi yang erat antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Bea Cukai dalam melakukan pengawasan peredaran rokok tanpa Pita Cukai (ilegal).
2. Pengenaan Pajak Rokok didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Rokok dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

### 5.1.1.1.1.6 Pajak Alat Berat

Berikut ini adalah Pajak Alat Berat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.6.1 Rincian Pajak Alat Berat**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pajak Alat Berat | 90.000.000,00 | 147.095.900,00 | 163,43 | 0,00 |
| **Jumlah** | **90.000.000,00** | **147.095.900,00** | **163,43** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Alat Berat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp147.095.900,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Alat Berat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Alat Berat memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 163,43% dengan realisasi sebesar Rp147.095.900,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Pajak Alat Berat mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai salah satu jenis pajak Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan objek pajak berupa kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, dasar pengenaan berupa nilai jual alat berat, serta tarif Pajak Alat Berat ditetapkan sebesar 0,2 persen. Sebagai jenis pajak yang baru diterapkan, penerimaan pada tahap awal pelaksanaan dapat meningkat seiring dimulainya proses pendataan dan penetapan, karena jumlah alat berat yang teridentifikasi sebagai objek pajak serta nilai jual yang menjadi dasar pengenaan dapat bertambah sejalan dengan pemutakhiran data; dan
      2) Terdapat penguatan upaya pemungutan melalui UPTD PPRD Provinsi, antara lain pendataan dan sosialisasi secara jemput bola, termasuk pelayanan keliling dan penelusuran langsung kepada pihak yang memiliki atau menguasai alat berat. Penerapan tersebut tercermin, salah satunya pada UPTD PPRD Provinsi di Kabupaten Jembrana yang melakukan pendekatan jemput bola kepada pemilik alat berat, menjelaskan mekanisme penetapan berbasis data atau faktur, dan mendorong pemenuhan kewajiban Pajak Alat Berat.
2. Pengenaan Pajak Alat Berat didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Alat Berat dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

#### 5.1.1.1.1.7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berikut ini adalah Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.7.1 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 19.080.000.000,00 | 18.311.812.285,00 | 95,97 | 0,00 |
| **Jumlah** | **19.080.000.000,00** | **18.311.812.285,00** | **95,97** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp18.311.812.285,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 95,97% pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan penerimaan yang baru mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada tahap awal implementasi masih terdapat penyesuaian pendataan, penetapan, dan mekanisme pemungutan di lapangan; dan

2) Besaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan 25 persen dari Pajak MBLB dan dipungut bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB, sehingga capaian opsen MBLB relatif bergantung pada penerimaan Pajak MBLB pada Kabupaten/Kota.

2. Pengenaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

#### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.1 Rincian Retribusi Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Retribusi Jasa Umum | 340.889.890.000,00 | 312.473.157.763,18 | 91,66 | 296.109.115.165,28 |
| Retribusi Jasa Usaha | 93.177.727.614,00 | 588.375.816.326,34 | 631,45 | 34.988.817.314,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 5.400.000.000,00 | 8.746.943.030,00 | 161,98 | 6.941.946.900,00 |
| **Jumlah** | **439.467.617.614,00** | **909.595.917.119,52** | **206,97** | **338.039.879.379,28** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp571.556.037.740,24 atau 169,08%.

#### 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.1.1 Rincian Retribusi Jasa Umum**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 324.149.890.000,00 | 294.497.267.763,18 | 90,85 | 280.616.753.706,00 |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan | 16.740.000.000,00 | 17.975.890.000,00 | 107,38 | 15.492.361.459,28 |
| **Jumlah** | **340.889.890.000,00** | **312.473.157.763,18** | **91,66** | **296.109.115.165,28** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp16.364.042.597,90 atau 5,53%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki persentase capaian 90,85% yang mendekati anggaran pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp274.943.124.919,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

         a) Pada TA 2025 penerimaan ini dianggarkan dan direalisasikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.1.1.1 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang Dianggarkan di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis**

| Perangkat Daerah | Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| RSUD Bali Mandara | 198.200.000.000,00 | 175.710.054.787,81 | 88,65 |
| Rumah Sakit Mata Bali Mandara | 93.863.440.000,00 | 90.559.637.694,00 | 96,48 |
| Rumah Sakit Jiwa | 24.767.450.000,00 | 21.716.668.832,00 | 87,68 |
| UPTD Balai Laboratorium Kesehatan *Kerthi* Bali *Sadhajiwa* | 7.019.000.000,00 | 6.218.326.449,37 | 88,59 |
| UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional | 300.000.000,00 | 292.580.000,00 | 97,53 |
| **Jumlah** | **324.149.890.000,00** | **294.497.267.763,18** | **90,85** |

b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dharma Yadnya tidak dianggarkan pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan belum terdapat Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mengatur mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Dharma Yadnya, sehingga seluruh penerimaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Dharma Yadnya tercatat sebagai Pendapatan BLUD. Jumlah anggaran dan realisasi tersebut diungkapkan lebih detail pada **Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya *Tabel 5.1.1.1.4.10.1.1.1.***

2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 90,85% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024. Penerimaan ini antara lain ditopang oleh pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang dalam ketentuan retribusi daerah dikategorikan sebagai objek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan. Rincian realisasi berdasarkan unit pelayanan adalah sebagai berikut:
   a) RSUD Bali Mandara sebesar Rp175.710.054.787,81;
   b) Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama sebesar Rp21.716.668.832,00;
   c) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp90.559.637.694,00;
   d) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa sebesar Rp6.218.326.449,37; dan
   e) UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional sebesar Rp292.580.000,00.

b. Retribusi Pelayanan Kebersihan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 107,38% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Penerimaan ini berasal dari realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali selama 12 (dua belas) bulan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
   1) Terdapat peningkatan jumlah pelanggan seiring bertambahnya pengguna layanan kebersihan, baik dari sektor rumah tangga maupun usaha, sehingga basis pemungutan retribusi cenderung semakin luas dan penerimaan turut meningkat;
   2) Terdapat pelunasan tunggakan oleh pelanggan lama dalam mendorong kenaikan pendapatan, dikarenakan sebagian pelanggan yang sebelumnya menunggak kemudian menyelesaikan kewajibannya sesuai tagihan;
   3) Meningkatnya upaya tim kerja dalam melakukan penyebaran tagihan retribusi (*invoice*) dan sosialisasi yang berperan dalam memperbaiki kepatuhan pembayaran, melalui penyampaian tagihan yang lebih tertib serta penguatan pemahaman pelanggan mengenai kewajiban retribusi dan batas waktu pembayaran; dan
   4) Bertambahnya volume jasa yang dimanfaatkan pelanggan, baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas layanan, yang pada akhirnya turut mendorong kenaikan retribusi yang dapat dipungut.

2. Pengenaan Retribusi Jasa Umum didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

#### 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.2.1 Rincian Retribusi Jasa Usaha**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 62.500.000,00 | 66.100.000,00 | 105,76 | 64.250.000,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 94.000.000,00 | 94.007.578,00 | 100,00 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan | 43.272.000,00 | 65.651.500,00 | 151,71 | 28.049.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 4.358.620.000,00 | 4.873.970.011,00 | 111,82 | 6.432.789.000,00 |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 897.000.000,00 | 1.315.022.000,00 | 146,60 | 1.226.096.928,00 |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 87.722.335.614,00 | 581.961.065.237,34 | 663,41 | 27.237.632.386,00 |
| **Jumlah** | **93.177.727.614,00** | **588.375.816.326,34** | **631,45** | **34.988.817.314,00** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp553.386.999.012,34 atau 1.581,61%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 105,76% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp3.600.000,00 berasal dari tempat penginapan pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBUN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas akomodasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perlindungan tanaman, seperti pembinaan, pelatihan atau pendampingan, koordinasi lapangan, dan/atau kunjungan kerja; dan
      2) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp62.500.000,00 berasal dari tamu yang menginap di Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali yang berlokasi di Jl. Cikini II No. 3, Jakarta, sebagai fasilitas akomodasi bagi pegawai atau tamu yang memiliki kepentingan dinas dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait. Penerimaan ini mencerminkan adanya pemanfaatan fasilitas sebagai sarana akomodasi kedinasan yang lebih aktif, serta tertibnya administrasi pelayanan dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memiliki persentase capaian sebesar 100,00% pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Penerimaan ini berasal dari realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan (PPOTPPK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melakukan produksi dan penjualan produk bahan baku obat tradisional berupa tanaman kering (simplisia) sebagai hasil pengolahan dari budidaya tanaman, di mana bibit atau benih yang dibudidayakan selanjutnya dipanen dan dikeringkan, sehingga menghasilkan produk bernilai ekonomis yang dapat dipungut retribusinya sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 151,71% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp37.602.500,00 pada TA 2025. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dibukanya lokasi pelayanan kepelabuhan baru, yaitu PP Tanjung Benoa, yang aktif pada tanggal 5 Maret 2025. Beroperasinya lokasi pelayanan baru tersebut turut andil dalam memperluas cakupan layanan kepelabuhanan yang dapat diberikan, sehingga berdampak pada bertambahnya aktivitas pelayanan dan pada akhirnya mendorong peningkatan penerimaan retribusi;
   d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 111,82% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan ketentuan yang berimplikasi pada kenaikan tarif retribusi serta pemanfaatan atau pengelolaan kekayaan daerah, termasuk kenaikan tarif sewa fasilitas milik daerah. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp3.096.755.011,00 antara lain didukung oleh penyesuaian (kenaikan) tarif retribusi yang berlaku untuk berbagai kategori pengunjung dan jenis kegiatan pada UPTD di sektor kebudayaan dan pariwisata, yaitu UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali, dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB), yang mencakup:
   a) Kenaikan tarif karcis masuk yang dibedakan menurut pengunjung mancanegara dan nusantara, termasuk kategori mahasiswa dan pelajar; dan
   b) Penyesuaian tarif kegiatan, seperti foto adat dan *prewedding* dan kegiatan *shooting* video/film/sinetron/video klip yang pengenaannya disesuaikan berdasarkan peruntukan komersial atau pendidikan; dan
2) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp1.777.215.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a) Penjualan Tiket Kawasan Konservasi Nusa Penida pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan belum mencapai target. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya cuaca ekstrem pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2025 yang berdampak pada penurunan aktivitas kunjungan dan wisata bahari, baik wisatawan domestik maupun mancanegara; dan
   b) Berkembangnya alternatif destinasi wisata dan aktivitas rekreasi pada berbagai daerah di luar Provinsi Bali turut memengaruhi kunjungan wisatawan, seperti Banyuwangi, Lombok, dan Nusa Tenggara, sehingga minat terhadap aktivitas *snorkeling* dan kegiatan wisata lainnya di Nusa Penida mengalami penyesuaian. Hal ini berdampak terhadap penurunan penjualan tiket kawasan konservasi, sehingga realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 146,60% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp1.166.798.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a) Pada UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (BIBDPTHPT) terdapat peningkatan yang berasal dari:
      (1) Permintaan semen beku sapi dan semen cair babi pada periode musim kawin, di mana kebutuhan peternak terhadap layanan dan produk inseminasi buatan cenderung meningkat untuk mendukung proses perkawinan ternak; dan
      (2) Penjualan atau pelayanan terkait hewan ternak antara lain babi ras umur 45 hari, babi lokal umur 45 hari, kambing betina umur 1 tahun, bebek putih jambul umur 12 minggu, ayam umur 6 minggu, serta penjualan ternak sapi afkir.

      Meningkatnya permintaan tersebut berdampak pada bertambahnya volume penjualan atau layanan yang dapat dipenuhi, sehingga penerimaan yang diperoleh relatif menjadi lebih tinggi; dan
   b) Pada UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BBITPHBUN), terdapat peningkatan yang berasal dari:
      (1) Penjualan benih Kopi Arabika dalam bentuk butiran (kopi beras) yang telah tersertifikasi, termasuk realisasi penjualan Kopi Beras Arabika (olah kering/DP), Kopi HS (olah basah), benih Kopi Arabika untuk proyek/kegiatan (termasuk luar Bali), serta Kopi Beras Robusta (olah kering/DP); dan
      (2) Pembayaran atau penjualan komoditas lain yang tercatat antara lain anggrek (Anggrek Phalaenopsis, Anggrek Chatelia, dan Anggrek Dendrobium), durian, Benih Kelapa Genjah Salak, dan Kentang G3.
2) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp148.224.000,00 bersumber dari peningkatan penjualan bibit atau benih ikan, yang didukung oleh adanya kesesuaian penganggaran dengan kebutuhan sarana produksi budidaya, sehingga proses produksi bibit atau benih dapat dilaksanakan lebih efektif. Selain itu, terdapat peningkatan kompetensi tenaga teknis yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya, yang pada akhirnya membantu menjaga konsistensi proses produksi. Di sisi lain, kondisi kualitas lingkungan budidaya yang mendukung turut berkontribusi terhadap kelancaran proses

budidaya, sehingga ketersediaan bibit atau benih ikan yang dapat diproduksi dan dipasarkan menjadi relatif lebih baik.

f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 663,41% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp554.723.432.851,34, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp3.207.849.551,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, sewa rumah dinas, dan sewa gedung berupa Gelanggang Olahraga (GOR) Ngurah Rai dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

   2) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp12.960.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Selain itu, terdapat penerimaan yang bersumber dari BLUD dan UPTD dengan rincian sebagai berikut:
      a) RSUD Bali Mandara sebesar Rp327.088.000,00;
      b) Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama sebesar Rp30.900.000,00;
      c) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp93.329.008,00; dan
      d) UPTD PPOTPPK sebesar Rp114.276.612,00.
   3) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp2.464.735.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, sewa laboratorium, sewa alat berat, sewa gedung atau bangunan, dan sewa tanah;
   4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp9.360.000,00 berasal dari pembayaran sewa rumah dinas dan sewa kantin;
   5) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp469.238.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Pembayaran sewa kantin sebesar Rp21.720.000,00; dan
      b) Pemakaian laboratorium sebesar Rp447.518.500,00 pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja yang belum mencapai target dikarenakan laboratorium sedang dalam proses persiapan reakreditasi ISO 17025:2017 dan Registrasi Laboratorium Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2020 tentang Laboratorium Lingkungan, yang mensyaratkan peralatan dan bahan uji tersertifikasi serta tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI);
   6) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp5.664.000,00 berasal dari pemanfaatan QRIS Bus Sarbagita;
   7) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp5.040.000,00 berasal dari sewa kantin;
   8) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp557.900.000,00 berasal dari sewa gedung atau bangunan dan sewa kantin;
   9) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp854.681.294,00 berasal dari pembayaran sewa tanah dan sewa laboratorium pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang ditunjuk sebagai salah satu Laboratorium *Official Control* dalam pelaksanaan *surveillance sample* logam berat, histamin dan *E. coli* oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
   10) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp5.275.200,00 berasal dari pembayaran sewa kantin
   11) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp205.469.513,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, sewa rumah dinas, kegiatan pemeriksaan lapangan pada UPTD BPSBTPHBUN, sewa lahan pertanian pada UPTD BPTPHBUN, sewa laboratorium pada UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (BSMKP) dan pembayaran jasa produksi biakan padat *Trichoderma sp.* dan jasa produksi stater agensia hayati;
   12) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp39.220.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin dan sewa pengujian laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
   13) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp30.240.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, Sertifikasi Mutu Kopi, Pengujian Mutu Kopi, Pengujian Mutu Kayu Manis Batang, Pengujian Mutu Kayu Manis Bubuk,

Pengujian Mutu Pala Utuh, Pengujian Mutu Pala Bubuk, Pengujian Mutu Fuli, Sertifikasi Mutu Panili, dan Sertifikasi Mutu Beras;

14) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari perpanjangan sewa menyewa atas Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan luas tanah 12 $m^2$ dari keseluruhan luas tanah seluas 68.120 $m^2$ yang terletak di lingkungan Kantor Gubernur Bali Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala-Renon-Denpasar, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar oleh PT Telekomunikasi Nusantara atas sewa Gedung Kantor selama 5 (lima) tahun pada tanggal 29 Desember 2025 dengan Perjanjian SK Nomor B.40.000/61485/AKA/B.UM;
15) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp140.976.000,00 berasal dari sewa kantin dan sewa rumah dinas, serta pada 7 (tujuh) UPTD PPRD sebesar Rp131.674.800,00 berasal dari sewa kantin;
16) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp9.000.000,00 berasal dari sewa kantin. Selain itu, terdapat penerimaan yang bersumber dari UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) sebesar Rp572.880.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Sewa ruang atau kamar (Ruang Belajar, Mess/Asrama, Auditorium/Aula, dan Laboratorium Komputer) selama 1 (satu) tahun sebesar Rp560.880.000,00; dan
    b) Sewa kantin selama 1 (satu) tahun sebesar Rp12.000.000,00
17) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp500.000,00 berasal dari sewa gedung berupa aula; dan
18) Pada UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, realisasi penerimaan sebesar Rp572.522.807.759,34 bersumber dari kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan melalui mekanisme sewa kantin, sewa rumah dinas, kerja sama pemanfaatan, serta sewa tanah. Adapun peningkatan penerimaan yang signifikan pada Tahun Anggaran 2025 terutama dipengaruhi oleh transaksi:
    a) Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan atas sebagian Barang Milik Daerah berupa Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Desa Kesiman Kertalanggu dengan NIB-el 22.09.000024299.0 seluas 93.900 $m^2$ (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) dari total luas 121.750 $m^2$ (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan PT Bali Budaya Semesta (PT BBS) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan dengan NIB-el 22.09.000024299.0 Nomor 18 tanggal 25 November 2025 ditandatangani oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali dan Heru Budihartono selaku Direktur PT BBS di hadapan dr. Ketut Mahatma Dharma Wijaya, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Denpasar

       Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor B.31.000.2.3.2/2553/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2025, yang didahului oleh Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) tanggal 13 Mei 2024 antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Heru Budihartono terkait pemanfaatan HGB Nomor 80 atas nama PT Abdi Persada Nusantara di atas HPL No. 2. Sebagai syarat pelaksanaan Kesepakatan Bersama, seluruh tunggakan kewajiban PT Abdi Persada Nusantara sebesar Rp1.478.423.445,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) setara USD 88.528,35 telah dibayarkan oleh Heru Budihartono pada tanggal 14 November 2025 dan diterima melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali, serta diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025.

       Lahan yang dikerjasamakan diperuntukkan bagi pengembangan kawasan wisata budaya, meliputi Gedung Parkir, Tempat Pertunjukan/Venue, Wisata Budaya dan Spiritual, Wisata Edukasi, Desa Wisata, Restoran/Kuliner, Pasar Oleh-oleh, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya, serta Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya. Sisa lahan seluas 28.170 $m^2$ (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atau 30% dari luas lahan yang dikerjasamakan ditetapkan sebagai Lahan Konservasi Desa Adat Kesiman untuk kegiatan yang berhubungan dengan upacara Agama Hindu.

       Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 (dua puluh) tahun. Selama jangka waktu perjanjian, PT BBS wajib membayar Kontribusi Tetap kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp58.380.000.000,00 (lima puluh delapan miliar

tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang wajib dibayarkan secara penuh dan sekaligus pada saat penandatanganan perjanjian. Selain Kontribusi Tetap, PT BBS juga wajib membayar Kontribusi Pembagian Pendapatan sebesar 2,5% dari Pendapatan Bruto pengoperasian Fasilitas Kegiatan Usaha setelah memasuki masa Operasi Komersial, serta Kompensasi Pengalihan Unit sebesar 2,5% dari Nilai Pengalihan Unit yang besarannya akan ditetapkan berdasarkan realisasi operasional sesuai ketentuan perjanjian.

Dengan demikian, total penerimaan yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan kerja sama pemanfaatan lahan HPL No. 2 dengan PT BBS adalah sebesar Rp59.858.423.445,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari pelunasan tunggakan sebesar Rp1.478.423.445,00 dan Kontribusi Tetap sebesar Rp58.380.000.000,00, keduanya telah diterima melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan dicatat.

b) Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan (HPL) seluas kurang lebih 398.990 $m^2$ (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Jl. Terompong, Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL), yang dituangkan dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali dan Ferry Ma'ruf selaku Direktur Utama PT BDL di hadapan dr. Ketut Mahatma Dharma Wijaya, S.H., M.Kn selaku Notaris di Denpasar.

Perjanjian ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali atas kerja sama pemanfaatan lahan yang telah berjalan sejak tahun 1989 melalui Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan (*Land Utilization and Land Development Agreement* atau "LUDA Induk") antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pemerintah Provinsi Bali, dan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII) di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua. Berdasarkan Perjanjian Pemisahan tertanggal 10 November 2022, pelaksanaan kerja sama atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dipisahkan dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 tertanggal 23 Desember 2022 antara Pemerintah Provinsi Bali dan NII ("LUDA Pemprov Bali").

Dalam pelaksanaannya, NII gagal memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap sehingga pada tanggal 1 Juni 2023 Gubernur Bali menyampaikan surat pengakhiran LUDA Pemprov Bali kepada NII. Pada tanggal 6 Juli 2023, kreditur-kreditur NII mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap NII di Pengadilan Niaga Surabaya, yang dikabulkan melalui Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 31 Agustus 2023. Sebagai tindak lanjut Putusan PKPU, pada tanggal 25 Oktober 2023 Perjanjian Perdamaian antara NII dan para krediturnya telah mendapat pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya ("Putusan Homologasi"). Dalam rangka pelaksanaan Putusan Homologasi, NII bersama PT Globalnet Spektrum Teknologi (GST) mendirikan PT Bali Destinasi Lestari (BDL) sebagai entitas baru untuk melanjutkan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan lahan. Pada tanggal 22 April 2024, melalui serangkaian proses pengalihan saham, komposisi kepemilikan saham BDL menjadi PT Kalibiru Graha Abadi (KGA) sebesar 90,01% dan Bangkok Bank *Public Company Limited* sebesar 9,99%.

Pada tanggal 2 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Bali, NII, dan BDL menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali. Atas dasar Kesepakatan Bersama tersebut, seluruh tunggakan sebesar Rp59.884.028.378,98 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan Rupiah) telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 2 Desember 2025 melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, setelah penandatanganan Akta Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025, PT BDL telah melaksanakan pembayaran Kontribusi Tetap Tahap 1 sebesar Rp425.137.500.000,-

(empat ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari total Kontribusi Tetap, dan turut diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, total penerimaan yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan kerja sama pemanfaatan lahan HPL dengan PT BDL adalah sebesar Rp485.021.528.378,98 (empat ratus delapan puluh lima miliar dua puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah).

Perjanjian ini berlaku untuk Jangka Waktu Awal selama 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 (dua puluh) tahun. Selama jangka waktu perjanjian, PT BDL wajib membayar Kontribusi Tetap kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp850.275.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap di mana Tahap 1 sebesar Rp425.137.500.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2025, Tahap 2 sebesar Rp212.568.750.000,- (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) wajib dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2026, dan Tahap 3 sebesar Rp212.568.750.000,- (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) wajib dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2027. Selain Kontribusi Tetap, PT BDL juga wajib membayar Kontribusi Pembagian Pendapatan dari Pendapatan Bruto pengoperasian Fasilitas Pariwisata dan Kompensasi Pengalihan Unit, yang besarannya akan ditetapkan berdasarkan realisasi operasional sesuai ketentuan perjanjian. Apabila Jangka Waktu Awal diperpanjang, PT BDL wajib membayar Kontribusi Tetap Jangka Waktu Perpanjangan sebesar Rp1.079.163.488.229,- (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap mulai tahun ke-36 sejak Tanggal Efektif.

2. Pengenaan Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan
   d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

#### 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Berikut ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.3.1 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 5.400.000.000,00 | 8.746.943.030,00 | 161,98 | 6.941.946.900,00 |
| **Jumlah** | **5.400.000.000,00** | **8.746.943.030,00** | **161,98** | **6.941.946.900,00** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.804.996.130,00 atau 26,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 161,98% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
   1) Meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan pekerja asing yang ditandai dengan membaiknya perekonomian dan kondisi operasional perusahaan untuk mempekerjakan TKA;
   2) Perkiraan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada saat penetapan target sebesar Rp13.700,00. Namun, pada akhir TA 2025 mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran Rp16.720,00.

2. Pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

#### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.3.1 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 253.382.756.690,00 | 253.382.756.694,43 | 100,00 | 196.751.692.444,03 |
| Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 221.082.422,00 | 221.082.422,00 | 100,00 | 618.255.179,00 |
| **Jumlah** | **253.603.839.112,00** | **253.603.839.116,43** | **100,00** | **197.369.947.623,03** |

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp56.233.891.493,40 atau 28,49%.

#### 5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Berikut ini adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.3.1.1 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 226.382.756.690,00 | 226.382.756.694,43 | 100,00 | 196.751.692.444,03 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 27.000.000.000,00 | 27.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **253.382.756.690,00** | **253.382.756.694,43** | **100,00** | **196.751.692.444,03** |

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp56.631.064.250,40 atau 28,78%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai target yang ditetapkan pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Penerimaan tersebut antara lain berkaitan dengan kinerja laba BUMD, kebijakan pembagian dividen, serta porsi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dengan rincian sebagai berikut:
      1) PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp224.454.593.473,43 yang tercatat pada Berita Acara Nomor: 2050/BA/RNO/DOC/2025 pada tanggal 10 Februari 2025; dan
      2) PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp1.928.163.221,00 yang tercatat pada Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1203/JBM/III/2025 pada tanggal 21 Maret 2025.
   b. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) mencapai target yang ditetapkan pada TA 2025 yang dibagikan oleh Perumda Kerta Bali Saguna sebesar Rp27.000.000.000,00 pada tanggal 3 September 2025, sedangkan pada TA 2024 realisasi tercatat nihil dikarenakan Perumda Kerta Bali Saguna tidak melakukan pembagian dividen sehubungan dengan belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pencatatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 didasarkan pada:
   a. PT Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Berita Acara Nomor: 2050/BA/RNO/DOC/2025 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2024 tanggal 10 Februari 2025 dengan Akta Nomor 6 tanggal 3 Februari 2026 Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.; dan
   b. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 10 Maret 2025 Notaris I Made Pria Dharsana, SH.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

#### 5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Berikut ini adalah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.3.2.1 Rincian Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 221.082.422,00 | 221.082.422,00 | 100,00 | 618.255.179,00 |
| **Jumlah** | **221.082.422,00** | **221.082.422,00** | **100,00** | **618.255.179,00** |

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp397.172.757,00) atau -64,24%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta mencapai target yang ditetapkan pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp397.172.757,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat penurunan laba pada PT Puri Raharja (Rumah Sakit Puri Raharja) pada Tahun Buku 2024 menjadi Rp903.823.349,56 dibandingkan dengan laba pada Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.527.534.582,05 (selisih Rp1.623.711.232,49), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen PT Puri Raharja Nomor: 00031/2.1274/AU.2/05/0463-4/1/III/2025; dan
      2) Penurunan laba tersebut berdampak pada besaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, sehingga bagian dividen yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali dengan porsi kepemilikan modal sebesar 58% turut menurun pada TA 2025.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

### 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 390.000.000,00 | 700.068.400,00 | 179,50 | 1.061.493.900,00 |
| Hasil Kerja Sama Daerah | 6.224.780.000,00 | 6.812.347.316,00 | 109,43 | 3.817.445.100,00 |
| Jasa Giro | 9.269.418.781,00 | 8.480.362.829,62 | 91,48 | 10.304.453.335,81 |
| Pendapatan Bunga | 2.645.833.333,00 | 15.267.241.419,64 | 577,02 | 9.555.179.227,40 |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 5.000.000,00 | 18.000.000,00 | 360,00 | 18.000.000,00 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 126.144.212,00 | 388.650.982,18 | 308,10 | 2.021.009.936,46 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 50.500.100.000,00 | 17.892.730.336,00 | 35,43 | 71.236.784.994,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 2.773.340,00 | 20.433.146,04 | 736,77 | 23.266.408,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian | 94.996.528.409,00 | 97.680.108.411,33 | 102,82 | 697.704.902,79 |
| Pendapatan BLUD | 91.192.035.624,00 | 82.679.933.999,49 | 90,66 | 63.071.871.378,06 |
| Pungutan bagi Wisatawan Asing | 500.000.000.000,00 | 369.021.750.000,00 | 73,80 | 317.880.000.000,00 |
| Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah | 0,00 | 85.577.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **755.352.613.699,00** | **599.047.204.301,30** | **79,30** | **479.687.209.182,52** |

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp119.359.995.118,78 atau 24,88%.

#### 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.1.1 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hasil Penjualan Aset Lain-Lain | 390.000.000,00 | 700.068.400,00 | 179,50 | 1.061.493.900,00 |
| **Jumlah** | **390.000.000,00** | **700.068.400,00** | **179,50** | **1.061.493.900,00** |

Tabel di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp361.425.500,00) atau -34,05%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 179,50% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penjualan BMD bersifat tidak rutin atau insidentil dan umumnya dipengaruhi oleh jumlah, jenis, serta nilai ekonomis aset yang dihapuskan dan dijual pada tahun berjalan. Penerimaan bersumber dari aset yang kondisi fisiknya telah menurun (rusak berat atau terbakar dan material bongkaran), sehingga nilai penjualannya dapat lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun masih melampaui target.
2. Rincian Hasil Penjualan Aset Lain-Lain berdasarkan penjualan aset rusak berat serta bongkaran gedung yang dilakukan menurut perangkat daerah beserta dasar penghapusan aset dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, terdapat:
      1) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SLBN 2 Buleleng sebesar Rp81.312.470,40 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1945/P.BMD/BPKAD tanggal 20 Maret 2025;
      2) Penghapusan Barang Inventaris kondisi terbakar pada SLBN 1 Karangasem sebesar Rp147.335.595,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.000.2.4/3182/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Mei 2025;
      3) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp4.975.359.291,50 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.000.2.4/7409/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025;
      4) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SMAN 2 Banjar sebesar Rp11.428.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8702/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Desember 2025;
      5) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SMAN 1 Kediri sebesar Rp3.051.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8703/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Desember 2025; dan
      6) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SMAN 1 Bangli dan SMAN 1 Tembuku sebesar Rp242.984.470,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8838/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025.
   b. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdapat:
      1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp933.138.898,33 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8837/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;
      2) Penghapusan Kendaraan Dinas kondisi rusak berat sebesar Rp8.800.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8244/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2025;
      3) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp933.138.898,33 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8837/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025.

4) Pada Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali terdapat:
   a) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp3.677.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/5914/P.BMD/BPKA tanggal 3 September 2025; dan
   b) Penghapusan bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp2.039.594.093,29 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/6004/P.BMD/BPKAD tanggal 8 September 2025.
5) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp136.738.767,99 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7408/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025.

c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp168.493.228,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8839/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;
d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, terdapat:
   1) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp674.907.420,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8928/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Desember 2025; dan
   2) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp674.907.420,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8929/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Desember 2025.
e. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali terdapat penghapusan bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp222.295.134,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/3029/P.BMD/BPKAD tanggal 9 Mei 2025;
f. Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp83.265.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4742/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Juli 2025;
g. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp187.341.600,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2627/P.BMD/BPKAD tanggal 21 April 2025;
   2) Bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp44.600.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/5915/P.BMD/BPKAD tanggal 3 September 2025; dan
   3) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp195.649.800,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7827/P.BMD/BPKAD tanggal 25 November 2025.
h. Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp409.723.960,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8839/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;
i. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp533.223.348,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/1086/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025;
   2) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp271.044.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025; dan
   3) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp15.251.455,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8839/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025.
j. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp299.058.975,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025; dan
   2) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp2.600.000,00, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8135/P.BMD/BPKAD tanggal 3 Desember 2025.
k. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terdapat berupa penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp280.366.380,00 berdasarkan

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8837/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;

l. Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp14.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2795/P.BMD/BPKAD tanggal 30 April 2025;
   2) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp711.633.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7407/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025; dan
   3) Penghapusan bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp115.753.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8932/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Desember 2025.
m. Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp66.792.450,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2627/P.BMD/BPKAD tanggal 21 April 2025;
n. Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp153.258.300,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7827/P.BMD/BPKAD tanggal 25 November 2025;
o. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp328.223.552,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7353/P.BMD/BPKAD tanggal 3 November 2025; dan
   2) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp11.932.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025.
   3) Pada UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdapat penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp228.519.900,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6506/P.BMD/BPKAD tanggal 29 September 2025.
p. Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali beserta UPTD terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp529.368.296,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025; dan
   2) Penghapusan kendaraan Dinas kondisi rusak berat sebesar Rp434.850.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/6005/P.BMD/BPKAD tanggal 8 September 2025.
q. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp116.043.400,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7408/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025;
r. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdapat:
   1) Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp820.133.657,50 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2581/P.BMD/BPKAD tanggal 17 April 2025;
   2) Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp232.339.296,42 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2581/P.BMD/BPKAD tanggal 17 April 2025; dan
   3) Biro Hukum Setda Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp172.051.829,70 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7407/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025; dan
   4) Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp192.818.613,88 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7408/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025.
s. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp479.774.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2763/P.BMD/BPKAD tanggal 29 April 2025; dan
   2) Penghapusan barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp979.917.357,67 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7407/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025.

t. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025;
u. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali beserta UPTD terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sesuai sebesar Rp1.455.453.290,01 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4776/P.BMD/BPKAD tanggal 23 Juli 2025;
   2) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp32.493.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/6006/P.BMD/BPKAD tanggal 8 September 2025; dan
   3) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp120.231.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8224/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2025.
v. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdapat penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp463.842.368,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4742/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Juli 2025; dan
w. Pada Badan Penghubung Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp281.141.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4742/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Juli 2025.

3. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

#### 5.1.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah

Berikut ini adalah Hasil Kerja Sama Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.2.1 Rincian Hasil Kerja Sama Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hasil Kerja Sama Daerah | 6.224.780.000,00 | 6.812.347.316,00 | 109,43 | 3.817.445.100,00 |
| **Jumlah** | **6.224.780.000,00** | **6.812.347.316,00** | **109,43** | **3.817.445.100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.994.902.216,00 atau 78,45%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Hasil Kerja Sama Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 109,43% pada TA 2025, dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.994.902.216,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp4.200.107.316,00, berasal dari pendapatan tiket Bus Trans Sarbagita serta adanya pelimpahan pengelolaan layanan Bus Trans Metro Dewata (TMD). Layanan TMD yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan kemudian dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada pertengahan TA 2025, setelah sebelumnya sempat berhenti beroperasi pada 31 Desember 2024 akibat kendala anggaran pusat. Selanjutnya, pada 20 April 2025 Pemerintah Provinsi Bali mengaktifkan kembali layanan TMD dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengambil alih kewenangan pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Mulai Oktober 2025, TMD kembali melayani 6 (enam) koridor dengan tarif *flat*, serta mendorong peningkatan kemudahan transaksi melalui pemanfaatan teknologi pembayaran, termasuk QRIS *Tap*;
      2) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp1.191.600.000,00, berasal dari penerimaan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga, yaitu PT Jasa

Marga Bali Tol sebesar Rp254.400.000,00, PT ITDC sebesar Rp800.000.000,00, dan PUDAM Tirta Mangutama sebesar Rp137.200.000,00; dan

3) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebesar Rp1.420.640.000,00 berasal dari kontribusi atau partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, serta pemerintah daerah di luar Provinsi Bali, yaitu Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Sumba, dan Pemerintah Kota Bima. Penerimaan tersebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama atau layanan pengembangan SDM dan kepegawaian.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

#### 5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Berikut ini adalah Jasa Giro yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.3.1 Rincian Jasa Giro**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Jasa Giro pada Kas Daerah | 9.269.418.781,00 | 7.140.669.743,77 | 77,03 | 7.610.111.049,43 |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 0,00 | 1.329.865.164,23 | 0,00 | 1.652.346.726,59 |
| Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.753.904,24 |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS | 0,00 | 9.845.243,00 | 0,00 | 8.241.655,55 |
| **Jumlah** | **9.269.418.781,00** | **8.480.380.151,00** | **91,48** | **10.304.453.335,81** |

Tabel di atas menunjukkan Jasa Giro TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.824.073.184,81) atau -17,70%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Jasa Giro TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Jasa Giro pada Kas Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,03% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rata-rata saldo mengendap pada RKUD selama TA 2025 relatif lebih rendah dibandingkan TA 2024.
   b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh rata-rata saldo mengendap, tingkat jasa giro/bunga bank, serta ketepatan waktu pelimpahan/penyetoran dari rekening bendahara/rekening instansi ke kas daerah.
   c. Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.033.753.904,24) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat saldo yang mengendap pada rekening dana cadangan; dan
   d. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan rata-rata saldo mengendap pada rekening Dana BOS selama TA 2025.
2. Realisasi Penerimaan Jasa Giro tergantung pada perputaran jumlah uang di RKUD, yang mengakibatkan penerimaan Jasa Giro tidak dapat diprediksi dengan tepat dikarenakan tergantung pada ketersediaan dan perputaran kas di RKUD; dan
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

#### 5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

Berikut ini adalah Pendapatan Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.4.1 Rincian Pendapatan Bunga**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 2.645.833.333,00 | 15.267.241.419,64 | 577,02 | 9.555.179.227,40 |
| **Jumlah** | **2.645.833.333,00** | **15.267.241.419,64** | **577,02** | **9.555.179.227,40** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bunga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp5.712.062.192,24 atau 59,78%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 577,02% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp5.712.062.192,24 pada TA 2025. Penerimaan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah bersumber dari Deposito Berjangka Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan skema pengelolaan kas daerah melalui penempatan dana *idle* pada instrumen deposito berjangka guna mengoptimalkan perputaran kas daerah dan meningkatkan pendapatan bunga. Pelaksanaannya tetap memperhatikan ketersediaan dana untuk mendukung kebutuhan operasional pada bulan berjalan. Pada TA 2025, skema deposito ini semakin diintensifkan melalui penambahan jumlah penempatan deposito serta optimalisasi tenor penempatan sebagai bagian dari strategi manajemen kas yang lebih aktif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Bunga pada TA 2025. Adapun rincian nomor rekening deposito dan besaran pendapatan bunga yang diterima masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Bilyet Deposito Berjangka 0100331001168 selama 11 bulan sebesar Rp8.020.833.333,37;
   b. Bilyet Deposito Berjangka 0100331001171 selama 9 bulan sebesar Rp1.312.499.999,97;
   c. Bilyet Deposito Berjangka 0100331001194 selama 10 bulan sebesar Rp5.833.333.333,30; dan
   d. Penerimaan remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025, dengan uraian sebagai berikut:
      1) Remunerasi TDF-DBH Triwulan I sebesar Rp90.680.744,00; dan
      2) Remunerasi TDF-DBH Triwulan II sebesar Rp9.894.009,00.
2. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bunga dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

### 5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Berikut ini adalah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.5.1 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 5.000.000,00 | 18.000.000,00 | 360,00 | 18.000.000,00 |
| **Jumlah** | **5.000.000,00** | **18.000.000,00** | **360,00** | **18.000.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 360,00% pada TA 2025. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dicatat merupakan setoran atas nama inisial IWW sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan total penyetoran sebesar Rp18.000.000,00 yang dipotong secara langsung dari Gaji Pensiunan yang bersangkutan.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

### 5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Berikut ini adalah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.6.1 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 126.144.212,00 | 388.650.982,18 | 308,10 | 2.021.009.936,46 |
| **Jumlah** | **126.144.212,00** | **388.650.982,18** | **308,10** | **2.021.009.936,46** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.632.358.954,28) atau -80,77%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 308,10% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.632.358.954,28) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan umumnya bersifat estimatif dan tidak dirancang sebagai sumber pendapatan rutin yang dipengaruhi oleh kejadian keterlambatan aktual dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun berjalan; dan
      2) Masih terdapat beberapa pekerjaan yang terlambat pada TA 2025, sehingga menimbulkan setoran denda dan menyebabkan capaian melampaui anggaran. Namun, secara jumlah dan/atau nilai denda yang timbul pada TA 2025 tercatat lebih kecil dibandingkan TA 2024, sehingga total realisasi tahun berjalan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Setoran berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia kepada Pemerintah Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berikut:
      1) Program Gizi Retinol (Vitamin A) PT Kimia Farma sebesar Rp13.111.575,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000252/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025 tanggal 7 November 2025, terjadi dikarenakan adanya kendala teknis di pihak penyedia, antara lain terkait kesiapan barang dan pengaturan distribusi, sehingga pengiriman barang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses pendistribusian barang; dan
      2) Belanja Obat *Buffer* Vitamin C sebesar Rp27.090,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000256/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025 tanggal 7 November 2025, terjadi dikarenakan terdapat kendala teknis pada penyedia yang mengakibatkan barang tidak dapat didistribusikan sesuai jadwal pelaksanaan.
   b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat 4 (empat) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berikut:
      1) Pemeliharaan ruas Jalan Provinsi Denpasar-Sanur sebesar Rp115.625.427,03 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000058/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 21 Maret 2025, terjadi dikarenakan adanya upacara keagamaan (*Dewa Yadnya*) pada Pura Jagatnatha yang berlangsung dengan pelaksanaan Denpasar Festival pada akhir tahun, sehingga pelaksanaan pemasangan *kerb* pracetak tipe L mengalami keterlambatan. Selain itu, faktor cuaca yang tidak mendukung turut berdampak pada keterlambatan pekerjaan pengaspalan pada segmen STA 0+000, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan;
      2) Pemeliharaan berkala pada ruas Jalan Provinsi SP. Kargo–SP. Imam Bonjol serta Jalan Udayana dan Jalan Hassanudin di Kota Denpasar sebesar Rp9.874.464,86 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000288/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 9 Desember 2025, dikarenakan adanya bencana alam berupa banjir yang berdampak pada kondisi

lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan perlu penjadwalan ulang, khususnya pekerjaan marka jalan. Selain itu, pasca banjir terdapat material endapan atau sedimentasi pada lokasi pekerjaan yang memerlukan pembersihan terlebih dahulu, sehingga pemasangan plat penutup baru dapat dilakukan setelah proses pembersihan selesai;

3) Pengembangan SPAM Regional Petanu Denpasar Selatan sebesar Rp27.597.860,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000267/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025 tanggal 29 Desember 2025, dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan; dan
4) Optimalisasi SPAM CV Bima Sakti sebesar Rp6.304.640,00 berdasarkan STS Nomor 51.00/42.0/000292/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 29 Desember 2025, dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan.

c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan bangunan gedung tempat kerja lainnya TA 2024 sebesar Rp924.785,49 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000067/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 26 Maret 2025, sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan tanggal batas waktu pelaksanaan dalam kontrak, sehingga batas waktu penyelesaian pekerjaan perlu disesuaikan dengan ketentuan kontrak sebagai dasar perhitungan denda;
d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berikut:
   1) Pengadaan pakaian dinas lapangan TA 2024 sebesar Rp209.100,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000071/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 10 April 2025, terjadi dikarenakan penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
   2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan PT Berawantangi sebesar Rp33.124.335,80 berdasarkan STS Nomor 51.00/42.0/000289/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 18 Desember 2025, dikarenakan adanya kendala ketersediaan tenaga kerja serta keterlambatan suplai material ke lokasi proyek, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu kontrak.
e. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, terdapat keterlambatan pekerjaan belanja modal bangunan gedung kantor (belanja kontruksi rehab kantor) sebesar Rp129.690.504,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000226/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/11/2025 tanggal 27 Oktober 2025, dikerjakan oleh CV Sinar Beliti dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dan hasil pekerjaan tersebut telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
f. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berkut:
   1) Pekerjaan tahap I konstruksi bangunan pendukung Turyapada Tower 2025 terdapat denda keterlambatan sebesar Rp10.384.900,00, dikarenakan kondisi cuaca tidak mendukung yang berdampak pada pembatasan jam kerja di lapangan serta menurunkan produktivitas pelaksanaan pekerjaan, sehingga realisasi penyelesaian tidak dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan; dan
   2) Pembangunan Fasilitas Umum (Fasum) Turyapada sebesar Rp10.384.900,00, dikarenakan gangguan cuaca yang menghambat kegiatan pelaksanaan, baik dari sisi pengaturan jam kerja maupun efektivitas tenaga kerja, sehingga target penyelesaian tidak tercapai sesuai ketentuan.
g. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek CV Putra Catur Dewata sebesar Rp31.391.400,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000290/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 18 Desember 2025, dikarenakan pihak penyedia jasa konstruksi tidak dapat memenuhi target waktu sebagaimana diatur dalam kontrak kerja dalam pelaksanaan pembangunan ruang rapat.

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

**5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.7.1 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 50.000.000.000,00 | 17.788.126.600,00 | 35,57 | 70.448.079.400,00 |
| Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 500.000.000,00 | 104.169.200,00 | 20,83 | 788.373.200,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan | 100.000,00 | 434.536,00 | 434,53 | 332.394,00 |
| **Jumlah** | **50.500.100.000,00** | **17.892.730.336,00** | **35,43** | **71.236.784.994,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp53.344.054.658,00) atau -74,88%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 35,57% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp52.659.952.800,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Perkembangan kebijakan pemungutan denda dan kepatuhan Wajib Pajak, di antaranya:
         a) Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) relatif bergantung pada keterlambatan pendaftaran atau pembayaran, sehingga ketika keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar PKB menurun, maka pendapatan denda PKB juga ikut menurun. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda 1% per bulan dari pokok PKB terutang (termasuk Opsen PKB terutang) untuk paling lama 24 bulan. Dalam hal ini, ketika terjadi pergeseran perilaku pembayaran menjadi lebih tepat waktu, maka potensi denda dapat menjadi lebih kecil; dan
         b) Kebijakan keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok PKB sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mendorong Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajiban (terutama saat memanfaatkan kebijakan keringanan atau pengurangan pokok), sehingga keterlambatan yang memicu denda berkurang dan penerimaan lebih banyak terhimpun ke PKB daripada denda PKB.
      2) Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi pelayanan, di antaranya:
         c) Terdapat penerapan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB melalui pendekatan edukatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi razia kendaraan di berbagai lokasi strategis untuk memastikan kepatuhan pembayaran PKB oleh pemilik kendaraan bermotor; dan
         d) Terdapat peningkatan standar pelayanan melalui strategi jemput bola atau penagihan langsung secara *door to door* kepada Wajib Pajak yang menunggak berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah. Melalui strategi tersebut, pelunasan kewajiban dapat berlangsung lebih cepat sehingga keterlambatan yang menjadi dasar pembentukan denda menjadi lebih terkendali, dan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya penerimaan Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada TA 2025.
   b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 20,83% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp684.204.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

1) Denda BBNKB terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila:
   a) Terjadi keterlambatan pendaftaran setelah penyerahan, di mana setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Dalam hal pendaftaran tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pokok BBNKB terutang dan Opsen BBNKB terutang. Dengan ketentuan tersebut, semakin tinggi ketepatan waktu pengurusan balik nama, maka basis pembentukan denda (keterlambatan pendaftaran) menjadi lebih kecil, sehingga penerimaan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) relatif menurun; dan
   b) Selain penyerahan, terdapat layanan administratif tertentu yang juga wajib didaftarkan tepat waktu. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan selesai dilaksanakan. Ketepatan waktu pada layanan ini turut memengaruhi terbentuknya denda BBNKB.
2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatur keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok BBNKB sebesar 24%. Kebijakan ini berpotensi mendorong Wajib Pajak untuk segera melakukan proses balik nama, sehingga keterlambatan pendaftaran yang menjadi dasar pengenaan denda menjadi lebih kecil.

c. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 434,53% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin meningkatnya pemanfaatan air permukaan dengan semakin berkembangnya pemanfaatan air permukaan untuk sarana pariwisata.

2. Pengenaan Pendapatan Denda Pajak Daerah didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

#### 5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.8.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 2.773.340,00 | 20.093.596,04 | 724,52 | 22.265.708,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 0,00 | 339.550,00 | 0,00 | 1.000.700,00 |
| **Jumlah** | **2.773.340,00** | **20.433.146,04** | **736,77** | **23.266.408,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.833.261,96) atau -12,18%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 724,52% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerimaan denda pada dasarnya bersifat tidak pasti dan tidak direncanakan sebagai sumber utama. Dalam hal ini, nilai denda yang lebih rendah dapat mencerminkan kepatuhan pembayaran sewa atau kontrak yang cenderung lebih baik. Penerimaan ini berasal dari realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah berupa denda sewa kantin, denda sewa rumah dinas, dan denda sewa parkir, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp11.176.920,00;

2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebesar Rp5.000,00;
3) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebesar Rp10.800,00;
4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebesar Rp16.800,00;
5) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebesar Rp2.400,00;
6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp25.380,00;
7) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp69.120,00;
8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebesar Rp52.800,00;
9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebesar Rp67.500,00;
10) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana sebesar Rp12.750,00; dan
11) UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp8.654.126,04.

b. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp661.150,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali terdapat Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada TA 2025 yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan bahwa pengenaan denda dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, yaitu sebesar 1 (satu) Dolar Amerika Serikat per hari yang dikonversikan ke dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

2. Pengenaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

#### 5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian

Berikut ini adalah Pendapatan dari Pengembalian yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.9.1 Rincian Pendapatan dari Pengembalian**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 1.633.548.454,00 | 0,00 | 613.334,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 0,00 | 325.387.871,04 | 0,00 | 42.848.164,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang | 0,00 | 33.478.481,00 | 0,00 | 2.976.200,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa | 0,00 | 42.692.500,00 | 0,00 | 6.075.000,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 907.585.412,65 | 0,00 | 324.752.080,16 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0,00 | 34.473.585,00 | 0,00 | 18.262.522,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| kepada Badan Usaha Milik Swasta | | | | |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 94.996.528.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 0,00 | 93.915.519.097,93 | 0,00 | 23.773.198,96 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung | 0,00 | 309.678.691,16 | 0,00 | 217.921.489,15 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan | 0,00 | 316.697.652,55 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.982.914,52 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 0,00 | 55.857.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 0,00 | 101.385.000,00 | 0,00 | 37.500.000,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 0,00 | 4.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **94.996.528.409,00** | **97.680.108.411,33** | **102,82** | **697.704.902,79** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp96.982.403.508,54 atau 13.900,20%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.632.935.120,00 pada TA 2025, yang berasal dari:
      1) Pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp598.835.954,00, antara lain berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas acara pertemuan tahunan BI Tahun 2024 dan pengembalian perjalanan dinas biasa bulan November sampai dengan Desember 2024 dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali; dan
      2) Pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp1.034.712.500,00, antara lain berasal dari pengembalian uang harian perjalanan dinas luar negeri TA 2024 dari beberapa perangkat daerah di antaranya Dinas Perhubungan.

Tidak terdapat anggaran pada rekening ini dikarenakan pengembalian kelebihan pembayaran bersifat tidak dapat diprediksi;

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp282.539.707,04 pada TA 2025 dipengaruhi salah satunya oleh pengembalian sisa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) SMA/SMK jenjang TA 2019 sampai dengan TA 2022 se-Bali sebesar Rp2.336.508.130,00 yang masuk melalui rekening ini (sebagai rekening titipan dikarenakan tidak tersedianya rekening lain yang sesuai pada SIPD), serta pengembalian SILPA dana BOS SMKN 2 Negara dan pengembalian gaji guru honorer yang tidak memiliki SK dari beberapa sekolah. Tidak terdapat anggaran pada rekening ini dikarenakan pengembalian bersifat insidental dari hasil pengawasan dan rekonsiliasi dana BOS oleh OPD terkait;
c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp30.502.281,00 pada TA 2025 bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja paket tanaman hias TA 2024 Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali sebesar Rp27.456.181,00 serta pengembalian kelebihan pembayaran belanja bahan kimia sebesar Rp4.966.300,00, dan pengembalian belanja bahan bakar minyak pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali TA 2024 sebesar Rp1.056.000,00;
d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp36.617.500,00 pada TA 2025 bersumber dari pengembalian kelebihan sewa mess Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) TA 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan pengembalian dana Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) Tahun 2024 sebesar Rp33.687.500,00, pengembalian honorarium narasumber dari beberapa perangkat daerah sebesar Rp5.040.000,00, serta pengembalian jasa juri perlombaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali TA 2024 sebesar Rp2.385.000,00 dan pengembalian belanja jasa lainnya;
e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp582.833.332,49 pada TA 2025 yang dipengaruhi oleh pengembalian kelebihan pembayaran Tower Turyapada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebesar Rp549.088.098,00 dan pengembalian kekurangan volume bangunan gedung RSUD Bali Mandara sebesar Rp189.453.868,00. Selain itu, terdapat pengembalian dari temuan BPK atas pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung kantor BPBD TA 2024 sebesar Rp25.571.500,00 serta pengembalian kelebihan pembayaran pemeliharaan gedung kantor dari perangkat daerah lainnya;
f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp16.211.063,00 pada TA 2025 yang seluruhnya berasal dari satu transaksi pengembalian belanja jasa layanan angkutan Trans Sarbagita/Angkutan Umum pada TA 2024;
g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta tidak terealisasi pada TA 2025, sehingga mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp5.000.000,00 dikarenakan tidak terdapat pengembalian subsidi dari Badan Usaha Milik Swasta pada tahun berjalan;
h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp94.996.528.409,00. Namun, belanja tersebut tidak terealisasi pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengembalian sisa dana hibah tersebut dicatat pada rekening Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (sebagaimana dijelaskan pada huruf i di bawah) yang merupakan Pengembalian Hibah dalam rangka pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp93.915.519.097,93 merupakan komponen terbesar dalam kelompok Pendapatan dari Pengembalian TA 2025. Nilai ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) transaksi pengembalian sisa dana hibah Pemilukada TA 2024, di antaranya:
    1) Pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali TA 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sebesar Rp80.279.271.888,00;

2) Pengembalian sisa dana hibah pengawasan Pemilihan Gubernur dari Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp10.974.051.072,00;
3) Pengembalian dana hibah pengamanan Pemilukada TA 2024 dari Polda Bali sebesar Rp2.584.937.932,00; dan
4) Sisa sebesar Rp77.258.137,93 berasal dari pengembalian sisa dana hibah berbagai badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta desa adat penerima hibah TA 2024;

j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp3.800.000,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran umum RSJ TA 2024;
k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp309.678.691,16 bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran kepada CV Waskita Karya Utama atas pekerjaan gedung SMAN 3 Negara TA 2024 sebesar Rp145.510.280,00, pengembalian kekurangan volume pekerjaan USB SMKN 1 Banjar TA 2024 sebesar Rp139.498.512,00, serta pengembalian kelebihan volume pekerjaan bangunan gedung pendidikan (DAK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali dan pengembalian dari perangkat daerah lainnya termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan dengan realisasi baru sebesar Rp316.697.652,55 pada TA 2025 seluruhnya bersumber dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan ruas jalan provinsi TA 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, antara lain ruas jalan Denpasar–Perang sebesar Rp86.462.758,00, ruas jalan Denpasar–Sanur sebesar Rp75.537.179,00, ruas jalan Tegaltamu–Payangan–Baturanyar Bangli sebesar Rp69.688.833,00, ruas jalan SP Penelokan–Bts Buleleng sebesar Rp43.398.973,00, dan ruas jalan Tegaltamu–Payangan sebesar Rp41.609.910,00:
m. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi memiliki persentase dengan penurunan signifikan sebesar (Rp17.982.914,52) pada TA 2025, tidak terdapat pengembalian pada jenis belanja dimaksud di tahun berjalan;
n. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan realisasi baru sebesar Rp55.857.000,00 pada TA 2025 seluruhnya berasal dari satu transaksi pengembalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pengendalian Penduduk Pendatang TA 2024 dari Kota Denpasar;
o. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan kenaikan signifikan sebesar Rp63.885.000,00 pada TA 2025 bersumber dari pengembalian sisa dana BKK oleh berbagai desa penerima, dengan transaksi terbesar berupa pengembalian BKK Desa Adat Tista melalui Kejaksaan Negeri Buleleng sebesar Rp37.500.000,00, diikuti pengembalian BKK Tambahan Penghasilan Perbekel (TPP) dari Desa Peliatan sebesar Rp20.400.000,00 dan Desa Kekeran sebesar Rp17.700.000,00, serta pengembalian sisa BKK dari desa-desa lainnya; dan
p. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP belum optimal dengan realisasi baru sebesar Rp4.666,00 pada TA 2025.

### 5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD

Berikut ini adalah Pendapatan BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.10.1 Rincian Pendapatan BLUD**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 64.183.650.000,00 | 57.993.630.323,00 | 90,35 | 59.434.976.862,17 |
| Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 1.200.000.000,00 | 1.193.407.472,00 | 99,45 | 1.215.081.560,00 |
| Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 25.808.385.624,00 | 23.492.896.204,49 | 91,02 | 2.421.812.955,89 |
| **Jumlah** | **91.192.035.624,00** | **82.679.933.999,49** | **90,66** | **63.071.871.378,06** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan BLUD TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp19.608.062.621,43 atau 31,09%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 90,35% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadinya penyesuaian jumlah kegiatan pelatihan, pemanfaatan fasilitas, atau kunjungan dan penggunaan layanan pada masing-masing BLUD, sehingga penerimaan yang diperoleh menjadi relatif lebih rendah, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:
      1) Pada UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM), penerimaan sebesar Rp21.080.074.500,00 berasal dari peningkatan okupansi fasilitas pendukung berupa aula, ruang belajar, ruang makan, kamar/VIP, ruang CAT/simulasi, CCTV, dan laboratorium yang disewakan kepada kabupaten/kota, lembaga/kampus, dan pihak swasta dengan 8.992 peserta pelatihan dan uji sertifikasi, yang bersumber dari kegiatan diklat, pelatihan kepemimpinan (PKN II, PKA, PKP), Latsar CPNS, pelatihan teknis/kompetensi PBJP, uji sertifikasi, orientasi PPPK, serta bimbingan teknis pendalaman tugas anggota DPRD;
      2) Pada UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM), penerimaan sebesar Rp32.662.398.001,00 berasal dari pendapatan operasional layanan air minum, antara lain penerimaan dari penjualan atau penyaluran air kepada pelanggan, biaya layanan sambungan atau pemasangan baru, pemeliharaan dan penggantian atau perbaikan instalasi atau meter, serta penerimaan lain yang terkait dengan jasa pelayanan air minum;
      3) Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, penerimaan sebesar Rp3.221.661.635,00 berasal dari penyelenggaraan layanan pelatihan dan peningkatan kompetensi, termasuk penerimaan dari paket pelatihan atau bimtek, penggunaan sarana prasarana pelatihan (kelas, asrama, dan fasilitas penunjang), serta layanan lain yang terkait dengan program pelatihan kesehatan dan masyarakat; dan
      4) Pada Rumah Sakit Jiwa, penerimaan sebesar Rp1.029.496.187,00 berasal dari jasa layanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap, termasuk layanan penunjang medis dan penerimaan lain yang terkait dengan pelayanan rumah sakit.
   b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 99,45% pada TA 2025. Penerimaan ini berasal dari RSUD Bali Mandara, penerimaan sebesar Rp1.193.407.472,00. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat optimalisasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain yang berjalan lebih intensif, baik dari sisi jumlah kegiatan maupun pemanfaatan fasilitas atau layanan rumah sakit, sehingga penerimaan yang diperoleh melampaui target. Penerimaan ini bersumber dari kerja sama pemanfaatan layanan parkir, penyelenggaraan studi banding, kegiatan penelitian, program magang atau praktik kerja, serta pelaksanaan *workshop*; dan
   c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 91,02% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp21.071.083.248,60. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan penerimaan yang bersumber dari beberapa komponen, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.10.1.1 Rincian Pendapatan BLUD Menurut Perangkat Daerah**

| Perangkat Daerah / BLUD | Jasa Giro | Bunga | Komisi | Pengembangan Usaha |
|---|---|---|---|---|
| **Dinas Kesehatan Provinsi Bali** | | | | |
| Rumah Sakit Jiwa | 278.106.142,46 | - | - | - |
| Rumah Sakit Mata Bali Mandara | 241.425.753,07 | 632.973.744,26 | - | 429.436.450,00 |
| RSUD Bali Mandara | 237.129.841,05 | - | 3.919.446,00 | - |
| RSU Dharma Yadnya | 5.533.752,90 | 8.765.039,07 | - | 20.827.502.505,86 |
| UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat | 55.272.162,55 | - | - | - |

| Perangkat Daerah / BLUD | Jasa Giro | Bunga | Komisi | Pengembangan Usaha |
|---|---|---|---|---|
| UPTD Balai Laboratorium Kesehatan *Kerthi* Bali *Sadhajiwa* | 140.366.862,04 | - | - | 33.190.000,00 |
| **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali** | | | | |
| UPTD Pengelolaan Air Limbah (PAL) | 302.087.993,17 | - | - | - |
| UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM) | 94.842.004,18 | - | - | - |
| **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali** | | | | |
| UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | 202.344.507,88 | - | - | - |
| **Jumlah** | **1.557.109.019,30** | **641.738.783,33** | **3.919.446,00** | **21.290.128.955,86** |

Pada Rumah Sakit Dharma Yadnya yang belum menetapkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tarif Pelayanan Kesehatan, seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan TA 2025 dicatat sebagai Pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.10.1.1.1 Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya**

| Uraian | Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan | 23.827.919.062,00 | 20.535.235.500,00 | 86,18 |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas | - | - | - |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | - | 221.665.564,00 | - |
| Pendapatan Hibah | - | - | - |
| Pendapatan Lainnya | 36.966.562,00 | 84.900.233,97 | 229,67 |
| **Jumlah** | **23.864.885.624,00** | **20.841.801.297,97** | **87,33** |

2. Pengenaan Pendapatan BLUD didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;
   d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
   e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2025 tentang Detail Rincian Objek Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

### 5.1.1.1.4.11 Pungutan bagi Wisatawan Asing

Berikut ini adalah Pungutan bagi Wisatawan Asing yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.11.1 Rincian Pungutan bagi Wisatawan Asing**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pungutan bagi Wisatawan Asing | 500.000.000.000,00 | 369.021.750.000,00 | 73,80 | 317.880.000.000,00 |
| **Jumlah** | **500.000.000.000,00** | **369.021.750.000,00** | **73,80** | **317.880.000.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp51.141.750.000,00 atau 16,09%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pungutan bagi Wisatawan Asing memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,80% dengan realisasi sebesar Rp369.021.750.000,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Pemahaman dan kesadaran wisatawan asing untuk membayar *tourist levy* umumnya masih beragam, di mana sebagian wisatawan asing kemungkinan belum memperoleh informasi yang cukup sejak awal perjalanan, sehingga kesediaan untuk melakukan pembayaran belum merata;
      2) Dukungan operasional, termasuk penambahan tenaga tim *checker* atau penjaga operator, baru terlaksana pada November 2025, sehingga dampaknya terhadap peningkatan cakupan verifikasi dan pendampingan pembayaran belum sepenuhnya tercermin sepanjang TA 2025; dan
      3) Pelaksanaan kerja sama dengan penyedia akomodasi pariwisata masih belum merata atau menyeluruh, sehingga kanal fasilitasi pembayaran dan verifikasi belum menjangkau seluruh wisatawan asing.

      Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp51.141.750.000,00 atau 16,09%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat strategi pemungutan wisatawan asing yang lebih baik untuk menjaring lebih banyak wisatawan asing yang membayar pungutan ke Provinsi Bali sebagai berikut:
         a) Sebagai tindak lanjut atas evaluasi penyelenggaraan Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2024, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan:
            (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, yang memperluas ruang lingkup pengaturan dengan memasukkan aspek kerja sama dan imbalan jasa. Ketentuan ini membuka peluang pelaksanaan pungutan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagai *collecting agent*, mitra manfaat, atau *endpoint* yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama; dan
            (2) Keterlibatan pelaku usaha pariwisata yang bekerja sama dalam fasilitasi pengumpulan pungutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing, termasuk pengaturan pemberian imbalan jasa sebesar 3% atas pungutan yang difasilitasi oleh mitra manfaat dan *endpoint*, yang pada praktiknya dapat meningkatkan insentif serta kepatuhan mitra dalam mendukung penyampaian informasi dan fasilitasi pembayaran.
         b) Dilakukan perluasan titik layanan serta penguatan mekanisme pelayanan di area kedatangan internasional sehingga proses pemberian informasi awal, pengecekan bukti bayar, dan pendampingan transaksi dapat dilaksanakan pada lebih banyak titik dan rentang waktu layanan, yang berdampak pada meningkatnya peluang wisatawan asing untuk menyelesaikan pembayaran sejak awal kedatangan; dan
         c) Dimulainya pengoperasian dukungan personel tambahan pada bulan November 2025 turut menambah kapasitas layanan, sehingga mendukung kelancaran pelayanan dan berkontribusi pada peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.
      2) Terdapat peningkatan pada aspek dukungan sistem dan layanan pembayaran, antara lain:
         a) Penguatan tata cara pembayaran melalui pemanfaatan sistem Love Bali sebagai saluran pembayaran turut mendukung kemudahan akses transaksi, sehingga proses pembayaran bagi wisatawan asing terdokumentasi dengan lebih baik; dan
         b) Perluasan kerja sama dengan bank persepsi dalam rangka penyediaan alternatif kanal pembayaran *tourist levy* bagi wisatawan asing, sehingga pilihan metode pembayaran

menjadi lebih beragam dan memudahkan wisatawan menyesuaikan dengan preferensi transaksi yang digunakan.

b. Penerimaan Pungutan bagi Wisatawan Asing menurut bulan dan jumlah pelimpahan pada TA 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.11.1.1 Rincian Pungutan bagi Wisatawan Asing Menurut Tanggal dan Jumlah Pelimpahan**

| No. | Tanggal Pelimpahan | Jumlah Pelimpahan |
|---|---|---|
| 1 | 2 Januari - 31 Januari 2025 | 21.670.200.000,00 |
| 2 | 3 Februari - 28 Februari 2025 | 20.601.750.000,00 |
| 3 | 3 Maret - 27 Maret 2025 | 21.735.300.000,00 |
| 4 | 8 April - 30 April 2025 | 35.353.950.000,00 |
| 5 | 2 Mei - 28 Mei 2025 | 28.831.050.000,00 |
| 6 | 21 Mei 2025 | 130.350.000,00 |
| 7 | 2 Mei - 30 Juni 2025 | 39.812.400.000,00 |
| 8 | 1 Juli - 31 Juli 2025 | 42.045.750.000,00 |
| 9 | 1 Agustus - 29 Agustus 2025 | 37.806.600.000,00 |
| 10 | 1 September - 30 September 2025 | 39.121.500.000,00 |
| 11 | 1 Oktober - 31 Oktober 2025 | 32.000.400.000,00 |
| 12 | 3 November - 28 November 2025 | 2.1601.350.000,00 |
| 13 | 18 Desember 2025 | 4.350.000,00 |
| 14 | 1 Desember - 31 Desember 2025 | 28.306.800.000,00 |
| | **Jumlah** | **369.021.750.000,00** |

2. Pengenaan Pungutan bagi Wisatawan Asing didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

### 5.1.1.1.4.12 Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.12.1 Rincian Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 85.577.461,00 | 0,00 | 0,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| **Jumlah** | **0,00** | **85.577.461,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp85.577.461,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Pajak Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar Rp85.577.461,00 pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat keterlambatan pembayaran PBBKB Bahan Bakar Solar pada Masa Pajak Bulan Januari 2025, sehubungan dengan pembayaran tersebut belum terkonfigurasi ke dalam sistem ERM Modul Pajak, sehingga proses pemenuhan kewajiban pajak mengalami keterlambatan dan menimbulkan pengenaan denda.
2. Pengenaan Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

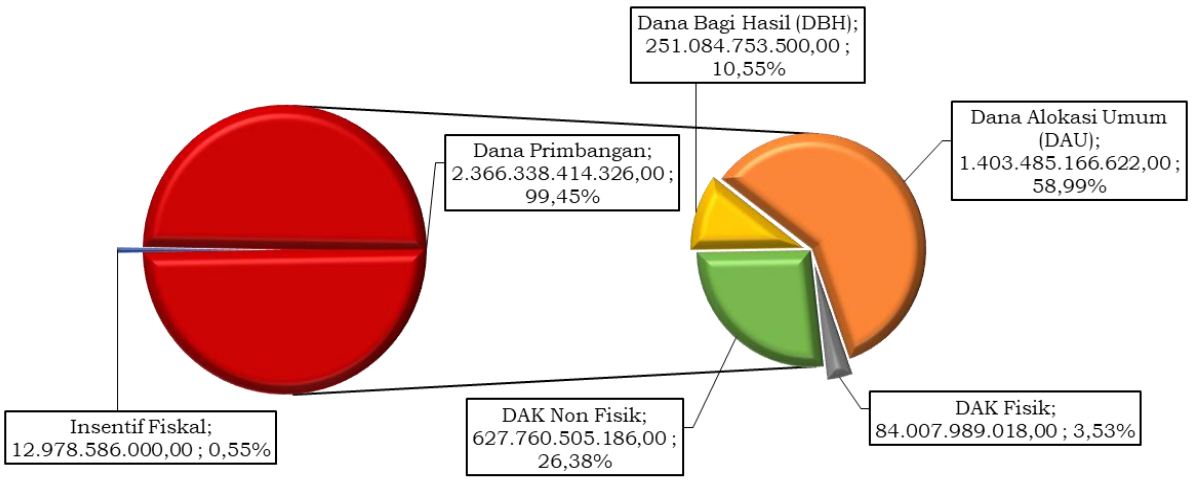
### 5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1 Rincian Pendapatan Transfer**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.403.777.640.000,00 | 2.379.317.000.326,00 | 98,98 | 2.283.418.060.237,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34.825.690.369,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **2.438.603.330.369,00** | **2.414.142.690.695,00** | **98,99** | **2.283.418.060.237,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp130.724.630.458,00 atau 5,72%. Komposisi realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.4.




**Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Dana Perimbangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.260.706.237,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) | 244.948.196.000,00 | 251.084.753.500,00 | 102,50 | 0,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.401.748.162.000,00 | 1.403.485.166.622,00 | 100,12 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 744.102.696.000,00 | 711.768.494.204,00 | 95,65 | 0,00 |
| Insentif Fiskal | 12.978.586.000,00 | 12.978.586.000,00 | 100,00 | 23.157.354.000,00 |
| **Jumlah** | **2.403.777.640.000,00** | **2.379.317.000.326,00** | **98,98** | **2.283.418.060.237,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp95.898.940.089,00 atau 4,20%.

##### 5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Berikut ini adalah Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.1.1 Rincian Dana Perimbangan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.545.491.110,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.677.271.075,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.240.500.926,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.797.443.126,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.260.260.706.237,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Perimbangan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.260.260.706.237,00) atau -100,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap struktur Bagan Akun Standar (BAS), diketahui telah terjadi perubahan nomenklatur akun pada kelompok Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Daerah Provinsi. Perubahan tersebut merupakan implikasi dari penerapan standar klasifikasi dan kodefikasi akun keuangan daerah sebagaimana diatur dalam regulasi Pemerintah;
2. Perubahan tersebut meliputi reklasifikasi akun dari kelompok pendapatan lama ke dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan penyesuaian struktur kode akun dan nomenklatur sesuai standar BAS terbaru yang bertujuan untuk menjamin konsistensi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan pendapatan transfer pusat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
3. Perbedaan nomenklatur akun antara periode sebelum dan sesudah penyesuaian BAS bukan merupakan kesalahan pencatatan, melainkan merupakan akibat langsung dari perubahan kebijakan klasifikasi akun sesuai regulasi yang berlaku.

###### 5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Berikut ini adalah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.1.1.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727.208.000,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.347.552.000,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.637.455.000,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.422.110,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.000,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.545.491.110,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp190.545.491.110,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 disajikan pada:

1. **DBH Pajak *Poin 5.1.1.2.1.2.1***; dan
2. **DBH Sumber Daya Alam *Poin 5.1.1.2.1.2.2***.

### 5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Berikut ini adalah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.1.2.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.810.466.000,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.549.360.075,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.853.643.000,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.463.802.000,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.367.677.271.075,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.367.677.271.075,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 disajikan pada:

1. **DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya *Poin 5.1.1.2.1.3.1***; dan
2. **DAU yang Ditentukan Penggunaannya *Poin 5.1.1.2.1.3.2***.

### 5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Berikut ini adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.1.3.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877.975.100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.394.505.247,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.023.469,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.095.838.636,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.293.067.738,00 |
| DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.007.204.150,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.123.353.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.533.586,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.240.500.926,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp87.240.500.926,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 disajikan pada **DAK Fisik *Poin 5.1.1.2.1.4.1***.

### 5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Berikut ini adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.1.4.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Non Fisik-BOS Reguler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.752.312.593,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638.750.000,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.031.199.000,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.750.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727.225.999,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.778.106,00 |
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.945.000,00 |
| DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.021.450,00 |
| DAK Non Fisik-PK2UMK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458.820.306,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752.640.672,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **614.797.443.126,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp614.797.443.126,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 disajikan pada **DAK Non Fisik *Poin 5.1.1.2.1.4.2***.

### 5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Berikut ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.2.1 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DBH Pajak | 244.945.208.000,00 | 251.058.696.500,00 | 102,49 | 0,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 2.988.000,00 | 26.057.000,00 | 872,05 | 0,00 |
| **Jumlah** | **244.948.196.000,00** | **251.084.753.500,00** | **102,50** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp251.084.753.500,00 atau 0,00%.

### 5.1.1.2.1.2.1 DBH Pajak

Berikut ini adalah DBH Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.2.1.1 Rincian DBH Pajak**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DBH PBB | 1.428.472.000,00 | 1.367.044.800,00 | 95,69 | 0,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 226.939.104.000,00 | 231.273.570.600,00 | 101,90 | 0,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 15.779.569.000,00 | 17.565.604.100,00 | 111,31 | 0,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 798.063.000,00 | 852.477.000,00 | 106,81 | 0,00 |
| **Jumlah** | **244.945.208.000,00** | **251.058.696.500,00** | **102,49** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan DBH Pajak TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp251.058.696.500,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DBH Pajak TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DBH PBB dengan realisasi baru sebesar Rp1.367.044.800,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH PBB pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.727.208.000,00, realisasi DBH PBB TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp360.163.200,00 atau 20,85%;
      2) Realisasi DBH PBB TA 2025 sebesar Rp1.367.044.800,00 tidak mencapai pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.428.472.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp61.427.200,00. Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali tersebut terdiri dari:
         a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1.285.624.800,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp142.847.200,00 untuk periode Februari dan Desember, Rp214.270.800,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp285.694.400,00 untuk periode Agustus dan Oktober;
         b) Penyaluran Kurang Bayar s.d. TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp47.525.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025;
         c) Pencairan Pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2024 sebesar Rp33.895.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH PBB yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024.

3) Tidak tercapainya pagu disebabkan Pemerintah Pusat melakukan penyaluran DBH PBB berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun berjalan yang lebih rendah dari prognosa yang menjadi dasar penetapan pagu, di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH PBB yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp666.662.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp62.868.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp603.794.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp47.525.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp619.137.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

b. DBH PPh Pasal 21 dengan realisasi baru sebesar Rp231.273.570.600,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH PPh Pasal 21 pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp174.347.552.000,00, realisasi DBH PPh Pasal 21 TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp56.926.018.600,00 atau 32,65%;
   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp231.273.570.600,00 terdiri dari:
      a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp210.605.274.600,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp22.693.910.400,00 untuk periode Februari dan Desember, Rp34.040.865.600,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp45.387.820.800,00 untuk periode Agustus dan Oktober;
      b) Penyaluran Kurang Bayar s.d. TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp20.668.296.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan
      c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp6.360.081.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebagai pencairan atas penempatan DBH PPh Pasal 21 yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024.
   3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran karena adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp157.816.257.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp27.341.028.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp130.475.229.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp20.668.296.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp137.147.961.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dengan realisasi baru sebesar Rp17.565.604.100,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp13.637.455.000,00, realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.928.149.100,00 atau 28,80%;

2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp17.565.604.100,00 terdiri dari:
   a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp15.601.993.100,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp1.577.956.900,00 untuk periode Februari dan Desember, Rp2.366.935.350,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp3.155.913.800,00 untuk periode Agustus dan Oktober;
   b) Penyaluran Kurang Bayar s.d. TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp1.963.611.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan
   c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp1.400.381.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024.

3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran karena adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp21.313.495.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp2.597.560.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp18.715.935.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp1.963.611.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp19.349.884.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,81% dengan realisasi baru sebesar Rp852.477.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH CHT pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp831.422.110,00, realisasi DBH CHT TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.054.890,00 atau 2,53%;
   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp852.477.000,00 terdiri dari penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp798.063.000,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp79.806.300,00 untuk periode Februari, Rp119.709.450,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp159.612.600,00 untuk periode Agustus, Oktober, dan Desember, serta penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp54.414.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025. Tidak terdapat komponen pencairan Pokok TDF pada DBH CHT TA 2025 dikarenakan tidak terdapat saldo TDF DBH CHT pada TA 2024 yang ditempatkan di rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali; dan
   3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran dikarenakan adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH CHT yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp302.145.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp71.981.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp230.164.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp54.414.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa

Kurang Bayar sebesar Rp247.731.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

#### 5.1.1.2.1.2.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Berikut ini adalah DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.2.2.1 Rincian DBH Sumber Daya Alam (SDA)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent | 1.612.000,00 | 3.545.000,00 | 219,91 | 0,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 690.000,00 | 16.946.000,00 | 2.455,94 | 0,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) | 0,00 | 5.566.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **2.988.000,00** | **26.057.000,00** | **872,05** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp26.057.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 219,91% dengan realisasi baru sebesar Rp3.545.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.854.000,00, realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.691.000,00 atau 91,21%;
      2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp3.545.000,00 terdiri dari:
         a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1.612.000,00;
         b) Penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp1.128.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan
         c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp805.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024;
      d) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran karena adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp1.699.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp1.492.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp207.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp1.128.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar

Rp571.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

b. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 2.455,94% dengan realisasi baru sebesar Rp16.946.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH SDA Kehutanan-PSDH pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Tidak terdapat realisasi pada kode rekening sebelumnya di TA 2024 sehingga seluruh realisasi TA 2025 merupakan penerimaan baru;
   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp16.946.000,00 terdiri dari:
      a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp690.000,00;
      b) Penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp9.489.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025;
      c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp6.767.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH SDA Kehutanan-PSDH yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024;
   3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran dikarenakan adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan-PSDH yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp20.062.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp12.552.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp7.510.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp9.489.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp10.573.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

c. DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp5.566.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH SDA Kehutanan-IIUPH pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Tidak terdapat anggaran maupun realisasi pada kode rekening sebelumnya di TA 2024 sehingga seluruh realisasi TA 2025 merupakan penerimaan baru;
   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp5.566.000,00 terdiri dari:
      a) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp2.317.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH SDA Kehutanan-IIUPH yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024; dan
      b) Penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp3.249.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025;
   3) Persentase capaian tercatat 0,00% dikarenakan tidak terdapat anggaran yang ditetapkan pada rekening ini, namun demikian terdapat realisasi penerimaan dari komponen TDF dan Kurang Bayar sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana

Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan-IIUPH yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp4.298.000,00, yang seluruhnya merupakan sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp3.249.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp1.049.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

d. DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat realisasi DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) pada TA 2025 meskipun telah dianggarkan sebesar Rp686.000,00. Tidak terdapat realisasi pada kode rekening sebelumnya di TA 2024 maupun komponen TDF yang ditempatkan atas DBH SDA Kehutanan-DR, sehingga seluruh penyebab tidak terealisasinya anggaran bersumber dari belum adanya penyaluran oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa terdapat Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan-DR yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp762.000,00 yang seluruhnya merupakan Kurang Bayar TA 2024. Pemerintah Pusat tidak menyalurkan DBH SDA Kehutanan-DR pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga seluruh saldo Kurang Bayar sebesar Rp762.000,00 tersebut merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berikut ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.3.1 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 1.226.822.935.000,00 | 1.226.100.162.762,00 | 99,94 | 0,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 174.925.227.000,00 | 177.385.003.860,00 | 101,40 | 0,00 |
| **Jumlah** | **1.401.748.162.000,00** | **1.403.485.166.622,00** | **100,12** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.403.485.166.622,00 atau 0,00%.

#### 5.1.1.2.1.3.1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Berikut ini adalah DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.3.1.1 Rincian DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAU | 1.226.822.935.000,00 | 1.226.100.162.762,00 | 99,94 | 0,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| **Jumlah** | **1.226.822.935.000,00** | **1.226.100.162.762,00** | **99,94** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.226.100.162.762,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DAU dengan realisasi baru sebesar Rp1.226.100.162.762,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.278.810.466.000,00, realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.710.303.238,00 atau -4,12%. Penurunan tersebut merupakan dampak dari penyesuaian besaran alokasi DAU Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp1.226.100.162.762,00 tidak mencapai anggaran sebesar Rp1.226.822.935.000,00 dengan selisih sebesar Rp722.772.238,00 atau 0,06%. Hal ini dikarenakan penyesuaian dalam mekanisme penyaluran DAU oleh Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan realisasi penerimaan negara sepanjang tahun anggaran berjalan.

#### 5.1.1.2.1.3.2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Berikut ini adalah DAU yang Ditentukan Penggunaannya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.3.2.1 Rincian DAU yang Ditentukan Penggunaannya**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 91.327.186.000,00 | 93.786.962.860,00 | 102,69 | 0,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 83.598.041.000,00 | 83.598.041.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **174.925.227.000,00** | **177.385.003.860,00** | **101,40** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp177.385.003.860,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan realisasi baru sebesar Rp93.786.962.860,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp68.549.360.075,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp25.237.602.785,00 atau 36,82%. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah PPPK yang telah diangkat dan aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran sebesar Rp91.327.186.000,00 dengan selisih lebih sebesar Rp2.459.776.860,00 atau 2,69%. Kelebihan realisasi tersebut disebabkan adanya penyaluran tambahan dari Pemerintah Pusat yang memperhitungkan kebutuhan riil

pembayaran gaji PPPK daerah sepanjang tahun anggaran berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

2. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dengan realisasi baru sebesar Rp83.598.041.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp7.853.643.000,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp75.744.398.000,00 atau 964,45%. Peningkatan yang signifikan tersebut mencerminkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam memperluas cakupan dan meningkatkan besaran alokasi DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp83.598.041.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran, mencerminkan penyerapan yang optimal sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berikut ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.4.1 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Fisik | 90.134.667.000,00 | 84.007.989.018,00 | 93,20 | 0,00 |
| DAK Non Fisik | 653.968.029.000,00 | 627.760.505.186,00 | 95,99 | 0,00 |
| **Jumlah** | **744.102.696.000,00** | **711.768.494.204,00** | **95,65** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp711.768.494.204,00.

#### 5.1.1.2.1.4.1 DAK Fisik

Berikut ini adalah DAK Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.4.1.1 Rincian DAK Fisik**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | 395.186.000,00 | 394.381.253,00 | 99,79 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK | 47.705.577.000,00 | 47.564.269.965,00 | 99,70 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 0,00 | 15.638.212.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan | 18.128.137.000,00 | 16.387.013.262,00 | 90,39 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar | 19.773.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak | 4.132.019.000,00 | 4.024.112.038,00 | 97,38 | 0,00 |
| **Jumlah** | **90.134.667.000,00** | **84.007.989.018,00** | **93,20** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAK Fisik TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp84.007.989.018,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAK Fisik TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA dengan realisasi baru sebesar Rp394.381.253,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp16.877.975.100,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.483.593.847,00 atau -97,68%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp394.381.253,00 mencapai 99,79% dari anggaran sebesar Rp395.186.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan.
   b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK dengan realisasi baru sebesar Rp47.564.269.965,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp30.394.505.247,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp17.169.764.718,00 atau 56,49%. Peningkatan tersebut mencerminkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMK untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp47.564.269.965,00 mencapai 99,70% dari anggaran sebesar Rp47.705.577.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan.
   c. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp15.638.212.500,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler berdasarkan kode rekening sebelumnya, sehingga realisasi TA 2025 sebesar Rp15.638.212.500,00 merupakan penerimaan perdana atas alokasi DAK Fisik bidang tersebut; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp15.638.212.500,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dikarenakan terdapat penyaluran DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler oleh Pemerintah Pusat yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya disalurkan, sementara alokasi DAK Fisik-Bidang Air Minum untuk TA 2025 dialokasikan pada sub-bidang Layanan Dasar sebesar Rp19.773.748.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
   d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan dengan realisasi baru sebesar Rp16.387.013.262,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan gabungan realisasi TA 2024 pada kode rekening sebelumnya yang mencakup DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp5.000.023.469,00 dan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp4.123.353.000,00 dengan total sebesar Rp9.123.376.469,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.263.636.793,00 atau 79,62%. Peningkatan tersebut mencerminkan penguatan alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp16.387.013.262,00 mencapai 90,39% dari anggaran sebesar Rp18.128.137.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp1.741.123.738,00 atau 9,60%. Belum

optimalnya penyerapan tersebut disebabkan oleh kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan sehingga sebagian kegiatan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

e. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar berdasarkan kode rekening sebelumnya; dan
   2) Realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar TA 2025 menunjukkan nilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp19.773.748.000,00. Tidak terdapat realisasi pada bidang ini dikarenakan penyaluran DAK Fisik-Bidang Air Minum oleh Pemerintah Pusat pada TA 2025 seluruhnya tersalurkan melalui kode rekening DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp15.638.212.500,00 yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya, sehingga penyaluran atas alokasi Layanan Dasar TA 2025 belum dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

f. DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak dengan realisasi baru sebesar Rp4.024.112.038,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kode rekening sebelumnya, sehingga realisasi TA 2025 sebesar Rp4.024.112.038,00 merupakan penerimaan perdana atas alokasi DAK Fisik bidang tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp4.024.112.038,00 mencapai 97,38% dari anggaran sebesar Rp4.132.019.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan.

#### 5.1.1.2.1.4.2 DAK Non Fisik

Berikut ini adalah DAK Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.4.2.1 Rincian DAK Non Fisik**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Non Fisik-BOS Reguler | 353.029.490.000,00 | 346.838.606.116,00 | 98,24 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 5.719.000.000,00 | 5.719.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD | 280.872.927.000,00 | 263.281.297.426,00 | 93,73 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 2.084.180.000,00 | 1.088.490.000,00 | 52,22 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 4.596.891.000,00 | 4.101.958.564,00 | 89,23 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | 2.300.500.000,00 | 2.208.487.060,00 | 96,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 4.707.426.000,00 | 4.002.268.020,00 | 85,02 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 400.660.000,00 | 263.443.000,00 | 65,75 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 199.955.000,00 | 199.955.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian | 0,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **653.968.029.000,00** | **627.760.505.186,00** | **95,99** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAK Non Fisik TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp627.760.505.186,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAK Non Fisik TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan realisasi baru sebesar Rp346.838.606.116,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp344.752.312.593,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.086.293.523,00 atau 0,61%. Peningkatan tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi BOS Reguler untuk Provinsi Bali pada TA 2025 yang mempertimbangkan perkembangan jumlah peserta didik; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp346.838.606.116,00 mencapai 98,24% dari anggaran sebesar Rp353.029.490.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp6.190.883.884,00 atau 1,75%. Penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penyaluran BOS Reguler oleh Pemerintah Pusat yang memperhitungkan realisasi jumlah peserta didik aktif pada masing-masing sekolah penerima.
   b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja dengan realisasi baru sebesar Rp5.719.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp5.638.750.000,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp80.250.000,00 atau 1,42%. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya jumlah sekolah yang memenuhi kriteria kinerja sebagai penerima BOS Kinerja pada TA 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp5.719.000.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.719.000.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sempurna atas alokasi yang telah ditetapkan.
   c. DAK Non Fisik-TPG PNSD dengan realisasi baru sebesar Rp263.281.297.426,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp242.031.199.000,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.250.098.426,00 atau 8,78%. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah guru PNSD bersertifikasi yang berhak menerima tunjangan profesi pada TA 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp263.281.297.426,00 mencapai 93,73% dari anggaran sebesar Rp280.872.927.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp17.591.629.574,00 atau 6,26%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya guru PNSD penerima TPG yang mengalami perubahan status kepegawaian, mutasi, atau kondisi lainnya sepanjang tahun anggaran berjalan sehingga penyaluran tidak dapat dilakukan secara penuh.
   d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 52,22% dengan realisasi baru sebesar Rp1.088.490.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp3.996.750.000,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.908.260.000,00 atau -72,77%. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru PNSD yang

memenuhi kriteria penerima tambahan penghasilan pada TA 2025 seiring dengan peralihan sebagian guru berstatus PNSD menjadi PPPK; dan

2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp1.088.490.000,00 baru mencapai 52,22% dari anggaran sebesar Rp2.084.180.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp995.690.000,00 atau 47,77%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian data guru PNSD penerima Tamsil sepanjang tahun anggaran berjalan, sehingga penyaluran oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan secara penuh sesuai pagu yang telah ditetapkan.

e. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum dengan realisasi baru sebesar Rp4.101.958.564,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp3.727.225.999,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp374.732.565,00 atau 10,05%. Peningkatan tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi BOP Museum untuk Provinsi Bali pada TA 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp4.101.958.564,00 mencapai 89,23% dari anggaran sebesar Rp4.596.891.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp494.932.436,00 atau 10,77%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penyaluran BOP Museum oleh Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan realisasi kegiatan operasional museum sepanjang tahun anggaran berjalan.

f. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya dengan realisasi baru sebesar Rp2.208.487.060,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.959.778.106,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp248.708.954,00 atau 12,69%. Peningkatan tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi BOP Taman Budaya untuk Provinsi Bali pada TA 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp2.208.487.060,00 mencapai 96,00% dari anggaran sebesar Rp2.300.500.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan

g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan realisasi baru sebesar Rp4.002.268.020,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOK pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya yang mencakup DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi sebesar Rp2.752.640.672,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.249.627.348,00 atau 45,40%. Peningkatan tersebut mencerminkan perluasan cakupan kegiatan kesehatan masyarakat yang dibiayai melalui BOK pada TA 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp4.002.268.020,00 mencapai 85,02% dari anggaran sebesar Rp4.707.426.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp705.157.980,00 atau 14,98%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lapangan sehingga sebagian kegiatan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

h. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 65,75% dengan realisasi baru sebesar Rp263.443.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp302.021.450,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.578.450,00 atau -12,77%; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp263.443.000,00 baru mencapai 65,75% dari anggaran sebesar Rp400.660.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp137.217.000,00 atau 34,25%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penyaluran oleh Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan realisasi kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan.

i. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan realisasi baru sebesar Rp199.955.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi dengan nomenklatur yang sama berdasarkan kode rekening sebelumnya, sehingga realisasi TA 2025 sebesar Rp199.955.000,00 merupakan penerimaan perdana atas alokasi DAK Non Fisik bidang tersebut; dan
2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp199.955.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp199.955.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sempurna atas alokasi yang telah ditetapkan.

j. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp57.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi dengan nomenklatur yang sama berdasarkan kode rekening sebelumnya; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp57.000.000,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dikarenakan terdapat penyaluran DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian oleh Pemerintah Pusat yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya, sementara alokasi untuk TA 2025 telah dialihkan pada kode rekening DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp57.000.000,00
k. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi dengan nomenklatur yang sama berdasarkan kode rekening sebelumnya; dan
   2) Realisasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 menunjukkan nilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp57.000.000,00. Tidak terdapat realisasi pada komponen ini dikarenakan penyaluran DAK Non Fisik bidang pertanian oleh Pemerintah Pusat pada TA 2025 seluruhnya tersalurkan melalui kode rekening DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian sebesar Rp57.000.000,00 yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya, sehingga penyaluran atas alokasi Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 belum dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

#### 5.1.1.2.1.5 Insentif Fiskal

Berikut ini adalah Insentif Fiskal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.5.1 Rincian Insentif Fiskal**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Insentif Fiskal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.157.354.000,00 |
| Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya | 12.978.586.000,00 | 12.978.586.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **12.978.586.000,00** | **12.978.586.000,00** | **100,00** | **23.157.354.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Insentif Fiskal TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp10.178.768.000,00) atau (43,95%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Insentif Fiskal TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Insentif Fiskal memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp23.157.354.000,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan perubahan kebijakan pengalokasian dan klasifikasi insentif fiskal dari Pemerintah Pusat, di mana Pada TA 2025, Insentif Fiskal tidak lagi disalurkan dalam skema Insentif Fiskal (reguler) sebagaimana TA 2024, akan tetapi

dialokasikan dalam skema Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, yang dicatat sebagai akun tersendiri sesuai struktur Bagan Akun Standar (BAS). Dengan demikian, tidak terdapat realisasi pada akun Insentif Fiskal TA 2025, dan seluruh penerimaan insentif fiskal dicatat pada akun Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp12.978.586.000,00. Perubahan ini merupakan dampak penyesuaian kebijakan pusat dan klasifikasi akun, dan bukan penurunan substansi penerimaan fiskal daerah; dan

b. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya memiliki persentase capaian sebesar 100,00% pada TA 2025. Hal ini sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lampiran V C sebesar Rp12.978.586,00.

2. Rincian rencana dan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Provinsi Bali TA 2025 merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.1.2.1.5.1.1 Rincian Insentif Fiskal Menurut Rencana dan Realisasi Penggunaan**

| No. | Jenis Kegiatan | Realisasi Pendapatan | Realisasi Belanja | % | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Perekonomian | 8.059.445.100,00 | 7.750.963.570,00 | 96,17 | 308.481.530,00 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan | 4.919.140.900,00 | 4.742.626.005,00 | 96,41 | 176.514.895,00 |
| | **Jumlah** | **12.978.586.000,00** | **12.493.589.575,00** | **96,26** | **484.996.425,00** |

3. Rencana dan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya TA 2025, didasarkan atas:
   a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/1818/PADFE/BPKAD tanggal 14 Maret 2025, Hal: Penyampaian Rencana Penggunaan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025;
   b. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/6314/PAPKD/BPKAD tanggal 22 September 2025, Pengantar Laporan Realisasi Penyerapan DID IF Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap I Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Bali; dan
   c. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/971/PAPKD/BPKAD tanggal 9 Februari 2026, Pengantar Laporan Realisasi Penyerapan DID IF Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap II Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Bali.

### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.2.1 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bantuan Keuangan | 34.825.690.369,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **34.825.690.369,00** | **34.825.690.369,00** | **100,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00 atau 0,00%.

#### 5.1.1.2.2.1 Bantuan Keuangan

Berikut ini adalah Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.2.1.1 Rincian Bantuan Keuangan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota | 34.825.690.369,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **34.825.690.369,00** | **34.825.690.369,00** | **100,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp34.825.690.369,00 pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Penerimaan ini berasal dalam bentuk bagi atau *sharing* pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) tanggal 18 April 2025 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.2.1.1.1 Rincian Bantuan Keuangan Menurut Perjanjian Kerja Sama**

| Pemerintah Daerah | | Nomor Perjanjian | Realisasi |
|---|---|---|---|
| Pemerintah Provinsi Bali | Pihak I | B.36.100.3.7/19133/KS/B.PEMKESRA | - |
| Pemerintah Kota Denpasar | Pihak II | 100.3.7.1/02/PKS/KS/2025 | 14.029.778.120,00 |
| Pemerintah Kabupaten Badung | Pihak III | 100.2.2/11912/PKS/TKKSD-Bdg/2025 | 16.069.568.556,00 |
| Pemerintah Kabupaten Gianyar | Pihak IV | 010/18/PKS/B.Tapem/IV/2025 | 4.726.343.693,00 |
| Pemerintah Kabupaten Tabanan | Pihak V | 100.3.7.1/1117/PKS-T.Pem/2025 | - |
| | **Jumlah** | | **34.825.690.369,00** |

Berdasarkan Laporan Rincian Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 Nomor: 900.1.4.11/3562/UPTD.SBGT/DISHUB tanggal 25 November 2025 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2025 tidak dikenakan *sharing* pembiayaan. Persentase *sharing* sebesar 2,92% atau sebesar Rp1.452.231.288,00 dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Badung sesuai kesepakatan Kepala Daerah dalam rapat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

### 5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berikut ini adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.3.1 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Hibah | 5.757.272.000,00 | 6.089.799.194,01 | 105,77 | 5.750.844.000,00 |
| **Jumlah** | **5.757.272.000,00** | **6.089.799.194,01** | **105,77** | **5.750.844.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp338.955.194,01 atau 5,89%.

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini adalah Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.3.1.1 Rincian Pendapatan Hibah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 5.753.232.000,00 | 6.085.759.194,01 | 105,77 | 5.744.244.000,00 |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 4.040.000,00 | 4.040.000,00 | 100,00 | 6.600.000,00 |
| **Jumlah** | **5.757.272.000,00** | **6.089.799.194,01** | **105,77** | **5.750.844.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp338.955.194,01 atau 5,89%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Hibah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 105,77% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp5.753.232.000,00 yang berasal dari Hibah Kontribusi Biaya Operasional KB Samsat PT Jasa Raharja selama 12 bulan; dan
      2) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp332.527.194,01, yang berasal dari Hibah Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya berdasarkan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya per 1 Juli 2025. Pada Neraca, hibah tersebut berupa Kas dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut:
         a) Kas Tunai, terdiri atas:

| | |
|---|---|
| Kas Kasir FO | 4.704.373,15 |
| Kas Besar | 8.134.897,86 |
| **Jumlah Kas Tunai** | **12.839.271,01** |

Kas Kasir FO merupakan penerimaan kasir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 yang direncanakan disetorkan pada bulan Juli 2025, sedangkan Kas Besar merupakan saldo kas per 30 Juni 2025 yang akan disetorkan ke bank pada bulan Juli 2025.

b) Kas di Bank, terdiri atas:

| | |
|---|---|
| Giro | |
| PT. Bank Mandiri, | |
| - (No. Rek. 145-00-0752544-3) | 9.624.150,83 |
| - (No. Rek. 145-00-1306337-1) | 195.468.876,00 |
| PT. Bank Negara Indonesia | |
| - (No. Rek 2017102466) | 142.953,00 |
| Tabungan | |
| - PT. Bank Pembangunan Daerah (No. Rek. 028 02.22.00869-4) | 5.757.987,37 |
| - PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (045020241949-1) | 5.575.086,71 |
| - PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (045.02.02.35982-8) | 100.861.079,13 |
| - PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rek.0686-01-000462-56-3 | 2.257.789,96 |

| | |
|---|---|
| **Jumlah Kas Bank** | **319.687.923,00** |

Rekening-rekening bank tersebut masih atas nama Yayasan, kecuali rekening BPD Bali Nomor 045.02.02.35982-8 yang telah atas nama rekening BLUD. Pihak Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya sedang memproses penutupan rekening atas nama Yayasan dan pembukaan rekening baru atas nama BLUD, termasuk pembukaan rekening dalam bentuk giro.

b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis memiliki persentase capaian sebesar 100,00% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat sumbangan penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan Demonstrasi Pilot (Demplot) pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang bersifat tidak terus-menerus dan insidental sesuai kebutuhan.

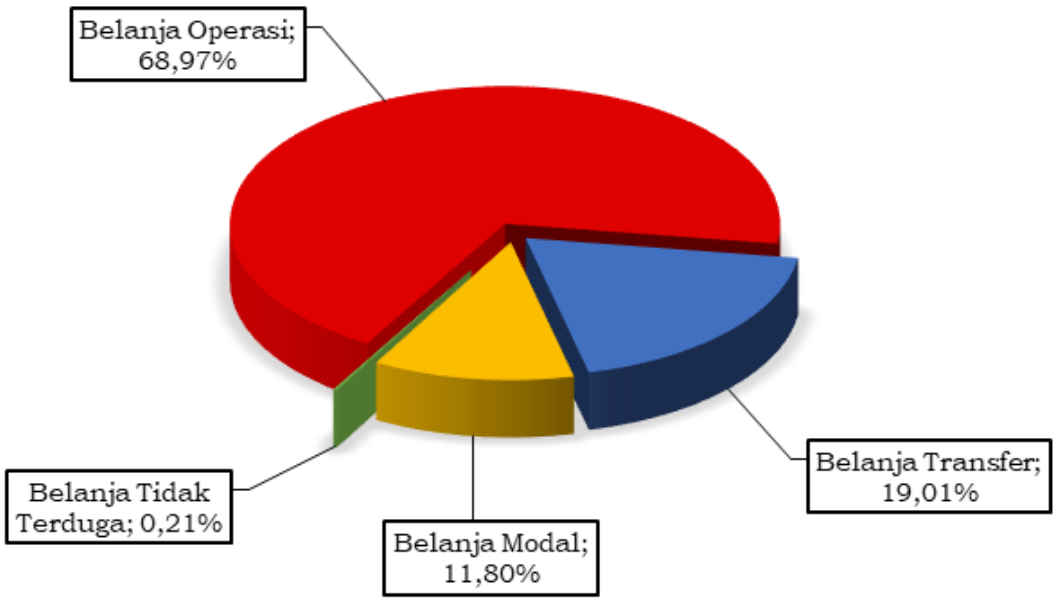
### 5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

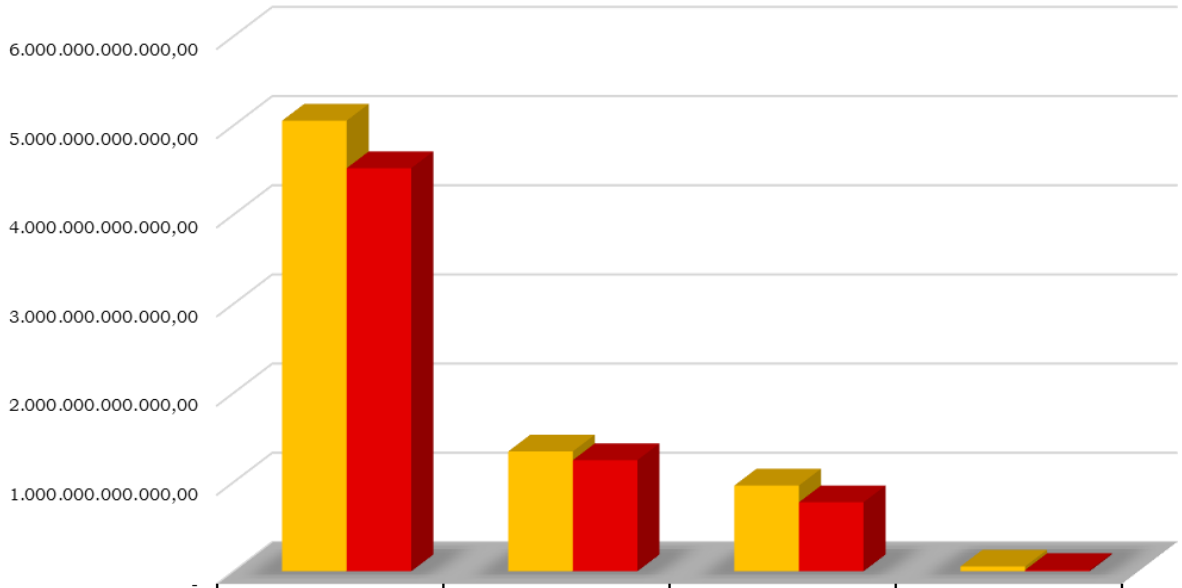
**Tabel 5.1.2.1 Rincian Belanja Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| BELANJA OPERASI | 5.053.188.410.600,60 | 4.520.551.159.698,76 | 89,45 | 4.461.088.682.470,66 |
| BELANJA MODAL | 961.755.254.119,00 | 773.687.032.749,53 | 80,44 | 667.689.607.145,41 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 53.861.777.244,00 | 14.075.388.800,30 | 26,13 | 7.441.134.041,00 |
| BELANJA TRANSFER | 1.344.164.836.020,00 | 1.246.339.410.303,03 | 92,72 | 2.156.832.426.341,00 |
| **Jumlah** | **7.412.970.277.983,60** | **6.554.652.991.551,62** | **88,42** | **7.293.051.849.998,07** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp738.398.858.446,45) atau -10,12%. Komposisi realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan 5.6.




**Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**




| | Belanja Operasi | Belanja Transfer | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|---|---|---|---|---|
| Anggaran | 5.053.188.410.600,60 | 1.344.164.836.020,00 | 961.755.254.119,00 | 53.861.777.244,00 |
| Realisasi | 4.520.551.159.698,76 | 1.246.339.410.303,03 | 773.687.032.749,53 | 14.075.388.800,30 |

**Gambar 5.6 Capaian Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 5***.

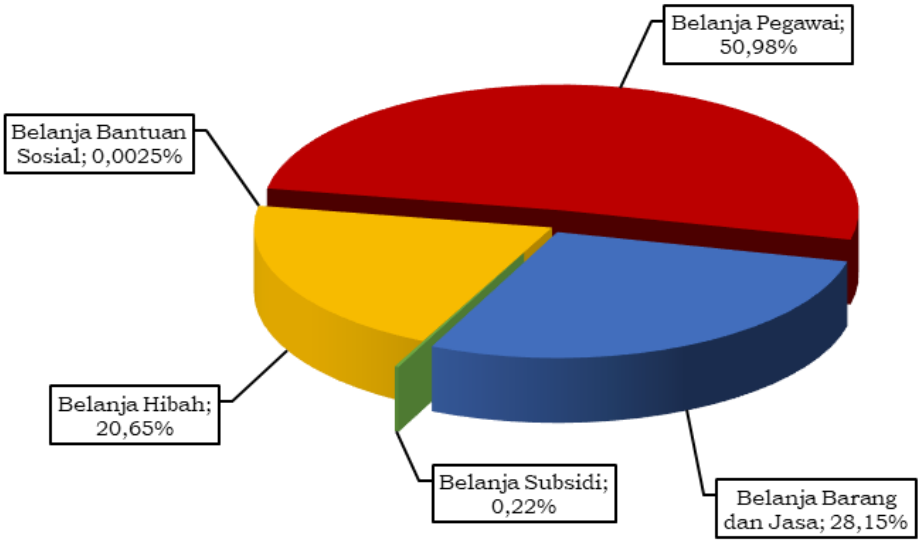
### 5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

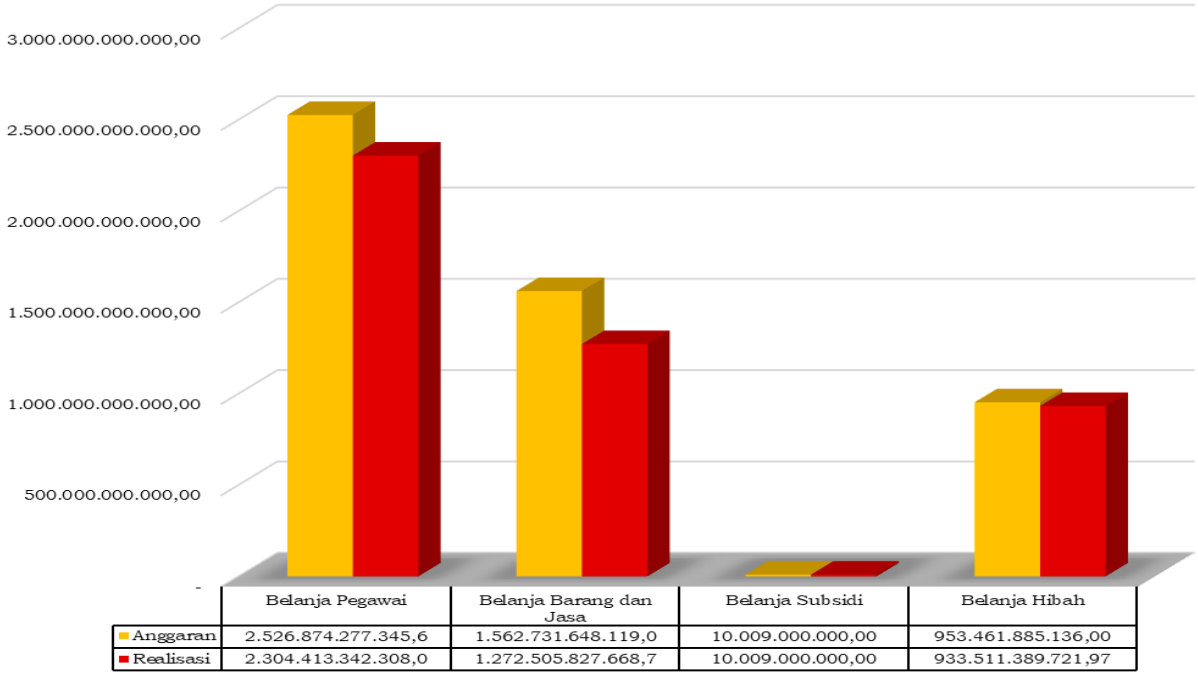
**Tabel 5.1.2.1.1 Rincian Belanja Operasi**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Pegawai | 2.526.874.277.345,60 | 2.304.413.342.308,00 | 91,19 | 2.088.693.065.509,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.562.731.648.119,00 | 1.272.505.827.668,79 | 81,42 | 1.200.096.660.415,66 |
| Belanja Subsidi | 10.009.000.000,00 | 10.009.000.000,00 | 100,00 | 2.525.000.000,00 |
| Belanja Hibah | 953.461.885.136,00 | 933.511.389.721,97 | 97,90 | 1.169.523.956.546,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 100,00 | 250.000.000,00 |
| **Jumlah** | **5.053.188.410.600,60** | **4.520.551.159.698,76** | **89,45** | **4.461.088.682.470,66** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp59.462.477.228,10 atau 1,33%. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan capaian realisasi Belanja Operasi terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.7 dan 5.8.




**Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**




**Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Pegawai**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 1.172.678.735.056,00 | 1.094.301.132.770,00 | 93,31 | 915.767.773.065,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.149.191.089.336,60 | 1.025.358.198.349,00 | 89,22 | 648.766.658.646,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.514.710.609,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 62.566.813.904,00 | 58.685.482.937,00 | 93,79 | 58.811.705.124,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 3.007.840.762,00 | 1.013.327.807,00 | 33,68 | 180.740.600,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 6.677.806.694,00 | 6.675.000.000,00 | 99,95 | 5.090.000.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 132.751.991.593,00 | 118.380.200.445,00 | 89,17 | 103.561.477.465,00 |
| **Jumlah** | **2.526.874.277.345,60** | **2.304.413.342.308,00** | **91,19** | **2.088.693.065.509,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp215.720.276.799,00 atau 10,33%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Tambahan Penghasilan ASN memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 89,22% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, dengan kenaikan signifikan sebesar Rp376.591.539.703,00;
   b. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 33,68% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp832.587.207,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada TA 2025 telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 sedangkan pada TA 2024 terdapat beberapa sub rincian belanja dari Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang tidak direalisasikan dikarenakan pada tahun tersebut Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dijabat oleh PJ Gubernur yang saat itu merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri sehingga belanja Gaji dan Tunjangan dari PJ Gubernur pada TA 2024 sudah ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 6***.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.2.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Barang | 243.573.830.490,00 | 194.073.326.821,40 | 79,67 | 142.523.484.359,00 |
| Belanja Jasa | 524.480.110.880,00 | 462.105.370.947,70 | 88,10 | 498.947.019.991,30 |
| Belanja Pemeliharaan | 58.551.033.391,00 | 45.127.465.842,23 | 77,07 | 39.402.749.121,78 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 171.410.619.300,00 | 70.854.483.596,00 | 41,33 | 98.258.652.122,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 123.254.194.950,00 | 95.380.073.712,58 | 77,38 | 21.182.298.130,09 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.119.656.792,61 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP | 185.639.814.002,00 | 179.240.131.088,00 | 96,55 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 255.822.045.106,00 | 225.724.975.660,88 | 88,23 | 211.662.799.898,88 |
| **Jumlah** | **1.562.731.648.119,00** | **1.272.505.827.668,79** | **81,42** | **1.200.096.660.415,66** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp72.409.167.253,13 atau 6,03%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Barang memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,67% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat penyesuaian harga yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, di antaranya:

a) Efisiensi harga dimaksud terutama muncul karena beberapa paket pengadaan dilaksanakan melalui konsolidasi pengadaan serta dilakukan negosiasi harga dengan penyedia, sehingga harga kontrak atau harga hasil transaksi pengadaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga perkiraan yang tercantum dalam DPA dan/atau DPPA; dan
b) Pada pengadaan melalui E-Katalog, terdapat kondisi di mana harga satuan pada saat transaksi lebih rendah daripada harga satuan yang telah dianggarkan dalam DPPA, sehingga menimbulkan selisih harga yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Barang dibandingkan target;

c) Terdapat penyesuaian kebutuhan belanja barang dengan memperhatikan ketersediaan stok persediaan, sehingga realisasi belanja barang menjadi lebih rendah dikarenakan masih terdapat sisa persediaan tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional perangkat daerah;
d) Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, di mana sebagian kegiatan dilaksanakan secara daring (*online*), sehingga menurunkan kebutuhan belanja barang tertentu seperti konsumsi rapat dan bahan cetak; dan
e) Terdapat kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025. Melalui kebijakan tersebut, seluruh perangkat daerah melakukan pengendalian pelaksanaan belanja agar lebih selektif, memprioritaskan kebutuhan yang bersifat mendesak dan mendukung layanan utama, serta mengurangi belanja yang dapat dioptimalkan tanpa mengganggu pencapaian target kinerja. Dampaknya, sebagian rencana belanja barang yang semula dianggarkan tidak seluruhnya direalisasikan dikarenakan dilakukan penajaman prioritas dan penguatan disiplin belanja sesuai arahan pengendalian.

b. Belanja Pemeliharaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,07% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat efisiensi dan pengendalian belanja pemeliharaan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025. Pengendalian dimaksud antara lain mencakup pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan, serta pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor lainnya, sehingga sebagian kegiatan pemeliharaan yang bersifat kurang mendesak dapat dilakukan penjadwalan ulang, penyesuaian volume, atau penundaan pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan riil dan ketersediaan anggaran;
c. Belanja Perjalanan Dinas memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 41,33% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerapan kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja yang berdampak langsung pada pembatasan serta penyesuaian pelaksanaan perjalanan dinas, dengan uraian sebagai berikut:
    1) Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk membatasi belanja pada kegiatan tertentu dan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Sejalan dengan instruksi tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas menjadi lebih selektif. Pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025, pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri tidak dapat ditindaklanjuti. Walau demikian, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan melalui alternatif lain yang tidak memerlukan perjalanan dinas luar negeri; dan
    2) Pengendalian pelaksanaan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025, yang memasukkan belanja perjalanan dinas sebagai salah satu objek pengendalian. Dampaknya, sebagian perjalanan dinas dilakukan penjadwalan ulang, pengurangan intensitas, atau pelaksanaan secara lebih selektif menyesuaikan prioritas kegiatan.
d. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,38%. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp74.197.775.582,49.
e. Belanja Barang dan Jasa BOS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp188.119.656.792,61) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2025, belanja yang pada tahun sebelumnya disajikan pada nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOS telah disajikan dan dicatat pada nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOSP sesuai penyesuaian penyajian dan pengelompokan akun belanja Dana BOS dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa:
1) Pasal 18 ayat (2) bahwa penerimaan dan belanja yang tercantum dalam RKAS diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; dan
2) Pasal 19 ayat (3) huruf b menegaskan bahwa penelaahan RKAS memperhatikan kesesuaian penerimaan dan belanja dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Barang dan Jasa BOSP memiliki persentase yang mendekati anggaran sebesar 96,55% dengan realisasi sebesar Rp179.268.311.088,00 pada TA 2025, yang dapat dirinci sebagai berikut:
1) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp176.725.799.782,87, yang pada umumnya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional rutin pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bali sesuai perencanaan dan ketentuan pengelolaan Dana BOSP; dan
2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp2.514.331.305,13, yang pada umumnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bali sesuai kriteria dan ketentuan Dana BOSP.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 7***.

#### 5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.3.1 Rincian Belanja Subsidi**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 100,00 | 2.500.000.000,00 |
| Belanja Subsidi kepada Koperasi | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,00 | 25.000.000,00 |
| **Jumlah** | **10.009.000.000,00** | **10.009.000.000,00** | **100,00** | **2.525.000.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Subsidi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp7.484.000.000,00 atau 296,40%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.500.000.000,00 pada TA 2025, yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan alokasi subsidi pupuk organik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pupuk organik bagi sektor pertanian, seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok penerima dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan; dan
   b. Belanja Subsidi kepada Koperasi dengan penurunan signifikan sebesar (Rp16.000.000,00) pada TA 2025, yang berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat penyesuaian penganggaran dan penatausahaan pada TA 2025, di mana sebagian alokasi yang pada tahun sebelumnya tercatat pada akun Belanja Subsidi kepada Koperasi dialihkan penyajiannya ke akun Belanja Barang dan Jasa untuk pelaksanaan kegiatan subsidi akta Koperasi Merah Putih.
2. Dasar hukum dan rincian penerima subsidi diuraikan sebagai berikut:
   a. Subsidi pemberian pupuk organik didasarkan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 590/03-F/HK/2025 tentang Penerima dan Besaran Subsidi Pupuk Organik Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2025, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.3.1.1 Rincian Belanja Subsidi Menurut Penerima dan Besaran Subsidi Pupuk Organik**

| No. | Nama Produsen | Nama Penanggung Jawab | Volume Pupuk (Kg) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. Ananta Winangun | Dewa Putu Buda | 5.850.000 | 5.850.000.000,00 |
| 2 | Yayasan Pemilahan Sampah Temesi | I Ketut Trikaya Wijaya Manik | 700.000 | 700.000.000,00 |
| 3 | CV. Satyaloka Parama Sidhi | I Wayan Sudarma | 3.450.000 | 3.450.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | **10.000.000** | **10.000.000.000,00** |

b. Subsidi kepada koperasi didasarkan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 970/03-H/HK/2025 tentang Penetapan Koperasi yang Mendapatkan Subsidi Pembuatan Akta Koperasi Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 25 November 2025, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.3.1.2 Rincian Belanja Subsidi Menurut Nama dan Akta Koperasi**

| No. | Nama Koperasi | Nomor dan Tanggal Akta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Koperasi Jasa Bali Transport Bersatu | Nomor 12 Tanggal 4 Maret 2025 | 3.000.000,00 |
| 2 | Koperasi Produsen Industri Semeton Bali | Nomor 25 Tanggal 11 April 2025 | 3.000.000,00 |
| 3 | Koperasi Produsen Bambu Harta Lestari | Nomor 70 Tanggal 20 Mei 2025 | 3.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | **9.000.000,00** |

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 8***.

### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4.1 Rincian Belanja Hibah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.859.625.000,00 | 6.470.508.238,00 | 94,32 | 157.039.446.676,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 824.332.380.136,00 | 805.989.221.824,97 | 97,77 | 899.482.561.466,00 |
| Belanja Hibah Dana BOS | 98.428.300.000,00 | 97.210.079.659,00 | 98,76 | 90.422.943.204,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 23.841.580.000,00 | 23.841.580.000,00 | 100,00 | 22.579.005.200,00 |
| **Jumlah** | **953.461.885.136,00** | **933.511.389.721,97** | **97,90** | **1.169.523.956.546,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp236.012.566.824,03) atau -20,18%.

#### 5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4.1.1 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 2.834.625.000,00 | 2.834.625.000,00 | 100,00 | 157.039.446.676,00 |
| Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 4.025.000.000,00 | 3.635.883.238,00 | 90,33 | 0,00 |
| **Jumlah** | **6.859.625.000,00** | **6.470.508.238,00** | **94,32** | **157.039.446.676,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp150.568.938.438,00) atau -95,88%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat memiliki capaian yang mencapai target pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, dengan penurunan signifikan sebesar (Rp154.204.821.676,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2024, terdapat belanja hibah yang bersifat insidental dalam rangka dukungan pendanaan pengamanan, penyelenggaraan, dan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Sementara itu, pada TA 2025, tidak terdapat kebutuhan pendanaan yang sejenis, sehingga realisasi pada periode saat ini relatif terbatas; dan
   b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dengan realisasi baru sebesar Rp3.635.883.238,00 pada TA 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan belanja hibah barang yang direalisasikan untuk mendukung pekerjaan perencanaan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana Lanud I Gusti Ngurah Rai sebesar Rp99.786.713,00, pekerjaan pengawasan rehabilitasi pagar depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp99.256.000,00, serta pekerjaan rehabilitasi pagar depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp3.436.840.525,00.
2. Pemberian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut.
   a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali kepada Kepolisian Daerah Bali, yang beralamat di Jalan WR Supratman No. 7, Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pemberian hibah berupa uang sebesar Rp2.834.625.000,00 digunakan untuk untuk Pembangunan Parkir Kendaraan Roda Dua yang bertempat di depan gedung Biro Operasi Polda Bali. yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-H/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Pemerintah Pusat yang ditetapkan tanggal 18 September 2025;
   b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali kepada:
      1) Komando Daerah Militer IX/Udayana Komando Resor Militer 163/Wira Satya yang beralamat di Jl. PB Sudirman, Dangin Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali untuk Rehabilitasi Pagar Depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp3.436.840.525,00;
      2) Komando Daerah Militer IX/Udayana Komando Resor Militer 163/Wira Satya yang beralamat di Jl. PB Sudirman, Dangin Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali untuk Pengawasan Rehabilitasi Pagar Depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp99.256.000,00; dan
      3) Komando Daerah Militer IX/Udayana Babinminvetcad yang beralamat di Jalan Airport Ngurah Rai No.12 Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung untuk Renovasi Komplek Perumahan dan Gedung Base Ops sebesar Rp99.786.713,00.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

**5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4.2.1 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 562.199.085.136,00 | 553.902.556.673,97 | 98,52 | 666.211.925.565,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 6.100.000.000,00 | 5.347.798.094,00 | 87,66 | 0,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 255.183.295.000,00 | 245.938.867.057,00 | 96,37 | 233.021.316.201,00 |
| Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 850.000.000,00 | 800.000.000,00 | 94,11 | 249.319.700,00 |
| **Jumlah** | **824.332.380.136,00** | **805.989.221.824,97** | **97,77** | **899.482.561.466,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp93.493.339.641,03) atau -10,39%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp553.902.556.673,97 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memberikan hibah kepada Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem Tahap I sebesar Rp 25.009.117.814,00
      2) Dinas Kesehatan Provinsi Bali memberikan hibah uang kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) yang beralamat di Jalan Melati No. 21 Denpasar diperuntukkan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Bali sebesar Rp437.823.612,00
      3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Bali memberikan hibah uang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Raya Puputan Renon Denpasar diperuntukkan untuk Operasional BPSK Kota Denpasar sebesar Rp456.000.000,00;
      4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali sebesar Rp 62.099.615.247,97
      5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ibah kepada Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (DPD PEPABRI) Provinsi Bali yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. G.21, Kota Denpasar sebesar Rp 500.000.000,00;
      6) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pemberian hibah berupa yang yang ditujukan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Desa Adat sebesar Rp465.400.000.000,00. Penurunan realisasi dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan terdapat pembayaran utang hibah Desa Adat Tahap III 2023 yang dibayar pada TA 2024 sebanyak 1.485 Desa Adat atau Rp148.500.000.000,00. Pada TA 2025, pembayaran hibah hanya untuk Tahap I-III TA 2025. Belanja hibah yang tidak terealisasi seluruhnya pada TA 2025 disebabkan karena beberapa Desa Adat tidak mengajukan/tidak memenuhi syarat pencairan dana Desa Adat dari Tahap I sampai dengan Tahap III dengan rincian sebagai berikut:
         a) Pemberian Hibah kepada Desa Adat sebagai berikut:
            (1) Kepada Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 9/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 10.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;
            (2) Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 14/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi

Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 15.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;

(3) Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 5/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 07.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;

(4) Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 10/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 14.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah);

(5) Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 6/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 06.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;

(6) Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 12.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;

(7) Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 7/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;

(8) Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 27/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 09.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah; dan

(9) Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 12/03-O/HK/2025 dan NPHD Nomor 11.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah.

b) Pemberian Hibah kepada MDA sebagai berikut:

(1) Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 4/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan NPHD Nomor 05.U/03-O/2025 (dari APBD Induk TA 2025); dan

(2) Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 237/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan NPHD Nomor 374.U/03-O/2025 (dari APBD Perubahan 2025).

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan realisasi baru sebesar Rp5.347.798.094,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terdapat pemberian hibah berupa uang sebesar Rp1.997.798.094,00 berupa pengadaan sarana dan prasarana *sound system*, peralatan laptop, pembangunan *tower* dan lain-lain kepada komisi penyiaran, desa adat dan banjar dinas
2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat pemberian hibah sebesar Rp 3.350.000.000,00.

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp245.938.867.057,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp1.922.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan operasional untuk Kabupaten/Kota;
2) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 25.135.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembelian kostum, seperangkat *Gamelan Baleganjur*;
3) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat hibah uang sebesar Rp350.000.000,00 yang diperuntukkan untuk Penguatan Bendega, Sarana-Prasarana dan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2025 dan Pengadaan Mesin Tempel Tahun Anggaran 2025
4) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 11.793.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembelian sapi pada kelompok ternak
5) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 43.249.058.668,00 yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana kepada *pengempon* Pura Dadia;
6) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 152.882.558.389,00 yang diperuntukkan untuk *pengempon* pura untuk pembangunan sarana dan prasarana pura
7) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebesar Rp4.446.000.000,00;

8) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebesar Rp2.891.250.000,00;
9) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdapat pemberian hibah sebesar Rp3.270.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Forum Kepala Lingkungan Kelurahan dan *Pengempon Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Padonan* Keputusan Gubernur Bali Nomor: 398/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD Nomor 585.U/03-O/2025 01/FKB/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
   b) Krama Banjar Adat Taman Sudharma berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 397/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD Nomor 563.U/03-O/2025 05/KBATS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
   c) Pakis Banjar Sente, Pakis Banjar Pasekan, dan Pakis Desa Adat Gelogor, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 399/03-O/HK/2025 tanggal 6 November 2025 dengan NPHD Nomor 578.U/03-O/2025 01/PBP/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
   d) Paiketan Krama Istri Banjar Adat Bajera Belayu, Paiketan Krama Istri Panca Pasa Pitra Yadnya, Paiketan Krama Istri Tempek Lima, dan Krama Istri Banjar Adat Pekandelan, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 364/03-O/HK/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor 608.U/03-O/2025 01/PBABJ/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
   e) Krama Istri Banjar Adat Mekar Sari Pasar, Pakis Adat Dana Kerti, Krama Istri Banjar Adat Sari Muncul, dan Krama Istri Tempek Kangin, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 403/03-O/HK/2025 tanggal 7 November 2025 dengan NPHD Nomor: 623.U/03-O/2025 01/PAD-K/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
   f) Paiketan Krama Istri Desa Adat Pupuan Sawah, Paiketan Krama Istri Banjar Adat Sigaran, dan Paiketan Krama Istri Banjar Adat Alas, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 327/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 536.U/03-O/2025 01/PAKIS.PPS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
   g) Paiketan Krama Istri Desa Adat Sidetapa dan Banjar Adat Dalem, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 328/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 544.U/03-O/2025 001/PAKIS/DAS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
   h) Paiketan Krama Istri Desa Adat Cangkup, Paiketan Krama Istri Desa Adat Munduk Juwet, Paiketan Suka Duka Sekar Wangi, Paiketan Krama Istri Sedana Yoga, dan STT Dharma Kanti, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 391/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD Nomor: 622.U/03-O/2025 01/KIDAC/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
   i) Paiketan Krama Istri Cantya Gayatri, Paiketan Krama Istri Yamuna, Paiketan Krama Istri Tempek Bangklet, dan Paiketan Krama Istri Kamboja, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 348/03-O/HK/2025 tanggal 23 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 607.U/03-O/2025 01/PAKIS-TB/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
   j) Krama Br. Tegalsaat Delodan dan Kelompok Krama Istri Desa Adat Seseh Keputusan Gubernur Bali Nomor: 329/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 484.U/03-O/2025 01/KBTD/XI/2025 tanggal 21 November 2025 dan 514.U/03-O/2025 01/KKIDAS/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Penerima hibah adalah.

d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan sebesar Rp800.000.000,00 pada TA 2025 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Bali kepada:
   1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Teratai No. 25 Denpasar untuk kegiatan Operasional FKUB Provinsi Bali sebesar Rp500.000.000,00
   2) Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan Pasraman Satyam Eva Jayate yang beralamat di Jalan Trengguli Gg. IV D3 Denpasar untuk Bantuan Dana Rumah Kakek Festival 2025 sebesar Rp150.000.000,00
   3) Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Bali yang beralamat di jalan Trengguli I/27 Tembawu, Penatih, Denpasar untuk Bantuan dna dalam rangka Petirtaan Purnama ke Dasa lan Betara Turun Kabeh sebesar Rp50.000.000,00
   4) Pimpinan Sekretariat Pusat Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) yang beralamat di Jalan Nangka Utara 294, Denpasar, Bali untuk kegiatan Bhakti Sosial Besakih sebesar Rp50.000.000,00;
   5) Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang beralamat di gedung PHDI Bali lantai 1, Jalan Ratna 71, Tonja, Denpasar, Bali untuk Bantuan dana untuk kegiatan Jambore Pemuda Bali Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000,00

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

#### 5.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS

Berikut ini adalah Belanja Hibah Dana BOS yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4.3.1 Rincian Belanja Hibah Dana BOS**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta | 97.618.580.000,00 | 96.413.028.124,00 | 98,76 | 89.499.371.704,00 |
| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta | 809.720.000,00 | 797.051.535,00 | 98,43 | 923.571.500,00 |
| **Jumlah** | **98.428.300.000,00** | **97.210.079.659,00** | **98,76** | **90.422.943.204,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.787.136.455,00 atau 7,50%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta mencapai persentase sebesar 98,76% pada TA 2025. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kenaikan signifikan terhadap Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sehubungan dengan peningkatan volume siswa yang mendaftar di sekolah swasta yang menyebabkan sekolah swasta mengalami kenaikan dalam penerimaan dana BOS; dan
   b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta mencapai persentase sebesar 98,43% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan anggaran yang terserap pada TA 2025 mengalami penurunan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (dapodik).
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

#### 5.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Berikut ini adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4.4.1 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 23.841.580.000,00 | 23.841.580.000,00 | 100,00 | 22.579.005.200,00 |
| **Jumlah** | **23.841.580.000,00** | **23.841.580.000,00** | **100,00** | **22.579.005.200,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.262.574.800,00 atau 5,59%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mencapai persentase sebesar 100,00% dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD Provinsi Bali diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pada TA 2025 dan besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara sah dikalikan nilai bantuan per suara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar hukum dan penerima Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibebankan pada APBD TA 2025 (Induk) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 10/04-H/HK/2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tanggal 3 Maret 2025, yang diberikan kepada 6 (enam) Partai Politik sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4.4.1.1 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Menurut Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.465.830.000,00 | 14.465.830.000,00 | 100,00 | 13.544.131.100,00 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya | 3.246.480.000,00 | 3.246.480.000,00 | 100,00 | 2.173.629.100,00 |
| Partai Golongan Karya | 3.225.690.000,00 | 3.225.690.000,00 | 100,00 | 3.196.484.700,00 |
| Partai Demokrat | 1.525.060.000,00 | 1.525.060.000,00 | 100,00 | 1.673.103.200,00 |
| Partai NasDem | 853.350.000,00 | 853.350.000,00 | 100,00 | 1.130.589.300,00 |
| Partai Solidaritas Indonesia | 525.170.000,00 | 525.170.000,00 | 100,00 | 468.434.400,00 |
| Partai Hati Nurani Rakyat | - | - | - | 392.633.400,00 |
| **Jumlah** | **23.841.580.000,00** | **23.841.580.000,00** | **100,00** | **22.579.005.200,00** |

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.5.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **111.600.000,00** | **111.600.000,00** | **100,00** | **250.000.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp138.400.000,00) atau -55,36%.

#### 5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.5.1.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp250.000.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp250.000.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi untuk belanja tersebut pada TA 2025.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada ***Lampiran 10***.

### 5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.5.2.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **111.600.000,00** | **111.600.000,00** | **100,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp111.600.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dengan realisasi baru sebesar Rp111.600.000,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan hibah uang kepada Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Tunggak Bingin No. 15 B Sanur, Denpasar yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Sosial Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada ***Lampiran 10***.

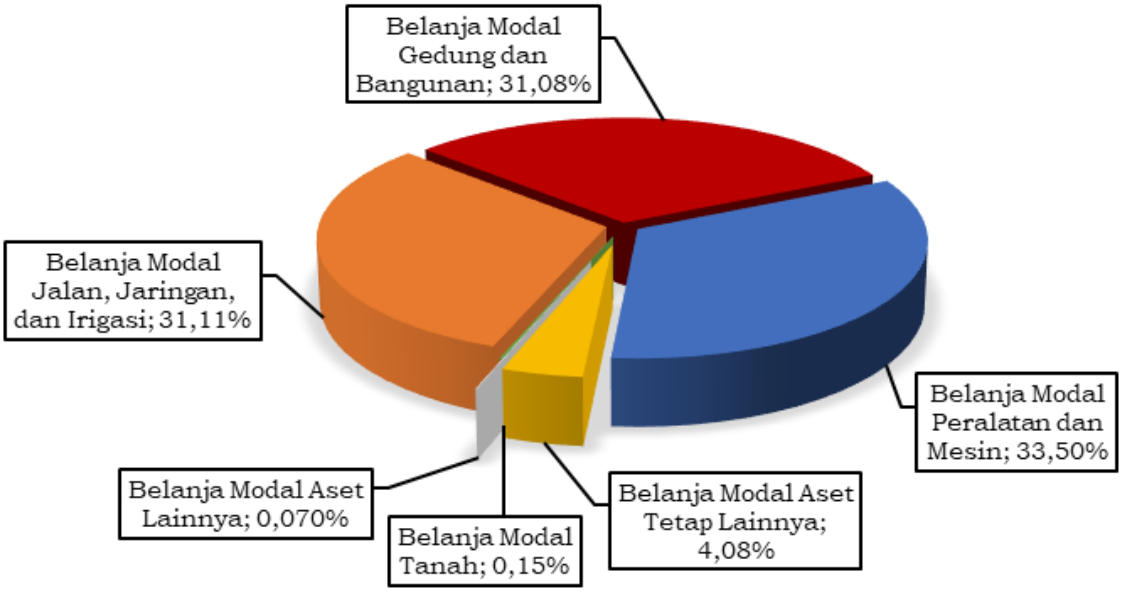
### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

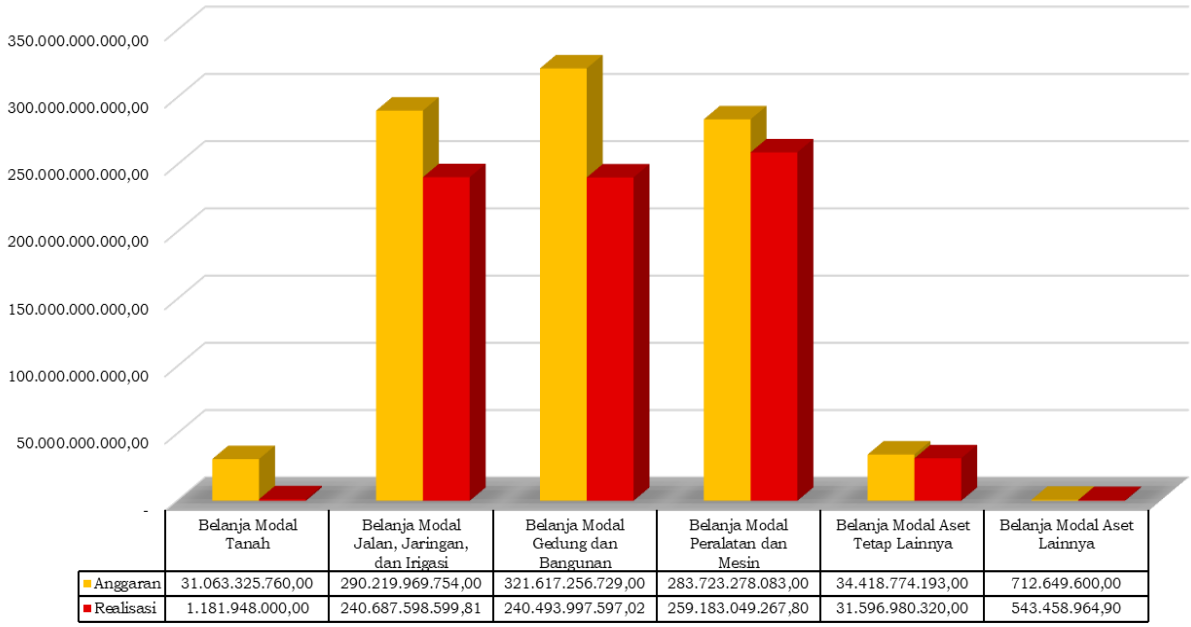
**Tabel 5.1.2.2.1 Rincian Belanja Modal**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Tanah | 31.063.325.760,00 | 1.181.948.000,00 | 3,80 | 3.464.184.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 283.723.278.083,00 | 259.183.049.267,80 | 91,35 | 130.063.180.613,50 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 321.617.256.729,00 | 240.493.997.597,02 | 74,77 | 407.489.294.374,22 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 290.219.969.754,00 | 240.687.598.599,81 | 82,93 | 94.451.449.090,69 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 34.418.774.193,00 | 31.596.980.320,00 | 91,80 | 31.382.599.067,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 712.649.600,00 | 543.458.964,90 | 76,25 | 838.900.000,00 |
| **Jumlah** | **961.755.254.119,00** | **773.687.032.749,53** | **80,44** | **667.689.607.145,41** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp105.997.425.604,12 atau 15,88%. Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2025 dan capaian realisasi Belanja Modal terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.9 dan 5.10.




**Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**




| | Belanja Modal Tanah | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Belanja Modal Aset Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anggaran | 31.063.325.760,00 | 290.219.969.754,00 | 321.617.256.729,00 | 283.723.278.083,00 | 34.418.774.193,00 | 712.649.600,00 |
| Realisasi | 1.181.948.000,00 | 240.687.598.599,81 | 240.493.997.597,02 | 259.183.049.267,80 | 31.596.980.320,00 | 543.458.964,90 |

**Gambar 5.10 Capaian Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 11***.

### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini adalah Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.1.1 Rincian Belanja Modal Tanah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Tanah | 31.063.325.760,00 | 1.181.948.000,00 | 3,80 | 3.464.184.000,00 |
| **Jumlah** | **31.063.325.760,00** | **1.181.948.000,00** | **3,80** | **3.464.184.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Tanah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.282.236.000,00) atau -65,88%.

### 5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini adalah Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.1.1.1 Rincian Belanja Modal Tanah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Tanah Persil | 31.048.325.760,00 | 1.181.948.000,00 | 3,80 | 3.464.184.000,00 |
| Belanja Modal Lapangan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **31.063.325.760,00** | **1.181.948.000,00** | **3,80** | **3.464.184.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Tanah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.282.236.000,00) atau -65,88%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Tanah Persil memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 3,80% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp2.282.236.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Belanja Modal Tanah Persil yang dimaksud merupakan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung. Namun, kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan dikarenakan para pihak yang seharusnya ditetapkan sebagai penerima ganti kerugian sedang dalam proses penyelesaian sengketa dan belum menerbitkan akta perdamaian, serta menunggu proses mediasi yang difasilitasi BPN Kabupaten Klungkung. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan pembayaran konsinyasi belum dapat dilakukan. Selain itu, pengajuan pembayaran konsinyasi tidak dapat diajukan kembali kepada Pengadilan Negeri Semarapura dikarenakan proses konsinyasi sebelumnya telah dinyatakan selesai. Apabila mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan, mekanisme pembayaran ganti kerugian direncanakan dilakukan melalui permohonan pembayaran langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, dan tidak lagi melalui rekening konsinyasi;
      2) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, realisasi Belanja Modal Tanah Persil Lainnya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
         a) Pelaksanaan pengadaan tanah memerlukan pemenuhan tahapan administratif dan yuridis yang meliputi penyiapan dokumen perencanaan, pelaksanaan penilaian (*appraisal*) nilai tanah, serta verifikasi status dan keabsahan kepemilikan tanah. Sampai dengan akhir TA 2025, sebagian tahapan dimaksud belum dapat dituntaskan sepenuhnya;
         b) Pelaksanaan pengadaan tanah juga bergantung pada kesiapan objek tanah dan kesediaan pemilik tanah untuk melakukan pelepasan hak. Pada TA 2025, sebagian rencana pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan karena proses pembahasan dan/atau kesepakatan dengan pemilik tanah belum tercapai;
         c) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan kepastian hukum, asas kehati-hatian, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga realisasi belanja dilakukan hanya terhadap objek tanah yang telah memenuhi seluruh persyaratan; dan
         d) Sisa anggaran Belanja Modal Tanah pada TA 2025 merupakan anggaran yang belum dapat direalisasikan dan akan dievaluasi kembali perencanaannya pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pengadaan tanah.
   b. Belanja Modal Lapangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal tersebut berkaitan dengan rencana Belanja Modal Lapangan Tanah untuk Bangunan Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, di mana pada saat penyusunan anggaran TA 2025 telah dipersiapkan alokasi untuk pembayaran proses penyertifikatan atas tanah Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng yang pada saat itu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu sebanyak 2 (dua) sertifikat yang belum terbit. Namun, sampai dengan akhir TA 2025, proses penyertifikatan dimaksud belum selesai, dan tidak terdapat pembayaran atas proses penyertifikatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang TA 2025 tidak terdapat tagihan dan/atau permohonan pembayaran yang dapat diproses untuk kegiatan dimaksud, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 12***.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.2.1 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Alat Besar | 4.878.553.334,00 | 4.339.065.460,00 | 88,94 | 1.000.015.688,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 32.705.892.586,00 | 29.941.202.984,00 | 91,54 | 9.104.940.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 1.163.318.800,00 | 1.147.030.300,00 | 98,59 | 20.655.000,00 |
| Belanja Modal Alat Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.995.750,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 33.112.747.205,00 | 27.557.100.944,00 | 83,22 | 20.805.699.849,00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 24.887.588.529,00 | 22.816.626.241,80 | 91,67 | 3.381.338.750,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 48.463.757.976,00 | 48.126.584.812,00 | 99,30 | 12.097.276.465,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 26.966.402.483,00 | 26.335.611.827,00 | 97,66 | 6.481.862.238,00 |
| Belanja Modal Komputer | 33.199.218.847,00 | 28.793.392.682,00 | 86,72 | 8.734.885.826,00 |
| Belanja Modal Alat Eksplorasi | 17.982.100,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400.000,00 |
| Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300.000,00 |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 140.000.000,00 | 132.000.002,00 | 94,28 | 775.460.000,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 959.343.200,00 | 804.092.709,00 | 83,81 | 95.500.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 77.172.500,00 | 74.085.000,00 | 95,99 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.816.245.711,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 42.888.128.423,00 | 42.580.231.926,00 | 99,28 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 34.238.172.100,00 | 26.536.024.380,00 | 77,50 | 24.597.605.336,50 |
| **Jumlah** | **283.723.278.083,00** | **259.183.049.267,80** | **91,35** | **130.063.180.613,50** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp129.119.868.654,30 atau 99,27%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Alat Besar dengan kenaikan signifikan sebesar Rp3.339.049.772,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan alat besar/alat penunjang operasional pada beberapa SKPD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain berupa genset (*electric generating set*), *excavator*, pompa, serta alat bantu lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali berupa Pompa Banjir sebesar Rp44.400.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      2) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa *Electric Generating Set* (Genset 150 KVA/120 KWA tipe *silent*) sebesar Rp627.000.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      3) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali, di antaranya:
         a) Alat Bantu Lainnya berupa Tank Pompa Air sebesar Rp29.415.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
         b) Pompa sebesar Rp43.940.460,00 sebanyak 1 (satu) unit.
      4) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di antaranya:
         a) *Electric Generating Set* (*Genset Portable* kapasitas 5.000 watt tipe *silent*) sebesar Rp67.800.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
         b) *Electric Generating Set* (*Genset* 30 kVA tipe *silent*) sebesar Rp1.067.500.000,00 sebanyak 1 (satu) unit.
      5) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali, berupa *Electric Generating Set* sebesar Rp193.500.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      6) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa *Excavator* sebesar Rp1.187.700.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;

7) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di antaranya:
   a) Pompa sebesar Rp839.160.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
   b) Pompa sebesar Rp238.650.000,00 sebanyak 1 (satu) unit.

b. Belanja Modal Alat Angkutan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp20.836.262.984,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan untuk pengadaan kendaraan operasional atau dinas pada beberapa SKPD guna mendukung mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kantor sebesar Rp247.000.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
   2) Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa BYD SEAL Premium sebesar Rp6.787.000.000,00 sebanyak 11 unit;
      b) Paket Kendaraan Bermotor Penumpang berupa 2 (dua) unit Alphard 2.5 Hybrid CVT, 2 (dua) unit Innova Zenix 2.0 Q HV CVT, 2 (dua) unit Fortuner 2.8 VRZ, 5 (lima) unit Veloz 1.5 Q CVT, dan 1 (satu) unit Hiace Commuter M/T sebesar Rp8.491.699.999,00;
      c) Paket Kendaraan Bermotor Penumpang berupa 5 (lima) unit Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista dan 3 (tiga) unit Hiace Premio 2.8 M/T sebesar Rp5.294.100.000,00;
      d) Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa D-TRACKER X 250 sebesar Rp274.199.998,00 sebanyak 3 (tiga) unit. Namun, telah dilakukan pengembalian dengan Jurnal 51/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/4.01.2.23.2.24.01.0007/11/2025 tanggal 12 November 2025;
      e) Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa Sepeda motor listrik Gesits G1 DLX sebesar Rp251.748.000,00 sebanyak 7 (tujuh) unit;
      f) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa Pick Up Mitsubishi New Triton DC Exceed 4x4 MT sebesar Rp1.522.499.999,00 sebanyak 3 (tiga) unit;
      g) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa Hino GB150L MT Bus Sedang Umum Deluxe 30+1 sebesar Rp2.275.600.000,00 sebanyak 2 (dua) unit;
      h) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa MPV Mitsubishi New Xpander Cross Plus CVT sebesar Rp361.819.995,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      i) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa DENZA D9 MPV PREMIUM sebesar Rp1.932.999.999,00 sebanyak 2 (dua) unit;
      j) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa DENZA D9 MPV PREMIUM sebesar Rp1.895.000.000,00 sebanyak 2 (dua) unit; dan
      k) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa Hilux Rangga Pick Up 2.4 Diesel High A/T sebesar Rp320.100.000,00 sebanyak 1 (satu) unit.
   3) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa sepeda motor (Yamaha Mio M3 CW) sebesar Rp183.649.995,00; dan
   4) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa kendaraan listrik roda 3 (tiga) sebesar Rp32.000.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      b) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp16.485.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
      c) Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa Yamaha Freego 125 dan Yamaha Nmax Neo sebesar Rp55.299.999,00 sebanyak 2 (dua) unit.

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.126.375.300,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan alat bengkel dan alat ukur pada beberapa SKPD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain untuk kebutuhan operasional pengawasan, pengendalian, pengujian mutu, penanggulangan bencana, serta kegiatan lapangan, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu berupa *Chainsaw* STIHL 250 dan *Chainsaw* STIHL MS070 sebesar Rp56.410.200,00;
   2) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Peralatan Alat Ukur Lainnya (dalam rangka Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah) sebesar Rp1.023.200.000,00;
   3) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali terdapat Belanja mesin potong kayu berupa gergaji mesin/alat bantu lainnya (*chainsaw* ukuran kecil) sebesar Rp17.980.000,00;
   4) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain berupa *hammer test* sebesar Rp9.025.000,00;

5) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Perkakas Bengkel Service (dalam rangka Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi) sebesar Rp38.278.350,00; dan
6) Pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Ukur Lainnya berupa Termometer Digital (*Thermometer 4-Channel*) sebesar Rp2.136.750,00.

d. Belanja Modal Alat Pertanian memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp48.995.750,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi untuk belanja tersebut pada TA 2025;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 83,22% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024 dengan kenaikan sebesar Rp6.751.401.095. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, baik untuk pengadaan alat kantor, perlengkapan rumah tangga, mebel, maupun peralatan penunjang operasional lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan hasil pelaksanaan pengadaan;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.435.287.491,80 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan/perkuatan sarana pendukung komunikasi dan pemancar (termasuk pekerjaan peralatan pemancar), serta pengadaan peralatan studio audio dan video untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional terdapat Peralatan Studio Video dan Film serta Peralatan Studio Audio sebesar Rp15.000.000,00; dan
      b) Pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan terdapat Alat Studio Lainnya berupa kamera video *conference* sebesar Rp28.280.000,00;
      c) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional terdapat peralatan studio sebesar Rp7.150.770,00; dan
      d) Pada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya terdapat peralatan studio audio berupa *sound system* dan *dry box* dengan total sebesar Rp58.081.860,00.
   2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Peralatan Studio Audio dan Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp64.450.000,00; dan
      b) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian terdapat Peralatan Studio Audio sebesar Rp5.716.500,00;
   3) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Alat Studio Lainnya berupa rak *sound system* dan *stand mic* serta Peralatan Studio Video dan Film berupa peralatan *podcast* sebesar Rp35.432.500,00;
      b) Pada UPTD Pengendalian Bencana Daerah terdapat Alat Komunikasi Lainnya berupa pengadaan HT dan radio RIG, Alat Komunikasi Radio VHF berupa antena/perangkat VHF, serta Alat Komunikasi Khusus berupa perkuatan perangkat sistem sirine BTEWS dan perangkat radio komunikasi kebencanaan sebesar Rp3.532.308.001,00.
   4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berupa Peralatan Studio Video dan Film berupa *group conference with expansion mic* sebesar Rp25.999.530,00;
   5) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera sebesar Rp23.300.000,00;
   6) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di antaranya:
      a) Peralatan Pemancar Lainnya berupa pekerjaan peralatan pemancar (Termin I dan Termin II), Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera Sony A7III dan gimbal Zhiyun Weebill S, Peralatan Studio Audio berupa alat perekam audio, Alat Studio Lainnya berupa memori kamera, serta Sumber Tenaga berupa *stabilizer* sebesar Rp9.086.314.700,00;
      b) Pada UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa *drone for photogrammetry*, kamera digital Sony Alpha 6400 (16–50), serta *dry box* sebesar Rp107.278.400,00; dan
      c) Pada UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film, Peralatan Studio Audio berupa peningkatan *public address* (PA *system*) dan *mic clip wireless*, serta Alat Studio Lainnya sebesar Rp447.373.951,80.

7) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa perangkat *podcast* dan kamera/tripod, Alat Studio Lainnya berupa alat video *conference*, serta Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp199.529.500,00;
8) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film serta Peralatan Studio Audio sebesar Rp187.400.001,00;
9) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera, Alat Studio Lainnya berupa kamera dan Alat Studio Lainnya berupa peralatan video *conference* sebesar Rp124.400.000,00;
10) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa *videotron* sebesar Rp263.500.000,00;
11) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdapat Alat Studio Lainnya berupa rak *mixer* serta Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp119.726.999,00;
12) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio berupa *sound system* dan alat perekam suara, serta Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera dan *display videowall* sebesar Rp8.033.659.082,00;
13) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio sebesar Rp135.258.999,00;
14) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera dan tripod (Sony A7III *mirrorless camera kit* 28–70 mm) sebesar Rp40.549.999,00;
15) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali terdapat Alat Komunikasi Lainnya berupa *Handy Talky* (HT) serta Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp43.525.248,00;
16) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali berupa Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera foto serta Peralatan Studio Audio berupa *mic omnidirectional* sebesar Rp97.900.001,00;
17) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp115.240.200,00; dan
18) Pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio berupa alat perekam suara sebesar Rp19.250.000,00.

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp36.029.308.347,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Bali guna mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pemenuhan kebutuhan operasional layanan, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
      a) RSUD Bali Mandara terdapat Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam berupa *Handheld* USG *Doppler*, Alat Kedokteran Mata berupa *Fotofundus*, serta Alat Kedokteran Nuklir berupa PET/CT, sebesar Rp45.923.500.000,00;
      b) Pada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya terdapat Alat Kesehatan Umum Lainnya berupa *bed* pasien, serta Alat Kedokteran Umum berupa *Trolley Emergency Advance* PC sebanyak 2 (dua) unit dan Peralatan Penunjang Layanan Kesehatan Lainnya sebesar Rp947.655.496,00; dan
      c) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional terdapat Belanja Modal Alat Kedokteran dan Belanja Modal Alat Laboratorium pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebesar Rp1.244.254.316,00.
   2) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Kedokteran Umum pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp11.175.000,00.

h. Belanja Modal Alat Laboratorium dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.853.749.589,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan alat laboratorium dan peralatan pendukung pengujian/praktik pada beberapa perangkat daerah, terutama untuk mendukung penyediaan sarana praktik/laboratorium pendidikan serta kebutuhan pengujian mutu dan monitoring teknis, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya serta Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (Laboratorium Pendidikan) sebesar Rp25.907.947.988,00;
   2) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional berupa Belanja Modal Alat Kedokteran dan Belanja Modal Alat Laboratorium pada Sub Kegiatan SPGDT sebesar Rp4.560.000,00; dan

b) Pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan berupa alat laboratorium fisika pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional sebesar Rp9.324.000,00.

3) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat Laboratorium Kearsipan berupa *paper shredder* sebesar Rp5.439.000,00;
4) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi serta Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp327.640.000,00;
5) Pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berupa Alat Laboratorium Umum berupa *pippet controller* serta Alat Laboratorium Lainnya berupa *accumax micropippete* sebesar Rp71.060.839,00; dan
6) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berupa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya serta Alat Laboratorium Lain sebesar Rp9.640.000,00.

i. Belanja Modal Komputer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp20.058.506.856,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan dan pembaruan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara lebih intensif untuk mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik, penguatan layanan digital, serta pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah, dengan komposisi sebagai berikut:
   1) Sebesar 62,74% dari total realisasi atau Rp18.064.372.228,00 merupakan Belanja Modal Personal Computer (realisasi setelah pengembalian belanja). Sebagai contoh, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk pengadaan komputer pada SMKN se-Bali;
   2) Sebesar 23,74% dari total realisasi atau Rp6.836.551.067,00 merupakan Belanja Modal Peralatan Jaringan, yang terutama terkait dengan penguatan infrastruktur jaringan dan pusat kendali. Sebagai contoh, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk pekerjaan HCI *Cloud System* serta pengadaan perangkat jaringan (antara lain *core switch/ switch* dan perangkat pendukung); dan
   3) Sebesar 13,52% dari total realisasi atau Rp3.892.469.387,00 merupakan Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, dan Belanja Modal Komputer Jaringan.
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp45.400.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat efisiensi dan pengendalian belanja sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025, sehingga Belanja Modal Alat Eksplorasi dilakukan penyesuaian prioritas dan penjadwalan kembali;
k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat efisiensi dan pengendalian belanja sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025, sehingga Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dilakukan penyesuaian prioritas dan penjadwalan kembali;
l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp57.300.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi untuk belanja tersebut pada TA 2025;
m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dengan penurunan signifikan sebesar (Rp643.459.998,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali difokuskan pada pemenuhan kebutuhan alat keselamatan kerja berupa tenda pengungsi, sedangkan kebutuhan lainnya terbantu melalui penerimaan hibah alat *Search and Rescue* (SAR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BAST-290/DSP-103/LOGPAL-BALI/D=III/BNPB/09/2025, sehingga pemenuhan sebagian kebutuhan peralatan keselamatan kerja dapat didukung melalui mekanisme hibah;

n. Belanja Modal Rambu-Rambu dengan kenaikan signifikan sebesar Rp708.592.709,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi kegiatan peningkatan keselamatan dan manajemen lalu lintas melalui pengadaan dan pemasangan rambu-rambu,

termasuk rambu bersuar dan rambu lalu lintas darat lainnya, serta penyediaan sarana pendukung pengendalian lalu lintas, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Rambu Tidak Bersuar berupa papan informasi Jalan Provinsi sebesar Rp99.067.500,00; dan
2) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, di antaranya:
   a) Pada UPTD Perlengkapan Jalan berupa Rambu Bersuar dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya, antara lain pengadaan dan pemasangan *warning light* tenaga surya serta Zona Selamat Sekolah (ZoSS) termasuk kegiatan pengawasan, sebesar Rp512.525.209,00; dan
   b) Pada UPTD Pusat Pengendalian LLAJ berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya berupa alat hitung lalu lintas portabel sebesar Rp192.500.000,00.

o. Belanja Modal Peralatan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp74.085.000,00 pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat kebutuhan pengadaan peralatan olahraga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan aktivitas olahraga atau kompetisi, serta pemenuhan sarana pendukung kegiatan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik untuk kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) serta Belanja Modal Peralatan Permainan untuk kegiatan *Training Center* (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) sebesar Rp66.960.000,00;
   2) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berupa Belanja Modal Peralatan Permainan terkait kegiatan Belanja Jantra Tradisi Bali (Terompah Panjang) sebesar Rp3.375.000,00; dan
   3) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa Belanja Modal Peralatan Senam sebesar Rp3.750.000,00.
p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp42.816.245.711,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2025 belanja yang pada tahun sebelumnya disajikan pada nomenklatur Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS telah dialihkan penyajiannya menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, sebagai penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja Dana BOS dalam APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP dengan realisasi sebesar Rp42.580.231.926,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat realisasi belanja modal yang bersumber dari BOSP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan mesin pada satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, sesuai ketentuan pemanfaatan dana BOSP, dengan komposisi sebagai berikut:
   1) Sebesar 99,41% merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler atau sebesar Rp42.330.526.400,00, yang terdiri dari jenjang SMA sebesar Rp21.517.584.853,00, jenjang SMK sebesar Rp19.380.954.047,00, dan jenjang SLB sebesar Rp1.431.987.500,00; dan
   2) Sebesar 0,59% merupakan Belanja Modal BOSP-BOS Kinerja atau sebesar Rp249.705.526,00, yang terdiri dari jenjang SMA sebesar Rp83.184.526,00 dan jenjang SMK sebesar Rp166.521.000,00.
r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,50% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD direalisasikan sesuai kebutuhan layanan serta kesiapan pelaksanaan pengadaan pada masing-masing BLUD, sehingga sampai dengan akhir TA 2025 masih terdapat sebagian rencana belanja modal yang belum dapat direalisasikan.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 13***.

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.3.1 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 312.766.552.324,00 | 233.401.336.963,35 | 74,62 | 398.486.846.224,00 |
| Belanja Modal Monumen | 60.000.000,00 | 24.719.700,00 | 41,19 | 5.651.346.599,00 |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 3.418.527.580,00 | 3.100.165.659,00 | 90,68 | 14.818.500,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 5.372.176.825,00 | 3.967.775.274,67 | 73,85 | 3.336.283.051,22 |
| **Jumlah** | **321.617.256.729,00** | **240.493.997.597,02** | **74,77** | **407.489.294.374,22** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp166.995.296.777,20) atau -40,98%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,62% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Sebesar 47,99% dari total realisasi atau Rp112.009.801.566,53 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa pembangunan/peningkatan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri beserta sarana pendukungnya. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang mencakup uang muka, pembayaran termin/tahap, retensi, serta belanja perencanaan dan pengawasan;
      2) Sebesar 22,41% dari total realisasi atau Rp52.307.994.374,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, di antaranya:
         a) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di antaranya:
            (1) Bangunan Fasilitas Umum untuk penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah/Turyapada (antara lain pekerjaan sarana dan prasarana pusat kendali, bangunan pendukung, serta pembangunan *tower* transmisi sinyal beserta fasilitas penunjangnya) sebesar Rp49.220.549.800,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang telah mencakup pembayaran termin/tahap, retensi, serta paket pendukung; dan
            (2) Pada UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali berupa Bangunan Fasilitas Umum (Teleskop Area *Panoramic*) sebesar Rp995.000.000,00.
         b) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Fasilitas Umum dalam bentuk jasa perencanaan sebesar Rp10.762.612,00, dengan realisasi pada tanggal 10 Desember 2025;
         c) Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berupa Bangunan Fasilitas Umum (Rumah Perlindungan Sementara) sebesar Rp2.081.681.962,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang telah mencakup pembayaran termin/tahap serta perencanaan/pengawasan.
      3) Sebesar 7,84% dari total realisasi atau Rp18.303.695.141,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Kesehatan, di antaranya:
         a) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
            (1) Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berupa Bangunan Kesehatan (pembangunan/rehabilitasi sarana layanan Napza) sebesar Rp13.892.816.425,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang telah mencakup uang muka, pembayaran termin/tahap, retensi, serta perencanaan dan pengawasan;
            (2) Pada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali berupa Bangunan Kesehatan dalam bentuk jasa perencanaan (*Masterplan* dan DED) sebesar Rp686.417.118,00; dan
            (3) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional berupa Bangunan Kesehatan (antara lain pekerjaan penyekatan/interior penunjang layanan) sebesar Rp545.844.948,00.
         b) Pada UPTD Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berupa Bangunan Kesehatan (rehabilitasi ruang kesehatan pada unit layanan sosial) sebesar Rp3.178.616.650,00.
      4) Sebesar 7,62% dari total realisasi atau Rp17.792.475.544,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan, pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Tempat Persidangan (rehabilitasi Gedung Ruang Sidang Utama) sebesar Rp17.792.475.544,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang mencakup uang muka, pembayaran termin/tahap, retensi, serta pengawasan;

5) Sebesar 6,08% dari total realisasi atau Rp14.195.386.126,76 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, di antaranya:
   a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (kegiatan penunjang, antara lain perencanaan dan/atau pekerjaan penataan ruang pendukung) sebesar Rp275.033.848,00;
   b) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
      (1) Bangunan Gedung Kantor (jasa perencanaan rehabilitasi gedung kantor) sebesar Rp96.790.046,40; dan
      (2) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi atap/plafon serta belanja pendukung perencanaan/pengawasan yang terkait) sebesar Rp497.646.959,00.
   c) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (perencanaan teknis/reviu perencanaan rehabilitasi gedung perkantoran) sebesar Rp296.116.874,00;
   d) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, di antaranya:
      (1) Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor (termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan pengawasan) sebesar Rp1.695.127.962,00; dan
      (2) Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Bangunan Gedung Kantor (pembangunan gedung kantor UPTD PPA beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp1.942.430.075,00.
   e) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor terkait penguatan fasilitas pusat kendali (antara lain rehabilitasi ruang rapat SPBE, pembangunan ruang *power house*, pengawasan pusat kendali, serta perencanaan rehabilitasi gedung) sebesar Rp753.409.445,78;
   f) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (revitalisasi/rehabilitasi gedung kantor beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp267.978.939,61;
   g) Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (pekerjaan sarana prasarana gedung beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp127.932.000,00;
   h) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berupa rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor beserta perencanaan dan pengawasan sebesar Rp2.126.305.533,00;
   i) Pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi toilet gedung) sebesar Rp140.279.000,00;
   j) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (ruang konsultasi DPRD) sebesar Rp496.080.804,00;
   k) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi ruang/lantai serta penyelesaian pembayaran dan pengawasan) sebesar Rp220.813.578,00;
   l) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (antara lain pembangunan Gedung TNKB dan Kantin serta penataan/pengembangan ruang layanan pada UPTD PPRD) sebesar Rp4.773.709.179,97;
   m) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi/renovasi bagian bangunan kantor) sebesar Rp161.681.235,00;
   n) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali berupa rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor beserta perencanaan dan pengawasan sebesar Rp192.895.100,00; dan
   o) Pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi bangunan gedung kantor) sebesar Rp131.155.501,00.
6) Sebesar 4,77% dari total realisasi atau Rp11.135.820.829,97 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah, di antaranya:
   a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (antara lain pembangunan Padmasana pada satuan pendidikan beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp482.085.473,97;
   b) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (antara lain penataan/akses kawasan suci dan drainase kawasan suci beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp10.418.361.397,00; dan

c) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (rehabilitasi pura di lingkungan kantor beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp235.373.959,00.

7) Sebesar 3,28% dari total realisasi atau Rp7.656.163.381,09 terdiri atas beberapa jenis Belanja Modal Bangunan, di antaranya:
   a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (pembangunan Gedung Aula beserta perencanaan, pengawasan, dan retensi) sebesar Rp1.604.784.000,00;
   b) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Bangunan Parkir (perencanaan teknis gedung parkir kawasan pelabuhan) dan Flat/Rumah Susun (kegiatan penunjang rusunawa) sebesar Rp922.408.169,00;
   c) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gudang (pembangunan gudang BPBD beserta perencanaan, pengawasan, dan retensi) sebesar Rp2.041.600.840,36;
   d) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berupa Taman sebesar Rp9.758.010,00;
   e) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di antaranya:
      (2) Bangunan Gedung untuk Pos Jaga dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp116.525.290,76; dan
      (3) Pada UPTD Museum Bali berupa Bangunan Gedung Museum (rehabilitasi/restorasi dan perencanaan) sebesar Rp1.036.845.964,00.
   f) Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali berupa Taman dan Bangunan Terbuka di lingkungan kantor sebesar Rp143.931.624,00;
   g) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Terbuka serta Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/Taman sebesar Rp484.419.319,00;
   h) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool dan Bangunan Parkir sebesar Rp37.125.225,00;
   i) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Terbuka (kanopi pada UPTD PPRD di kabupaten/kota) sebesar Rp277.854.936,97; dan
   j) Pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa Bangunan Gudang (gudang obat *expired* beserta pengawasan) dan Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp778.780.002,00; dan
   k) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berupa Bangunan Terbuka penunjang pengelolaan persampahan sebesar Rp202.130.000,00.

b. Belanja Modal Monumen memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 41,19% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp5.626.626.899,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi serta pengendalian belanja;
c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan kenaikan signifikan sebesar Rp3.085.347.159,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan paket-paket pekerjaan Belanja Modal Pagar, sehingga kenaikan realisasi dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan fisik, pembayaran uang muka, pembayaran termin/angsuran, pembayaran jasa pengawasan, serta pembayaran retensi atas kegiatan pembangunan/pengadaan/rehabilitasi tembok penyengker/pagar, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp2.672.641.000,00, yang berlokasi di SMKN 1 Tembuku, SMKN 2 Negara, SMKN 2 Tegallalang, dan SLBN 2 Denpasar.
   2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebesar Rp341.560.000,00, yang berlokasi di Rusunawa ASN Penatih (Relokasi Program Provinsi), terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran progres 95%, dan retensi 5% atas pengadaan tembok pagar/*penyengker*;
   3) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebesar Rp74.242.800,00 berlokasi di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Jl. Melati No. 23, Denpasar untuk rehabilitasi atau renovasi tembok pada bagian belakang kantor; dan
   4) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp11.721.859,00, yang berlokasi di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali Jl. D.I. Panjaitan No. 14 Niti Mandala, Denpasar berupa pekerjaan pintu pagar.

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,85% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada BLUD yang volumenya relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penyerapannya belum dapat mendekati target dikarenakan sebagian besar alokasi belanja merupakan pekerjaan fisik yang memerlukan rangkaian tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan pengadaan, meliputi persiapan perencanaan (DED), penyusunan dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta masa sanggah, sehingga penandatanganan kontrak pada beberapa paket pekerjaan baru dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dampaknya, pekerjaan fisik dan realisasi pembayaran (uang muka atau termin) hanya dapat berjalan dalam sisa waktu pelaksanaan yang tersedia, sehingga realisasi pada TA 2025 belum optimal meskipun secara nominal menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 14***.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.4.1 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 210.198.677.070,00 | 183.290.331.207,36 | 87,19 | 67.093.118.028,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air | 22.508.489.772,00 | 19.653.582.341,00 | 87,31 | 11.454.013.321,00 |
| Belanja Modal Instalasi | 19.681.752.757,00 | 12.477.297.859,00 | 63,39 | 1.627.853.890,69 |
| Belanja Modal Jaringan | 34.846.550.155,00 | 24.854.390.901,45 | 71,32 | 10.212.120.985,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 2.984.500.000,00 | 411.996.291,00 | 13,80 | 4.064.342.866,00 |
| **Jumlah** | **290.219.969.754,00** | **240.687.598.599,81** | **82,93** | **94.451.449.090,69** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp146.236.149.509,12 atau 154,83%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp116.197.213.179,36 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan volume dan nilai pekerjaan infrastruktur jalan provinsi (pemeliharaan berkala, rekonstruksi/peningkatan, pelebaran, serta rehabilitasi/perkuatan tebing dan saluran) pada sejumlah ruas, sehingga pembayaran termin/MC dan retensi yang mengikuti progres fisik juga menjadi lebih besar, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp183.258.286.668,00, terdiri dari:
         a) Belanja Modal Jalan Provinsi sebesar Rp179.458.803.918,00, yang direalisasikan untuk paket pemeliharaan berkala, rekonstruksi/peningkatan jalan, pelebaran menuju standar, serta penanganan titik rawan (perkuatan tebing dan saluran) pada ruas strategis, antara lain ruas Tegaltamu–Payangan–Baturanyar (Segmen I–III), Pempatan–Ban, Bts. Kota Amlapura–Seraya–Culik, Wanagiri–Munduk–Mayong, Tampaksiring–Tegallalang, Rendang–Bts. Kota Amlapura, Ketewel–Sukawati, serta Bts. Kediri–Tanah Lot, dan ruas provinsi lainnya sesuai progres fisik serta ketentuan pembayaran termin/retensi;
         b) Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp3.158.015.748,00, yang dipergunakan untuk dukungan perencanaan teknis dan dokumen pendukung pada beberapa rencana penanganan/akses jalan, antara lain *Basic Design* Jalan Baru Sang Hyang Ambu, perencanaan Jalan Akses menuju Pelabuhan Sanur, penyusunan dokumen perencanaan/pendukung untuk Jalan Baru Mahendradatta–Sunset Road, serta

dukungan awal pada Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja–Mengwitani (kebutuhan patok/pemetaan/pemecahan sertifikat); dan

c) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi sebesar Rp641.467.002,00, yang dipergunakan terutama untuk perencanaan teknik jembatan pada beberapa lokasi prioritas, antara lain perencanaan Jembatan Tukad Sangsang II (ruas Bts. Kota Bangli–Kayuambua), perencanaan jembatan pada ruas Pempatan–Ban, serta perencanaan penggantian jembatan pada ruas Tampaksiring–Tegallalang.

2) Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp32.044.539,36, berupa pekerjaan *paving* pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.

b. Belanja Modal Bangunan Air dengan kenaikan signifikan sebesar Rp8.199.569.020,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan pelaksanaan paket pekerjaan bangunan air, terutama pembangunan pengaman pantai serta rehabilitasi jaringan irigasi, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.623.829.936,00, di antaranya:

a) Pembangunan Pengaman Pantai Cengceng Kembar di Kabupaten Jembrana yang meliputi konstruksi bangunan pengaman pantai (*sea wall*), pengawasan pelaksanaan, serta retensi sebesar Rp5.870.087.000,00;

b) Pembangunan Pengaman Pantai Syahbandar di Kabupaten Karangasem yang meliputi konstruksi *sea wall*, penyusunan dokumen lingkungan, pengawasan pelaksanaan, serta retensi sebesar Rp3.633.234.480,00;

c) Perencanaan teknis (DED) Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Tianyar Kabupaten Karangasem yang mencakup penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan sebesar Rp227.826.597,00;

d) Penyusunan dokumen lingkungan pembangunan pengaman pantai pada Pantai Julah (Kabupaten Buleleng) dan Pantai Penyaringan (Kabupaten Jembrana) sebesar Rp198.966.497,00;

e) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bekutel dan D.I. Apuan (Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar) yang meliputi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, pengawasan pelaksanaan, serta tahapan penyelesaian/retensi sebesar Rp5.284.888.171,00;

f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Oongan (Kota Denpasar) dan D.I. Padpadan (Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar) yang meliputi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, pengawasan pelaksanaan, serta tahapan penyelesaian/retensi sebesar Rp3.567.692.786,00;

g) Reviu desain jaringan irigasi pada D.I. Balian (Kabupaten Tabanan), D.I. Tembuku (Kabupaten Bangli–Kabupaten Gianyar), D.I. Oongan (Kota Denpasar), D.I. Padpadan (Kabupaten Bangli–Kabupaten Gianyar), serta D.I. Dwi Eka Buana (Kabupaten Bangli–Kabupaten Gianyar) yang mencakup penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan sebesar Rp641.677.669,00; dan

h) Perencanaan bangunan tampungan air (embung) yang mencakup penyusunan dokumen lingkungan Pembangunan Embung Cemara di Kabupaten Karangasem dan kajian teknis Embung Puragae di Kabupaten Karangasem sebesar Rp199.456.736,00.

2) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp29.752.405,00, berupa Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor (Saluran Pembuang Air Kotor) sebesar Rp29.752.405,00.

c. Belanja Modal Instalasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 63,39% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp10.849.443.968,31 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:

a) Pada RSUD Bali Mandara sebesar Rp8.092.853.133,00, berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mencakup konstruksi/pembangunan IPAL serta pengawasan pembangunan IPAL; dan

b) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional sebesar Rp82.816.666,00, berupa:

(1) Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp23.430.000,00; dan

(2) Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Klinik Pratama sebesar Rp59.386.666,00.

2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.401.645.800,00, berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang mencakup

perencanaan pemasangan pipa, pemasangan pipa tersier dan sambungan pelanggan, pengawasan pelaksanaan, serta pembayaran bertahap (uang muka, termin, dan retensi);

3) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp1.198.500.000,00, berupa:
   a) Instalasi Panel dan *Cable System* Ruang Pusat Kendali Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp594.200.000,00; dan
   b) Instalasi Sistem *Sky Walk* pada Pusat Kendali Pemerintah Daerah sebesar Rp604.300.000,00.
4) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.880.000,00, berupa Paket Jaringan Internet pada subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
5) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp692.602.260,00, berupa Instalasi Pengolahan Gas Metana TPA Regional Sarbagita.

d. Belanja Modal Jaringan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 71,32% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp14.642.269.916,45 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat penambahan pelaksanaan paket pekerjaan jaringan, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp23.171.395.700,00, berupa:
      a) Pengembangan SPAM Regional Petanu untuk Kawasan Denpasar Selatan (DAK) yang mencakup uang muka, termin I–IV, pengawasan pekerjaan, dan retensi sebesar Rp15.737.223.300,00;
      b) Optimalisasi SPAM Petanu (Pengadaan dan Pemasangan Pompa *Booster* Optimalisasi JDU SPAM Petanu *Tapping* Ketewel) yang mencakup uang muka/termin pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan retensi sebesar Rp7.334.932.500,00; dan
      c) Perencanaan optimalisasi SPAM Petanu dan SPAM Penet (*Tapping* Ketewel dan *Tapping* Berawa) sebesar Rp99.239.900,00.
   2) Pada Dinas Pariwisata sebesar Rp159.573.378,00, berupa Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya sebesar Rp159.573.378,00;
   3) Pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali sebesar Rp157.065.000,00, berupa Penyediaan/penataan Jaringan Listrik pada subkegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp157.065.000,00;
   4) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp36.452.400,00, berupa Perluasan Jaringan Instalasi Listrik pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp36.452.400,00;
   5) Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp9.990.000,00, berupa Penambahan Daya Listrik pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung sebesar Rp9.990.000,00;
   6) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, berupa Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Rp1.072.246.214,00; dan
   7) Pada UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali berupa pekerjaan belanja modal jaringan listrik lainnya, pengawasan sistem transmisi listrik, dan pengadaan sistem transmisi listrik sebesar Rp247.668.209,45.

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 13,80% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp3.652.346.575,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada BLUD relatif lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi jumlah paket maupun nilai pekerjaan yang dapat dituntaskan dalam tahun berjalan. Selain itu, penyerapannya belum dapat mendekati target karena sebagian besar alokasi belanja merupakan pekerjaan fisik yang memerlukan rangkaian tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan pengadaan, meliputi persiapan perencanaan (survei/ukur teknis dan penyusunan dokumen perencanaan), penyusunan dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta masa sanggah, sehingga pelaksanaan pada beberapa paket pekerjaan tidak dapat segera dimulai atau baru berjalan pada paruh akhir tahun anggaran.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 15***.

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.5.1 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 45.000.000,00 | 44.799.600,00 | 99,55 | 98.531.370,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 300.000.000,00 | 298.680.549,00 | 99,56 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.752.067.697,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 32.013.774.193,00 | 31.211.500.171,00 | 97,49 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 2.060.000.000,00 | 42.000.000,00 | 2,03 | 2.532.000.000,00 |
| **Jumlah** | **34.418.774.193,00** | **31.596.980.320,00** | **91,80** | **31.382.599.067,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp214.381.253,00 atau 0,68%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dengan penurunan signifikan sebesar (Rp53.731.770,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan hanya berasal dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, sehingga nilai realisasinya relatif terbatas. Selain itu, penurunan dibandingkan TA 2024 dapat dipengaruhi oleh pergeseran prioritas kebutuhan bahan pustaka serta perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
   b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dengan realisasi baru sebesar Rp298.680.549,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat pelaksanaan kegiatan renovasi sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa pekerjaan renovasi Gedung Rusunawa ASN Penatih yang masih berada dalam tahapan pekerjaan/penyelesaian, sehingga pengeluarannya dicatat terlebih dahulu sebagai Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
   c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp28.752.067.697,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2025 belanja yang pada tahun sebelumnya disajikan pada nomenklatur Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS telah dialihkan penyajiannya menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP, sebagai penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja Dana BOS dalam APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
   d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dengan realisasi baru sebesar Rp31.211.500.171,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat regulasi baru pada petunjuk dan teknis pengelolaan Dana BOSP yang menyatakan bahwa 10% dari Dana BOSP harus digunakan untuk pembelian buku; dan
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 2,03% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp2.490.000.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi, berupa Belanja Aplikasi ERM SIMRS yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada TA 2025 baru akan dibayarkan pada TA 2026. Adapun nilai yang menjadi kewajiban telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Tahun 2025 pada Kewajiban Jangka Pendek serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.964.700.000,00;
      2) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, berupa Windows Server dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp42.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.000.000,00. Sisa anggaran tersebut terjadi dikarenakan pada saat perencanaan, harga yang tersedia pada e-katalog masih mengacu pada Windows Server Versi 2022 sebesar Rp30.000.000,00 per item, sedangkan pada saat realisasi telah tersedia Windows Server Versi 2025 dengan harga Rp21.000.000,00 per item.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 16***.

### 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.6.1 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 176.649.600,00 | 153.536.964,90 | 86,91 | 838.900.000,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 536.000.000,00 | 389.922.000,00 | 72,74 | 0,00 |
| **Jumlah** | **712.649.600,00** | **543.458.964,90** | **76,25** | **838.900.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp295.441.035,10) atau -35,22%.

### 5.1.2.2.6.1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.6.1.1 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 176.649.600,00 | 153.536.964,90 | 86,91 | 838.900.000,00 |
| **Jumlah** | **176.649.600,00** | **153.536.964,90** | **86,91** | **838.900.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp685.363.035,10) atau -81,70%.

#### 5.1.2.2.6.1.1 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.6.1.1.1 Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 116.649.600,00 | 96.015.000,00 | 82,31 | 49.300.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian | 60.000.000,00 | 57.521.964,90 | 95,86 | 789.600.000,00 |
| **Jumlah** | **176.649.600,00** | **153.536.964,90** | **86,91** | **838.900.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp685.363.035,10) atau -81,70%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software dengan kenaikan signifikan sebesar Rp46.715.000,00 pada TA 2025 merupakan Sistem Monitoring Fasilitas Keselamatan Jalan pada UPTD PPLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Bali; dan
   b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian dengan penurunan signifikan sebesar (Rp732.078.035,10) pada TA 2025 berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di mana pengadaan kajian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, untuk mendukung pengambilan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan strategis. Selisih anggaran dengan realisasi terjadi dikarenakan efisiensi proses pengadaan dan penyesuaian kebutuhan riil terhadap materi kajian yang diperlukan.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 17***.

#### 5.1.2.2.6.2 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.6.2.1 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 536.000.000,00 | 389.922.000,00 | 72,74 | 0,00 |
| **Jumlah** | **536.000.000,00** | **389.922.000,00** | **72,74** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp389.922.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Belanja Modal Aset Lainnya BLUD memiliki capaian yang belum optimal dengan realisasi baru sebesar Rp389.922.000,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sisa anggaran atas 2 (dua) paket pengadaan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yaitu pengadaan server berupa SQL Server 2022 *Standard Core* 4 dan pengadaan lisensi Forum Zeiss ke PACS. Pada pengadaan server, anggaran disusun berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan dan potensi kenaikan harga dari tahun perencanaan, sehingga pagu anggaran lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi. Sementara itu, pada pengadaan lisensi, berdasarkan penawaran awal penyedia yang melebihi pagu anggaran dan karena pada saat penyusunan anggaran perubahan belum terdapat kepastian hasil negosiasi harga, dilakukan penyesuaian anggaran pada anggaran perubahan. Setelah dilakukan negosiasi, penyedia menyetujui harga sesuai pagu anggaran induk, sehingga terdapat sisa anggaran pada anggaran perubahan.

### 5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Berikut ini adalah Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3.1 Rincian Belanja Tidak Terduga**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Tidak Terduga | 53.861.777.244,00 | 14.075.388.800,30 | 26,13 | 7.441.134.041,00 |
| **Jumlah** | **53.861.777.244,00** | **14.075.388.800,30** | **26,13** | **7.441.134.041,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tidak Terduga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.634.254.759,30 atau 89,16%.

#### 5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini adalah Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3.1.1 Rincian Belanja Tidak Terduga**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Tidak Terduga | 53.861.777.244,00 | 14.075.388.800,30 | 26,13 | 7.441.134.041,00 |
| **Jumlah** | **53.861.777.244,00** | **14.075.388.800,30** | **26,13** | **7.441.134.041,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tidak Terduga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.634.254.759,30 atau 89,16%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Belanja Tidak Terduga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 26,13% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp6.634.254.759,30 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebagai dana kontinjensi untuk kondisi darurat, kejadian luar biasa, dan keadaan mendesak lainnya, sehingga realisasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan yang memenuhi kriteria serta didukung dasar yang memadai, dan akibatnya tidak seluruh alokasi dapat digunakan. Walau demikian, realisasi TA 2025 meningkat dibandingkan TA 2024 seiring adanya kebutuhan penanganan yang relatif lebih besar, terutama penyaluran bantuan sosial yang bersifat tidak dapat direncanakan untuk penanganan bencana/musibah dan pasca bencana serta pembayaran restitusi/pengembalian yang memerlukan tindak lanjut segera.
2. Pemerintah Provinsi Bali telah merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan kondisi darurat, kejadian luar biasa, dan keadaan mendesak lainnya pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi bantuan sosial yang bersifat tidak dapat direncanakan sebesar Rp12.358.200.000,00, yang diberikan sesuai kebutuhan penanganan bencana/musibah dan pasca bencana sebagai berikut:
      1) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan sebesar Rp75.000.000,00, tercatat pada 10 Maret 2025;
      2) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan sebesar Rp1.303.000.000,00, tercatat pada 10 Maret 2025;
      3) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp957.000.000,00, tercatat pada 21 April 2025;
      4) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp982.500.000,00, tercatat pada 5 Juni 2025;
      5) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Badung sebesar Rp1.439.300.000,00, tercatat pada 24 Juli 2025;
      6) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan sebesar Rp766.400.000,00, tercatat pada 12 Agustus 2025;
      7) Bantuan sosial berupa sarana prasarana perekonomian dan santunan penguatan ekonomi di Kota Denpasar sebesar Rp2.714.000.000,00, tercatat pada 17 September 2025;
      8) Bantuan sosial untuk perbaikan tempat suci/ibadah akibat bencana di Kota Denpasar sebesar Rp710.500.000,00, tercatat pada 17 September 2025;
      9) Bantuan sosial pasca bencana/musibah untuk perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum, tempat suci/ibadah, sarana prasarana perekonomian, serta santunan luka berat di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar sebesar Rp886.500.000,00, tercatat pada 17 November 2025; dan
      10) Bantuan sosial pasca bencana/musibah untuk perbaikan sarana prasarana perekonomian, rumah masyarakat, fasilitas umum, tempat suci/ibadah, serta santunan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar sebesar Rp2.524.000.000,00, tercatat pada 11 Desember 2025.
   b. Selain bantuan sosial, BTT pada TA 2025 juga digunakan untuk pembayaran restitusi/pengembalian yang memerlukan tindak lanjut segera sebesar Rp3.426.782.296,00, sebagai berikut:
      1) Pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan PKB dan BBNKB Bulan Desember 2024 atas nama Putu Agus Yanta sesuai SK Gubernur Bali Nomor 385/04-E/HK/2025 tanggal 14 April 2025 sebesar Rp21.888.800,00;

2) Pembayaran restitusi Dana BOSP terkait pengembalian SiLPA Dana BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022 melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 5004 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp3.056.472.413,00;
3) Pembayaran restitusi Dana BOSP TA 2021 sampai dengan TA 2023 pada SMKN 2 Negara melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 5003 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp42.400.000,00;
4) Pembayaran restitusi Dana BOSP terkait belanja barang dan jasa BOSP yang tidak sesuai ketentuan melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 5005 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 (termasuk pembulatan SIMPONI) sebesar Rp143.132.185,00;
5) Pembayaran restitusi kelebihan setoran ke Kas Daerah terkait SiLPA Dana BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022 pada SMAN 1 Gianyar serta temuan BPK RI atas belanja honorarium BOSP pada SLBN 1 Denpasar sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 6755 Tahun 2025 sebesar Rp3.516.500,00; dan
6) Pembayaran restitusi pengembalian Dana BOSP yang tidak sesuai ketentuan melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 8792 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 (termasuk pembulatan SIMPONI) sebesar Rp159.372.398,00.

c. Terdapat pengembalian/penyetoran kembali sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Pengembalian bantuan sosial kebencanaan di Desa Adat Utu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebesar Rp85.000.000,00;
2) Pengembalian bantuan sosial kebencanaan di Kabupaten Buleleng sebesar Rp19.000.000,00;
3) Pengembalian bantuan sosial berupa sarana prasarana perekonomian dan santunan penguatan ekonomi di Kota Denpasar sebesar Rp12.000.000,00; dan
4) Pengembalian bantuan sosial pasca bencana/musibah di Desa Sidan, Kabupaten Gianyar sebesar Rp20.000.000,00, tercatat pada 15 Desember 2025.

d. Terdapat penyesuaian dan reklasifikasi pencatatan melalui Jurnal Umum, yang terdiri dari kredit sebesar Rp3.404.893.495,70 dan debit sebesar Rp1.831.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
1) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp42.400.000,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000106/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026;
2) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp143.132.185,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000110/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026;
3) Reklasifikasi penyetoran SiLPA BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022 ke RKUN sebesar Rp3.056.472.412,70, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000031/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026;
4) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp3.516.500,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000108/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026;
5) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp159.372.398,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000109/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026; dan
6) Reklasifikasi atas kesalahan pembebanan rekening sebesar Rp1.831.300.000,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000032/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026.

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Tidak Terduga didasarkan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada ***Lampiran 18***.

#### 5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Berikut ini adalah Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4.1 Rincian Belanja Transfer**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bagi Hasil | 1.018.848.956.716,00 | 965.738.976.448,00 | 94,78 | 1.800.971.992.343,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 325.315.879.304,00 | 280.600.433.855,03 | 86,25 | 355.860.433.998,00 |
| **Jumlah** | **1.344.164.836.020,00** | **1.246.339.410.303,03** | **92,72** | **2.156.832.426.341,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Transfer TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp910.493.016.037,97) atau -42,21%.

### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini adalah Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4.1.1 Rincian Belanja Bagi Hasil**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 1.018.848.956.716,00 | 965.738.976.448,00 | 94,78 | 1.800.971.992.343,00 |
| **Jumlah** | **1.018.848.956.716,00** | **965.738.976.448,00** | **94,78** | **1.800.971.992.343,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bagi Hasil TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp835.233.015.895,00) atau -46,38%.

#### 5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Berikut ini adalah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4.1.1.1 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten | 1.018.848.956.716,00 | 965.738.976.448,00 | 94,78 | 1.513.443.514.254,00 |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.528.478.089,00 |
| **Jumlah** | **1.018.848.956.716,00** | **965.738.976.448,00** | **94,78** | **1.800.971.992.343,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp835.233.015.895,00) atau -46,38%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 94,78% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024 dengan penurunan sebesar (Rp547.704.537.806,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah relatif dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak provinsi yang menjadi dasar pembagian, seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok; dan
   b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp287.528.478.089,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

1) Tidak terdapat penganggaran pada komponen belanja tersebut pada saat penyusunan anggaran TA 2025, di mana Standar Satuan Harga (SSH) untuk komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota belum tersedia pada aplikasi SIPD RI Modul Penganggaran, sehingga alokasi bagi hasil kepada Kota Denpasar tidak dapat dianggarkan melalui mekanisme yang seharusnya; dan
2) Guna memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Bali dalam mendistribusikan bagi hasil pajak daerah kepada Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran bagi hasil dimaksud tetap dianggarkan, dilaksanakan dan dicairkan melalui komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dengan Kota Denpasar sebagai penerima. Dengan demikian, secara substansial kewajiban bagi hasil pajak daerah kepada Kota Denpasar telah terpenuhi seluruhnya pada TA 2025, meskipun pencatatannya tidak dapat dilakukan pada kode rekening yang semestinya akibat keterbatasan yang terdapat pada SIPD RI Modul Penganggaran.

2. Pemerintah Provinsi Bali merealisasikan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan direalisasikan pada Bulan Januari TA 2025, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 224/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp6.027.263.612,00;
      2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.407.276.902,00;
      3) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.481.343.417,00;
      4) Kabupaten Badung sebesar Rp6.416.191.194,00;
      5) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.748.542.154,00;
      6) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.846.786.954,00;
      7) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.794.511.813,00;
      8) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.327.477.548,00; dan
      9) Kota Denpasar sebesar Rp6.818.746.945,00.
   b. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan direalisasikan pada Bulan Februari sampai dengan Desember TA 2025 berdasarkan:
      1) Keputusan Gubernur Bali Nomor 364/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret 2025, kepada:
         a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp4.379.319.052,00;
         b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.394.451.308,00;
         c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.192.570.104,00;
         d) Kabupaten Badung sebesar Rp4.618.487.131,00;
         e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp3.397.797.091,00;
         f) Kabupaten Bangli sebesar Rp1.969.124.999,00;
         g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp1.935.655.517,00;
         h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.085.380.108,00; dan
         i) Kota Denpasar sebesar Rp4.867.352.400,00.
      2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 401/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Maret Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 April 2025, kepada:
         a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.408.303.202,00;
         b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.956.347.199,00;
         c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.942.077.751,00;
         d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.706.400.850,00;
         e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.197.716.421,00;
         f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.432.123.560,00;
         g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.391.540.797,00;
         h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.811.165.272,00; dan
         i) Kota Denpasar sebesar Rp6.015.299.345,00.
      3) Keputusan Gubernur Bali Nomor 465/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan April Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2025, kepada:
         a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.083.485.119,00;

b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.778.992.837,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.705.498.094,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.362.909.506,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp3.945.166.444,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.285.960.982,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.247.604.146,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.582.036.031,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp5.652.816.882,00.

4) Keputusan Gubernur Bali Nomor 540/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 16 Juni 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.256.233.831,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.873.496.181,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.831.478.585,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.544.898.813,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.079.087.152,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.363.613.046,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.323.882.739,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.703.684.538,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp5.844.512.569,00.

5) Keputusan Gubernur Bali Nomor 747/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.790.424.094,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.165.314.994,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.220.681.643,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.109.244.933,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.494.110.868,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.603.923.823,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.560.380.659,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.080.338.271,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.439.775.334,00.

6) Keputusan Gubernur Bali Nomor 364/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.314.100.138,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.905.185.390,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.873.708.014,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.605.734.089,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.123.875.062,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.389.609.468,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.349.384.369,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.744.395.207,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp5.908.527.162,00.

7) Keputusan Gubernur Bali Nomor 818/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 18 September 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.888.344.929,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.218.831.493,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.292.046.593,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.212.601.572,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.570.135.215,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.647.963.570,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.603.696.218,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.149.353.603,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.548.746.763,00.

8) Keputusan Gubernur Bali Nomor 913/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan September Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2025, kepada:

a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.773.482.322,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.156.138.198,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.208.407.323,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.091.047.795,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.480.778.054,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.596.266.935,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.552.762.573,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.068.301.902,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.420.427.194,00.

9) Keputusan Gubernur Bali Nomor 983/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Desember 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.749.445.306,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.142.858.776,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.190.762.966,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.066.221.310,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.462.426.591,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.585.520.956,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.542.344.030,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.051.526.001,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.394.533.125,00.

10) Keputusan Gubernur Bali Nomor 1005/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan November Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp6.039.924.909,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.301.593.680,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.402.447.177,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.372.904.062,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.687.995.280,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.716.172.965,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.670.869.175,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.256.281.878,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.717.916.474,00.

c. Bagi Hasil Pajak Rokok direalisasikan menurut Triwulan I sampai dengan IV, berdasarkan:

1) Keputusan Gubernur Bali Nomor 408/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 April 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp15.716.694.745,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp8.177.579.399,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp10.186.774.121,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp11.550.265.964,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp10.589.191.187,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp6.985.414.134,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp6.503.819.868,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp11.322.292.835,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp13.677.283.984,00.

2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 702/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp8.771.053.487,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp4.563.681.326,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp5.684.957.437,00
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.445.884.596,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp5.909.535.293,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp3.898.366.800,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.629.602.334,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp6.318.659.086,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp7.632.914.638,00.

3) Keputusan Gubernur Bali Nomor 920/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025, kepada:
   a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp9.390.415.718,00;
   b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp4.885.942.710,00;
   c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp6.086.397.004,00;
   d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.901.056.539,00;
   e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp6.326.833.279,00;
   f) Kabupaten Bangli sebesar Rp4.173.647.433,00;
   g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.885.904.340,00;
   h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp6.764.847.083,00; dan
   i) Kota Denpasar sebesar Rp8.171.907.935,00.
4) Keputusan Gubernur Bali Nomor 1013/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2025, kepada:
   a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp6.033.644.232,00;
   b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.139.375.395,00;
   c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.910.705.902,00;
   d) Kabupaten Badung sebesar Rp4.434.150.865,00;
   e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.065.193.945,00;
   f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.681.702.761,00;
   g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.496.818.566,00;
   h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.346.631.907,00; dan
   i) Kota Denpasar sebesar Rp5.250.713.776,00.

d. Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan TA 2024 direalisasikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 845/04-E/HK/2025 tentang Kewajiban Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 September 2025, kepada:
   1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp41.993.205.593,00;
   2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp26.433.506.710,00;
   3) Kabupaten Tabanan sebesar Rp33.330.435.781,00;
   4) Kabupaten Badung sebesar Rp46.083.586.753,00;
   5) Kabupaten Gianyar sebesar Rp34.784.305.253,00;
   6) Kabupaten Bangli sebesar Rp23.105.327.805,00;
   7) Kabupaten Klungkung sebesar Rp22.577.803.210,00;
   8) Kabupaten Karangasem sebesar Rp32.078.368.624,00; dan
   9) Kota Denpasar sebesar Rp50.298.175.523,00.

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Tata Cara Belanja Bagi Hasil.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 19***.

#### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4.2.1 Rincian Belanja Bantuan Keuangan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 236.296.079.304,00 | 192.057.433.855,03 | 81,27 | 269.381.700.098,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 89.019.800.000,00 | 88.543.000.000,00 | 99,46 | 86.478.733.900,00 |
| **Jumlah** | **325.315.879.304,00** | **280.600.433.855,03** | **86,25** | **355.860.433.998,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp75.260.000.142,97) atau -21,15%.

#### 5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4.2.1.1 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 236.296.079.304,00 | 192.057.433.855,03 | 81,27 | 269.381.700.098,00 |
| **Jumlah** | **236.296.079.304,00** | **192.057.433.855,03** | **81,27** | **269.381.700.098,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp77.324.266.242,97) atau -28,70%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota memiliki persentase sebesar 81,27% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang mensyaratkan kelengkapan dokumen usulan, verifikasi, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan, sehingga penyaluran relatif bergantung pada kesiapan administrasi dan *readiness criteria* dari pemerintah kabupaten/kota.
2. Pemerintah Provinsi Bali merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. BKK untuk Subak/Subak Abian sebesar Rp2.415.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1/03-O/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota untuk Subak/Subak Abian yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Januari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp315.000.000,00;
      2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp375.000.000,00;
      3) Kabupaten Badung sebesar Rp285.000.000,00;
      4) Kabupaten Gianyar sebesar Rp570.000.000,00;
      5) Kabupaten Bangli sebesar Rp345.000.000,00;
      6) Kabupaten Klungkung sebesar Rp30.000.000,00;
      7) Kabupaten Karangasem sebesar Rp345.000.000,00; dan
      8) Kota Denpasar sebesar Rp150.000.000,00.
   b. BKK dalam rangka Pengelolaan Sampah sebesar Rp35.417.506.900,03 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 3/03-P/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengelolaan Sampah yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Bangli sebesar Rp3.947.715.000,00;
      2) Kabupaten Buleleng sebesar Rp3.632.300.000,80;
      3) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.486.700.000,00;
      4) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.890.455.000,00;
      5) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.561.425.899,23;
      6) Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.900.060.000,00;
      7) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.768.060.000,00; dan
      8) Kota Denpasar sebesar Rp7.230.791.000,00.
   c. BKK untuk Pengendalian Penduduk Pendatang sebesar Rp1.550.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 4/03-D/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem untuk Pengendalian Penduduk Pendatang, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp300.000.000,00;
      2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp750.000.000,00; dan

3) Kabupaten Karangasem sebesar Rp500.000.000,00.

d. BKK dalam rangka Pesta Kesenian Bali sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 5/03-J/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten dalam Rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari 2025, kepada:
   1) Kabupaten Buleleng;
   2) Kabupaten Jembrana;
   3) Kabupaten Tabanan;
   4) Kabupaten Bangli;
   5) Kabupaten Klungkung; dan
   6) Kabupaten Karangasem;

   Masing-masing sebesar Rp500.000.000,00.

e. BKK kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp8.164.887.000,00 untuk Paket Pengerjaan Pengerasan Jalan Lingkar Turyapada-Tower Lemukih berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 7/03-Q/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 2025;

f. BKK *Sharing* PBI sebesar Rp91.895.501.040,00, berdasarkan:
   1) Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 8/03-B/HK/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 6 (Enam) Kabupaten di Bali yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 2025; dan
   2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 13/03-B/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 8/03-B/HK/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 6 (Enam) Kabupaten di Bali yang ditetapkan di Denpasar tanggal 6 Oktober 2025.

   Direalisasikan kepada:
   1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp32.735.805.480,00;
   2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp4.602.059.280,00;
   3) Kabupaten Tabanan sebesar Rp19.534.964.400,00;
   4) Kabupaten Bangli sebesar Rp7.426.535.760,00;
   5) Kabupaten Klungkung sebesar Rp7.205.236.080,00; dan
   6) Kabupaten Karangasem sebesar Rp20.390.900.040,00.

g. BKK kepada Kabupaten Bangli sebesar 1.000.000.000,00 untuk Pengelolaan Batur UNESCO *Global Geopark* berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 11/03-L/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Bangli untuk Pengelolaan Batur UNESCO *Global Geopark* yang ditetapkan di Denpasar tanggal 14 Mei 2025;

h. BKK dalam rangka Festival Jegog kepada Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 15/03-J/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Rangka Festival Jegog Kabupaten Jembrana yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2025;

i. BKK kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp83.472.000,00 untuk Pengadaan *ChromeBook* pada SD Negeri 1 Sembiran, Alamat Banjar Dinas Anyar, Desa Sembiran, Kecamatan Terjakula, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 20/03-A/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025;

j. BKK kepada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp45.687.616.615,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 21/03-Q/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp16.662.934.615,00;
   2) Kabupaten Bangli sebesar Rp29.024.682.000,00; dan
   3) Kabupaten Klungkung tidak terdapat realisasi dikarenakan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Bali Nomor: B.31.900.1.3.3/7628/Set/BPKAD, tanggal 14 November 2025, Hal: Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Fisik pada APBD Perubahan TA 2025 menyatakan bahwa alokasi BKK Fisik sebesar Rp3.500.000.000,00 diperuntukkan untuk penyusunan dokumen perencanaan fisik, yang belum sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, dikarenakan permohonan BKK untuk pembangunan infrastruktur fisik wajib dilengkapi *readiness criteria* termasuk ketersediaan dokumen *feasibility study* dan dokumen *Detailed*

*Engineering Design* (DED), sehingga peruntukan BKK yang tidak sesuai ketentuan tersebut tidak dapat direalisasikan.

k. BKK *Mobil Rescue* kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp697.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 22/03-N/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 November 2025;

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dapat dilihat pada ***Lampiran 20***.

#### 5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4.2.2.1 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 89.019.800.000,00 | 88.543.000.000,00 | 99,46 | 86.478.733.900,00 |
| **Jumlah** | **89.019.800.000,00** | **88.543.000.000,00** | **99,46** | **86.478.733.900,00** |

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.064.266.100,00 atau 2,39%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa telah mendekati anggaran dengan persentase sebesar 99,46% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan dukungan program pada Desa se-Bali, khususnya untuk penguatan kelembagaan masyarakat desa melalui Subak/Subak Abian, dukungan kegiatan keagamaan pada Pura Kahyangan Jagat, serta dukungan tambahan penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa, sehingga alokasinya relatif dapat disalurkan hampir seluruhnya pada tahun berjalan;
      2) Penetapan penerima dan besaran BKK pada TA 2025 telah dituangkan melalui beberapa Keputusan Gubernur yang ditetapkan, sehingga proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, serta penatausahaan dapat dilaksanakan lebih terarah dan tepat waktu sesuai ketentuan; dan
      3) Selisih yang masih tersisa dari target sebesar 99,46% umumnya dipengaruhi oleh pemenuhan persyaratan penyaluran dan pertanggungjawaban, seperti kelengkapan dokumen, serta penyesuaian kebutuhan riil pada sebagian penerima, sehingga terdapat bagian yang tidak tersalurkan.
2. Pemerintah Provinsi Bali merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. BKK untuk *Subak/Subak Abian* kepada Desa se-Bali sebesar Rp40.350.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2/03-O/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Desa untuk Subak/Subak Abian se-Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Desa pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp7.560.000.000;
      2) Desa pada Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.105.000.000;
      3) Desa pada Kabupaten Bangli sebesar Rp7.065.000.000;
      4) Desa pada Kabupaten Badung sebesar Rp2.775.000.000;
      5) Desa pada Kabupaten Gianyar sebesar Rp7.815.000.000;

6) Desa pada Kabupaten Tabanan sebesar Rp6.000.000.000;
7) Desa pada Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.320.000.000;
8) Desa pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp1.320.000.000; dan
9) Desa pada Kota Denpasar sebesar Rp390.000.000.

b. BKK untuk Kegiatan Keagamaan (*Upakara Aci Nyabran*, *Upakara Ngusabha Kedasa*, *Upakara Pujawali*, dan *Upakara Bhumi Sudha*) pada 18 Pura *Kahyangan Jagat* di Bali sebesar Rp5.600.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 6/01-A/HK tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Jagat di Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Februari 2025;

c. BKK untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa se-Bali sebesar Rp42.654.200.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 9/03-D/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Desa untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa se-Bali dalam Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:
1) Desa pada Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.637.000.000,00;
2) Desa pada Kabupaten Tabanan sebesar Rp8.990.900.000,00;
3) Desa pada Kabupaten Badung sebesar Rp3.442.100.000,00;
4) Desa pada Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.699.500.000,00;
5) Desa pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.209.700.000,00;
6) Desa pada Kabupaten Bangli sebesar Rp4.275.900.000,00;
7) Desa pada Kabupaten Karangasem sebesar Rp5.395.800.000,00;
8) Desa pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp7.853.800.000,00; dan
9) Desa pada Kota Denpasar sebesar Rp2.149.500.000,00.

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 20***.

### 5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Berikut ini adalah Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1 Rincian Pembiayaan Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.153.811.060.761,60 | 620.675.986.790,62 | 53,79 | 342.650.523.381,56 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 401.464.808.088,00 | 401.464.798.088,00 | 99,99 | 250.464.798.088,00 |
| **Jumlah** | **752.346.252.673,60** | **219.211.188.702,62** | **29,13** | **92.185.725.293,56** |

Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp127.025.463.409,06 atau 137,79%.

#### 5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berikut ini adalah Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 623.732.459.203,32 | 620.675.986.790,62 | 99,50 | 171.480.190.581,56 |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.170.332.800,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 530.078.601.558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **1.153.811.060.761,60** | **620.675.986.790,62** | **53,79** | **342.650.523.381,56** |

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp278.025.463.409,06 atau 81,14%.

### 5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1.1.1 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pelampauan Penerimaan PAD | 623.732.459.203,32 | 943.575.945.233,49 | 151,27 | (413.705.102.485,34) |
| Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer | 0,00 | 3.180.000.237,00 | 0,00 | (11.191.766.664,00) |
| Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | (49.994.822.500,00) |
| Pelampauan Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | (832.932.027.174,44) | 0,00 | (670.757.862.495,00) |
| Penghematan Belanja | 0,00 | 499.573.408.393,23 | 0,00 | 1.325.787.678.439,90 |
| Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 5.452.215.264,00 | 0,00 | (8.657.933.714,00) |
| Sisa Belanja Lainnya | 0,00 | 1.819.844.837,34 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **623.732.459.203,32** | **620.675.986.790,62** | **99,50** | **171.480.190.581,56** |

Tabel di atas menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp449.195.796.209,06 atau 261,95%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pelampauan Penerimaan PAD memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 151,27% dengan penurunan signifikan sebesar Rp1.357.281.047.718,83 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelampauan PAD terutama dibentuk oleh penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB yang melampaui proyeksi, serta didukung oleh penerimaan PAD lain seperti pungutan bagi wisatawan asing, retribusi tertentu, dan denda pajak daerah, sehingga akumulasi pelampauan PAD menjadi relatif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
   b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar Rp14.371.766.901,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer dibentuk oleh realisasi penyaluran/penetapan transfer dari pemerintah pusat yang pada akhir tahun dapat menghasilkan selisih lebih terhadap proyeksi, terutama pada komponen DBH dan DAU, sehingga terdapat realisasi;
   c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar Rp50.001.422.500,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelampauan ini dibentuk oleh penerimaan yang bersifat insidental, yaitu sumbangan pihak ketiga/sejenis;

d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025;
e. Penghematan Belanja memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp826.214.270.046,67) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Penghematan Belanja dibentuk oleh sisa pagu pada berbagai kelompok belanja, terutama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, termasuk pula sisa pada pos-pos tertentu seperti belanja tidak terduga, sisa belanja bagi hasil, dan sisa bantuan keuangan, sehingga pada akhir tahun terbentuk akumulasi Penghematan Belanja;
f. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar Rp14.110.148.978,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dibentuk dari sisa dana pengeluaran pembiayaan, yaitu terdapat rencana pengeluaran pembiayaan yang belum terealisasi, sehingga menyisakan dana sisa; dan
g. Sisa Belanja Lainnya memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp1.819.844.837,34 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pada pengelolaan BLUD sebagai akibat dari realisasi penerimaan dan pelaksanaan belanja BLUD yang tidak seluruhnya terserap sesuai rencana kegiatan, sehingga sisa dana tersebut kemudian dicatat dan disajikan sebagai Sisa Belanja Lainnya.

#### 5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Berikut ini adalah Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1.2.1 Rincian Pencairan Dana Cadangan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.170.332.800,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **171.170.332.800,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pencairan Dana Cadangan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp171.170.332.800,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Pencairan Dana Cadangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Dana Cadangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah seluruhnya dicairkan pada TA 2024 sebesar Rp171.170.332.800,00 guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Dengan telah selesainya penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 dan telah terpakainya seluruh Dana Cadangan dimaksud, maka pada TA 2025 tidak terdapat lagi Dana Cadangan yang dapat dicairkan sehingga tidak dilakukan penganggaran.

#### 5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini adalah Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1.3.1 Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 530.078.601.558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **530.078.601.558,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

#### 5.1.3.1.3.1 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Berikut ini adalah Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1.3.1.1 Rincian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah | 530.078.601.558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **530.078.601.558,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali mencantumkan anggaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah sebesar Rp530.078.601.558,28 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penganggaran tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun struktur pembiayaan daerah yang *prudent* dan berimbang, sekaligus sebagai langkah antisipatif dalam menjaga agar posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun dapat terkelola secara optimal sesuai dengan arah kebijakan fiskal daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali; dan
      2) Realisasi Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah pada TA 2025 menunjukkan nilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp530.078.601.558,28. Tidak terealisasinya penerimaan pinjaman dimaksud merupakan cerminan dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan efisien sepanjang tahun anggaran berjalan, di mana kondisi fiskal daerah terjaga dengan baik sehingga Pemerintah Provinsi Bali tidak perlu menggunakan instrumen pinjaman yang telah direncanakan. Kondisi serupa juga terjadi pada TA 2024, di mana penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp832.932.027.174,00 juga tidak terealisasi yang semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali untuk senantiasa mengutamakan kemandirian fiskal daerah dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan kebijakan pembiayaan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

### 5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berikut ini adalah Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.2.1 Rincian Pengeluaran Pembiayaan**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Penyertaan Modal Daerah | 158.000.000.000,00 | 158.000.000.000,00 | 100,00 | 7.000.000.000,00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 243.464.808.088,00 | 243.464.798.088,00 | 99,99 | 243.464.798.088,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| **Jumlah** | **401.464.808.088,00** | **401.464.798.088,00** | **99,99** | **250.464.798.088,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp151.000.000.000,00 atau 60,29%.

### 5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini adalah Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.2.1.1 Rincian Penyertaan Modal Daerah**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 158.000.000.000,00 | 158.000.000.000,00 | 100,00 | 7.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | **158.000.000.000,00** | **158.000.000.000,00** | **100,00** | **7.000.000.000,00** |

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp151.000.000.000,00 atau 2.157,14%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kenaikan signifikan sebesar Rp151.000.000.000,00 atau 2.157,14% pada TA 2025. Penyertaan Modal Daerah TA 2025 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp38.000.000.000,00 dan PT Bank BPD Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp38.000.000.000,00 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
         a) Sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dilaksanakan pada TA 2024; dan
         b) Sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah) dilaksanakan pada TA 2025.
   b. Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada PT Bank BPD Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Tahun 2021 sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah);
      b) Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
      c) Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

   Namun, realisasi pemenuhan penambahan penyertaan modal tersebut baru dapat direalisasikan secara keseluruhan pada TA 2025, sehubungan dengan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara penyesuaian bertahap sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

### 5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini adalah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.2.2.1 Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat | 243.464.808.088,00 | 243.464.798.088,00 | 99,99 | 243.464.798.088,00 |
| **Jumlah** | **243.464.808.088,00** | **243.464.798.088,00** | **99,99** | **243.464.798.088,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat memiliki persentase capaian sebesar 99,99% dan realisasi tersebut tercatat sama dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah yang berasal dari Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan perubahannya, ditentukan sebagai berikut:
         a) Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp1.500.000.000.000,00 (*limit* pinjaman);
         b) Jangka waktu pinjaman 96 (sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali;
         c) Masa pencairan pinjaman adalah sejak tanggal pencairan pertama pinjaman sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; dan
         d) Bunga dan biaya pinjaman. Bunga sebesar 0,00%. Biaya Pinjaman yang wajib dibayar:
            (1) Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan; dan
            (2) Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayar saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau sebelum tanggal terakhir masa pencairan.
      2) Pembayaran cicilan utang bagian lancar PEN PT SMI dilakukan melalui pemotongan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari alokasi Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
         a) Penerimaan DAU dicatat secara kotor (bruto) oleh Bendahara Penerimaan BPKAD Provinsi Bali yang lalu nilai pemotongan untuk pembayaran cicilan PEN dikurangi sesuai dengan data yang ditampilkan pada aplikasi SIKD *Next Generation* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pencatatan pengurangan nilai DAU tersebut dicatat melalui mekanisme jurnal penyesuaian dengan nilai potongan sebesar Rp20.288.733.174,00 per bulan, rincian nomor jurnal penyesuaian dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.2.2.1.1 Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Menurut Jurnal Penyesuaian**

| No. | Bulan | No. Jurnal Penyesuaian | Tanggal Jurnal Penyesuaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2025 | 0001/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 2 Januari 2025 |
| 2 | Februari 2025 | 0002/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 31 Januari 2025 |
| 3 | Maret 2025 | 0003/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 28 Februari 2025 |
| 4 | April 2025 | 0004/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 27 Maret 2025 |
| 5 | Mei 2025 | 0005/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 30 April 2025 |
| 6 | Juni 2025 | 0006/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 28 Mei 2025 |
| 7 | Juli 2025 | 0007/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 30 Juni 2025 |
| 8 | Agustus 2025 | 0008/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 31 Juli 2025 |
| 9 | September 2025 | 0009/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 29 Agustus 2025 |
| 10 | Oktober 2025 | 0010/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 30 September 2025 |
| 11 | November 2025 | 0011/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 31 Oktober 2025 |
| 12 | Desember 2025 | 0012/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025 | 28 November 2025 |

b) Total pembayaran cicilan PEN melalui pemotongan DAU selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp243.464.798.088,00 dengan selisih sebesar Rp10.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp243.464.808.088,00.

### 5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Berikut disajikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta realisasi pada TA 2024. Rincian besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

| Uraian | Tahun 2025 | | | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| **Pendapatan Daerah** | **6.660.624.025.310,00** | **7.048.315.869.271,64** | **105,82** | **7.824.598.583.907,83** |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 4.216.263.422.941,00 | 4.628.083.379.382,63 | 109,76 | 5.535.429.679.670,83 |
| Pendapatan Transfer | 2.438.603.330.369,00 | 2.414.142.690.695,00 | 98,99 | 2.283.418.060.237,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 5.757.272.000,00 | 6.089.799.194,01 | 105,77 | 5.750.844.000,00 |
| **Belanja Daerah** | **7.412.970.277.983,60** | **6.554.652.991.551,62** | **88,42** | **7.293.051.849.998,07** |
| Belanja Operasi | 5.053.188.410.600,60 | 4.520.551.159.698,76 | 89,45 | 4.461.088.682.470,66 |
| Belanja Modal | 961.755.254.119,00 | 773.687.032.749,53 | 80,44 | 667.689.607.145,41 |
| Belanja Tidak Terduga | 53.861.777.244,00 | 14.075.388.800,30 | 26,13 | 7.441.134.041,00 |
| Belanja Transfer | 1.344.164.836.020,00 | 1.246.339.410.303,03 | 92,72 | 2.156.832.426.341,00 |
| **Surplus (Defisit)** | **(752.346.252.673,60)** | **493.662.877.720,02** | **(65,61)** | **531.546.733.909,76** |
| **Pembiayaan Daerah** | **752.346.252.673,60** | **219.211.188.702,62** | **29,13** | **92.185.725.293,56** |
| Penerimaan Pembiayaan | 1.153.811.060.761,60 | 620.675.986.790,62 | 53,79 | 342.650.523.381,56 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 401.464.808.088,00 | 401.464.798.088,00 | 99,99 | 250.464.798.088,00 |
| **SLLPA** | **0,00** | **712.874.066.422,64** | **0,00** | **623.732.459.203,32** |

Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp712.874.066.422,64, yang terdiri atas SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terikat**

| SiLPA Terikat TA 2025 | Nilai |
|---|---|
| **1. Sisa Dana DAK Fisik** | **693.851.793,00** |
| **2. Sisa Dana DAK Non Fisik** | **9.849.791.233,40** |
| a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler | 6.530.421.296,40 |
| b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja | 941.988.484,00 |
| c. Dana Tunjangan Profesi Guru | 0,00 |
| d. Dana Tambahan Penghasilan PNSD | 0,00 |
| e. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0,00 |
| f. BOP Museum dan MPRB | 538.705.746,00 |
| g. Taman Budaya | 118.692.832,00 |
| h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 53.722.731,00 |
| i. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 1.647.685.144,00 |
| j. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) | 5.275.000,00 |
| k. Dana Fasilitas Penanaman Modal | 0,00 |
| l. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 13.300.000,00 |
| **3. DAU yang Ditentukan Penggunaannya, yang terdiri atas:** | **2.423.344.441,00** |
| a. DAU Pendidikan | 2.272.027.846,00 |
| b. DAU Kesehatan | 151.316.595,00 |
| **4. Insentif Fiskal** | **14.868.313.529,00** |
| **Jumlah** | **27.835.300.996,40** |

SiLPA tersebut terdiri atas saldo akun-akun yang membentuknya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1.2 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Non Terikat**

| Uraian SiLPA | Nilai |
|---|---|
| **1. Kas di Kas Daerah (Rekening Giro pada Bank BPD Bali)** | **609.165.272.494,47** |
| **2. Kas di Bendahara Pengeluaran** | **17.321,38** |
| **3. Kas di BLUD** | **96.236.366.826,39** |
| a. Kas di BLUD RSUD Bali Mandara | 11.545.168.915,10 |
| b. Kas di BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara | 30.247.848.716,17 |
| c. Kas di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali | 13.459.001.613,50 |
| d. Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah | 15.677.032.611,38 |
| e. Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum | 1.417.318.943,87 |
| f. Kas di BLUD UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat | 3.045.880.643,11 |
| g. Kas di BLUD UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | 11.008.641.026,33 |
| h. Kas di BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa | 8.552.400.887,51 |
| i. Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya | 1.283.073.469,42 |
| **4. Kas Dana BOSP di Bendahara BOSP SMA/SMK Negeri** | **7.472.409.780,40** |
| **Jumlah** | **712.874.066.422,64** |

Penjelasan SiLPA:

1) Saldo akhir kas di Kas Daerah antara Catatan atas Laporan Arus Kas dengan saldo fisik kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1 pada PT Bank BPD

Bali menunjukkan kesesuaian (*matching*). Per tanggal 31 Desember 2025, posisi kas di Kas Daerah berdasarkan pembukuan pada SIPD RI tercatat sebesar Rp609.165.272.494,47 dan telah sesuai antara pencatatan akuntansi dan saldo kas secara fisik;

2) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp17.321,38 merupakan koreksi penambahan saldo Jasa Giro per 31 Desember 2025 pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD RSU Dharma Yadnya yang belum dicatat sebagai pendapatan dan kas yang dicatat berdasarkan Jurnal Umum Nomor 51/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0008/05/2026;
3) Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 sebesar Rp712.874.066.422,64 telah diungkapkan secara konsisten dan terintegrasi dalam:
   a. **Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (CaLK)** ***Poin 5.2.5***; dan
   b. **Saldo Akhir Kas pada Catatan atas Laporan Arus Kas (CaLK)** ***Poin 5.5.9.***
4) Pengungkapan tersebut menunjukkan konsistensi antar laporan keuangan serta keselarasan antara informasi SILPA, SAL, dan posisi kas daerah dalam sistem pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

**Tabel 5.2.1.1 Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| **Saldo Anggaran Lebih Awal** | **623.732.459.203,32** | **171.480.190.581,56** |

Saldo anggaran lebih awal di atas merupakan saldo akhir Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

**Tabel 5.2.1.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal**

| Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---|---|---|
| Kas Di Kas Daerah | 540.047.220.034,96 | 93.261.463.025,33 |
| Kas di BLUD: | | |
| - Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara | 11.384.643.832,20 | 23.106.882.669,81 |
| - Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara | 22.272.848.565,09 | 13.955.324.668,78 |
| - Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali | 11.253.136.977,16 | 9.421.039.081,34 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah | 11.397.444.299,21 | 4.803.618.256,49 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum | 3.776.013.806,69 | 4.820.767.557,36 |
| - Kas di BLUD UPT Bapelkesmas | 2.591.826.952,86 | 2.215.539.343,00 |
| - Kas di BLUD UPT PKSDM | 7.302.650.158,45 | 4.199.692.447,04 |
| - Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan | 5.493.460.321,60 | 3.266.828.045,70 |
| - Kas di BLUD RS Dharma Yadnya | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 4.495.970.420,00 |
| Kas Dana BOS | 5.156.741.842,40 | 7.933.065.066,71 |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 3.056.472.412,70 | 0,00 |
| **Jumlah** | **623.732.459.203,32** | **171.480.190.581,56** |

Saldo di atas merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Bali. Nilai saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan SiLPA pada tahun anggaran berkenaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

**Tabel 5.2.2.1 Perbandingan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | **620.675.986.790,62** | **171.480.190.581,56** |

Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran TA 2024 dan 2023 yang telah dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Seluruh saldo tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali pada masing-masing tahun anggaran tersebut.

Adapun penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan pembiayaan TA 2025 menunjukkan selisih sebesar Rp3.056.472.412,70 dibandingkan dengan SiLPA TA 2024. Selisih tersebut terjadi karena adanya koreksi SiLPA yang bersumber dari kas BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022, yang sebelumnya dicatat sebagai SiLPA dan telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

### 5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

**Tabel 5.2.3.1 Perbandingan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | **712.874.066.422,64** | **623.732.459.203,32** |

Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran TA 2025 dan 2024. Nilai saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada masing-masing tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berkenaan.

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

**Tabel 5.2.4.1 Perbandingan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | **(3.056.472.412,70)** | **0,00** |

Terdapat koreksi atas pengakuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.056.472.412,70. Saldo tersebut merupakan koreksi SiLPA BOSP Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang pada Tahun Anggaran 2024 dicatat sebagai Saldo Kas Lainnya, yang masih mengendap pada Rekening Bendahara BOSP di SMAN/SMKN dan SLBN.

Pada Tahun Anggaran 2025, seluruh saldo kas dimaksud telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali, sehingga dilakukan penyesuaian (koreksi) pengakuan SiLPA dalam laporan keuangan.

### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

**Tabel 5.2.5.1 Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | **712.874.066.422,64** | **623.732.459.203,32** |

Saldo Anggaran Lebih Akhir di atas diuraikan berdasarkan komponen kas terdiri dari:

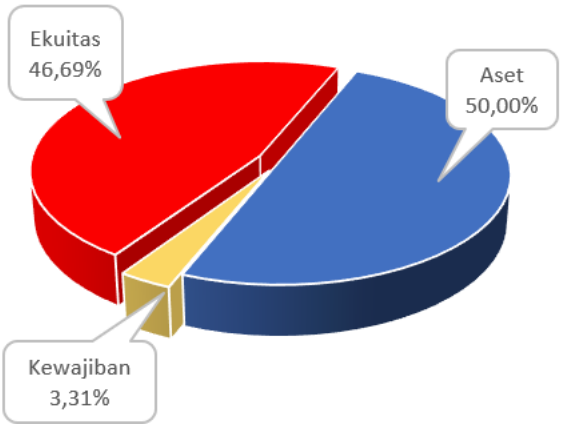
**Tabel 5.2.5.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Kas di Kas Daerah | 609.165.272.494,47 | 540.047.220.034,96 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 17.321,38 | 0,00 |
| Kas di BLUD: | | |
| - Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara | 11.545.168.915,10 | 11.384.643.832,20 |
| - Kas di BLUD RS Dharma Yadnya | 1.283.073.469,42 | 0,00 |
| - Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara | 30.247.848.716,17 | 22.272.848.565,09 |
| - Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali | 13.459.001.613,50 | 11.253.136.977,16 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah | 15.677.032.611,38 | 11.397.444.299,21 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum | 1.417.318.943,87 | 3.776.013.806,69 |
| - Kas di BLUD UPTD BAPELKES | 3.045.880.643,11 | 2.591.826.952,86 |
| - Kas di BLUD UPTD PKSDM | 11.008.641.026,33 | 7.302.650.158,45 |
| - Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan | 8.552.400.887,51 | 5.493.460.321,60 |
| Kas Dana BOSP | 7.472.409.780,40 | 5.156.741.842,40 |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 0,00 | 3.056.472.412,70 |
| **Jumlah** | **712.874.066.422,64** | **623.732.459.203,32** |

Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp712.874.066.422,64, sebagaimana telah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

## 5.3. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 5.11 Komposisi Neraca Pmerintah Provinsi Bali Tahun 2025**

### 5.3.1 ASET

Saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1 Rincian Aset**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Aset Lancar | 1.104.842.086.420,35 | 863.415.737.426,76 | 241.426.348.993,59 | 27,96 |
| Investasi Jangka Panjang | 7.122.255.477.273,94 | 6.915.708.269.354,89 | 206.547.207.919,05 | 2,98 |
| Aset Tetap | 14.009.192.786.281,11 | 10.422.663.292.333,20 | 3.586.529.493.947,91 | 34,41 |
| Aset Lainnya | 260.970.253.210,00 | 261.737.503.949,75 | (767.250.739,75) | (0,29) |
| Properti Investasi | 701.321.954.302,03 | 702.536.128.035,03 | (1.214.173.733,00) | (0,17) |
| **Jumlah** | **23.198.582.557.487,43** | **19.166.060.931.099,63** | **4.032.521.626.387,80** | **21,03** |

Tabel di atas menunjukkan Aset per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.032.521.626.387,80 atau 21,03%.

#### 5.3.1.1 ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1 Rincian Aset Lancar**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas dan Setara Kas | 712.874.066.422,64 | 623.732.459.203,32 | 89.141.607.219,32 | 14,29 |
| Piutang Pajak Daerah | 686.987.500,00 | 49.838.810.531,04 | (49.151.823.031,04) | (98,62) |
| Piutang Retribusi Daerah | 52.160.083.376,74 | 881.023.472.856,43 | (828.863.389.479,69) | (94,07) |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 3.156.897.225,00 | 3.287.603.356,37 | (130.706.131,37) | (3,97) |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 180.125.380.000,00 | 0,00 | 180.125.380.000,00 | 100,00 |
| Piutang Lainnya | 17.903.688.447,00 | 3.709.104.636,00 | 14.194.583.811,00 | 382,69 |
| Penyisihan Piutang | (19.960.668.142,46) | (862.191.285.296,38) | 842.230.617.153,92 | (97,68) |
| Beban Dibayar Dimuka | 485.566.225,08 | 490.726.285,24 | (5.160.060,16) | (1,05) |
| Persediaan | 157.410.085.366,35 | 163.524.845.854,74 | (6.114.760.488,39) | (3,73) |
| **Jumlah** | **1.104.842.086.420,35** | **863.415.737.426,76** | **241.426.348.993,59** | **27,96** |

Tabel di atas menunjukkan Aset Lancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp241.426.348.993,59 atau 27,96%.

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Kas dan Setara Kas**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas di Kas Daerah | 609.165.272.494,47 | 540.047.220.034,96 | 69.118.052.459,51 | 12,79 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 17.321,38 | 0,00 | 17.321,38 | 100,00 |
| Kas di BLUD | 96.236.366.826,39 | 75.472.024.913,26 | 20.764.341.913,13 | 27,51 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 3.056.472.412,70 | (3.056.472.412,70) | (100,00) |
| Kas Dana BOSP | 7.472.409.780,40 | 5.156.741.842,40 | 2.315.667.938,00 | 44,90 |
| **Jumlah** | **712.874.066.422,64** | **623.732.459.203,32** | **89.141.607.219,32** | **14,29** |

Tabel di atas menunjukkan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp89.141.607.219,32 atau 14,29%.

#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1.1.1 Rincian Kas di Kas Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas di Kas Daerah | 609.165.272.494,47 | 540.047.220.034,96 | 69.118.052.459,51 | 12,80 |
| **Jumlah** | **609.165.272.494,47** | **540.047.220.034,96** | **69.118.052.459,51** | **12,80** |

Tabel di atas menunjukkan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp69.118.052.459,51 atau 12,80%. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1 di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1.2.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 17.321,38 | 0,00 | 17.321,38 | 100,00 |
| **Jumlah** | **17.321,38** | **0,00** | **17.321,38** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp17.321,38 atau 100,00% yang merupakan saldo Jasa Giro di rekening Bendahara Pembantu APBD RSU Darma Yadnya.

#### 5.3.1.1.1.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1.3.1. Rincian Kas di BLUD**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas di BLUD | 96.236.366.826,39 | 75.472.024.913,26 | 20.764.341.913,13 | 27,51 |
| **Jumlah** | **96.236.366.826,39** | **75.472.024.913,26** | **20.764.341.913,13** | **27,51** |

Tabel di atas menunjukkan Kas di BLUD per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp20.764.341.913,13 atau 27,51%.

**Tabel 5.3.1.1.1.3.2 Rincian Saldo Kas BLUD**

| No | Unit | Saldo Awal | Pendapatan | Belanja | Setor Kasda | Total Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RS Bali Mandara | 11.384.643.832,20 | 177.471.599.546,86 | 177.311.074.463,96 | 0,00 | 11.545.168.915,10 |
| 2. | RS Mata Bali Mandara | 22.272.848.565,09 | 91.956.802.649,33 | 83.981.802.498,25 | 0,00 | 30.247.848.716,17 |
| 3. | RS Jiwa | 11.253.136.977,16 | 23.055.171.219,46 | 20.849.306.583,12 | 0,00 | 13.459.001.613,50 |
| 4. | Pengelolaan Air Limbah | 11.397.444.299,21 | 18.277.977.993,17 | 13.998.389.681,00 | 0,00 | 15.677.032.611,38 |
| 5. | Pengelolaan Air Minum | 3.776.013.806,69 | 32.757.240.005,18 | 35.115.934.868,00 | 0,00 | 1.417.318.943,87 |
| 6. | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | 7.302.650.158,45 | 21.855.299.007,88 | 18.149.308.140,00 | 0,00 | 11.008.641.026,33 |
| 7. | Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat | 2.591.826.952,86 | 3.276.942.797,55 | 2.822.889.107,30 | 0,00 | 3.045.880.643,11 |
| 8. | Laboratorium Kesehatan | 5.493.460.321,60 | 6.391.883.311,41 | 3.332.942.745,50 | 0,00 | 8.552.400.887,51 |
| 9. | RS Dharma Yadnya | 0,00 | 21.174.328.491,84 | 19.891.255.022,42 | 0,00 | 1.283.073.469,42 |
| | Total | 75.472.024.913,26 | 396.217.245.022,68 | 375.452.903.109,55 | 0,00 | 96.236.366.826,39 |

### 5.3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1.4.1 Rincian Kas Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas Lainnya | 0,00 | 3.056.472.412,70 | (3.056.472.412,70) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **3.056.472.412,70** | **(3.056.472.412,70)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Kas Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.056.472.412,70) atau (100,00%).

### 5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.1.5.1 Rincian Kas Dana BOSP**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas Dana BOSP | 7.472.409.780,40 | 5.156.741.842,40 | 2.315.667.938,00 | 44,91 |
| **Jumlah** | **7.472.409.780,40** | **5.156.741.842,40** | **2.315.667.938,00** | **44,91** |

Tabel di atas menunjukkan Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.315.667.938,00 atau 44,91%.

Rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada ***Lampiran 22***

### 5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.2.1 Rincian Piutang Pajak Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 109.347.500,00 | 126.767.000,00 | (17.419.500,00) | (13,74) |
| Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 247.395.000,00 | 247.395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0,00 | 49.049.509.849,04 | (49.049.509.849,04) | (100,00) |
| Piutang Pajak Air Permukaan | 0,00 | 415.138.682,00 | (415.138.682,00) | (100,00) |
| Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 330.245.000,00 | 0,00 | 330.245.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **686.987.500,00** | **49.838.810.531,04** | **(49.151.823.031,04)** | **(98,62)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp49.151.823.031,04) atau (98,62%).

Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.2.1.1 Rincian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan | 9.763.200,00 | 9.763.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep | 8.011.500,00 | 8.985.400,00 | (973.900,00) | (10,84) |
| Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus | 54.361.600,00 | 54.361.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus | 0,00 | 13.093.600,00 | (13.093.600,00) | (100,00) |
| Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck | 16.107.200,00 | 16.107.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 14.537.300,00 | 17.889.300,00 | (3.352.000,00) | (18,74) |
| **Jumlah** | **109.347.500,00** | **126.767.000,00** | **(17.419.500,00)** | **(13,74)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp17.419.500,00) atau (13,74%), berikut penjelasan saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep mengalami penurunan sebesar (Rp973.900,00) atau (10,84%);
2. Komponen Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp13.093.600,00) atau (100%);
3. Komponen Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua mengalami penurunan sebesar (Rp3.352.000,00) atau (18,74%)

Penurunan komponen Piutang tersebut diatas disebabkan adanya Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1026/04-E/HK/2025 Tanggal 29 Desember 2025.

### 5.3.1.1.2.2 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Saldo Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.2.2.1 Rincian Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | 65.400.000,00 | 65.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | 55.730.000,00 | 55.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 124.605.000,00 | 124.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **247.395.000,00** | **247.395.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

### 5.3.1.1.2.3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.2.3.1 Rincian Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar | 0,00 | 7.502.811.151,04 | (7.502.811.151,04) | (100,00) |
| Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya | 0,00 | 41.546.698.698,00 | (41.546.698.698,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **49.049.509.849,04** | **(49.049.509.849,04)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp49.049.509.849,04) atau (100,00%), berikut penjelasan saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp7.502.811.151,04) atau (100,00%);
2. Komponen Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp41.546.698.698,00) atau (100,00%).

Penurunan saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tersebut karena adanya Pelunasan Piutang pada Bulan Januari 2025.

### 5.3.1.1.2.4 Piutang Pajak Air Permukaan

Saldo Piutang Pajak Air Permukaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.2.4.1 Rincian Piutang Pajak Air Permukaan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pajak Air Permukaan | 0,00 | 415.138.682,00 | (415.138.682,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **415.138.682,00** | **(415.138.682,00)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp415.138.682,00) atau (100,00%).

### 5.3.1.1.2.5 Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Saldo Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.2.5.1 Rincian Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) | 330.245.000,00 | 0,00 | 330.245.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **330.245.000,00** | **0,00** | **330.245.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp330.245.000,00 atau 100,00%, merupakan penambahan piutang atas opsen MBLB dari Kabupaten Karangasem yang belum

dilimpahkan ke RKUD Provinsi Bali sesuai LHP PDRD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025)

#### 5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.3.1 Rincian Piutang Retribusi Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Jasa Umum | 44.236.509.612,75 | 29.539.543.742,75 | 14.696.965.870,00 | 49,75 |
| Piutang Retribusi Jasa Usaha | 7.923.573.763,99 | 851.476.404.113,68 | (843.552.830.349,69) | (99,07) |
| Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 0,00 | 7.525.000,00 | (7.525.000,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **52.160.083.376,74** | **881.023.472.856,43** | **(828.863.389.479,69)** | **(94,08)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp828.863.389.479,69) atau (94,08%).

Rincian Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

#### 5.3.1.1.3.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.3.1.1 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | 41.418.134.612,75 | 27.174.768.742,75 | 14.243.365.870,00 | 52,41 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan | 2.818.375.000,00 | 2.364.775.000,00 | 453.600.000,00 | 19,18 |
| **Jumlah** | **44.236.509.612,75** | **29.539.543.742,75** | **14.696.965.870,00** | **49,75** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 14.696.965.870,00 atau 49,75%. Berikut penjelasan saldo Piutang Retribusi Jasa Umum beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp14.243.365.870,00 atau 52,41%. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi saldo awal piutang atas kesalahan penginputan, klaim pending JKN Bulan Oktober dan Desember 2025, pengakuan pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan atas klaim Napza Bulan Desember 2025, dan pengakuan pendapatan retribusi atas klaim pasien Dinas Sosial Bulan Nopember dan Desember 2025.
2. Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan mengalami peningkatan sebesar Rp453.600.000,00 atau 19,18%, yang disebabkan karena adanya penambahan pelanggan baru dan peningkatan volume jasa yang diperlukan.

#### 5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.3.2.1 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 147.635.000,00 | 147.635.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 7.775.938.763,99 | 851.328.769.113,68 | (843.552.830.349,69) | (99,09) |
| **Jumlah** | **7.923.573.763,99** | **851.476.404.113,68** | **(843.552.830.349,69)** | **(99,07)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp843.552.830.349,69) atau (99,07%).

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari tahun 2024, merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada BKPSDM Provinsi Bali.

Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas NII bermula dari kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan NII. Kerja sama tersebut pada awalnya merupakan bagian dari *Land Utilization and Land Development Agreement* (LUDA Induk) yang telah berjalan sejak tahun 1989, melibatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pemerintah Provinsi Bali, dan NII di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua. Berdasarkan Perjanjian Pemisahan tanggal 10 November 2022, pelaksanaan kerja sama atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dipisahkan dan dituangkan dalam **Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022** antara Pemerintah Provinsi Bali dan NII (LUDA Pemprov Bali), yang mengatur kewajiban NII untuk membayar Kontribusi Tetap atas pemanfaatan lahan HPL seluas ±398.990 m² di Jalan Terompong, Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya, NII gagal memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap sehingga pada tanggal **1 Juni 2023** Gubernur Bali menyampaikan surat pengakhiran LUDA Pemprov Bali kepada NII.

Akibat kegagalan tersebut, pada tanggal **6 Juli 2023** kreditur-kreditur NII mengajukan permohonan PKPU terhadap NII di Pengadilan Niaga Surabaya, yang dikabulkan melalui **Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2023**. Perjanjian Perdamaian antara NII dan para krediturnya kemudian mendapat pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal **25 Oktober 2023**.

Meskipun demikian, kedua belah pihak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak. Dalam rangka pelaksanaan Putusan Homologasi, NII bersama PT Globalnet Spektrum Teknologi (GST) mendirikan **PT Bali Destinasi Lestari (BDL)** sebagai entitas baru untuk melanjutkan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan lahan. Melalui serangkaian proses pengalihan saham yang selesai pada tanggal **22 April 2024**, komposisi kepemilikan saham BDL menjadi PT Kalibiru Graha Abadi (KGA) sebesar **90,01%** dan Bangkok Bank Public Company Limited sebesar **9,99%**.

Sebagai puncak dari proses penyelesaian tersebut, pada tanggal **2 Desember 2025** ditandatangani **Kesepakatan Bersama** antara Pemerintah Provinsi Bali, NII, dan BDL yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII berdasarkan LUDA Pemprov Bali. Pada tanggal yang sama, seluruh tunggakan kewajiban NII sebesar **Rp59.884.028.378,98** termasuk di dalamnya piutang retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar **Rp56.863.253.645,15** telah diterima melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan diakui sebagai pendapatan serta Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pada tanggal **11 Desember 2025** kerja sama pemanfaatan lahan dilanjutkan melalui penandatanganan **Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 25** di hadapan Notaris dr. Ketut Mahatma Dharma Wijaya, S.H., M.Kn di Denpasar, yang ditandatangani oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali dan Ferry Ma'ruf selaku Direktur Utama PT BDL. Akta ini bukan merupakan perjanjian baru, melainkan perubahan dan pernyataan kembali atas LUDA Pemprov Bali yang telah ada, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sebelumnya tetap menjadi dasar perhitungan piutang. Atas dasar inilah dilakukan koreksi saldo awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas NII sebesar **Rp786.802.780.952,68** beserta penyisihannya, untuk menyesuaikan nilai piutang yang sebenarnya terutang berdasarkan hak dan kewajiban yang berlaku dalam LUDA Pemprov Bali sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025 tersebut.

Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban NII dan dinyatakan kembalinya LUDA Pemprov Bali melalui Akta Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025, Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas NII per **31 Desember 2025 telah terselesaikan seluruhnya**.

#### 5.3.1.1.3.3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.3.3.1 Rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan | 0,00 | 7.525.000,00 | (7.525.000,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **7.525.000,00** | **(7.525.000,00)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%). Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan piutang macet dan tak tertagih karena debitur yang berjumlah delapan orang tersebut seluruhnya dalam keadaan pailit dan sudah ada yang meninggal dunia sehingga piutang tersebut dihapuskan secara bersyarat pada Tahun Anggaran 2025 dengan SK Gubernur Nomor 1026/04-E/HK/2025 tanggal 29 Desember 2025.

### 5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.4.1 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah | 44.205.930,00 | 0,00 | 44.205.930,00 | 100,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 34.560,00 | 0,00 | 34.560,00 | 100,00 |
| Piutang Pendapatan BLUD | 3.112.656.735,00 | 2.796.271.075,00 | 316.385.660,00 | 11,31 |
| Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 0,00 | 491.332.281,37 | (491.332.281,37) | (100,00) |
| **Jumlah** | **3.156.897.225,00** | **3.287.603.356,37** | **(130.706.131,37)** | **(3,98)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp130.706.131,37) atau (3,98%).

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

### 5.3.1.1.4.1 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.4.1.1 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam | 44.205.930,00 | 0,00 | 44.205.930,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **44.205.930,00** | **0,00** | **44.205.930,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.205.930,00 atau 100,00%, merupakan piutang atas Opsen MBLB dari Kabupaten Karangasem yang belum dilimpahkan ke RKUD Provinsi Bali (LHP PDRD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025).

### 5.3.1.1.4.2 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.4.2.1 Rincian Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 34.560,00 | 0,00 | 34.560,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **34.560,00** | **0,00** | **34.560,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.560,00 atau 100,00%, merupakan piutang denda retribusi sewa kantin pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

### 5.3.1.1.4.3 Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang Pendapatan BLUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.4.3.1 Rincian Piutang Pendapatan BLUD**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 3.112.656.735,00 | 2.796.271.075,00 | 316.385.660,00 | 11,31 |
| **Jumlah** | **3.112.656.735,00** | **2.796.271.075,00** | **316.385.660,00** | **11,31** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp316.385.660,00 atau 11,31% merupakan Piutang Penjualan Air Curah pada UPTD. Pengelolaan Air Minum (PAM).

### 5.3.1.1.4.4 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.4.4.1 Rincian Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 0,00 | 491.332.281,37 | (491.332.281.,37) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **491.332.281,37** | **(491.332.281,37)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp491.332.281,37) atau (100,00%). Piutang denda ini bermula dari kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII). Kerja sama tersebut pada awalnya merupakan bagian dari *Land Utilization and Land Development Agreement* (LUDA Induk) yang telah berjalan sejak tahun 1989, melibatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pemerintah Provinsi Bali, dan NII di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua.

Seiring perkembangan, berdasarkan Perjanjian Pemisahan tanggal **10 November 2022**, pelaksanaan kerja sama atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dipisahkan secara khusus dan dituangkan dalam **Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022** antara Pemerintah Provinsi Bali dan NII, yang selanjutnya disebut LUDA Pemprov Bali. Perjanjian ini mengatur kewajiban NII untuk membayar Kontribusi Tetap kepada Pemerintah Provinsi Bali atas pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) yang berlokasi di Jalan Terompong, Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas kurang lebih **398.990 m²**. Dalam pelaksanaannya, NII tidak memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap pada **Triwulan II, III, dan IV Tahun 2022**, sehingga timbul denda keterlambatan yang dicatat sebagai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar **Rp491.332.281,37**.

Akibat kegagalan NII dalam memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, pada tanggal **1 Juni 2023** Gubernur Bali menyampaikan surat pengakhiran LUDA Pemprov Bali kepada NII. Selanjutnya, pada tanggal **6 Juli 2023**, kreditur-kreditur NII mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap NII di Pengadilan Niaga Surabaya.

Permohonan PKPU tersebut dikabulkan melalui **Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2023**. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal **25 Oktober 2023** Perjanjian Perdamaian antara NII dan para krediturnya telah mendapat pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui **Putusan Homologasi**.

Dalam rangka melaksanakan Putusan Homologasi tersebut, NII bersama PT Globalnet Spektrum Teknologi (GST) mendirikan **PT Bali Destinasi Lestari (BDL)** sebagai entitas baru yang akan melanjutkan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan lahan dengan Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya, melalui serangkaian proses pengalihan saham yang selesai pada tanggal **22 April 2024**, komposisi kepemilikan saham BDL menjadi PT Kalibiru Graha Abadi (KGA) sebesar **90,01%** dan Bangkok Bank Public Company Limited sebesar **9,99%.**

Sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh seluruh kewajiban NII yang tertunggak kepada Pemerintah Provinsi Bali, pada tanggal **2 Desember 2025** ditandatangani **Kesepakatan Bersama** antara Pemerintah Provinsi Bali, NII, dan BDL. Kesepakatan Bersama ini mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII berdasarkan LUDA Pemprov Bali, termasuk di dalamnya seluruh denda keterlambatan pembayaran Kontribusi Tetap. Pada tanggal yang sama, **2 Desember 2025**, seluruh tunggakan kewajiban NII sebesar **Rp59.884.028.378,98** telah diterima oleh Pemerintah

Provinsi Bali melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban denda NII dalam Tahun Anggaran 2025, saldo Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per **31 Desember 2025 menjadi nihil (Rp0,00)**.

### 5.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.5.1 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) | 180.125.380.000,00 | 0,00 | 180.125.380.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **180.125.380.000,00** | **0,00** | **180.125.380.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp180.125.380.000,00 atau 100,00%.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

### 5.3.1.1.5.1 Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.5.1.1 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang DBH Pajak | 180.098.559.000,00 | 0,00 | 180.098.559.000,00 | 100,00 |
| Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 26.821.000,00 | 0,00 | 26.821.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **180.125.380.000,00** | **0,00** | **180.125.380.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp180.125.380.000,00 atau 100,00% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

### 5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.6.1 Rincian Piutang Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 3.691.104.636,00 | 3.709.104.636,00 | (18.000.000,00) | (0,49) |
| Uang Muka | 14.212.583.811,00 | 0,00 | 14.212.583.811,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **17.903.688.447,00** | **3.709.104.636,00** | **14.194.583.811,00** | **382,70** |

Tabel di atas menunjukkan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.194.583.811,00 atau 382,70%.

Rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

### 5.3.1.1.6.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.6.1.1 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara | 3.691.104.636,00 | 3.709.104.636,00 | (18.000.000,00) | (0,49) |
| **Jumlah** | **3.691.104.636,00** | **3.709.104.636,00** | **(18.000.000,00)** | **(0,49)** |

Tabel di atas menunjukkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 202 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp18.000.000,00 atau (0,49%).

### 5.3.1.1.6.2 Uang Muka

Saldo Uang Muka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.6.2.1 Rincian Uang Muka**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 14.212.583.811,00 | 0,00 | 14.212.583.811,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **14.212.583.811,00** | **0,00** | **14.212.583.811,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Uang Muka per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.212.583.811 ,00 atau 100,00%, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uang muka pengadaan barang dan jasa bangunan fasilitas umum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain untuk pembayaran Sarbagita Bulan Desember Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan yang dicatat sebagai uang muka pengadaan barang/jasa.

### 5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.7 Rincian Penyisihan Piutang**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Piutang Pendapatan | (16.269.563.506,46) | (858.482.180.660,38) | 842.212.617.153,92 | (98,10) |
| Penyisihan Piutang Lainnya | (3.691.104.636,00) | (3.709.104.636,00) | 18.000.000,00 | (0,49) |
| **Jumlah** | **(19.960.668.142,46)** | **(862.191.285.296,38)** | **842.230.617.153,92** | **(97,68)** |

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp842.230.617.153,92 atau (97,68%).

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

### 5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.7.1.1 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Piutang Pajak Daerah | (358.393.725,00) | (621.485.242,76) | 263.091.517,76 | (42,33) |
| Penyisihan Piutang Retribusi | (14.905.276.565,05) | (857.298.578.937,07) | 842.393.302.372,02 | (98,26) |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | (105.266.316,41) | (562.116.480,55) | 456.850.164,14 | (81,27) |
| Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | (900.626.900,00) | 0,00 | (900.626.900,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **(16.269.563.506,46)** | **(858.482.180.660,38)** | **842.212.617.153,92** | **(98,10)** |

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp842.212.617.153,92 atau (98,10%). Penjelasan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Penyisihan Piutang Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp263.091.517,76 atau (42,33%) karena adanya pelunasan piutang pajak dan penghapusan piutang Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1026/04-E/HK/2025 Tanggal 29 Desember 2025;
2. Komponen Penyisihan Piutang Retribusi mengalami penurunan signifikan sebesar Rp842.393.302.372,02 atau (98,26%);
3. Komponen Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp456.850.164,14 atau (81,27%);
4. Komponen Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat memiliki saldo baru sebesar (Rp900.626.900,00) atau (100,00%).

### 5.3.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.7.2.1 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | (3.691.104.636,00) | (3.709.104.636,00) | 18.000.000,00 | (0,49) |
| **Jumlah** | **(3.691.104.636,00)** | **(3.709.104.636,00)** | **18.000.000,00** | **(0,49)** |

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp18.000.000,00 atau (0,49%).

### 5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.8.1 Rincian Beban Dibayar Dimuka**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 400,00 | (400,00) | (100,00) |
| Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah | 485.566.225,08 | 490.725.885,24 | (5.159.660,16) | (1,05) |
| **Jumlah** | **485.566.225,08** | **490.726.285,24** | **(5.160.060,16)** | **(1,05)** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp5.160.060,16) atau (1,05%).

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 24***.

### 5.3.1.1.8.1 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.8.1.1 Rincian Beban Dibayar Dimuka**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 400,00 | (400,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **400,00** | **(400,00)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp400,00) atau (100,00%).

### 5.3.1.1.8.2 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah

Saldo Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.8.2.1 Rincian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin | 319.217.205,72 | 157.694.163,93 | 161.523.041,79 | 102,43 |
| Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan | 166.349.019,36 | 333.031.721,31 | (166.682.701,95) | (50,05) |
| **Jumlah** | **485.566.225,08** | **490.725.885,24** | **(5.159.660,16)** | **(1,05)** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp5.159.660,16) atau (1,05%), berikut penjelasan saldo Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp161.523.041,79 atau 102,43%;
2. Komponen Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp166.682.701,95) atau (50,05%).

Saldo Beban Dibayar Dimuka berasal dari pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya berupa Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor: B.31.000.3.3/1171/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Juni 2025.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 24***

### 5.3.1.1.9 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.9.1 Rincian Persediaan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Barang Pakai Habis | 157.336.319.853,75 | 163.409.206.924,14 | (6.072.887.070,39) | (3,72) |
| Barang Tak Habis Pakai | 73.765.512,60 | 115.638.930,60 | (41.873.418,00) | (36,21) |
| **Jumlah** | **157.410.085.366,35** | **163.524.845.854,74** | **(6.114.760.488,39)** | **(3,74)** |

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.114.760.588,39) atau (3,74%).

Rincian Persediaan dapat dilihat pada ***Lampiran 25***.

#### 5.3.1.1.9.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.9.1.1 Rincian Barang Pakai Habis**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bahan | 40.782.711.528,56 | 33.276.009.681,62 | 7.506.701.846,94 | 22,76 |
| Suku Cadang | 171.269.356,52 | 100.078.598,67 | 71.190.757,85 | 71,13 |
| Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 20.345.838.128,68 | 16.882.653.748,28 | 3.463.184.380,40 | 20,51 |
| Obat-obatan | 20.374.237.440,90 | 26.621.649.453,73 | (6.247.412.012,83) | (23,47) |
| Persediaan untuk Dijual/Diserahkan | 70.473.946.891,14 | 81.611.712.942,31 | (11.137.766.051,17) | (13,65) |
| Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga | 2.202.350,00 | 0,00 | 2.202.350,00 | 100,00 |
| Natura dan Pakan | 498.997.210,97 | 467.729.866,85 | 31.267.344,12 | 6,68 |
| Persediaan Penelitian | 2.284.004.676,98 | 2.033.291.122,68 | 250.713.554,30 | 12,33 |
| Persediaan dalam Proses | 2.403.112.270,00 | 2.416.081.510,00 | (12.969.240,00) | (0,54) |
| **Jumlah** | **157.336.319.853,75** | **163.409.206.924,14** | **(6.072.887.070,39)** | **(3,72)** |

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.072.887.070,39) atau (3,72%), berikut penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Suku Cadang mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp71.190.757,85 atau 71,13%;
2. Komponen Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga mengalami saldo baru sebesar Rp2.202.350,00 atau 100,00%.

Selain itu juga terdapat persediaan kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan Sekretarian DPRD seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3.1.1.9.1.2 Rincian Barang Persediaan Kadaluarsa**

| NO | SKPD | NAMA BARANG | NILAI | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinas Kesehatan | Bahan Kimia | Rp | 24.561.475,60 |
| | | Bahan Lainnya | Rp | 29.254.614,55 |
| | | Obat | Rp | 162.765.524,06 |
| | | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | Rp | 2.588.467.226,79 |
| 2. | Sekretariat DPRD | Bahan Komputer | Rp | 10.175.000,00 |
| | **JUMLAH** | | **Rp** | **2.815.223.841,00** |

#### 5.3.1.1.9.2 Barang Tak Habis Pakai

Saldo Barang Tak Habis Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.1.9.2.1 Rincian Barang Tak Habis Pakai**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Komponen | 73.765.512,60 | 115.638.930,60 | (41.873.418,00) | (36,21) |
| **Jumlah** | **73.765.512,60** | **115.638.930,60** | **(41.873.418,00)** | **(36,21)** |

Tabel di atas menunjukkan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp41.873.418,00) atau (36,21%).

### 5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.2.1 Rincian Investasi Jangka Panjang**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 6.978.339.830.762,88 | 6.771.706.852.508,99 | 206.632.978.253,89 | 3,05 |
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 143.915.646.511,06 | 144.001.416.845,90 | (85.770.334,84) | (0,06) |
| **Jumlah** | **7.122.255.477.273,94** | **6.915.708.269.354,89** | **206.547.207.919,05** | **2,98** |

Tabel di atas menunjukkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp206.547.207.919,05 atau 2,98%.

#### 5.3.1.2.1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.2.1.1 Rincian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 6.978.339.830.762,88 | 6.771.706.852.508,99 | 206.632.978.253,89 | 3,05 |
| **Jumlah** | **6.978.339.830.762,88** | **6.771.706.852.508,99** | **206.632.978.253,89** | **3,05** |

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp206.632.978.253,89 atau 3,32%.

Rincian Penyertaan Modal dapat dilihat pada ***Lampiran 26***.

1. Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
   a. Perumda Kerta Bali Saguna

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Perumda Kerta Bali Saguna | 61.460.490.489,00 | 95.859.986.587,50 | (34.399.496.098,50) | (35,89) |

Pada Tahun 2022, terjadi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan Perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Bali yang Sejahtera dan Bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Bidang usaha dan jenis usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Pengelolaan Aset dan Infrastruktur serta jasa, Industri dan Perdagangan, dan Energi dan Ketenagalistrikan. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan Laporan No. 00014/3.0225/AU.8/05/1756-3/1/III/2026 tanggal 25 Pebruari 2026 dan mendapat opini Wajar dengan Pengecualian

   b. PT. BPD Bali

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. BPD Bali | 1.665.235.678.757,30 | 1.464.824.031.618,88 | 200.411.647.138,42 | 13,68 |

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank) didirikan berdasarkan akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962. Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan

Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Ruang lingkup kegiatan Bank BPD Bali meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2) Memberikan kredit
3) Menerbitkan surat pengakuan utang;
4) Menempatkan dana, meminjam dana, dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali disajikan dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. BPD Bali sebesar 29,16%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo dengan Laporan No/Ref:00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/1/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 dan mendapatkan Opini Wajar. Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2025 diperoleh dari perhitungan persentase kepemilikan dari laba PT.BPD Bali Tahun 2025 (audited) dikurangi dengan dividen yang dibagikan atas laba Tahun 2024. Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp120.000.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 199/01-C/HK/2025 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 18 Pebruari 2025.

c. PT. Jamkrida Bali Mandara

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. Jamkrida Bali Mandara | 246.898.956.931,31 | 203.432.294.659,34 | 43.466.662.271,97 | 21,37 |

PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 21 November 2010 Tanggal 20 Oktober 2010. PT. Jamkrida Bali Mandara berusaha dalam bidang Jasa Penjaminan Kredit, memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 196/01-C/HK/2025 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Tanggal 17 Pebruari 2025.Laporan Keuangan Konsolidasian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan Laporan No. 00012/3.0225/AU.1/09/1756-4/1/III/2026 tanggal 24 Pebruari 2026 dan mendapat opini Wajar.

d. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Perseroda Pusat Kebudayaan Bali | 5.004.744.704.585,27 | 5.004.744.704.585,27 | 0,00 | 0,00 |

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan;Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District*/CBD); Pelabuhan Penyebrangan dan Marina; *Meeting Incentive Convetion and Exhibition* (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (*Transit Oriented Development*/TOD); dan Wahana Wisata Alam diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda berupa inbreng atas

Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Sampai saat ini Perseroda Pusat Kebudayaan Bali belum beroperasi dan belum pernah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

e. Perumda Kerthi Bali Santhi

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Perumda Kerthi Bali Santhi | 0,00 | 2.845.835.058,00 | 0,00 | (100,00) |

Perumda Kerthi Bali Santhi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 2 Maret 2022. Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggaran Pariwisata Digital Budaya Bali secara professional, akuntabel dan transparan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerthi Bali Santhi disajikan dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali sebesar 100%. Laporan Keuangan direviu oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan dengan Laporan No. 00001/LR/KAP.IGOR/1/III/2026 tanggal 10 Maret 2026.

### 5.3.1.2.2 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.2.2.1 Rincian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 143.915.646.511,06 | 144.001.416.845,90 | (85.770.334,84) | (0,06) |
| **Jumlah** | **143.915.646.511,06** | **144.001.416.845,90** | **(85.770.334,84)** | **(0,06)** |

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp85.770.334,84) atau (0,06%). Rincian Penyertaan Modal dapat dilihat pada ***Lampiran 26***.

a. PT. Rumah Sakit Puri Raharja

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Rumah Sakit Puri Raharja | 42.765.646.511,06 | 42.851.416.845,90 | (85.770.334,84) | (0,20) |

PT. Puri Raharja merupakan salah satu rumah sakit swasta yang bergerak dalam kegiatan usaha berupa membangun, mendirikan dan mengelola rumah sakit untuk umum, termasuk di dalamnya klinik Kesehatan Masyarakat dan laboratorium. Nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Puri Raharja sebesar 58,00% dan karena keterbatasan akun, maka Penyertaan Modalnya di catat sebagai Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja tahun 2025 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laporan Laba (Rugi) Unaudited 2025 dan telah dikurangi nilai deviden yang dibagikan atas Laba Tahun 2024. Laporan Keuangan di audit oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiartha dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen No. 00014/2.1266/AU.8/05/1612-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 dan mendapat opini Wajar.

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Asuransi Bangun Askrida | 1.150.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PT. Asuransi Bangun Askrida (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Raharti Sudjardjati, S.H., No. 9 dan dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pemerintah No. KEP.192/KM.B/1990, tanggal 14 Maret 1990. PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya.Nilai penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode

*cost,* karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali sebesar 0,39% dan karena keterbatasan akun, maka Penyertaan Modalnya dicatat sebagai Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. PT. Jasa Marga Bali Tol

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Jasa Marga Bali Tol | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PT Jasa Marga Bali Tol (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU57740.AH.01.01.TH 2011 tanggal 25 Nopember 2011. PT. Jasa Marga Bali Tol berusaha dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan Teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, dimana hak konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atas jalan tol Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa selama 45 tahun, terhitung mulai Bulan Oktober 2013. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan Laporan No. 00151/2.1030/AU.1/06/0181-4/1/III/2026 tanggal 27 Pebruari 2026 dan mendapat opini Wajar

### 5.3.1.3 ASET TETAP

Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.1 Rincian Aset Tetap**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 8.097.663.457.350,43 | 5.385.006.936.615,43 | 2.712.656.520.735,00 | 50,37 |
| Peralatan dan Mesin | 2.502.919.368.695,03 | 2.196.293.227.099,70 | 306.626.141.595,33 | 13,96 |
| Gedung dan Bangunan | 4.199.917.279.027,22 | 3.850.274.091.822,14 | 349.643.187.205,08 | 9,08 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.647.587.427.731,03 | 4.335.363.075.122,41 | 1.312.224.352.608,62 | 30,26 |
| Aset Tetap Lainnya | 112.910.723.583,04 | 98.441.316.502,04 | 14.469.407.081,00 | 14,69 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 67.448.741.853,85 | 43.173.893.899,00 | 24.274.847.954,85 | 56,22 |
| Akumulasi Penyusutan | (6.619.254.211.959,49) | (5.485.889.248.727,52) | (1.133.364.963.231,97) | 20,65 |
| **Jumlah** | **14.009.192.786.281,11** | **10.422.663.292.333,20** | **3.586.529.493.947,91** | **34,41** |

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.586.529.493.947,91 atau 34,41%.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.1.1 Rincian Tanah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 8.097.663.457.350,43 | 5.385.006.936.615,43 | 2.712.656.520.735,00 | 50,37 |
| **Jumlah** | **8.097.663.457.350,43** | **5.385.006.936.615,43** | **2.712.656.520.735,00** | **50,37** |

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.712.656.520.735,00 atau 50,37%, berikut penjelasan saldo Tanah beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Tanah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.712.656.520.735,00 atau 50,37%. Salah satu penyebab kenaikan tersebut adalah adanya penerimaan hibah berupa tanah untuk jalan provinsi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga serta Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp 2.704.610.360.650,00
2. Pemerintah Provinsi Bali memiliki permasalahan terkait dengan Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Tanah Eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran**, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m2 (246,5 Ha). Tanah tersebut diklaim oleh PT M selaku pemegang HGU Nomor 1 Desa Pemuteran yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, hasil dari Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Bali menang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah inkracht. Proses selanjutnya melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang difasilitasi oleh Biro Hukum. Pada tanggal 10 Juni 2021 Perbekel Pemuteran telah membentuk tim melalui Keputusan Perbekel Pemuteran No. 140/25/VI/2021 disebut dengan Tim Tiga Belas, selanjutnya Tim tersebut mohon audiensi dengan Gubernur Bali melalui Surat No. 02/TIM PKPT/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021. Permohonan audiensi difasilitasi melalui rapat tanggal 17 Desember 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan hasil :
      1) Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Tiga Belas sepakat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran secara damai.
      2) Tim Tiga Belas akan segera menyiapkan data masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau menggarap tanah tersebut sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Bali, dan akan segera menyampaikannya bersama surat permohonan kepada Gubernur Bali;
      3) Tim Tiga Belas siap mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mendukung dan kooperatif jika dilaksanakan pendataan dan pemetaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke tanah tersebut. BPKAD Provinsi Bali telah mendaftarkan permohonan pengukuran dan pemetaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 1 November 2022 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak BPN, didapat luas total 2.406.835 m2 sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 1063/2022 Tanggal 15 Desember 2022. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Gubernur Bali. Tanggal 30 Januari 2023 dilakukan audiensi antara Tim Tigabelas dengan Gubernur Bali, namun belum juga ada kesepakatan mengenai luas lahan yang akan didistribusikan.

         Tanggal 27 Agustus 2023 dilaksanakan rapat bertempat di Jaya Sabha antara Gubernur Bali, Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Perwakilan Tim 13 menyepakati :
         1) Menyepakati realokasi tanah eks HGU 1 Pemuteran seluas 85,76 Hektar yang digunakan untuk : Desa Dinas, Desa Adat, Kawasan Pura dan Kuburan, warga penggarap tahun 1963, warga penggarap tahun 1992, TNI (Arhanud), fasilitas umum dan peternakan.
         2) Realokasi sebagaimana dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Tim 13 dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

         Pada tanggal 3 September 2023 dilaksanakan pertemuan langsung antara Gubernur dengan Tim Tigabelas dan warga penggarap bertempat di Kantor Desa Pemuteran untuk menyampaikan hasil pertemuan tanggal 27 Agustus 2023 (poin 1 di atas) secara langsung kepada warga penggarap. Namun pada hari itu Tim Tigabelas meminta waktu kepada Gubernur untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada warga penggarap karena pada pertemuan itu tidak semua warga penggarap hadir. Gubernur memberikan waktu paling lambat tanggal 4 September 2023 harus sudah ada jawaban dari Tim Tigabelas atas opsi pemberian lahan seluas 85,76 Hektar kepada warga. Sesuai batas waktu yang diberikan, maka Tim Tigabelas menghadap kepada Gubernur di Jayasabha tanggal 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati luas tanah yang akan dilepaskan hak oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk diredistribusikan kepada warga penggarap, Desa Adat Pemuteran, Desa Dinas Pemuteran, kawasan pura dan kuburan serta fasilitas umum adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas hasil ukur terbaru, atau seluas 120,3 Ha.

Sedangkan 50% sisanya seluas 120,3 Ha adalah untuk Pemerintah Provinsi Bali termasuk alokasi untuk TNI (Arhanud).

Terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya BPKAD Provinsi Bali melaksanakan rapat pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk membahas tindaklanjut penyelesaian permasalahan tanah eks HGU 1, yang bertujuan untuk mendengar secara langsung dari Tim Tigabelas terkait kesepakatan yang telah disetujui bersama Gubernur Bali di Jayasabha. Tim Tigabelas menjelaskan bahwa mereka sudah membuat konsep peta posisi tanah sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2023 di Jayasabha. Dalam rapat tersebut juga terdapat usulan dari anggota Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali agar dilakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 591/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (Putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan Pemerintah Provinsi Bali dalam perkara melawan PT M). Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Atas laporan hasil rapat tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menugaskan Kepala Biro Hukum untuk membahas terkait usulan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga pada tanggal 3 November 2023 Biro Hukum melaksanakan rapat bersama Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, dan Inspketorat Daerah Provinsi Bali. Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Serikat Petani Suka Makmur melalui Surat Nomor 01/SPSM/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 yang ditujukan kepada Menteri ATR RI, menyatakan:

1) Menolak kesepakatan antara Tim Tigabelas Desa Pemuteran dan Gubernur Bali tanggal 4 September 2023 (poin 19 huruf h di atas) karena tanpa persetujuan Serikat Petani Suka Makmur.
2) Menolak klaim kepemilikan Pemerintah Provinsi Bali atas tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran.
3) Menuntut redistribusi dan pengakuan hak atas tanah untuk Serikat Petani Suka Makmur.

Pemerintah Provinsi Bali telah bersurat kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Surat Gubernur Bali Nomor B.31.000.2.3.2/738/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 10 April 2025 yang intinya bahwa tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran adalah sah milik Pemerintah Provinsi Bali yang diperoleh dari hasil pembelian, dan telah dipertegas dalam salah satu amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 591/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang berbunyi ”Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Pemerintah Provinsi Bali) adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m2”, sehingga penolakan kepemilikan Pemerintah Provinsi Bali atas tanah tersebut yang dinyatakan oleh Serikat Petani Suka Makmur adalah tidak benar dan sebagai tindakan melawan hukum.

Tanggal 23 Juli 2025 dilaksanakan rapat di Jayasabha yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali, Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng beserta jajarannya, Kepala Desa Pemuteran, Bendesa Adat Pemuteran, Ketua Tim Tigabelas Desa Pemuteran, Perwakilan petani, dengan kesepakatan:

1) Sebanyak 82 rumah akan diberikan kompensasi dan besarannya atas hasil penilaian dari Dinas PUPRPKP Provinsi Bali dan Dinas PU Kabupaten Buleleng.
2) Petani yang masih punya tanaman hanya diijinkan sampai bulan Desember 2025.
3) Tanah wakaf yang semula 1,5 Hektare diberikan tambahan 1,5 Hektare menjadi 3 Hektare diambilkan dari alokasi fasilitas umum jalan yang semula 3 Hektare menjadi 1,5 Hektare. Kekurangan lahan untuk fasilitas umum jalan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali seluas maksimum 1,5 Hektare.
4) Kesepakatan pembagian lahan 50%:50% sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2023 yaitu atas nama Pemerintah Provinsi Bali seluas 120,3 Hektare dan Desa Adat Pemuteran seluas 120,3 Hektare. Proses pengukuran dan sertifikasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kantor Pertanahan

Kabupaten Buleleng, Bendesa Adat Pemuteran, Kepala Desa Pemuteran dan Tim Tigabelas.

5) Bupati Buleleng, Camat Gerokgak, Bendesa Adat Pemuteran, Kepala Desa Pemuteran dan Tim Tigabelas bertanggungjawab mengkomunikasikan kepada masyarakat serta menjaga situasi kondusif.
6) Terhadap perlakuan oknum yang mengganggu kesepakatan dan memprovokasi warga agar dilaporkan kepada penegak hukum untuk dilakukan tindakan tegas.

BPKAD Provinsi Bali dan Dinas PUPRPKP Provinsi Bali melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap rumah warga yang berada di atas tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran pada tanggal 28 dan 31 Juli 2025, bersama: Camat Gerokgak, Perbekel Pemuteran, Bendesa Adat Pemuteran, Ketua Tim Tigabelas Desa Pemuteran, Sekretaris Tim Tigabelas Desa Pemuteran, Kelian Banjar Dinas Pengumbahan.

Konsorsium Pembaruan Agraria bersurat kepada Gubernur Bali Nomor 435/Seknas-KPA/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025, yang pada intinya menyampaikan:

a. Menganulir hasil rapat Rabu, 23 Juli 2025 sebab akan menimbulkan masalah yang lebih berat dan sulit ditangani di kemudian hari;
b. Menggelar dialog terbuka kembali dengan Petani dan KPA untuk mendengarkan aspirasi dari petani secara langsung; dan
c. Mengeluarkan keputusan pengusulan objek redistribusi tanah kepada Menteri ATR/BPN sebagai percepatan redistribusi tanah di Desa Pemuteran.

**b. Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 4 Desa Sidakarya**, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 3.000 m2 (0,3 Ha). Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik a.n INSA yang telah dijual dan dijadikan perumahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan INSA ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini yang semestinya diajukan ke PTUN Denpasar. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya, Kota Denpasar, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk meminta data para pemegang sertifikat hak milik yang berada di atas tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya sebagai bahan penyusunan gugatan. Hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk dapat diberikan data dan informasi yang memuat nama pemegang hak, nomor sertifikat, dan luas bidang tanah/sertifikat yang terbit di atas bidang tanah SHP Nomor 4 / Desa Sidakarya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun upaya hukum penyelesaian permasalahan tanah dimaksud (Surat Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022). Sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, untuk memenuhi Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali tersebut, Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut akan diuraikan asal-mula tanah SHP Nomor 4 / Sidakarya sampai pada tersebutnya beberapa hak milik di atasnya, serta akan disebutkan nomor dan nama pemegang haknya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023) untuk meminta agar segera dilakukan mediasi sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah mengundang Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi penyelesaian permasalahan akibat indikasi tumpang tindih SHP Nomor 4/Sidakarya pada tanggal 13 Desember 2023. Hasil mediasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang isinya memberikan daftar nama pemegang hak dan nomor sertipikat/hak yang terbit di atas tanah aset Pemerintah Provinsi Bali SHP 4 Sidakarya.

Kepala BPKAD Provinsi Bali telah menyampaikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali melalui Surat Nomor B.13.045.2/12/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar membalas surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023, dengan Surat Nomor IP.02.02/3592-51.71/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, yang isinya bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang pertanahan dan guna menjamin kepastian hukum, pihak-pihak yang berkeberatan dipersilakan untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan di lembaga peradilan.

**c.** **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali**, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m2, tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh I Nengah Saban dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada Made Tirtayasa (ipar dari pengelola UD Taman Dewata yang bernama Ketut Arta) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh PG Cs (cucu alm. PGM) kepada KA (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bll/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama Ketut Arta. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m2, tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh INS dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada MT (ipar dari pengelola UD TD yang bernama KA) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh Putu Gunawan Cs (cucu alm. PGM) kepada Ketut Arta (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bll/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama KA. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

1) Pada pertemuan tersebut telah berhasil dirumuskan bahwa tanah Dinas Perikanan di Jalan A. Yani Singaraja akan diganti dengan tanah milik Pemda Tk. II Buleleng yang berlokasi di sebelah barat Gedung Kesenian (Di belakang Kantor Departemen Keuangan) Singaraja, seluas ± 4 are.
2) Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penijauan ke lapangan, ternyata tanah yang direncanakan sebagai ganti tersebut point 1 di atas, ada oknum yang menguasainya, di samping itu tanah tersebut bentuknya kecil memanjang.

Dalam upaya tertib pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan lapangan tanggal 29 Mei 2013 ditemukan bahwa:

1) Tanah yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Buleleng ternyata luasnya bukan 400 m2 melainkan 350 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 853 tanggal 22 Februari 1993 atas nama IKA (almarhum) yang dibeli pada tahun 1992 dari cucu PGM (GCS).
2) Di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan oleh I Ketut Arta (almarhum) dan disewa oleh perusahaan FIF.

Untuk mengetahui kepastian terbitnya SHM No. 853 dimaksud di atas, BPKAD Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan telah dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2022, didapat hasil ukur 400 m2 dengan keterangan berada pada SHM 00853, GS 00011/1993. Hasil ukur tersebut akan dilaporkan kepada Sekda.

Saat ini sedang pengumpulan dokumen pendukung (asli) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk proses gugatan.

**d. Permasalahan Tanah SHP 121 dan 126 Desa Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung:**

Berdasarkan Buku Tanah Dana Bukti di Kabupaten Badung, terdapat tanah Persil 11 Klas III Luas 191.050 m2 (19,105 Ha) yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta (saat ini Kecamatan Kuta Selatan), Kabupaten Badung, tahun 1970an digarap oleh 19 Orang dengan Surat Ijin Menggarap Nomor 1647 s/d 1665.

Berdasarkan hasil pengecekan bahwa tanah Persil 11 Desa Unggasan, belum bersertipikat, maka Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya mengajukan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada bulan Nopember 2015, sehingga pada tanggal 2 Maret 2016 terbit SHP Nomor 121 seluas 40.400 m2 dan tanggal 1 Juni 2016 terbit SHP Nomor 126 luas 48.450 m2, keduanya atas nama Pemerintah Provinsi Bali (terbit menjadi 2 sertipikat karena adanya batas jalan). Bagian yang terbit sertipikat adalah tanah kosong yang secara fisik tidak ada bangunan di atasnya.

Pada tahun 2023, I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung, dkk mengajukan permohonan pensertipikatan atas keseluruhan tanah Persil 11 Desa Unggasan (termasuk yang sudah terbit SHP Nomor 121 dan SHP Nomor 126). Tanggal 16 Agustus 2023 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Tanah (Panitia A) Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas permohonan I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung, dkk di Kantor Desa Ungasan, dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung dkk mengajukan permohonan pembatalan SHP 121 dan SHP 126 Desa Ungasan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung memberitahukan adanya permohonan pembatalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.03/4931-51.03/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023.

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menyampaikan/meneruskan permohonan pembatalan SHP 121 dan SHP 126 Desa Ungasan yang diajukan oleh I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung dkk tersebut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Surat Nomor 4932/51.03.MP.01.03/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali menyampaikan pemberitahuan penanganan permohonan pembatalan SHP 121 dan SHP 126 Desa Ungasan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1360-51/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Tanggal 31 Agustus 2023 terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas 40.400 m2 Dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 m2 Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak Di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Menanggapi pembatalan kedua sertipikat tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan keberatan atas pembatalan SHP Nomor 121 & SHP Nomor 126 Ungasan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Surat Pj. Gubernur Bali Nomor B.00.180/47488/Setda Tanggal 17 November 2023.

Surat Keberatan Pj. Gubernur Bali dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1878-51/XI/2023 Tanggal 30 November 2023, yang intinya

bahwa pembatalan SHP Nomor 121 dan SHP Nomor 126 Ungasan adalah pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dalam rangka memperbaiki kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi pertanahan, namun tidak merubah status keperdataan tanah dimaksud. Tanah dimaksud dapat dimohonkan kembali Sertipikat Hak Atas Tanah setelah seluruh syarat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali telah menempuh upaya hukum dengan menggugat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 ke PTUN Denpasar dengan hasil pengadilan sebagai berikut:

1. Pada tahap Gugatan Pemerintah Provinsi Bali kalah, sesuai Putusan PTUN Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS Tanggal 28 Maret 2024;
2. Pada tahap Banding Pemerintah Provinsi Bali kalah, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi TUN Mataram Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR Tanggal 9 Juli 2024;
3. Pada tahap Kasasi Pemerintah Provinsi Bali kalah, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/TUN/2024 Tanggal 13 Januari 2025.

Sampai saat ini, tanah eks SHP Nomor 121 dan SHP Nomor 126 Desa Unggasan masih tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, sehingga muncul tuntutan dari Ahli Waris I Made Sirta (alm) dkk kepada Bapak Gubernur Bali agar kedua bidang tanah tersebut dihapus dari catatan aset Pemerintah Provinsi Bali.

Mutasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.1.2 Mutasi Tanah**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **5.385.006.936.615,43** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Belanja Modal | 1.181.948.000,00 |
| Kapitalisasi Belanja Non Modal | 5.178.495.000,00 |
| Penerimaan Hibah | 2.716.023.863.906,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 228.720.000,00 |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya | 1.814.465.225,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 238.149.119.920,00 |
| Tukar Menukar | 5.558.000.000,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 22.343.445.450,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | 2.990.478.057.501,00 |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Koreksi Saldo Awal | 235.693.378.441,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 22.343.445.450,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 19.784.712.875,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **277.821.536.766,00** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **8.097.663.457.350,43** |

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 27***.

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.2.1 Rincian Peralatan dan Mesin**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Alat Besar | 85.169.307.276,00 | 70.959.444.466,00 | 14.209.862.810,00 | 20,02 |
| Alat Angkutan | 256.386.930.593,00 | 226.963.391.360,00 | 29.423.539.233,00 | 12,96 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | 54.784.490.689,96 | 48.203.113.713,96 | 6.581.376.976,00 | 13,65 |
| Alat Pertanian | 14.493.991.866,91 | 14.365.775.866,91 | 128.216.000,00 | 0,89 |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | 615.712.086.047,87 | 564.840.721.616,94 | 50.871.364.430,93 | 9,00 |
| Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 165.173.037.755,68 | 126.036.150.182,77 | 39.136.887.572,91 | 31,05 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan | 567.002.800.363,53 | 504.846.069.910,53 | 62.156.730.453,00 | 12,31 |
| Alat Laboratorium | 198.244.763.293,18 | 171.765.182.507,18 | 26.479.580.786,00 | 15,41 |
| Alat Persenjataan | 35.614.389.834,10 | 29.957.170.739,10 | 5.657.219.095,00 | 18,88 |
| Komputer | 469.510.138.789,74 | 412.199.352.455,24 | 57.310.786.334,50 | 13,90 |
| Alat Eksplorasi | 29.136.000,00 | 29.136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alat Pengeboran | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 618.620.320,00 | 445.680.100,00 | 172.940.220,00 | 38,80 |
| Alat Bantu Eksplorasi | 5.881.063.162,00 | 32.700.000,00 | 5.848.363.162,00 | 17884,90 |

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Alat Keselamatan Kerja | 11.434.400.005,00 | 10.480.814.485,00 | 953.585.520,00 | 9,09 |
| Alat Peraga | 790.674.764,00 | 772.313.100,00 | 18.361.664,00 | 2,37 |
| Peralatan Proses/Produksi | 8.640.251.740,00 | 3.986.207.750,00 | 4.654.043.990,00 | 116,75 |
| Rambu-rambu | 6.407.404.897,56 | 3.570.604.549,56 | 2.836.800.348,00 | 79,44 |
| Peralatan Olahraga | 6.960.881.296,50 | 6.774.398.296,50 | 186.483.000,00 | 2,75 |
| **Jumlah** | **2.502.919.368.695,03** | **2.196.293.227.099,70** | **306.626.141.595,34** | **13,96** |

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp306.626.141.595,34 atau 13,96%, berikut penjelasan saldo Peralatan dan Mesin beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Alat Bantu Eksplorasi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.848.363.162,00 atau 17.884,90%,hal tersebut dikarenakan terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Alat Bantu Produksi Lainnya senilai Rp5.848.363.162,00;
2. Komponen Peralatan Proses/Produksi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.654.043.990,00 atau 116,75%, hal tersebut dikarenakan terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Blower dan Peralatan Proses Lainnya senilai Rp2.046.953.054,00 dan terdapat Belanja Modal juga berupa Peralatan Proses lainnya senilai Rp2.151.000.000,00;
3. Komponen Rambu-rambu mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.836.800.348,00 atau 79,44%, dikarenakan salah satunya terdapat penerimaan hibah pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan berupa Rambu tidak bersuar lainnya, Rambu Jalan, dan Guardrail senilai Rp1.921.750.000,00

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.2.2 Mutasi Peralatan dan Mesin**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **2.196.293.227.099,69** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Belanja Modal | 259.183.049.267,81 |
| Hutang | 1.580.232.319,00 |
| Kapitalisasi Belanja Non Modal | 657.552.420,00 |
| Penerimaan Hibah | 24.711.451.683,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 51.760.700.823,13 |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya | 69.960.525,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 6.906.129.660,98 |
| Reklasidikasi dari Aset Ektra ke Intra | 20.916.485,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 15.686.440.268,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | **360.576.433.451,92** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Salah Pos Belanja Modal | 62.674.945,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 2.372.188.173,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 24.818.178.249,95 |
| Koreksi Saldo Awal | 7.322.963.199,00 |
| Dibawah Kapitalisasi | 3.687.847.021,63 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 15.686.440.268,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **53.950.291.856,58** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **2.502.919.368.695,03** |

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp32.468.781,00 yang berasal dari koreksi nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 30***.

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.3.1 Rincian Gedung dan Bangunan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan Gedung | 3.767.266.473.163,86 | 3.451.952.262.488,78 | 315.314.210.675,08 | 9,13 |
| Monumen | 70.251.164.132,50 | 50.200.883.292,50 | 20.050.280.840,00 | 39,94 |
| Bangunan Menara | 327.367.097.220,98 | 327.291.142.220,98 | 75.955.000,00 | 0,02 |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti | 35.032.544.509,88 | 20.829.803.819,88 | 14.202.740.690,00 | 68,18 |
| **Jumlah** | **4.199.917.279.027,22** | **3.850.274.091.822,14** | **349.643.187.205,08** | **9,08** |

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp349.643.187.205,08 atau 9,08%, berikut penjelasan saldo Gedung dan Bangunan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Tugu Titik Kontrol/Pasti mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp14.202.740.690,00 atau 68,18%, hal tersebut dikarenakan salah satunya terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pagar Permanen senilai Rp11.090.969.679,00

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.3.2 Mutasi Gedung dan Bangunan**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **3.850.274.091.822,14** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Belanja Modal | 240.493.997.597,02 |
| Kapitalisasi Belanja Non Modal | 287.511.064,00 |
| Penerimaan Hibah | 102.964.593.161,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 308.028.076.375,06 |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya | 107.521.964,90 |
| Koreksi Saldo Awal | 69.073.628.461,95 |
| Reklasidikasi dari Aset Ektra ke Intra | 10.000.000,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 71.757.211.647,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | **792.722.540.270,93** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Salah Pos Belanja Modal | 14.319.000,00 |
| Pembayaran Hutang | 315.381.323,60 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 295.434.045.933,06 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 19.421.068.621,34 |
| Koreksi Saldo Awal | 38.644.465.648,25 |
| Dibawah Kapitalisasi | 137.860.892,60 |
| Pembayaran di Muka | 17.355.000.000,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 71.757.211.647,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **443.079.353.065,85** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **4.199.917.279.027,22** |

Terdapat mutasi kurang dikarenakan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp792.542.743,35 pada SKPD Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 31***.

### 5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.4.1 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Jalan dan Jembatan | 3.296.509.040.775,81 | 2.613.411.578.530,16 | 683.097.462.245,65 | 26,13 |
| Bangunan Air | 444.617.500.145,21 | 355.653.499.408,69 | 88.964.000.736,52 | 25,01 |
| Instalasi | 1.022.687.134.960,27 | 589.054.059.025,27 | 433.633.075.935,00 | 73,61 |
| Jaringan | 883.773.751.849,74 | 777.243.938.158,29 | 106.529.813.691,45 | 13,70 |
| **Jumlah** | **5.647.587.427.731,03** | **4.335.363.075.122,41** | **1.312.224.352.608,62** | **30,26** |

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.312.224.352.608,62 atau 30,26%, berikut penjelasan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Instalasi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp433.633.075.935,00 atau 73,61%, hal tersebut dikarenakan salah satunya terdapat penerimaan hibah pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar senilai Rp634.229.488.611,00

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.4.2 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **4.335.363.075.122,41** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Belanja Modal | 240.687.598.599,81 |
| Hutang | 1.143.700.000,00 |
| Penerimaan Hibah | 1.117.342.734.174,66 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 131.649.049.103,00 |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya | 41.165.806.000,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 115.055.000,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 634.625.999.436,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | **2.166.729.942.313,47** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 219.013.219.352,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 866.370.916,85 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 634.625.999.436,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **854.505.589.704,85** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **5.647.587.427.731,03** |

Terdapat mutasi kurang dikarenakan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.798.191,85 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 32***.

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.5.1 Rincian Aset Tetap Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bahan Perpustakaan | 85.999.488.152,74 | 72.138.503.436,74 | 13.860.984.716,00 | 19,21 |
| Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 24.250.994.060,40 | 23.639.272.060,40 | 611.722.000,00 | 2,58 |
| Hewan | 435.505.000,00 | 467.805.000,00 | (32.300.000,00) | -6,90 |
| Tanaman | 951.987.626,82 | 922.987.261,82 | 29.000.365,00 | 3,14 |
| Aset Tetap Dalam Renovasi | 1.272.748.743,08 | 1.272.748.743,08 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **112.910.723.583,04** | **98.441.316.502,04** | **14.469.407.081,00** | **14,69** |

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.469.407.081,00 atau 14,69%.

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.5.2 Mutasi Aset Tetap Lainnya**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **98.441.316.502,04** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Belanja Modal | 31.596.980.320,00 |
| Hutang | 1.964.700.000,00 |
| Kapitalisasi Belanja Non Modal | 1.999.998,00 |
| Penerimaan Hibah | 315.612.875,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 4.654.737.623,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 265.110.500,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | **38.799.141.316,00** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Salah Pos Belanja Modal | 13.152.883.620,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 841.191.579,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 7.883.373.636,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 153.067.000,00 |
| Dibawah Kapitalisasi | 2.299.218.400,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **24.329.734.235,00** |

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **112.910.723.583,04** |

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 33***.

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.6.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin | 29.446.535,00 | 29.446.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan | 49.405.269.196,85 | 29.969.608.079,00 | 19.435.661.117,85 | 64,85 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 17.345.755.122,00 | 12.506.568.285,00 | 4.839.186.837,00 | 38,69 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya | 668.271.000,00 | 668.271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **67.448.741.853,85** | **43.173.893.899,00** | **24.274.847.954,85** | **56,22** |

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp24.274.847.954,85 atau 56,22%, berikut penjelasan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp19.435.661.117,85 atau 64,85%, hal tersebut dikarenakan salah satunya terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik berupa Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain senilai Rp24.809.047.000,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.6.2 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **43.173.893.899,00** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 47.912.138.203,27 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | **47.912.138.203,27** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 535.513.158,02 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan | 23.101.777.090,40 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **23.637.290.248,42** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **67.448.741.853,85** |

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp535.513.158,02 yang berasal dari koreksi nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Bangunan Gedung pada SKPD Dinas Kesehatan.
Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 34***.

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.3.7.1 Rincian Akumulasi Penyusutan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (1.936.820.049.064,68) | (1.800.859.499.926,12) | (135.960.549.138,56) | 7,55 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (782.418.092.081,30) | (699.678.324.093,94) | (82.739.767.987,36) | 11,82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (3.877.048.453.375,11) | (2.963.822.678.011,06) | (913.225.775.364,05) | 30,81 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (22.967.617.438,40) | (21.528.746.696,40) | (1.438.870.742,00) | 6,68 |
| **Jumlah** | **(6.619.254.211.959,49)** | **(5.485.889.248.727,52)** | **(1.133.364.963.231,97)** | **20,66** |

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.133.364.963.231,97) atau (20,66%).

Mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.7.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | **(5.485.889.248.727,52)** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Beban Penyusutan | 443.156.837.539,90 |
| Kapitalisasi Barang Extra ke Intra | 10.000.000,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 78.958.950.072,00 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 260.495.601.659,00 |
| Penerimaan Hibah | 698.000.315.257,66 |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya | 14.117.300.000,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | **1.494.739.004.528,56** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Koreksi Saldo Awal | 72.132.627.680,64 |
| Mutasi Antar Perangkat Daerah | 260.495.601.659,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 28.745.811.956,95 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | **361.374.041.296,59** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **(6.619.254.211.959,49)** |

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 35***.

### 5.3.1.4 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.1 Rincian Aset Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Aset Tidak Berwujud | 36.195.435.167,65 | 28.998.557.508,65 | 7.196.877.659,00 | 24,81 |
| Aset Lain-lain | 356.569.130.729,74 | 347.585.034.803,41 | 8.984.095.926,33 | 2,58 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (28.105.557.846,82) | (20.833.551.606,82) | (7.272.006.240,00) | 34,90 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (107.855.903.850,22) | (105.330.548.116,98) | (2.525.355.733,24) | 2,39 |
| Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 4.167.149.009,65 | 3.513.765.361,49 | 653.383.648,16 | 18,59 |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 0,00 | 7.804.246.000,00 | (7.804.246.000,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **260.970.253.210,00** | **261.737.503.949,75** | **(767.250.739,75)** | **(0,29)** |

Tabel di atas menunjukkan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp767.250.739,75) atau (0,29%).

#### 5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Aset Tidak Berwujud | 36.195.435.167,65 | 28.998.557.508,65 | 7.196.877.659,00 | 24,81 |
| **Jumlah** | **36.195.435.167,65** | **28.998.557.508,65** | **7.196.877.659,00** | **24,81** |

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.196.877.659,00 atau 24,81%.

Mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.4.1.2 Mutasi Aset Tidak Berwujud**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | | **28.998.557.508,65** |
| **Mutasi Tambah:** | | |
| Penerimaan Hibah | | 82.119.030,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | | 6.817.981.654,00 |
| Belanja Modal | | 543.458.964,90 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **7.443.559.648,90** |
| **Mutasi Kurang:** | | |
| Koreksi Saldo Awal | | 49.300.000,00 |
| Penghapusan Aset (BPKAD) | | 69.899.500,00 |
| Reklasifikasi Ke Aset Tetap | | 127.482.489,90 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | | **246.681.989,90** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | | **36.195.435.167,65** |

Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 36***.

### 5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.2.1 Rincian Aset Lain-lain**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Aset Lain-lain | 356.569.130.729,74 | 347.585.034.803,41 | 8.984.095.926,33 | 2,58 |
| **Jumlah** | **356.569.130.729,74** | **347.585.034.803,41** | **8.984.095.926,33** | **2,58** |

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp8.984.095.926,33 atau 2,58%.

Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.4.2.2 Mutasi Aset Lain-lain**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | | **347.585.034.803,41** |
| **Mutasi Tambah:** | | |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya | | 72.141.181.332,16 |
| Koreksi Saldo Awal | | 1.788.000,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **72.142.969.332,16** |
| **Mutasi Kurang:** | | |
| Koreksi Saldo Awal | | 1.362.821.645,76 |
| Penghapusan Aset | | 32.883.080.535,07 |
| Reklasifikasi ke Aset Tetap | | 28.912.971.225,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | | **63.158.873.405,83** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | | **356.569.130.729,74** |

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp356.569.130.729,74 merupakan saldo awal sebesar Rp347.585.034.803,41 ditambah mutasi tambah sebesar Rp72.142.969.332,16 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp63.158.873.405,83, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp8.984.095.926,33 dibandingkan saldo awal tahun 2024.
Terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.961.322.874,22 yang berasal dari koreksi penambahan nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp32.468.781,00;
2. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp1.328.055.901,37 pada:
   a. SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp702.722.045,98;
   b. SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp89.820.697,37;
   c. SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp535.513.158,02;
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.798.191,85 pada:
   a. SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp165.074.698,48;
   b. SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp435.723.493,37.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 38 dan 39.***

### 5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.3.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (28.105.557.846,82) | (20.833.551.606,82) | (7.272.006.240,00) | 34,90 |
| **Jumlah** | **(28.105.557.846,82)** | **(20.833.551.606,82)** | **(7.272.006.240,00)** | **34,90** |

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.272.006.240,00) atau (34,90%).

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.4.3.2 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | | **(20.833.551.606,82)** |
| **Mutasi Tambah:** | | |
| Beban Amortisasi | | 2.914.493.503,00 |
| Penerimaan Hibah | | 32.250.000,00 |
| Koreksi Saldo Awal | | 4.416.972.062,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **7.363.715.565,00** |
| **Mutasi Kurang:** | | |
| Koreksi Saldo Awal | | 21.809.825,00 |
| Penghapusan Aset | | 69.899.500,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | | **91.709.325,00** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | | **(28.105.557.846,82)** |

Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 43***.

### 5.3.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (107.855.903.850,22) | (105.330.548.116,98) | (2.525.355.733,24) | 2,39 |
| **Jumlah** | **(107.855.903.850,22)** | **(105.330.548.116,98)** | **(2.525.355.733,24)** | **2,39** |

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.525.355.733,24) atau -2,39%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.4.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | | **(105.330.548.116,98)** |
| **Mutasi Tambah:** | | |
| Reklasifikasi Dari Aset Tetap | | 34.166.032.346,95 |
| Koreksi Saldo Awal | | 83.265.000,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **34.249.297.346,95** |
| **Mutasi Kurang:** | | |
| Penghapusan Aset | | 31.513.641.120,68 |
| Koreksi Saldo Awal | | 210.300.493,03 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | | **31.723.941.613,71** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | | **(107.855.903.850,22)** |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 44 dan 45***.

### 5.3.1.4.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.5.1 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka | 4.167.149.009,65 | 3.513.765.361,49 | 653.383.648,16 | 18,59 |
| **Jumlah** | **4.167.149.009,65** | **3.513.765.361,49** | **653.383.648,16** | **18,59** |

Tabel di atas menunjukkan Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp653.383.648,16 atau 18,59%.
Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada ***Lampiran 46.***

### 5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.4.6.1 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 0,00 | 7.804.246.000,00 | (7.804.246.000,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **7.804.246.000,00** | **(7.804.246.000,00)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.804.246.000,00) atau (100,00%).

### 5.3.1.5 PROPERTI INVESTASI

Saldo Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.5.1 Rincian Properti Investasi**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Properti Investasi Tanah | 698.906.498.820,00 | 700.024.106.820,00 | (1.117.608.000,00) | -0,15 |
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | 5.839.731.638,00 | 5.839.731.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | (3.424.276.155,97) | (3.327.710.422,97) | (96.565.733,00) | 2,90 |
| **Jumlah** | **701.321.954.302,03** | **702.536.128.035,03** | **(1.214.173.733,00)** | **-0,17** |

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.214.173.733,00) atau (0,17%).
Rincian Mutasi Properti Investasi dapat dilihat pada ***Lampiran 47***.

### 5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Saldo Properti Investasi Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.5.1.1 Rincian Properti Investasi Tanah**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Properti Investasi Tanah | 698.906.498.820,00 | 700.024.106.820,00 | (1.117.608.000,00) | -0,15 |
| **Jumlah** | **698.906.498.820,00** | **700.024.106.820,00** | **(1.117.608.000,00)** | **-0,15** |

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.117.608.000,00) atau -0,15%.

Mutasi Properti Investasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.5.1.2 Mutasi Properti Investasi Tanah**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | | **700.024.106.820,00** |
| **Mutasi Tambah:** | | |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **0,00** |
| **Mutasi Kurang:** | | |
| Koreksi Saldo Awal | | 610.596.000,00 |
| Penghapusan Aset (BPKAD) | | 507.012.000,00 |
| **Jumlah Mutasi Kurang** | | **1.117.608.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | **698.906.498.820,00** |

### 5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.5.2.1 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | 5.839.731.638,00 | 5.839.731.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **5.839.731.638,00** | **5.839.731.638,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

### 5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.5.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan | (3.424.276.155,97) | (3.327.710.422,97) | (96.565.733,00) | 2,90 |
| **Jumlah** | **(3.424.276.155,97)** | **(3.327.710.422,97)** | **(96.565.733,00)** | **2,90** |

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp96.565.733,00) atau -2,90%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.5.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2025** | | **(3.327.710.422,97)** |
| **Mutasi Tambah:** | | |
| Penyusutan Properti Investasi | | 96.565.733,00 |
| **Jumlah Mutasi Tambah** | | **96.565.733,00** |
| **Saldo Akhir 31 Desember 2025** | | **(3.424.276.155,97)** |

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada ***Lampiran 47.***

## 5.3.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1 Rincian Kewajiban**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kewajiban Jangka Pendek | 924.101.597.721,97 | 707.808.146.491,09 | 216.293.451.230,88 | 30,56 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 612.828.715.702,65 | 855.640.130.142,49 | (242.811.414.439,84) | (28,38) |
| **Jumlah** | **1.536.930.313.424,62** | **1.563.448.276.633,58** | **(26.517.963.208,96)** | **(1,69)** |

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp26.517.963.208,96) atau (1,70%).

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48***.

### 5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.1 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 3.056.472.412,70 | (3.056.472.412,70) | (100,00) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 243.464.798.088,00 | 243.464.798.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 514.165.349.793,52 | 21.702.352.175,15 | 492.462.997.618,37 | 2.269,17 |
| Utang Belanja | 166.471.449.840,45 | 439.584.523.815,24 | (273.113.073.974,79) | (62,13) |
| **Jumlah** | **924.101.597.721,97** | **707.808.146.491,09** | **216.293.451.230,88** | **30,55** |

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp216.293.451.230,88 atau 30,56%.

#### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.1.1 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Taspen | 0,00 | 3.056.472.412,70 | (3.056.472.412,70) | (100,00) |
| **Jumlah** | **0,00** | **3.056.472.412,70** | **(3.056.472.412,70)** | **(100,00)** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.056.472.412,70) atau (100,00%).

#### 5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.2.1 Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat | 243.464.798.088,00 | 243.464.798.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **243.464.798.088,00** | **243.464.798.088,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabel di atas menunjukkan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yang mengalami perubahan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

#### 5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.3.1 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III | 5.553.592.516,04 | 4.290.844.736,53 | 1.262.747.779,51 | 29,43 |
| Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa | 508.611.757.277,48 | 17.411.507.438,62 | 491.200.249.838,86 | 2.821,12 |
| **Jumlah** | **514.165.349.793,52** | **21.702.352.175,15** | **492.462.997.618,37** | **2.269,17** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp492.462.997.618,37 atau 2.269,17%.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 49***.

#### 5.3.2.1.3.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Saldo Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.3.1.1 Rincian Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III | 5.553.592.516,04 | 4.290.844.736,53 | 1.262.747.779,51 | 29,43 |
| **Jumlah** | **5.553.592.516,04** | **4.290.844.736,53** | **1.262.747.779,51** | **29,43** |

Tabel di atas menunjukkan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.262.747.779,51 atau 29,43%. yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi

Sumber Daya Mineral, Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Izin Pemanfaatan kawasan Tahura Ngurah Rai pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Data dapat dlihat pada ***Lampiran 49.***

#### 5.3.2.1.3.2 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.3.2.1 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah | 507.955.540.031,41 | 16.527.376.353,06 | 491.428.163.678,35 | 2.973,42 |
| Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan | 656.217.246,07 | 884.131.085,56 | (227.913.839,49) | (25,78) |
| **Jumlah** | **508.611.757.277,48** | **17.411.507.438,62** | **491.200.249.838,86** | **2.822,43** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp491.200.249.838,86 atau 2.822,43%, berikut penjelasan saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp491.428.163.678,35 atau 2.973,42%. Hal ini disebabkan oleh:
   a) Penambahan perjanjian sewa baru pada tahun berjalan;
   b) Pengakuan pendapatan diterima dimuka atas transaksi sewa jangka Panjang;
   c) Adanya transaksi signifikan dari PT BDL berupa pembayaran sewa tanah periode 50 tahun sebesar Rp425.137.500.000,00 yang dibayarkan pada 11 Desember 2025, Dimana pengakuan pendapatan dilakukan secara akrual sesuai masa manfaat;
   d) Serta transaksi PT BSS atas sewa tanah jangka Panjang 30 tahun sebesar Rp58.380.000.000,00 yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sesuai periode manfaat ekonomi.

   Kenaikan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pengakuan pendapatan berbasis waktu manfaat (*time proportionate basis*).
2. Komponen Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar (Rp227.913.839,49) atau (25,78%). Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan pendapatan tahun berjalan atas saldo pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya, reklasifikasi pendapatan menjadi Pendapatan-LO sesuai periode manfaat sewa, dan tidak terdapat penambahan kontrak signifikan pada tahun berjalan.
3. Kebijakan Akuntansi yang Digunakan

   Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Belanja Sewa dilakukan berdasarkan basis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu mengakui pendapatan pada saat ha katas pendapatan tersebut timbul sesuai periode manfaat ekonominya. Untuk kontrak sewa yang tidak dimulai atau berakhir pada awal/akhir bulan, digunakan metode cut-off by date (proporsional harian) dengan rumus:

   Pendapatan Diakui = (Nilai Kontrak ÷ Total Harian Sewa) x Hari yang telah berjalan

   Selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan yang telah menjadi hak diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka (liabilitas).

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Belanja Sewa tahun 2025 meningkat signifikan terutama karena transaksi sewa jangka Panjang yang diakui secara akrual dan proporsional sesuai masa manfaat. Penerapan metode *cut-off by date* memastikan bahwa pengakuan pendapatan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

#### 5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.1 Rincian Utang Belanja**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Pegawai | 91.580.345.868,73 | 101.054.700.228,54 | (9.474.354.359,81) | (9,38) |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 30.231.881.561,72 | 27.529.724.017,50 | 2.702.157.544,22 | 9,82 |
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.580.232.319,00 | 0,00 | 1.580.232.319,00 | 100,00 |
| Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 315.384.317,20 | (315.384.317,20) | (100,00) |
| Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.143.700.000,00 | 0,00 | 1.143.700.000,00 | 100,00 |
| Utang Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.964.700.000,00 | 0,00 | 1.964.700.000,00 | 100,00 |
| Utang Belanja Bagi Hasil | 39.970.590.091,00 | 310.684.715.252,00 | (270.714.125.161,00) | (87,13) |
| **Jumlah** | **166.471.449.840,45** | **439.584.523.815,24** | **(273.113.073.974,79)** | **(62,13)** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp273.113.073.974,79) atau (62,13%).

### 5.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.1.1 Rincian Utang Belanja Pegawai**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 4.823.001.673,00 | 1.915.469.959,13 | 2.907.531.713,87 | 151,79 |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 53.231.586.118,00 | 47.334.145.890,00 | 5.897.440.228,00 | 12,46 |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 33.148.439.478,73 | 51.805.084.379,41 | (18.656.644.900,68) | (36,01) |
| Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 377.318.599,00 | 0,00 | 377.318.599,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **91.580.345.868,73** | **101.054.700.228,54** | **(9.474.354.359,81)** | **(9,38)** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.474.354.359,81) atau (9,38%), berikut penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.907.531.713,87 atau 151,79%. Hal ini disebabkan karena adanya Utang BelanjaTambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
2. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp5.897.440.228,00 atau 12,46%;
3. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan sebesar (Rp18.656.644.900,68) atau (36,01%);
4. Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami saldo baru sebesar Rp377.318.599,00 atau 100,00% yang merupakan Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48.***

### 5.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.2.1 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Barang | 16.810.030.860,72 | 18.443.094.706,00 | (1.633.063.845,28) | (8,85) |
| Utang Belanja Jasa | 6.772.757.563,00 | 4.975.114.152,00 | 1.797.643.411,00 | 36,13 |
| Utang Belanja Pemeliharaan | 4.024.956.049,00 | 1.917.316.865,50 | 2.107.639.183,50 | 109,92 |
| Utang Belanja Perjalanan Dinas | 1.499.000,00 | 6.598.891,00 | (5.099.891,00) | (77,28) |
| Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada | 2.622.638.089,00 | 2.175.899.403,00 | 446.738.686,00 | 20,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | |
| Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD | 0,00 | 11.700.000,00 | (11.700.000,00) | (100,00) |
| **Jumlah** | **30.231.881.561,72** | **27.529.724.017,50** | **2.702.157.544,22** | **9,82** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.702.157.544,22 atau 9,82%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.107.639.183,50 atau 109,93% karena adanya penambahan utang baru pada RSUD Bali Mandara
2. Komponen Utang Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp5.099.891,00) atau (77,28%) karena sudah dibayarkan pada Bulan Januari 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
3. Komponen Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp11.700.000,00) atau (100,00%) karena sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Mei 2025.

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48.***

### 5.3.2.1.4.3 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.3.1 Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.580.232.319,00 | 0,00 | 1.580.232.319,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **1.580.232.319,00** | **0,00** | **1.580.232.319,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.580.232.319,00 atau 100,00% merupakan penambahan utang pada Rumah Sakit Bali Mandara.

### 5.3.2.1.4.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.4.1 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Modal Bangunan Gedung | 0,00 | 315.384.317,20 | (315.384.317,20) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **315.384.317,20** | **(315.384.317,20)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp315.384.317,20) atau -100,00%, hal ini disebabkan karena sudah dilakukan pembayaran atas Utang Belanja Modal tersebut selama periode Januari-Desember 2025.

### 5.3.2.1.4.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.5.1 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 1.143.700.000,00 | 0,00 | 1.143.700.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **1.143.700.000,00** | **0,00** | **1.143.700.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.143.700.000,00 atau 100,00%. Saldo ini merupakan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD pada Rumah Sakit Bali Mandara.

### 5.3.2.1.4.6 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.6.1 Rincian Utang Belanja Aset Tetap Lainnya**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 1.964.700.000,00 | 0,00 | 1.964.700.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **1.964.700.000,00** | **0,00** | **1.964.700.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.964.700.000,00 atau 100,00% pada UPTD Rumah Sakit Bali Mandara.

### 5.3.2.1.4.7 Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.1.4.7.1 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten | 33.454.244.356,00 | 260.386.539.729,00 | (226.932.295.373,00) | (87,15) |
| Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota | 6.516.345.735,00 | 50.298.175.523,00 | (43.781.829.788,00) | (87,04) |
| **Jumlah** | **39.970.590.091,00** | **310.684.715.252,00** | **(270.714.125.161,00)** | **(87,13)** |

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp270.714.125.161,00 atau 87,13%, sesuai dengan Surat Gubernur Bali Nomor B.31.900/1147/PADFE/BPKAD Tanggal 18 Pebruari 2026 Hal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025.

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48***.

## 5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.2.1 Rincian Kewajiban Jangka Panjang**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 608.661.566.693,00 | 852.126.364.781,00 | (243.464.798.088,00) | (28,57) |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 4.167.149.009,65 | 3.513.765.361,49 | 653.383.648,16 | 18,59 |
| **Jumlah** | **612.828.715.702,65** | **855.640.130.142,49** | **(242.811.414.439,84)** | **(28,38)** |

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp242.811.414.439,84) atau (28,38%).

### 5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.2.1.1 Rincian Utang kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri | 608.661.566.693,00 | 852.126.364.781,00 | (243.464.798.088,00) | (28,57) |
| **Jumlah** | **608.661.566.693,00** | **852.126.364.781,00** | **(243.464.798.088,00)** | **(28,57)** |

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp243.464.798.088,00) atau (28,57%).

#### 5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.2.2.2.1 Rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta | 4.167.149.009,65 | 3.513.765.361,49 | 653.383.648,16 | 18,59 |
| **Jumlah** | **4.167.149.009,65** | **3.513.765.361,49** | **653.383.648,16** | **18,59** |

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp653.383.648,16 atau 18,59% disebabkan karena adanya penambahan perusahaan atau penambang baru yang sudah memegang izin usaha. Data lebih detail terkait Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta dapat dilihat pada ***Lampiran 46.***

### 5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

**Tabel 5.3.3.1 Rincian Ekuitas**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ekuitas | 21.661.652.244.062,81 | 17.602.612.654.466,05 | 4.059.039.589.596,76 | 23,05 |
| **Jumlah** | **21.661.652.244.062,81** | **17.602.612.654.466,05** | **4.059.039.589.596,76** | **23,05** |

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.059.039.589.596,76 atau 23,05%. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas poin **5.6.4**.

## 5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

### 5.4.1 PENDAPATAN

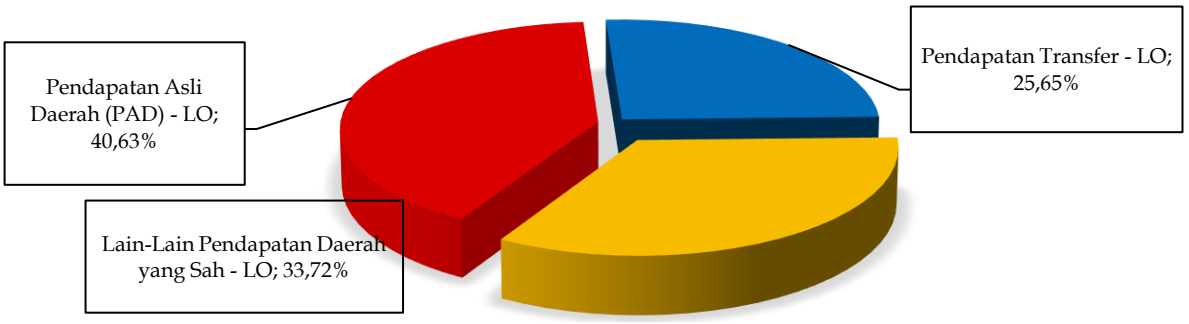
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1 Rincian Pendapatan**

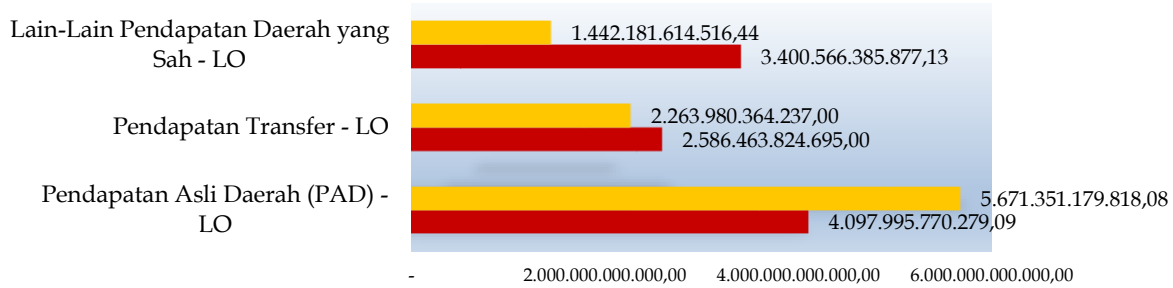
| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO | 4.097.995.770.279,09 | 5.671.351.179.818,08 | (1.573.355.409.538,99) | -27,74 |
| Pendapatan Transfer-LO | 2.586.463.824.695,00 | 2.263.980.364.237,00 | 322.483.460.458,00 | 14,24 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 3.400.566.385.877,13 | 1.442.181.614.516,44 | 1.958.384.771.360,69 | 135,79 |
| **Jumlah** | **10.085.025.980.851,22** | **9.377.513.158.571,52** | **707.512.822.279,70** | **7,54** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp707.512.822.279,70 atau 7,54%.

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:




**Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025**




**Gambar 5.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Daerah-LO | 2.816.701.997.992,96 | 4.518.050.546.030,04 | (1.701.348.548.037,08) | -37,66 |
| Retribusi Daerah-LO | 385.092.787.203,91 | 340.629.347.580,42 | 44.463.439.623,49 | 13,05 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 319.658.402.673,98 | 335.046.479.341,41 | (15.388.076.667,43) | -4,59 |
| Lain-lain PAD yang Sah-LO | 576.542.582.408,24 | 477.624.806.866,21 | 98.917.775.542,03 | 20,71 |
| **Jumlah** | **4.097.995.770.279,09** | **5.671.351.179.818,08** | **(1.573.355.409.538,99)** | **-27,74** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.573.355.409.538,99) atau -27,74%.

### 5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.1 Rincian Pajak Daerah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO | 1.069.465.642.900,00 | 1.844.964.341.717,00 | (775.498.698.817,00) | -42,03 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO | 798.076.710.700,00 | 1.694.519.308.500,00 | (896.442.597.800,00) | -52,90 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO | 581.923.299.163,96 | 637.045.182.695,04 | (55.121.883.531,08) | -8,65 |
| Pajak Air Permukaan-LO | 4.861.676.866,00 | 4.525.145.473,00 | 336.531.393,00 | 7,43 |
| Pajak Rokok–LO | 343.585.515.178,00 | 336.996.567.645,00 | 6.588.947.533,00 | 1,95 |
| Pajak Alat Berat-LO | 147.095.900,00 | 0,00 | 147.095.900,00 | 100,00 |
| Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO | 18.642.057.285,00 | 0,00 | 18.642.057.285,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **2.816.701.997.992,96** | **4.518.050.546.030,04** | **(1.701.348.548.037,08)** | **-37,66** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.701.348.548.037,08) atau -37,66%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Pajak Daerah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp49.134.403.531,04 (Rp2.816.701.997.992,96-Rp2.865.836.401.524,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Pajak Daerah-LO**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(49.134.403.531,04)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 (Neraca) | 686.987.500,00 | |
| ✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1026/04-E/HK/2025 Tanggal 29 Desember 2025 | 17.419.500,00 | |
| ➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 (Neraca) | (49.838.810.531,04) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(49.134.403.531,04)** |

#### 5.4.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.1.1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO | 14.665.225.100,00 | 27.214.938.300,00 | (12.549.713.200,00) | -46,11 |
| PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO | 79.599.249.800,00 | 135.243.958.900,00 | (55.644.709.100,00) | -41,14 |
| PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO | 531.666.094.500,00 | 901.273.780.700,00 | (369.607.686.200,00) | -41,01 |
| PKB-Mobil Bus-Microbus-LO | 11.573.630.500,00 | 20.014.575.800,00 | (8.440.945.300,00) | -42,17 |
| PKB-Mobil Bus-Bus-LO | 1.202.467.700,00 | 2.318.928.800,00 | (1.116.461.100,00) | -48,15 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO | 70.663.084.900,00 | 123.338.497.600,00 | (52.675.412.700,00) | -42,71 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO | 36.591.241.200,00 | 66.665.556.000,00 | (30.074.314.800,00) | -45,11 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO | 19.941.276.100,00 | 34.825.750.000,00 | (14.884.473.900,00) | -42,74 |
| PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO | 2.089.655.400,00 | 3.274.264.800,00 | (1.184.609.400,00) | -36,18 |
| PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO | 301.455.634.200,00 | 530.759.509.017,00 | (229.303.874.817,00) | -43,20 |
| PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO | 18.083.500,00 | 34.581.800,00 | (16.498.300,00) | -47,71 |
| **Jumlah** | **1.069.465.642.900,00** | **1.844.964.341.717,00** | **(775.498.698.817,00)** | **-42,03** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp775.498.698.817,00) atau -42,03%.

#### 5.4.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.2.1 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO | 3.745.351.600,00 | 6.947.410.000,00 | (3.202.058.400,00) | -46,09 |
| BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO | 33.980.088.000,00 | 70.725.181.500,00 | (36.745.093.500,00) | -51,95 |
| BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO | 264.228.211.400,00 | 685.876.893.300,00 | (421.648.681.900,00) | -61,48 |
| BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO | 14.003.791.600,00 | 36.146.981.000,00 | (22.143.189.400,00) | -61,26 |
| BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO | 1.311.674.600,00 | 1.657.870.000,00 | (346.195.400,00) | -20,88 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO | 51.861.632.000,00 | 86.484.578.100,00 | (34.622.946.100,00) | -40,03 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO | 11.523.692.300,00 | 25.223.364.000,00 | (13.699.671.700,00) | -54,31 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO | 16.160.541.200,00 | 28.440.048.000,00 | (12.279.506.800,00) | -43,18 |
| BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO | 1.938.885.100,00 | 3.453.580.000,00 | (1.514.694.900,00) | -43,86 |
| BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO | 399.315.902.500,00 | 749.498.266.600,00 | (350.182.364.100,00) | -46,72 |
| BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO | 6.940.400,00 | 65.136.000,00 | (58.195.600,00) | -89,34 |
| **Jumlah** | **798.076.710.700,00** | **1.694.519.308.500,00** | **(896.442.597.800,00)** | **-52,90** |

Tabel di atas menunjukkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp896.442.597.800,00) atau -52,90%.

#### 5.4.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.3.1 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| PBBKB Bahan Bakar Solar–LO | 114.150.903.048,96 | 138.753.895.643,04 | (24.602.992.594,08) | -17,73 |
| PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO | 467.772.396.115,00 | 498.291.287.052,00 | (30.518.890.937,00) | -6,12 |
| **Jumlah** | **581.923.299.163,96** | **637.045.182.695,04** | **(55.121.883.531,08)** | **-8,65** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp55.121.883.531,08) atau -8,65%.

#### 5.4.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Air Permukaan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Air Permukaan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.4.1 Rincian Pajak Air Permukaan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Air Permukaan-LO | 4.861.676.866,00 | 4.525.145.473,00 | 336.531.393,00 | 7,44 |
| **Jumlah** | **4.861.676.866,00** | **4.525.145.473,00** | **336.531.393,00** | **7,44** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Air Permukaan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp336.531.393,00 atau 7,44%.

#### 5.4.1.1.1.5 Pajak Rokok–LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Rokok–LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Rokok–LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.5.1 Rincian Pajak Rokok–LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Rokok-LO | 343.585.515.178,00 | 336.996.567.645,00 | 6.588.947.533,00 | 1,96 |
| **Jumlah** | **343.585.515.178,00** | **336.996.567.645,00** | **6.588.947.533,00** | **1,96** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Rokok–LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.588.947.533,00 atau 1,96%.

#### 5.4.1.1.1.6 Pajak Alat Berat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Alat Berat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Alat Berat-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.6.1 Rincian Pajak Alat Berat-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Alat Berat-LO | 147.095.900,00 | 0,00 | 147.095.900,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **147.095.900,00** | **0,00** | **147.095.900,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pajak Alat Berat-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp147.095.900,00.

#### 5.4.1.1.1.7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.1.7.1 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO | 18.642.057.285,00 | 0,00 | 18.642.057.285,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **18.642.057.285,00** | **0,00** | **18.642.057.285,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp18.642.057.285,00.

### 5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.2.1 Rincian Retribusi Daerah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Retribusi Jasa Umum-LO | 342.950.454.198,35 | 300.284.087.176,19 | 42.666.367.022,16 | 14,21 |
| Retribusi Jasa Usaha-LO | 34.658.137.755,07 | 34.259.897.914,86 | 398.239.840,21 | 1,16 |
| Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 7.484.195.250,49 | 6.085.362.489,37 | 1.398.832.761,12 | 22,99 |
| **Jumlah** | **385.092.787.203,91** | **340.629.347.580,42** | **44.463.439.623,49** | **13,05** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.463.439.623,49 atau 13,05%.

**Penjelasan :**

Pengakuan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Retribusi Daerah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp524.503.129.915,61 (Rp385.092.787.203,91-Rp909.595.917.119,52). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Retribusi Daerah-LO**

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | **(524.503.129.915,61)** |
| Penjelasan Selisih | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | |
| ✓ Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 (Neraca) | 52.160.083.376,74 |
| ✓ Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca) | 21.702.352.175,15 |
| ✓ Koreksi atas adanya pembayaran piutang pasien umum pada RSUD Bali Mandara | 12.377.003,00 |
| ✓ Koreksi atas adanya pembayaran piutang pasien lost pada RSUD Bali Mandara | 51.000.000,00 |
| ✓ Penghapusan Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan | 7.525.000,00 |
| ✓ Reklas rekening pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSU Dharma Yadnya (Reklas dilakukan agar rekening pendapatan piutang di UPTD dan RS menjadi satu rekening) | 20.825.174.918,86 |
| ✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII sesuai sesuai Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali. | 786.802.780.952,68 |
| ➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO | |
| ✓ Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 (Neraca) | (881.023.472.856,43) |
| ✓ Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca) | (514.165.349.793,52) |

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| ✓ Koreksi atas adanya kesalahan penginputan atas piutang PT Global Assistance Healthcare pada RSUD Bali Mandara | (50.859.152,00) | |
| ✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 atas Aset sewa yang baru diterbitkan SK perpanjangan namun pemanfaatan asetnya masih berlangsung sebelum 2025 | (1.277.360.883,37) | |
| ✓ Pendapatan Hibah berupa piutang bagian RSU Dharma Yadnya per 1 Juli 2025 | (5.045.954.140,00) | |
| ✓ Koreksi saldo awal terkait kesalahan perhitungan dengan nominal sewa ditahun kedua atas PT Premiera Nusantara pada RSUD Bali Mandara | (2.228.337,87) | |
| ✓ Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10 | (3.020.774.733,83) | |
| ✓ Reklasifikasi Penerimaan Pembayaran Settlement atas Kesepakatan Bersama Nomor B.31.000.2.3.2/2553/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2025, yang didahului oleh Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) tanggal 13 Mei 2024 antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Heru Budihartono terkait pemanfaatan HGB Nomor 80 atas nama PT Abdi Persada Nusantara di atas HPL No. 2 | (1.478.423.445,00) | |
| ✓ Reklasifikasi 0,2 sebagai surplus non operasional lainnya (pembulatan dari penerimaan transaksi pelunasan Piutang PKS Nomor 10) | (0,02) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(524.503.129.915,61)** |

### 5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Umum-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.2.1.1 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO | 324.520.964.198,35 | 284.264.232.176,19 | 40.256.732.022,16 | 14,16 |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO | 18.429.490.000,00 | 16.019.855.000,00 | 2.409.635.000,00 | 15,04 |
| **Jumlah** | **342.950.454.198,35** | **300.284.087.176,19** | **42.666.367.022,16** | **14,21** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp42.666.367.022,16 atau 14,21%.

### 5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.2.2.1 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO | 66.100.000,00 | 64.250.000,00 | 1.850.000,00 | 2,88 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO | 94.007.578,00 | 0,00 | 94.007.578,00 | 100,00 |
| Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO | 65.651.500,00 | 28.049.000,00 | 37.602.500,00 | 134,06 |

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO | 4.873.970.011,00 | 6.432.789.000,00 | (1.558.818.989,00) | -24,23 |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO | 1.315.022.000,00 | 1.226.096.928,00 | 88.925.072,00 | 7,25 |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO | 28.243.386.666,07 | 26.508.712.986,86 | 1.734.673.679,21 | 6,54 |
| **Jumlah** | **34.658.137.755,07** | **34.259.897.914,86** | **398.239.840,21** | **1,16** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp398.239.840,21 atau 1,16%.

#### 5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Perizinan Tertentu-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.2.3.1 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO | 4.256.849,12 | 55.752.472,45 | (51.495.623,33) | -92,36 |
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO | 7.479.938.401,37 | 6.029.610.016,92 | 1.450.328.384,45 | 24,05 |
| **Jumlah** | **7.484.195.250,49** | **6.085.362.489,37** | **1.398.832.761,12** | **22,99** |

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.398.832.761,12 atau 22,99%.

### 5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.3.1 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO | 319.523.090.586,82 | 334.522.261.798,67 | (14.999.171.211,85) | -4,48 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO | 135.312.087,16 | 524.217.542,74 | (388.905.455,58) | -74,19 |
| **Jumlah** | **319.658.402.673,98** | **335.046.479.341,41** | **(15.388.076.667,43)** | **-4,59** |

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp15.388.076.667,43) atau -4,59%.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut :

#### 5.4.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.3.1.1 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO | 312.261.066.104,82 | 265.661.424.824,67 | 46.599.641.280,15 | 17,54 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO | 7.262.024.482,00 | 68.860.836.974,00 | (61.598.812.492,00) | -89,45 |
| **Jumlah** | **319.523.090.586,82** | **334.522.261.798,67** | **(14.999.171.211,85)** | **-4,48** |

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp14.999.171.211,85) atau -4,48%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO Tahun 2025 lebih besar dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp66.140.333.892,39 (Rp319.523.090.586,82-Rp253.382.756.694,43). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.3.1.2 Penjelasan Selisih atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **66.140.333.892,39** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Bagian Laba Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2024 | 7.262.024.482,00 | |
| ✓ Bagian Laba PT BPD Bali Tahun 2024 | 304.866.240.611,85 | |
| ✓ Bagian Laba PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2023 | 7.394.825.492,97 | |
| ➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Pembagian Deviden Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2024 | (27.000.000.000,00) | |
| ✓ Pembagian Deviden PT BPD Bali Tahun 2024 | (224.454.593.473,43) | |
| ✓ Pembagian Deviden PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2024 | (1.928.163.221,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **66.140.333.892,39** |

### 5.4.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.3.2.1 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO | 135.312.087,16 | 524.217.542,74 | (388.905.455,58) | -74,19 |
| **Jumlah** | **135.312.087,16** | **524.217.542,74** | **(388.905.455,58)** | **-74,19** |

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp388.905.455,58) atau -74,19%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp85.770.334,84 (Rp135.312.087,16-Rp221.082.422,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.3.2.2 Penjelasan Selisih atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(85.770.334,84)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Bagian Laba PT Puri Raharja Tahun 2024 | 135.312.087,16 | |
| ➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Pembagian Deviden PT Puri Raharja Tahun 2024 | (221.082.422,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(85.770.334,84)** |

### 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Kerja Sama Daerah-LO | 6.812.347.316,00 | 3.417.445.100,00 | 3.394.902.216,00 | 99,34 |
| Jasa Giro-LO | 8.480.380.151,00 | 10.304.453.335,81 | (1.824.073.184,81) | -17,70 |
| Pendapatan Bunga-LO | 15.267.241.419,64 | 9.555.179.227,40 | 5.712.062.192,24 | 59,78 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 388.650.982,18 | 2.021.009.936,46 | (1.632.358.954,28) | -80,76 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | 18.022.513.727,00 | 71.236.784.994,00 | (53.214.271.267,00) | -74,70 |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO | 20.467.706,04 | 23.266.408,00 | (2.798.701,96) | -12,03 |
| Pendapatan dari Pengembalian-LO | 96.358.086.765,75 | 697.704.902,79 | 95.660.381.862,96 | 13.710,72 |
| Pendapatan dari BLUD-LO | 62.171.144.340,63 | 62.488.962.961,75 | (317.818.621,12) | -0,51 |
| Pendapatan Konsesi Jasa-LO | 369.021.750.000,00 | 317.880.000.000,00 | 51.141.750.000,00 | 16,09 |
| **Jumlah** | **576.542.582.408,24** | **477.624.806.866,21** | **98.917.775.542,03** | **20,71** |

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp98.917.775.542,03 atau 20,71%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Lain-lain PAD yang Sah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp22.504.639.214,44 (Rp576.542.582.408,24-Rp599.047.221.622,68). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.4.2 Penjelasan Selisih atas Lain-lain PAD yang Sah-LO**

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | **(22.504.639.214,44)** |
| Penjelasan Selisih | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | |
| ✓ Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 (Neraca) | 3.156.897.225,00 |
| ✓ Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10 | 3.020.774.733,83 |
| ➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO | |
| ✓ Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Neraca) | (3.287.603.356,37) |
| ✓ Reklas rekening pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSU Dharma Yadnya (Reklas dilakukan agar rekening pendapatan piutang di UPTD dan RS menjadi satu rekening) | (20.825.174.918,86) |
| ✓ Penyesuaian Hasil Penjualan BMD dari Penghapusan Aset (BPKAD) sebagai perhitungan Surplus Non Operasional | (700.068.400,00) |
| ✓ Penyesuaian atas pengembalian kelebihan belanja tahun lalu di RSJ yang dicatat Beban dibayar dimuka tahun 2024 | (400,00) |
| ✓ Penyesuaian atas pengembalian kelebihan belanja tahun lalu di RSJ yang dicatat Beban dibayar dimuka tahun 2025 | (2.529.442.452,46) |
| ✓ Penyesuaian TGR atas nama Wiyantara Tahun 2025 | (18.000.000,00) |
| ✓ Pengembalian atas Kekurangan Volume di Tahun 2024 dan dibayarkan di Tahun 2025 sehingga dilakukan eleminasi antara pendapatan pengembalian dengan nilai Aset | (1.322.021.645,58) |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | **(22.504.639.214,44)** |

### 5.4.1.1.4.1 Hasil Kerja Sama Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Kerja Sama Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Hasil Kerja Sama Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.1.1 Rincian Hasil Kerja Sama Daerah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Kerja Sama Daerah-LO | 6.812.347.316,00 | 3.417.445.100,00 | 3.394.902.216,00 | 99,34 |
| **Jumlah** | **6.812.347.316,00** | **3.417.445.100,00** | **3.394.902.216,00** | **99,34** |

Tabel di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.394.902.216,00 atau 99,34%.

### 5.4.1.1.4.2 Jasa Giro-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Jasa Giro-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Jasa Giro-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.2.1 Rincian Jasa Giro-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Jasa Giro pada Kas Daerah-LO | 7.140.669.743,77 | 7.610.111.049,43 | (469.441.305,66) | -6,16 |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO | 1.329.865.164,23 | 1.652.346.726,59 | (322.481.562,36) | -19,51 |
| Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO | 0,00 | 1.033.753.904,24 | (1.033.753.904,24) | -100,00 |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO | 9.845.243,00 | 8.241.655,55 | 1.603.587,45 | 19,45 |
| **Jumlah** | **8.480.380.151,00** | **10.304.453.335,81** | **(1.824.073.184,81)** | **-17,70** |

Tabel di atas menunjukkan Jasa Giro-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.824.073.184,81) atau -17,70%.

### 5.4.1.1.4.3 Pendapatan Bunga-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Bunga-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Bunga-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.3.1 Rincian Pendapatan Bunga-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO | 15.267.241.419,64 | 9.555.179.227,40 | 5.712.062.192,24 | 59,78 |
| **Jumlah** | **15.267.241.419,64** | **9.555.179.227,40** | **5.712.062.192,24** | **59,78** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bunga-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.712.062.192,24 atau 59,78%.

### 5.4.1.1.4.4 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.4.1 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 388.650.982,18 | 2.021.009.936,46 | (1.632.358.954,28) | -80,77 |
| **Jumlah** | **388.650.982,18** | **2.021.009.936,46** | **(1.632.358.954,28)** | **-80,77** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.632.358.954,28) atau -80,77%.

### 5.4.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.5.1 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO | 17.788.126.600,00 | 70.448.079.400,00 | (52.659.952.800,00) | -74,75 |
| Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO | 104.169.200,00 | 788.373.200,00 | (684.204.000,00) | -86,79 |
| Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO | 85.577.461,00 | 0,00 | 85.577.461,00 | 100,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO | 434.536,00 | 332.394,00 | 102.142,00 | 30,73 |

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO | 44.205.930,00 | 0,00 | 44.205.930,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **18.022.513.727,00** | **71.236.784.994,00** | **(53.214.271.267,00)** | **-74,70** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp53.214.271.267,00) atau -74,70%.

### 5.4.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.6.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO | 20.128.156,04 | 22.265.708,00 | (2.137.551,96) | -9,60 |
| Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 339.550,00 | 1.000.700,00 | (661.150,00) | -66,06 |
| **Jumlah** | **20.467.706,04** | **23.266.408,00** | **(2.798.701,96)** | **-12,03** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.798.701,96) atau -12,03%.

### 5.4.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan dari Pengembalian-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.7.1 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO | 1.633.548.454,00 | 613.334,00 | 1.632.935.120,00 | 266239,13 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO | 325.387.871,04 | 42.848.164,00 | 282.539.707,04 | 659,39 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO | 33.478.481,00 | 2.976.200,00 | 30.502.281,00 | 1024,87 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO | 42.692.500,00 | 6.075.000,00 | 36.617.500,00 | 602,75 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO | 335.093.169,28 | 324.752.080,16 | 10.341.089,12 | 3,18 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO | 34.473.585,00 | 18.262.522,00 | 16.211.063,00 | 88,76 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta-LO | 0,00 | 5.000.000,00 | (5.000.000,00) | -100,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO | 93.915.519.097,93 | 23.773.198,96 | 93.891.745.898,97 | 394947,88 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 100,00 |

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO | (164.783.968,50) | 217.921.489,15 | (382.705.457,65) | -175,61 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO | 41.630.910,00 | 0,00 | 41.630.910,00 | 100,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO | 0,00 | 17.982.914,52 | (17.982.914,52) | -100,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO | 55.857.000,00 | 0,00 | 55.857.000,00 | 100,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO | 101.385.000,00 | 37.500.000,00 | 63.885.000,00 | 170,36 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO | 4.666,00 | 0,00 | 4.666,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **96.358.086.765,75** | **697.704.902,79** | **95.660.381.862,96** | **13.710,72** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp95.660.381.862,96 atau 13.710,72%.

### 5.4.1.1.4.8 Pendapatan dari BLUD-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan dari BLUD-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan dari BLUD-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.8.1 Rincian Pendapatan dari BLUD-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO | 58.450.762.983,00 | 58.856.130.914,45 | (405.367.931,45) | -0,68 |
| Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO | 1.052.660.072,00 | 1.211.019.091,41 | (158.359.019,41) | -13,07 |
| Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO | 2.667.721.285,63 | 2.421.812.955,89 | 245.908.329,74 | 10,15 |
| **Jumlah** | **62.171.144.340,63** | **62.488.962.961,75** | **(317.818.621,12)** | **-0,51** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari BLUD-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp317.818.621,12) atau -0,51%.

### 5.4.1.1.4.9 Pendapatan Konsesi Jasa-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Konsesi Jasa-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Konsesi Jasa-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.1.4.9.1 Rincian Pendapatan Konsesi Jasa-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Konsesi Jasa-LO | 369.021.750.000,00 | 317.880.000.000,00 | 51.141.750.000,00 | 16,09 |
| **Jumlah** | **369.021.750.000,00** | **317.880.000.000,00** | **51.141.750.000,00** | **16,09** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Konsesi Jasa-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp51.141.750.000,00 atau 16,09%.

### 5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1 Rincian Pendapatan Transfer-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 2.551.638.134.326,00 | 2.263.980.364.237,00 | 287.657.770.089,00 | 12,71 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 34.825.690.369,00 | 0,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **2.586.463.824.695,00** | **2.263.980.364.237,00** | **322.483.460.458,00** | **14,24** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp322.483.460.458,00 atau 14,24%.

### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Dana Perimbangan-LO | 0,00 | 2.240.823.010.237,00 | (2.240.823.010.237,00) | -100,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH)-LO | 423.405.887.500,00 | 0,00 | 423.405.887.500,00 | 100,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU)-LO | 1.403.485.166.622,00 | 0,00 | 1.403.485.166.622,00 | 100,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO | 711.768.494.204,00 | 0,00 | 711.768.494.204,00 | 100,00 |
| Insentif Fiskal-LO | 12.978.586.000,00 | 23.157.354.000,00 | (10.178.768.000,00) | -43,95 |
| **Jumlah** | **2.551.638.134.326,00** | **2.263.980.364.237,00** | **287.657.770.089,00** | **12,71** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp287.657.770.089,00 atau 12,71%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 lebih besar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp172.321.134.000,00 (Rp2.551.638.134.326,00-Rp2.379.317.000.326,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **172.321.134.000,00** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Saldo Piutang DBH Pusat Tahun 2025 (Neraca) | 180.125.380.000,00 | |
| ➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Saldo Piutang DBH Pusat Tahun 2024 (Neraca) | (7.804.246.000,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **172.321.134.000,00** |

### 5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Perimbangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.1.1 Rincian Dana Perimbangan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO | 0,00 | 171.107.795.110,00 | (171.107.795.110,00) | -100,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO | 0,00 | 1.367.677.271.075,00 | (1.367.677.271.075,00) | -100,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO | 0,00 | 87.240.500.926,00 | (87.240.500.926,00) | -100,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO | 0,00 | 614.797.443.126,00 | (614.797.443.126,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **2.240.823.010.237,00** | **(2.240.823.010.237,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Perimbangan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.240.823.010.237,00) atau -100,00%.

### 5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.1.1.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DBH PBB-LO | 0,00 | 1.092.236.000,00 | (1.092.236.000,00) | -100,00 |
| DBH PPh Pasal 21-LO | 0,00 | 156.310.354.000,00 | (156.310.354.000,00) | -100,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO | 0,00 | 12.862.040.000,00 | (12.862.040.000,00) | -100,00 |
| DBH CHT-LO | 0,00 | 831.422.110,00 | (831.422.110,00) | -100,00 |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO | 0,00 | 2.659.000,00 | (2.659.000,00) | -100,00 |
| DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO | 0,00 | 6.767.000,00 | (6.767.000,00) | -100,00 |
| DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO | 0,00 | 2.317.000,00 | (2.317.000,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **171.107.795.110,00** | **(171.107.795.110,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp171.107.795.110,00) atau -100,00%.

### 5.4.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.1.2.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAU-LO | 0,00 | 1.278.810.466.000,00 | (1.278.810.466.000,00) | -100,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO | 0,00 | 68.549.360.075,00 | (68.549.360.075,00) | -100,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO | 0,00 | 7.853.643.000,00 | (7.853.643.000,00) | -100,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO | 0,00 | 12.463.802.000,00 | (12.463.802.000,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **1.367.677.271.075,00** | **(1.367.677.271.075,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.367.677.271.075,00) atau -100,00%.

### 5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.1.3.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO | 0,00 | 16.877.975.100,00 | (16.877.975.100,00) | -100,00 |
| DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO | 0,00 | 30.394.505.247,00 | (30.394.505.247,00) | -100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO | 0,00 | 5.000.023.469,00 | (5.000.023.469,00) | -100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO | 0,00 | 3.095.838.636,00 | (3.095.838.636,00) | -100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO | 0,00 | 15.293.067.738,00 | (15.293.067.738,00) | -100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO | 0,00 | 11.007.204.150,00 | (11.007.204.150,00) | -100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO | 0,00 | 4.123.353.000,00 | (4.123.353.000,00) | -100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO | 0,00 | 1.448.533.586,00 | (1.448.533.586,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **87.240.500.926,00** | **(87.240.500.926,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp87.240.500.926,00) atau -100,00%.

### 5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.1.4.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO | 0,00 | 344.752.312.593,00 | (344.752.312.593,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO | 0,00 | 5.638.750.000,00 | (5.638.750.000,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO | 0,00 | 242.031.199.000,00 | (242.031.199.000,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO | 0,00 | 3.996.750.000,00 | (3.996.750.000,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO | 0,00 | 3.727.225.999,00 | (3.727.225.999,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO | 0,00 | 1.959.778.106,00 | (1.959.778.106,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO | 0,00 | 1.177.945.000,00 | (1.177.945.000,00) | -100,00 |
| DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 302.021.450,00 | (302.021.450,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-PK2UMK-LO | 0,00 | 8.458.820.306,00 | (8.458.820.306,00) | -100,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO | 0,00 | 2.752.640.672,00 | (2.752.640.672,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **614.797.443.126,00** | **(614.797.443.126,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp614.797.443.126,00) atau -100,00%.

#### 5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Bagi Hasil (DBH)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.2.1 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DBH Pajak-LO | 423.362.898.500,00 | 0,00 | 423.362.898.500,00 | 100,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO | 42.989.000,00 | 0,00 | 42.989.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **423.405.887.500,00** | **0,00** | **423.405.887.500,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp423.405.887.500,00.

#### 5.4.1.2.1.2.1 DBH Pajak-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DBH Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DBH Pajak-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.2.1.1 Rincian DBH Pajak-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DBH PBB-LO | 1.999.811.800,00 | 0,00 | 1.999.811.800,00 | 100,00 |
| DBH PPh Pasal 21-LO | 382.729.746.600,00 | 0,00 | 382.729.746.600,00 | 100,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO | 37.478.718.100,00 | 0,00 | 37.478.718.100,00 | 100,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO | 1.154.622.000,00 | 0,00 | 1.154.622.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **423.362.898.500,00** | **0,00** | **423.362.898.500,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan DBH Pajak-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp423.362.898.500,00.

#### 5.4.1.2.1.2.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.2.2.1 Rincian DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO | 4.439.000,00 | 0,00 | 4.439.000,00 | 100,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO | 30.241.000,00 | 0,00 | 30.241.000,00 | 100,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)-LO | 7.547.000,00 | 0,00 | 7.547.000,00 | 100,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)-LO | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **42.989.000,00** | **0,00** | **42.989.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp42.989.000,00.

#### 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Umum (DAU)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.3.1 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO | 1.226.100.162.762,00 | 0,00 | 1.226.100.162.762,00 | 100,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO | 177.385.003.860,00 | 0,00 | 177.385.003.860,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **1.403.485.166.622,00** | **0,00** | **1.403.485.166.622,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.403.485.166.622,00 atau sebesar 100%.

### 5.4.1.2.1.3.1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.3.1.1 Rincian DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAU-LO | 1.226.100.162.762,00 | 0,00 | 1.226.100.162.762,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **1.226.100.162.762,00** | **0,00** | **1.226.100.162.762,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.226.100.162.762,00.

### 5.4.1.2.1.3.2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.3.2.1 Rincian DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO | 93.786.962.860,00 | 0,00 | 93.786.962.860,00 | 100,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO | 83.598.041.000,00 | 0,00 | 83.598.041.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **177.385.003.860,00** | **0,00** | **177.385.003.860,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp177.385.003.860,00.

### 5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.4.1 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAK Fisik-LO | 84.007.989.018,00 | 0,00 | 84.007.989.018,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-LO | 627.760.505.186,00 | 0,00 | 627.760.505.186,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **711.768.494.204,00** | **0,00** | **711.768.494.204,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp711.768.494.204,00 atau sebesar 100%.

#### 5.4.1.2.1.4.1 DAK Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAK Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAK Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.4.1.1 Rincian DAK Fisik-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO | 394.381.253,00 | 0,00 | 394.381.253,00 | 100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO | 47.564.269.965,00 | 0,00 | 47.564.269.965,00 | 100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO | 15.638.212.500,00 | 0,00 | 15.638.212.500,00 | 100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO | 16.387.013.262,00 | 0,00 | 16.387.013.262,00 | 100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak-LO | 4.024.112.038,00 | 0,00 | 4.024.112.038,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **84.007.989.018,00** | **0,00** | **84.007.989.018,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAK Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp84.007.989.018,00 atau sebesar 100%.

#### 5.4.1.2.1.4.2 DAK Non Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAK Non Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAK Non Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.4.2.1 Rincian DAK Non Fisik-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO | 346.838.606.116,00 | 0,00 | 346.838.606.116,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO | 5.719.000.000,00 | 0,00 | 5.719.000.000,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO | 263.281.297.426,00 | 0,00 | 263.281.297.426,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO | 1.088.490.000,00 | 0,00 | 1.088.490.000,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO | 4.101.958.564,00 | 0,00 | 4.101.958.564,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO | 2.208.487.060,00 | 0,00 | 2.208.487.060,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO | 4.002.268.020,00 | 0,00 | 4.002.268.020,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO | 263.443.000,00 | 0,00 | 263.443.000,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO | 199.955.000,00 | 0,00 | 199.955.000,00 | 100,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian-LO | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **627.760.505.186,00** | **0,00** | **627.760.505.186,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan DAK Non Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp627.760.505.186,00 atau sebesar 100%.

#### 5.4.1.2.1.5 Insentif Fiskal-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Insentif Fiskal-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Insentif Fiskal-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.1.5.1 Rincian Insentif Fiskal-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Insentif Fiskal-LO | 0,00 | 23.157.354.000,00 | (23.157.354.000,00) | -100,00 |
| Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO | 12.978.586.000,00 | 0,00 | 12.978.586.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **12.978.586.000,00** | **23.157.354.000,00** | **(10.178.768.000,00)** | **-43,95** |

Tabel di atas menunjukkan Insentif Fiskal-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp10.178.768.000,00) atau -43,95%.

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.2.1 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bantuan Keuangan | 34.825.690.369,00 | 0,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **34.825.690.369,00** | **0,00** | **34.825.690.369,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00.

**Penjelasan:**

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 sama dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp34.825.690.369,00.

#### 5.4.1.2.2.1 Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.2.1.1 Rincian Bantuan Keuangan**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota | 34.825.690.369,00 | 0,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **34.825.690.369,00** | **0,00** | **34.825.690.369,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00.

##### 5.4.1.2.2.1.1 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.2.2.1.1.1 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota | 34.825.690.369,00 | 0,00 | 34.825.690.369,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **34.825.690.369,00** | **0,00** | **34.825.690.369,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00.

### 5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos LAIN-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.3.1 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Hibah-LO | 3.400.091.365.877,13 | 1.441.939.855.516,44 | 1.958.151.510.360,69 | 135,80 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 475.020.000,00 | 241.759.000,00 | 233.261.000,00 | 96,48 |
| **Jumlah** | **3.400.566.385.877,13** | **1.442.181.614.516,44** | **1.958.384.771.360,69** | **135,79** |

Tabel di atas menunjukkan Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.958.384.771.360,69 atau 135,79%.

### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.3.1.1 Rincian Pendapatan Hibah-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 3.327.849.902.623,70 | 1.424.132.917.761,70 | 1.903.716.984.862,00 | 133,68 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO | 15.157.552.988,08 | 464.924.598,74 | 14.692.628.389,34 | 3.160,21 |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 90.582.995,00 | 182.406.500,00 | (91.823.505,00) | -50,34 |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO | 56.989.287.270,35 | 17.153.006.656,00 | 39.836.280.614,35 | 232,24 |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO | 4.040.000,00 | 6.600.000,00 | (2.560.000,00) | -38,78 |
| **Jumlah** | **3.400.091.365.877,13** | **1.441.939.855.516,44** | **1.958.151.510.360,69** | **135,80** |

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.958.151.510.360,69 atau 135,80%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 lebih besar dari Pendapatan Hibah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.394.001.566.683,12 (Rp3.400.091.365.877,13-Rp6.089.799.194,01). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.3.1.2 Penjelasan Selisih atas Pendapatan Hibah-LO**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **3.394.001.566.683,12** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Pemerintah Pusat | 3.327.849.902.623,70 | |
| ✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Pemerintah Daerah lainnya | 15.157.552.988,08 | |
| ✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri | 90.582.995,00 | |
| ✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Badan/Lembaga, Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri yang sudah dikurangi nilai Kas atas hibah RSDY | 50.903.528.076,34 | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **3.394.001.566.683,12** |

### 5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.1.3.2.1 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO | 475.020.000,00 | 241.759.000,00 | 233.261.000,00 | 96,48 |
| **Jumlah** | **475.020.000,00** | **241.759.000,00** | **233.261.000,00** | **96,48** |

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp233.261.000,00 atau 96,48%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 lebih besar dari - pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp475.020.000,00 (Rp475.020.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.3.2.2 Penjelasan Selisih atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **475.020.000,00** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO | | |
| ✓ Pengakuan Pendapatan dari Produksi semen sapi selama Tahun 2025 | 475.020.000,00 | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **475.020.000,00** |

### 5.4.2 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1 Rincian Beban**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Operasi | 5.083.409.266.836,26 | 5.493.833.077.696,32 | (410.423.810.860,06) | -7,47 |
| Beban Transfer | 975.625.285.142,03 | 1.906.374.937.152,00 | (930.749.652.009,97) | -48,82 |
| **Jumlah** | **6.059.034.551.978,29** | **7.400.208.014.848,32** | **(1.341.173.462.870,03)** | **-18,12** |

Tabel di atas menunjukkan Beban per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.341.173.462.870,03) atau -18,12%.

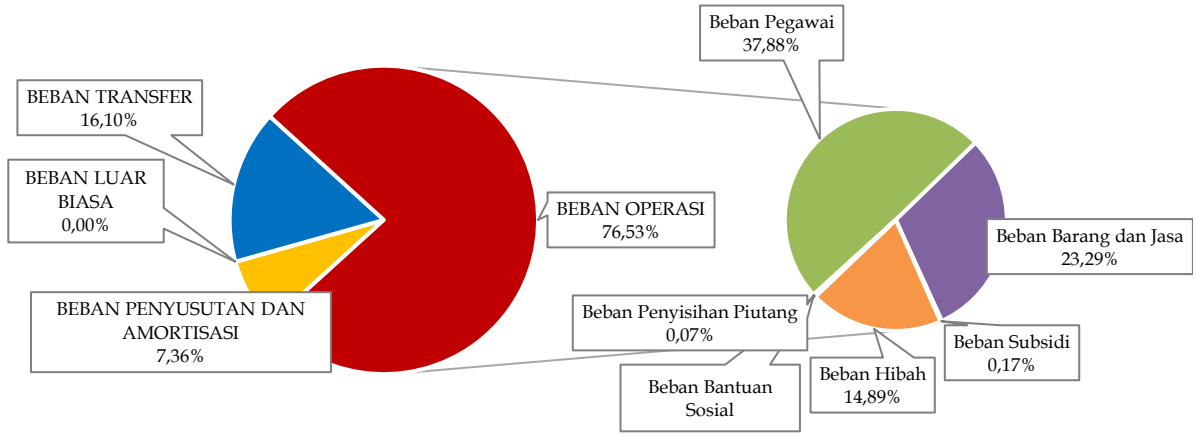
### 5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.1 Rincian Beban Operasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Pegawai | 2.295.243.928.886,13 | 2.069.550.805.320,36 | 225.693.123.565,77 | 10,90 |
| Beban Barang dan Jasa | 1.410.895.187.012,16 | 1.288.255.443.830,08 | 122.639.743.182,08 | 9,51 |
| Beban Subsidi | 10.009.000.000,00 | 2.525.000.000,00 | 7.484.000.000,00 | 296,39 |
| Beban Hibah | 902.463.875.280,97 | 1.056.940.040.569,00 | (154.476.165.288,03) | -14,61 |
| Beban Bantuan Sosial | 14.165.100.000,00 | 7.529.500.000,00 | 6.635.600.000,00 | 88,12 |
| Beban Penyisihan Piutang | 4.464.278.881,10 | 421.883.113.798,14 | (417.418.834.917,04) | -98,94 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 446.167.896.775,90 | 647.149.174.178,74 | (200.981.277.402,84) | -31,05 |
| **Jumlah** | **5.083.409.266.836,26** | **5.493.833.077.696,32** | **(410.423.810.860,06)** | **-7,47** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Operasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp410.423.810.860,06) atau -7,47%.




**Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Beban pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025**

#### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.1.1 Rincian Beban Pegawai**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 1.097.463.561.432,18 | 916.027.802.823,82 | 181.435.758.608,36 | 19,81 |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN | 1.012.765.142.474,00 | 648.584.154.018,00 | 364.180.988.456,00 | 56,15 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 118.498.450.958,95 | 440.856.402.754,54 | (322.357.951.795,59) | -73,12 |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 58.685.482.937,00 | 58.811.705.124,00 | (126.222.187,00) | -0,21 |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.156.291.084,00 | 180.740.600,00 | 975.550.484,00 | 539,75 |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 6.675.000.000,00 | 5.090.000.000,00 | 1.585.000.000,00 | 31,14 |
| **Jumlah** | **2.295.243.928.886,13** | **2.069.550.805.320,36** | **225.693.123.565,77** | **10,91** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp225.693.123.565,77 atau 10,91%. Rincian Beban Pegawai berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 53.**

**Penjelasan:**

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Pegawai pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp9.169.413.421,87 (Rp2.295.243.928.886,13-Rp2.304.413.342.308,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Pegawai**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(9.169.413.421,87)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Saldo Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 (Neraca) | 91.580.345.868,73 | |
| ✓ Koreksi Saldo Awal - Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bali Mandara | 315.980.715,63 | |
| ✓ Koreksi Saldo Awal - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada BPKAD Rp30.844,00 RSUD Bali Mandara sebesar Rp2.091.520,31 dan Badan Penghubung sebesar Rp137.858,00 | 2.260.222,31 | |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Reklas Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (dari Beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa) pada RSJ | (13.300.000,00) | |
| ✓ Saldo Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (Neraca) | (101.054.700.228,54) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(9.169.413.421,87)** |

### 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.2.1 Rincian Beban Barang dan Jasa**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Barang | 525.067.916.906,25 | 428.161.048.852,52 | 96.906.868.053,73 | 22,63 |
| Beban Jasa | 608.352.393.421,42 | 637.424.912.989,37 | (29.072.519.567,95) | -4,56 |
| Beban Pemeliharaan | 96.284.977.335,35 | 88.387.409.764,39 | 7.897.567.570,96 | 8,94 |
| Beban Perjalanan Dinas | 75.916.978.915,60 | 104.537.795.319,00 | (28.620.816.403,40) | -27,38 |
| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 105.272.920.433,54 | 29.744.276.904,80 | 75.528.643.528,74 | 253,93 |
| **Jumlah** | **1.410.895.187.012,16** | **1.288.255.443.830,08** | **122.639.743.182,08** | **9,52** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp122.639.743.182,08 atau 9,52%. Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 54.**

**Penjelasan:**

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp138.389.359.343,37 (Rp1.410.895.187.012,16-Rp1.272.505.827.668,79). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Barang dan Jasa**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **138.389.359.343,37** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 (Neraca) | 30.231.881.561,72 | |
| ✓ Saldo Persediaan Tahun 2024 (Neraca) | 163.524.845.854,74 | |
| ✓ Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2024 (Neraca) | 490.726.285,24 | |
| ✓ Penerimaan Hibah Barang Persediaan | 128.233.977.684,12 | |
| ✓ Salah Pos Belanja Modal | 13.229.877.565,00 | |
| ✓ Aset Dibawah Kapitalisasi | 6.085.611.314,63 | |
| ✓ Reklas Beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa | 13.300.000,00 | |
| ✓ Reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 31.209.264.441,00 | |
| ✓ Kekurangan pengakuan pendapatan dari hasil produksi semen sapi selama tahun 2025 dan pengakuan beban persediaan pada UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Distanpangan | 475.020.000,00 | |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Neraca) | (27.529.724.017,50) | |
| ✓ Saldo Persediaan Tahun 2025 (Neraca) | (157.410.085.366,35) | |
| ✓ Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2025 (Neraca) | (485.566.225,08) | |
| ✓ Koreksi Saldo Awal Persediaan | (40.330.336.348,15) | |
| ✓ Kapitalisasi Belanja Non Modal | (6.125.558.482,00) | |
| ✓ Pemberian Hibah Persediaan ke Kabupaten Jembrana | (161.750.000,00) | |
| ✓ Hibah Ekuitas - Utang RSDY | (2.686.174.713,00) | |
| ✓ Beban Dibayar Dimuka pada RSJ | (400,00) | |
| ✓ Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Pemeliharaan | (47.366.000,00) | |

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| ✓ Kelebihan pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain untuk pembayaran Sarbagia Bulan Desember 2025 sehingga dicatat menjadi uang muka | (328.583.811,00) |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | **138.389.359.343,37** |

### 5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.3.1 Rincian Beban Subsidi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 10.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 300,00 |
| Beban Subsidi kepada Koperasi | 9.000.000,00 | 25.000.000,00 | (16.000.000,00) | -64,00 |
| **Jumlah** | **10.009.000.000,00** | **2.525.000.000,00** | **7.484.000.000,00** | **296,40** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.484.000.000,00 atau 296,40%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Subsidi adalah sebagai berikut:
   a. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta pada 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00, berasal dari realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas pemberian subsidi pupuk organik kepada Badan Usaha Milik Swasta sesuai SK Gubernur Nomer 590/03-F/HK/2025 tgl. 30 Juni 2025.
   b. Beban Subsidi kepada Koperasi sebesar Rp9.000.000,00 atas Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Nilai Beban Subsidi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp10.009.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp10.009.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

### 5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.4.1 Rincian Beban Hibah**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 2.834.625.000,00 | 193.756.502.952,00 | (190.921.877.952,00) | -98,54 |
| Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 161.750.000,00 | 1.459.122.500,00 | (1.297.372.500,00) | -88,91 |
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 778.415.840.621,97 | 748.722.466.713,00 | 29.693.373.908,97 | 3,97 |
| Beban Hibah Dana BOS | 97.210.079.659,00 | 90.422.943.204,00 | 6.787.136.455,00 | 7,51 |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 23.841.580.000,00 | 22.579.005.200,00 | 1.262.574.800,00 | 5,59 |
| **Jumlah** | **902.463.875.280,97** | **1.056.940.040.569,00** | **(154.476.165.288,03)** | **-14,62** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp154.476.165.288,03) atau -14,62%. Rincian Beban Hibah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 55.**

### 5.4.2.1.4.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.4.1.1 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 2.834.625.000,00 | 157.039.446.676,00 | (154.204.821.676,00) | -98,19 |
| Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 36.717.056.276,00 | (36.717.056.276,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **2.834.625.000,00** | **193.756.502.952,00** | **(190.921.877.952,00)** | **-98,54** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp190.921.877.952,00) atau -98,54%.

**Penjelasan :**

Pengakuan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.635.883.238,00 (Rp2.834.625.000,00-Rp6.470.508.238,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.4.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(3.635.883.238,00)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat menjadi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | (3.635.883.238,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(3.635.883.238,00)** |

### 5.4.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.4.2.1 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 161.750.000,00 | 1.459.122.500,00 | (1.297.372.500,00) | -88,91 |
| **Jumlah** | **161.750.000,00** | **1.459.122.500,00** | **(1.297.372.500,00)** | **-88,91** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.297.372.500,00) atau -88,91%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 lebih besar dari - pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp161.750.000,00 (Rp161.750.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.4.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **161.750.000,00** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Pemberian Hibah Barang Persediaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana | 161.750.000,00 | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **161.750.000,00** |

### 5.4.2.1.4.3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.4.3.1 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 528.893.438.859,97 | 518.273.075.565,00 | 10.620.363.294,97 | 2,04 |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 5.347.798.094,00 | 0,00 | 5.347.798.094,00 | 100,00 |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 243.374.603.668,00 | 230.200.071.448,00 | 13.174.532.220,00 | 5,72 |
| Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 800.000.000,00 | 249.319.700,00 | 550.680.300,00 | 220,87 |
| **Jumlah** | **778.415.840.621,97** | **748.722.466.713,00** | **29.693.373.908,97** | **3,97** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp29.693.373.908,97 atau 3,97%.

**Penjelasan :**

Pengakuan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp27.573.381.203,00 (Rp778.415.840.621,97-Rp805.989.221.824,97). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.4.3.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(27.573.381.203,00)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | (25.009.117.814,00) | |
| ✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan menjadi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | (2.564.263.389,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(27.573.381.203,00)** |

### 5.4.2.1.4.4 Beban Hibah Dana BOS

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Dana BOS Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah Dana BOS yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.4.4.1 Rincian Beban Hibah Dana BOS**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta | 96.413.028.124,00 | 89.499.371.704,00 | 6.913.656.420,00 | 7,72 |
| Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta | 797.051.535,00 | 923.571.500,00 | (126.519.965,00) | -13,70 |
| **Jumlah** | **97.210.079.659,00** | **90.422.943.204,00** | **6.787.136.455,00** | **7,51** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah Dana BOS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.787.136.455,00 atau 7,51%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Hibah Dana BOS adalah sebagai berikut:
   a. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta pada 2025 sebesar Rp96.413.028.124,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.913.656.420,00 atau 7,72% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp89.499.371.704,00.
   b. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta pada 2025 sebesar Rp797.051.535,00, mengalami penurunan sebesar Rp126.519.965,00 atau -13,70% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp923.571.500,00.
2. Nilai Beban Hibah Dana BOS pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp97.210.079.659,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp97.210.079.659,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

### 5.4.2.1.4.5 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.4.5.1 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 23.841.580.000,00 | 22.579.005.200,00 | 1.262.574.800,00 | 5,59 |
| **Jumlah** | **23.841.580.000,00** | **22.579.005.200,00** | **1.262.574.800,00** | **5,59** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.262.574.800,00 atau 5,59%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah sebagai berikut:
   a. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada 2025 sebesar Rp23.841.580.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.574.800,00 atau 5,59% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp22.579.005.200,00.
2. Nilai Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp23.841.580.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp23.841.580.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

#### 5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.5.1 Rincian Beban Bantuan Sosial**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu | 7.370.300.000,00 | 4.123.500.000,00 | 3.246.800.000,00 | 78,73 |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat | 6.683.200.000,00 | 3.406.000.000,00 | 3.277.200.000,00 | 96,21 |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 111.600.000,00 | 0,00 | 111.600.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **14.165.100.000,00** | **7.529.500.000,00** | **6.635.600.000,00** | **88,13** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.635.600.000,00 atau 88,13% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp7.370.300.000,00 dan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp6.683.200.000,00 merupakan Nilai yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp111.600.000,00 merupakan Belanja Bantuan sosial yang disalurkan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Pada Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali.

#### 5.4.2.1.5.1 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.5.1.1 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 7.370.300.000,00 | 4.123.500.000,00 | 3.246.800.000,00 | 78,74 |
| **Jumlah** | **7.370.300.000,00** | **4.123.500.000,00** | **3.246.800.000,00** | **78,74** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.246.800.000,00 atau 78,74%.

**Penjelasan**:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2025 lebih besar dari - pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp7.370.300.000,00 (Rp7.370.300.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.5.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **7.370.300.000,00** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Reklasifikas dari Beban Tidak Terduga menjadi Beban Bantuan Sosial atas beban bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada individu melalui usulan BPBD | 7.370.300.000,00 | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **7.370.300.000,00** |

### 5.4.2.1.5.2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.5.2.1 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 6.683.200.000,00 | 3.406.000.000,00 | 3.277.200.000,00 | 96,22 |
| **Jumlah** | **6.683.200.000,00** | **3.406.000.000,00** | **3.277.200.000,00** | **96,22** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.277.200.000,00 atau 96,22%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 lebih besar dari Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp6.683.200.000,00 (Rp6.683.200.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.5.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **6.683.200.000,00** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Reklasifikas dari Beban Tidak Terduga menjadi Beban Bantuan Sosial atas beban bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada kelompok masyarakat melalui usulan BPBD | 6.683.200.000,00 | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **6.683.200.000,00** |

### 5.4.2.1.5.3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.5.3.1 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 111.600.000,00 | 0,00 | 111.600.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **111.600.000,00** | **0,00** | **111.600.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp111.600.000,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) adalah sebagai berikut:
   a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada 2025 sebesar Rp111.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp111.600.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp111.600.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp111.600.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

### 5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.6.1 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 1.651.225,00 | 427.371.442,76 | (425.720.217,76) | -99,61 |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 3.527.518.638,87 | 421.404.005.596,85 | (417.876.486.957,98) | -99,16 |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 34.482.117,23 | 51.736.758,53 | (17.254.641,30) | -33,35 |
| Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 900.626.900,00 | 0,00 | 900.626.900,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **4.464.278.881,10** | **421.883.113.798,14** | **(417.418.834.917,04)** | **-98,94** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp417.418.834.917,04) atau -98,94%.

**Penjelasan :**

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp846.694.896.035,02 (Rp4.464.278.881,10+(Rp862.191.285.296,38-Rp19.960.668.142,46)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Penyisihan Piutang Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.6.2 Penjelasan Selisih atas Beban Penyisihan Piutang**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih Beban Penyisihan Piutang dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang** | | **846.694.896.035,02** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Penyesuaian penyisihan piutang dari piutang TA 2024 yang tertagih di RS Bali Mandara | 2.519.697.346,81 | |
| ✓ Penghapusan Piutang Tak Tertagih di 2025 | 24.944.500,00 | |
| ✓ Penyesuaian penyisihan TGR atas nama Wiyantara 2025 | 18.000.000,00 | |
| ✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII sesuai sesuai Kesepakatan Bersama yang | 786.802.780.952,68 | |

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali. | |
| ✓ Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII PKS Nomor 10 sesuai Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali. | 56.863.253.645,15 |
| ✓ Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10 | 3.020.774.733,83 |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | |
| ✓ Jurnal koreksi saldo awal penyisihan piutang atas adanya kesalahan perhitungan piutang PT Global Assistance Healthcare, serta adanya pembayaran piutang pasien umum dan pasien lost pada RSUD Bali Mandara | (25.112.690,99) |
| ✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10 | (2.529.442.452,46) |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | **846.694.896.035,02** |

### 5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.1.7.1 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 143.915.686.361,51 | 153.485.323.115,35 | (9.569.636.753,84) | -6,23 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 78.728.783.486,00 | 69.658.650.163,60 | 9.070.133.322,40 | 13,02 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 219.067.046.950,39 | 419.270.877.852,14 | (200.203.830.901,75) | -47,75 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 1.445.320.742,00 | 1.626.824.943,00 | (181.504.201,00) | -11,15 |
| Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 2.914.493.503,00 | 3.010.932.371,65 | (96.438.868,65) | -3,20 |
| Beban Penyusutan Properti Investasi | 96.565.733,00 | 96.565.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **446.167.896.775,90** | **647.149.174.178,74** | **(200.981.277.402,84)** | **-31,05** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp200.981.277.402,84) atau -31,06%.

**Penjelasan** :

1. Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.955.137.222,94 (Rp143.915.686.361,51-(Rp1.800.859.499.926,11-Rp1.936.820.049.064,68)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.7.2 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan Perubahan Nilai** | | **7.955.137.222,94** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya | 24.053.802.717,96 | |
| ✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Properti Investasi | 6.755.252.193,00 | |
| ✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah | 6.477.180.699,00 | |
| ➢ Pengurangan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal Bertambah | (21.848.607.804,00) | |
| ✓ Penyusutan Barang Terima Hibah | (1.005.309.884,00) | |
| ✓ Mutasi Bertambah Antar OPD | (6.477.180.699,00) | |
| ✓ Koreksi Saldo awal menyesuaikan dengan SIMDA | (0,02) | |

2. Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.010.984.501,36 (Rp78.728.783.486,00-(Rp699.678.324.093,94-Rp782.418.092.081,30)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.7.3 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dengan Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan** | | **(4.010.984.501,36)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya | 4.669.427.325,00 | |
| ✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal | 29.204.291.469,64 | |
| ✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah | 3.500.632.899,00 | |
| ➢ Pengurangan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal | (33.019.559.506,00) | |
| ✓ Penyusutan Barang Terima Hibah | (4.855.143.790,00) | |
| ✓ Reklasifikasi dari Akumulasi Dari ASET EXTRA | (10.000.000,00) | |
| ✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah | (3.500.632.899,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(4.010.984.501,36)** |

3. Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp694.158.728.413,66 (Rp219.067.046.950,39-(Rp2.963.822.678.011,06-Rp3.877.048.453.375,11)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.7.4 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | **(694.158.728.413,66)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya | 16.131.914,00 | |
| ✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal | 36.173.084.018,00 | |
| ✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah | 250.517.788.061,00 | |
| ➢ Pengurangan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal | (24.090.782.762,00) | |
| ✓ Penyusutan Barang Terima Hibah | (692.139.861.583,66) | |
| ✓ Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya | (14.117.300.000,00) | |
| ✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah | (250.517.788.061,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(694.158.728.413,66)** |

4. Pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.450.000,00 (Rp1.445.320.742,00-(Rp21.528.746.696,40-Rp22.967.617.438,40)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.7.5 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya** | | **6.450.000,00** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Pengurangan Beban Penyusutan | | |
| ✓ Reklasifikasi Bertambah dari akumulasi Aset Lainnya | 6.450.000,00 | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **6.450.000,00** |

5. Pengakuan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.357.512.737,00 (Rp2.914.493.503,00-(Rp20.833.551.606,82-Rp28.105.557.846,82)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1.7.6 Penjelasan Selisih atas Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dengan Perubahan Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** | | **(4.357.512.737,00)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Beban Amortisasi | | |
| ✓ Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pada Setwan dan Disperindag | 69.899.500,00 | |
| ✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal Pada BKPSDM dan Dinkes | 21.809.825,00 | |
| ➢ Pengurangan Beban Amortisasi | | |
| ✓ Koreksi saldo awal bertambah | (4.416.972.062,00) | |
| ✓ Jurnal Penyesuaian untuk mencatat penerimaan Hibah BMN berupa Dermaga Gunaksa dan Penyusunan Value Engineering terhadap Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa dari Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Bali | (32.250.000,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(4.357.512.737,00)** |

6. Pengakuan Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sama dengan perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 96.565.733,00.

### 5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.2.1 Rincian Beban Transfer**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bagi Hasil | 695.024.851.287,00 | 1.748.842.154.053,00 | (1.053.817.302.766,00) | -60,26 |
| Beban Bantuan Keuangan | 280.600.433.855,03 | 157.532.783.099,00 | 123.067.650.756,03 | 78,12 |
| **Jumlah** | **975.625.285.142,03** | **1.906.374.937.152,00** | **(930.749.652.009,97)** | **-48,82** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Transfer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp930.749.652.009,97) atau -48,82%.

#### 5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.2.1.1 Rincian Beban Bagi Hasil**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 695.024.851.287,00 | 1.748.842.154.053,00 | (1.053.817.302.766,00) | -60,26 |
| **Jumlah** | **695.024.851.287,00** | **1.748.842.154.053,00** | **(1.053.817.302.766,00)** | **-60,26** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Bagi Hasil per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.053.817.302.766,00) atau -60,26%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Beban Bagi Hasil Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Bagi Hasil pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp270.714.125.161,00 (Rp695.024.851.287,00-Rp965.738.976.448,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bagi Hasil, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Rincian Beban Bagi Hasil**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(270.714.125.161,00)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 (Neraca) | 39.970.590.091,00 | |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 (Neraca) | (310.684.715.252,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(270.714.125.161,00)** |

### 5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.2.2.2.1 Rincian Beban Bantuan Keuangan**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 192.057.433.855,03 | 81.755.349.199,00 | 110.302.084.656,03 | 134,91 |
| Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 88.543.000.000,00 | 75.777.433.900,00 | 12.765.566.100,00 | 16,84 |
| **Jumlah** | **280.600.433.855,03** | **157.532.783.099,00** | **123.067.650.756,03** | **78,12** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp123.067.650.756,03 atau 78,12%.

**Penjelasan:**

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sama dengan Belanja Bantuan Keuangan pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp280.600.433.855,03.

### 5.4.3 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.1 Rincian Surplus Non Operasional-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 724.625.734,00 | 623.256.918,00 | 101.368.816,00 | 16,26 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | 0,00 | 30.705.444,00 | (30.705.444,00) | -100,00 |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 63.900.149.170,81 | 1.148.081.836,34 | 62.752.067.334,47 | 5.465,81 |
| **Jumlah** | **64.624.774.904,81** | **1.802.044.198,34** | **62.822.730.706,47** | **3.486,19** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus Non Operasional-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp62.822.730.706,47 atau 3.486,19%.

#### 5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.1.1 Rincian Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 677.625.734,00 | 623.256.918,00 | 54.368.816,00 | 8,72 |
| Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 47.000.000,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **724.625.734,00** | **623.256.918,00** | **101.368.816,00** | **16,26** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp101.368.816,00 atau 16,26%.

##### 5.4.3.1.1 Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.1.1.1 Rincian Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO | 677.625.734,00 | 623.256.918,00 | 54.368.816,00 | 8,72 |
| **Jumlah** | **677.625.734,00** | **623.256.918,00** | **54.368.816,00** | **8,72** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp54.368.816,00 atau 8,72%. Penjelasan lebih lanjut mengenai surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.3.1.1.2 Penjelasan atas Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Rincian detail transaksi Surplus dari Penjualan Aset dan Perhitungan Sisa Nilai Buku Penghapusan Aset** | | |
| 1 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dari Dinas Kesehatan | 7.404.100,00 |
| 2 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dari Bapenda | 88.568.300,00 |
| 3 | Penjualan ARB Barang Inventaris dari RS Mata Bali Mandara | 1.500.000,00 |
| 4 | Penjualan ARB Barang Inventaris Biro Organisasi Setda | 1.700.000,00 |
| 5 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Kebudayaan | 2.000.000,00 |
| 6 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.100.000,00 |
| 7 | Penjualan ARB Barang Inventaris dari Sekretariat DPRD | 4.400.000,00 |

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 8 | Penjualan ARB RS Umum Daerah Bali Mandara | 3.000.000,00 |
| 9 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1.700.000,00 |
| 10 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 150.451.100,00 |
| 11 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dari RSJ Manah Shanti Mahottama | 4.223.100,00 |
| 12 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 4 Dinas Kebudayaan | 9.193.100,00 |
| 13 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Beroda Empat dari Sekretariat DPRD | 73.968.100,00 |
| 14 | Penjualan ARB Kendaraan Dinas Beroda Tiga dari Sekretariat DPRD | 6.522.200,00 |
| 15 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat | 600.000,00 |
| 16 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.200.000,00 |
| 17 | Penjualan ARB Barang Inventaris Biro Umum Setda | 508.334,00 |
| 18 | Penjualan ARB Barang Inventaris Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda | 5.100.000,00 |
| 19 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.500.000,00 |
| 20 | Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 3.400.000,00 |
| 21 | Penghapusan ARB Peralatan dan Mesin BPKAD Provinsi Bali TA 2025 | 3.200.000,00 |
| 22 | Reklasifikasi Hasil Penjualan ARB menjadi Surplus Non Operasional (STS Penjualan Tidak Teridentifikasi ARB Induknya) | 306.387.400,00 |
| **Jumlah (22 transaksi)** | | **677.625.734,00** |

### 5.4.3.1.2 Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.1.2.1 Rincian Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus Tukar Menukar Tanah-LO | 47.000.000,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 100,00 |
| **Jumlah** | **47.000.000,00** | **0,00** | **47.000.000,00** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp47.000.000,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Tukar Menukar Tanah-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.3.1.2.2 Penjelasan atas Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Rincian detail transaksi Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan** | | |
| 1 | Transaksi Tukar Menukar Tanah antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Tanah Perorangan (Tukar Menukar Aset) | 47.000.000,00 |
| **Jumlah (1 transaksi)** | | **47.000.000,00** |

### 5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.2.1 Rincian Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO | 0,00 | 30.705.444,00 | (30.705.444,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **30.705.444,00** | **(30.705.444,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp30.705.444,00) atau -100,00%.

### 5.4.3.2.1 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.2.1.1 Rincian Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO | 0,00 | 30.705.444,00 | (30.705.444,00) | -100,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **30.705.444,00** | **(30.705.444,00)** | **-100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp30.705.444,00) atau -100,00%.

### 5.4.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.3.1 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 63.900.149.170,81 | 1.148.081.836,34 | 62.752.067.334,47 | 5.465,82 |
| **Jumlah** | **63.900.149.170,81** | **1.148.081.836,34** | **62.752.067.334,47** | **5.465,82** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp62.752.067.334,47 atau 5.465,82%.

### 5.4.3.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.3.3.1.1 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 63.900.149.170,81 | 1.148.081.836,34 | 62.752.067.334,47 | 5465,82 |
| **Jumlah** | **63.900.149.170,81** | **1.148.081.836,34** | **62.752.067.334,47** | **5465,82** |

Tabel di atas menunjukkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp62.752.067.334,47 atau 5.465,82%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut: Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp63.900.149.170,81 meningkat sebesar Rp62.752.067.334,47 atau 5.465,82% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.148.081.836,34. Nilai ini merupakan berasal dari pelunasan piutang yang mengakibatkan terhapusnya penyisihan piutang pada perangkat daerah. Berikut adalah rincian transaksinya:

**Tabel 5.4.3.3.1.2 Penjelasan atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Rincian detail transaksi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** | | |
| 1 | Penyesuaian TGR atas nama Wiyantara Januari - Desember 2025 | 18.000.000,00 |
| 2 | Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII PKS Nomor 10 sesuai Kesepakatan Bersama yang mengatur penyele | 56.863.253.645,15 |
| 3 | Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10 | 3.020.774.733,83 |

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 4 | Pengakuan surplus non operasional atas penyesuaian penyisihan piutang tahun 2025 untuk OPD | 2.519.684.089,27 |
| 5 | Reklasifikasi 0,2 sebagai surplus non operasional lainnya (pembulatan dari penerimaan transaksi pelunasan Piutang PKS No | 0,02 |
| 6 | Reklasifikasi Penerimaan Pembayaran Settlement atas Kesepakatan Bersama Nomor B.31.000.2.3.2/2553/UPTD.PBMD/BPKAD | 1.478.423.445,00 |
| 7 | Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 | 13.257,54 |
| | **Jumlah** | **63.900.149.170,81** |

### 5.4.4 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.4.1 Rincian Defisit Non Operasional-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 2.423.399.368,05 | 7.246.745.411,80 | (4.823.346.043,75) | -66,56 |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 2.845.835.058,00 | 5.092.414.901,00 | (2.246.579.843,00) | -44,12 |
| **Jumlah** | **5.269.234.426,05** | **12.339.160.312,80** | **(7.069.925.886,75)** | **-57,30** |

Tabel di atas menunjukkan Defisit Non Operasional-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.069.925.886,75) atau -57,30%.

#### 5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.4.1.1 Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 560.300.573,00 | 644.280.096,00 | (83.979.523,00) | -13,03 |
| Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 1.863.098.795,05 | 6.602.465.315,80 | (4.739.366.520,75) | -71,78 |
| **Jumlah** | **2.423.399.368,05** | **7.246.745.411,80** | **(4.823.346.043,75)** | **-66,56** |

Tabel di atas menunjukkan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.823.346.043,75) atau -66,56%.

##### 5.4.4.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.4.1.1.1 Rincian Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO | 0,00 | 624.686.662,00 | (624.686.662,00) | -100,00 |
| Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO | 560.300.573,00 | 19.593.434,00 | 540.707.139,00 | 2759,63 |
| **Jumlah** | **560.300.573,00** | **644.280.096,00** | **(83.979.523,00)** | **-13,03** |

Tabel di atas menunjukkan Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.979.523,00) atau -13,03%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4.4.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Rincian detail transaksi Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO** | | |
| 1 | Penjualan ARB Bangunan Gedung (SMAN 1 Bangli & SMAN 1 Tembuku) (Bongkaran Gedung) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah | 127.954.340,00 |
| 2 | Penjualan ARB Bangunan Gedung (SMAN 1 Kediri) (Bongkaran Gedung) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga | 192.321.080,00 |
| 3 | Penjualan ARB Peralatan dan Mesin (Sekolah Daerah Gianyar dan Bangli) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga | 240.025.153,00 |
| **Jumlah** | | **560.300.573,00** |

### 5.4.4.1.2 Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.4.1.2.1 Rincian Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Defisit Penghapusan Tanah-LO | 0,00 | 43.433.500,00 | (43.433.500,00) | -100,00 |
| Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO | 0,00 | 38.781.346,00 | (38.781.346,00) | -100,00 |
| Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO | 1.032.058.186,66 | 0,00 | 1.032.058.186,66 | 100,00 |
| Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO | 0,00 | 629.409.895,30 | (629.409.895,30) | -100,00 |
| Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO | 831.040.608,39 | 5.890.840.574,50 | (5.059.799.966,11) | -85,89 |
| **Jumlah** | **1.863.098.795,05** | **6.602.465.315,80** | **(4.739.366.520,75)** | **-71,78** |

Tabel di atas menunjukkan Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.739.366.520,75) atau -71,78%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.4.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **Rincian detail transaksi Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO** | | |
| 1 | Jurnal penyesuaian atas penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan | (229.112.717,64) |
| 2 | Jurnal penyesuaian untuk penghapusan koreksi saldo awal gedung dan bangunan berupa pagar | 1.261.170.904,30 |
| 3 | Penghapusan Barang Inventaris ARB dari DISHUB | 44.838.083,00 |
| 4 | Penghapusan Barang Inventaris ARB dari DISKOMINFO | 8.413.000,00 |
| 5 | Penghapusan Barang Inventaris ARB dari DUKCAPIL | 32.280,00 |
| 6 | Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah SETDA | 16.732.083,00 |
| 7 | Penghapusan ARB Bangunan Gedung dari RSJ Manah Shanti Mahottama | 627.297.989,99 |
| 8 | Penghapusan ARB Bangunan Gedung (Bongkaran Gedung) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipi | 34.639.333,00 |
| 9 | Penghapusan Barang Inventaris ARB dari Bapenda | 82.500,00 |
| 10 | Penghapusan ARB Peralatan dan Mesin (SLBN 1 Karangasem) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga karena Kebakaran | 28.308.977,00 |
| 11 | Penghapusan ARB Bangunan Gedung (Bongkaran Gedung) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 49.743.038,00 |
| 12 | Penghapusan ARB Bangunan Gedung (SLBN 2 Buleleng) (Bongkaran Gedung) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga | 11.248.224,40 |
| 13 | Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah DISTAN | 9.705.100,00 |
| **Jumlah (13 transaksi)** | | **1.863.098.795,05** |

### 5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.4.2.1 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 2.845.835.058,00 | 5.092.414.901,00 | (2.246.579.843,00) | -44,12 |
| **Jumlah** | **2.845.835.058,00** | **5.092.414.901,00** | **(2.246.579.843,00)** | **-44,12** |

Tabel di atas menunjukkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.246.579.843,00) atau -44,12%.

### 5.4.4.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.4.2.1.1 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 2.845.835.058,00 | 5.092.414.901,00 | (2.246.579.843,00) | -44,12 |
| **Jumlah** | **2.845.835.058,00** | **5.092.414.901,00** | **(2.246.579.843,00)** | **-44,12** |

Tabel di atas menunjukkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.246.579.843,00) atau -44,11%.

Penjelasan Tren penurunan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut: Nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp2.845.835.058,00 menurun sebesar Rp2.246.579.843,00 atau -44,11% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.092.414.901,00. Nilai Rp2.845.835.058,00 merupakan pengakuan penurunan investasi dari Perumda Kerthi Bali Santhi sampai dengan tanggal Tahun 2025.

### 5.4.5 BEBAN LUAR BIASA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

**Tabel 5.4.5.1 Rincian Beban Luar Biasa**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Luar Biasa | 21.888.800,30 | 0,00 | 21.888.800,26 | 100,00 |
| **Jumlah** | **21.888.800,30** | **0,00** | **21.888.800,26** | **100,00** |

Tabel di atas menunjukkan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp21.888.800,26 atau 100,00%.

**Penjelasan :**

Pengakuan Beban Luar Biasa Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Tidak Terduga pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp14.053.500.000,00 (Rp21.888.800,30 - Rp14.075.388.800,30). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Tidak Terduga, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.5.2 Penjelasan Selisih atas Beban Luar Biasa**

| Uraian | Nilai | |
|---|---|---|
| **Selisih LO – LRA** | | **(14.053.500.000,00)** |
| Penjelasan Selisih | | |
| ➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO | | |
| ✓ Konversi dari Beban Luar Biasa ke Beban Bantuan Sosial | (14.053.500.000,00) | |
| **Jumlah Penjelasan Selisih** | | **(14.053.500.000,00)** |

### 5.4.6 Surplus/(Defisit)-LO

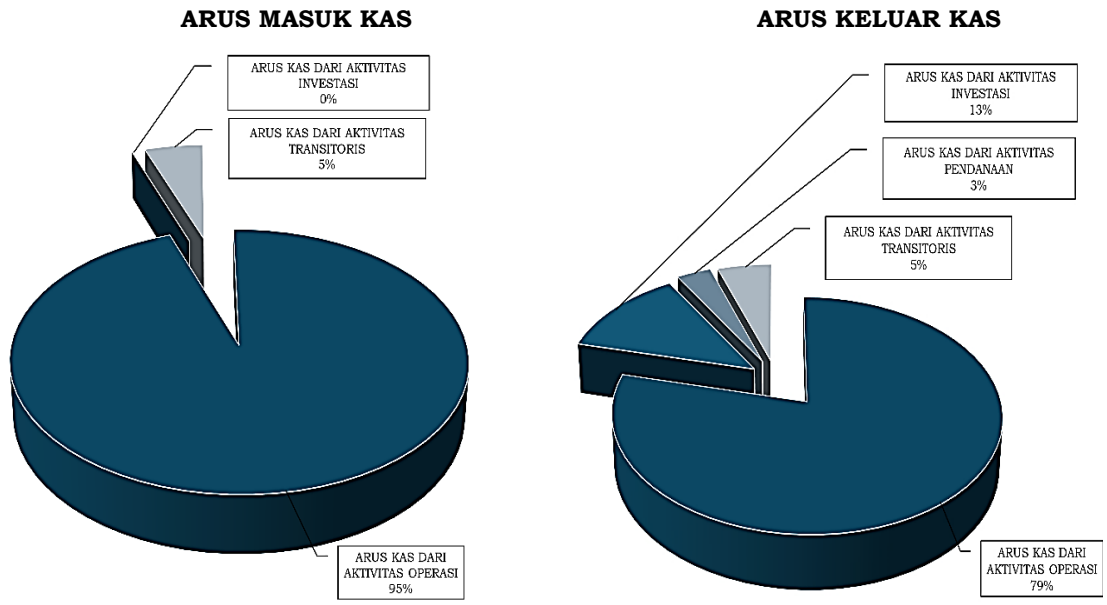
**Tabel 5.4.6.1 Rincian Surplus/(Defisit)-LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| SURPLUS/DEFISIT-LO | 4.085.325.080.551,39 | 1.966.768.027.608,74 | 2.118.557.052.942,65 | 107,72 |
| **Jumlah** | **4.085.325.080.551,39** | **1.966.768.027.608,74** | **2.118.557.052.942,65** | **107,72** |

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tersebut telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.6.2.

### 5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang memengaruhi perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut terhadap perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Bali.




**Gambar 5.15 Diagram Pengaruh Empat Aktivitas Arus Kas Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas TA 2025**




| | Operasi | Investasi | Pendanaan | Transitoris |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.198.174.847.155,17 | (502.457.780.445,41) | (243.464.798.088,00) | 0,00 |
| 2025 | 1.266.649.842.069,55 | (930.986.964.349,53) | (243.464.798.088,00) | (3.056.472.412,70) |

**Gambar 5.16 Diagram Perbandingan Tiga Aktivitas Arus Kas Bersih Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas TA 2025 dan 2024**

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 7.047.615.800.871,64 | 7.823.537.090.007,83 |
| Arus Kas Keluar | 5.780.965.958.802,09 | 6.625.362.242.852,66 |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **1.266.649.842.069,55** | **1.198.174.847.155,17** |

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas

**Tabel 5.5.1.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Pajak Daerah | 2.865.836.401.524,00 | 4.520.332.643.486,00 |
| Retribusi Daerah | 909.595.917.119,52 | 338.039.879.379,28 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 253.603.839.116,43 | 197.369.947.623,03 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 598.347.153.222,68 | 478.625.715.282,52 |
| Dana Bagi Hasil | 251.084.753.500,00 | 190.545.491.110,00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.403.485.166.622,00 | 1.367.677.271.075,00 |
| Dana Alokasi Khusus – Fisik | 84.007.989.018,00 | 87.240.500.926,00 |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 627.760.505.186,00 | 614.797.443.126,00 |
| Insentif Fiskal | 12.978.586.000,00 | 23.157.354.000,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34.825.690.369,00 | 0,00 |
| Hibah | 6.089.799.194,01 | 5.750.844.000,00 |
| **Jumlah** | **7.047.615.800.871,64** | **7.823.537.090.007,83** |

#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas

**Tabel 5.5.1.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 2.304.413.342.308,00 | 2.088.693.065.509,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.272.505.827.668,79 | 1.200.096.660.415,66 |
| Belanja Subsidi | 10.009.000.000,00 | 2.525.000.000,00 |
| Belanja Hibah | 933.511.389.721,97 | 1.169.523.956.546,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 111.600.000,00 | 250.000.000,00 |
| Belanja Tak Terduga | 14.075.388.800,30 | 7.441.134.041,00 |
| Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota | 965.738.976.448,00 | 1.800.971.992.343,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota | 192.057.433.855,03 | 269.381.700.098,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 88.543.000.000,00 | 86.478.733.900,00 |
| **Jumlah** | **5.780.965.958.802,09** | **6.625.362.242.852,66** |

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.5.2.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 700.068.400,00 | 172.231.826.700,00 |
| Arus Kas Keluar | 931.687.032.749,53 | 674.689.607.145,41 |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(930.986.964.349,53)** | **(502.457.780.445,41)** |

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas

**Tabel 5.5.2.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 171.170.332.800,00 |
| Penjualan Aset Lain-Lain | 700.068.400,00 | 1.061.493.900,00 |
| **Jumlah** | **700.068.400,00** | **172.231.826.700,00** |

### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas

**Tabel 5.5.2.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| Perolehan Tanah | 1.181.948.000,00 | 3.464.184.000,00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | 259.183.049.267,80 | 130.063.180.613,50 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | 240.493.997.597,02 | 407.489.294.374,22 |
| Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 240.687.598.599,81 | 94.451.449.090,69 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | 31.596.980.320,00 | 31.382.599.067,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | 543.458.964,90 | 838.900.000,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 158.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | **931.687.032.749,53** | **674.689.607.145,41** |

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.5.3.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas Keluar | 243.464.798.088,00 | 243.464.798.088,00 |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan** | **(243.464.798.088,00)** | **(243.464.798.088,00)** |

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

### 5.5.3.1 Arus Masuk Kas

**Tabel 5.5.3.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** |

### 5.5.3.2 Arus Keluar Kas

**Tabel 5.5.3.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 243.464.798.088,00 | 243.464.798.088,00 |
| **Jumlah** | **243.464.798.088,00** | **243.464.798.088,00** |

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Bali. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.5.4.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 375.893.982.146,00 | 371.823.264.458,00 |
| Arus Kas Keluar | 378.950.454.558,70 | 371.823.264.458,00 |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris** | **(3.056.472.412,70)** | **0,00** |

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas

**Tabel 5.5.4.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Pajak Pertambahan Nilai | 117.598.972.454,00 | 93.700.059.524,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 83.836.111.547,00 | 123.233.747.416,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 | 9.490.466.898,00 | 5.281.908.575,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 5.058.473.898,00 | 3.258.306.411,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | - | 0,00- |
| Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 | 14.224.419.103,00 | 12.283.918.707,00 |
| Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri | 892.730.476,00 | 2.425.775,00 |
| Potongan BPJS | 71.247.686.427,00 | 58.761.758.446,00 |
| IWP 8% | 45.658.433.839,00 | 50.685.610.430,00 |
| IWP 1% | 13.563.739.061,00 | 8.128.675.458,00 |
| Potongan JKK | 2.077.657.371,00 | 1.638.395.005,00 |
| Potongan JKM | 5.462.739.130,00 | 4.908.918.566,00 |
| Iuran JHT Non-ASN | 6.782.551.942,00 | 9.939.540.145,00 |
| **Jumlah** | **375.893.982.146,00** | **371.823.264.458,00** |

### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas

**Tabel 5.5.4.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Pajak Pertambahan Nilai | 117.598.972.454,00 | 93.700.059.524,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 83.836.111.547,00 | 123.233.747.416,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 | 9.490.466.898,00 | 5.281.908.575,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 5.058.473.898,00 | 3.258.306.411,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | - | - |
| Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 | 14.224.419.103,00 | 12.283.918.707,00 |
| Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri | 892.730.476,00 | 2.425.775,00 |
| Potongan BPJS | 71.247.686.427,00 | 58.761.758.446,00 |
| IWP 8% | 45.658.433.839,00 | 50.685.610.430,00 |
| IWP 1% | 13.563.739.061,00 | 8.128.675.458,00 |
| Potongan JKK | 2.077.657.371,00 | 1.638.395.005,00 |
| Potongan JKM | 5.462.739.130,00 | 4.908.918.566,00 |
| Iuran JHT Non-ASN | 6.782.551.942,00 | 9.939.540.145,00 |
| Sisa Dana Kas BOSP yang Dikembalikan ke RKUN | 3.056.472.412,70 | 0,00 |
| **Jumlah** | **378.950.454.558,70** | **371.823.264.458,00** |

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris secara rinci pada ***Lampiran 51.***

### 5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas

**Tabel 5.5.5.1 Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 89.141.607.219,32 | 452.252.268.621,76 |

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.5.5.2 Rincian Arus Kas Bersih dari Keempat Aktivitas Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi | 1.266.649.842.069,55 | 1.198.174.847.155,17 |
| Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi | (930.986.964.349,53) | (502.457.780.445,41) |
| Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan | (243.464.798.088,00) | (243.464.798.088,00) |
| Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris | (3.056.472.412,70) | 0,00 |
| **Jumlah** | **89.141.607.219,32** | **452.252.268.621,76** |

### 5.5.6 Saldo Awal Kas

**Tabel 5.5.6.1 Perbandingan Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023**

| Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---|---|---|
| Saldo Awal Kas | 623.732.459.203,32 | 171.480.190.581,56 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada ***poin 5.2.1*** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.6.2 Rincian Saldo Awal Kas**

| Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---|---|---|
| Kas Di Kas Daerah | 540.047.220.034,96 | 93.261.463.025,33 |
| Kas di BLUD: | | |
| - Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara | 11.384.643.832,20 | 23.106.882.669,81 |
| - Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara | 22.272.848.565,09 | 13.955.324.668,78 |
| - Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali | 11.253.136.977,16 | 9.421.039.081,34 |

| Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---|---|---|
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah | 11.397.444.299,21 | 4.803.618.256,49 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum | 3.776.013.806,69 | 4.820.767.557,36 |
| - Kas di BLUD UPT Bapelkesmas | 2.591.826.952,86 | 2.215.539.343,00 |
| - Kas di BLUD UPT PKSDM | 7.302.650.158,45 | 4.199.692.447,04 |
| - Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan | 5.493.460.321,60 | 3.266.828.045,70 |
| - Kas di BLUD RS Dharma Yadnya | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 4.495.970.420,00 |
| Kas Dana BOS | 5.156.741.842,40 | 7.933.065.066,71 |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 3.056.472.412,70 | 0,00 |
| **Jumlah** | **623.732.459.203,32** | **171.480.190.581,56** |

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 2024 dan Tahun 2023.

### 5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

**Tabel 5.5.7.1 Perbandingan Koreksi SiLPA Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Koreksi SiLPA Tahun Lalu | 0,00 | (3.056.472.412,70) |

Saldo tersebut merupakan Koreksi SiLPA BOSP TA 2019 s.d. TA 2022 yang mengendap di Rekening BOSP Satuan Pendidikan yang pada tahun sebelumnya masih dicatat sebagai SiLPA. Saldo tersebut sudah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

### 5.5.8. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)-Terkait PFK

**Tabel 5.5.8.1 Perbandingan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 0,00 | 3.056.472.412,70 |

Saldo tersebut merupakan pengakuan Utang ke Kas Negara sebesar Koreksi SiLPA BOSP TA 2019 s.d. TA 2022 yang mengendap di Rekening BOSP Satuan Pendidikan. Per 31 Desember 2024, SiLPA tersebut direklasifikasi pada Rekening Kas Lainnya yang sebelumnya dicatat pada Rekening Kas Dana BOSP.

### 5.5.9. Saldo Akhir Kas

**Tabel 5.5.9.1 Perbandingan Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Saldo Akhir Kas | **712.874.066.422,64** | **623.732.459.203,32** |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan rincian kas sebagai berikut:

**Tabel 5.5.9.1 Rincian Saldo Akhir Kas**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Kas di Kas Daerah | 609.165.272.494,47 | 540.047.220.034,96 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 17.321,38 | 0,00 |
| Kas di BLUD: | | |
| - Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara | 11.545.168.915,10 | 11.384.643.832,20 |
| - Kas di BLUD RS Dharma Yadnya | 1.283.073.469,42 | 0,00 |
| - Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara | 30.247.848.716,17 | 22.272.848.565,09 |
| - Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali | 13.459.001.613,50 | 11.253.136.977,16 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah | 15.677.032.611,38 | 11.397.444.299,21 |
| - Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum | 1.417.318.943,87 | 3.776.013.806,69 |
| - Kas di BLUD UPTD BAPELKES | 3.045.880.643,11 | 2.591.826.952,86 |
| - Kas di BLUD UPTD PKSDM | 11.008.641.026,33 | 7.302.650.158,45 |
| - Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan | 8.552.400.887,51 | 5.493.460.321,60 |
| Kas Dana BOSP | 7.472.409.780,40 | 5.156.741.842,40 |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 0,00 | 3.056.472.412,70 |
| **Jumlah** | **712.874.066.422,64** | **623.732.459.203,32** |

Saldo Akhir Kas tersebut telah sesuai (*matching*) dengan saldo yang tercantum dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca, yaitu sebesar Rp712.874.066.422,64, sehingga menunjukkan konsistensi antar laporan keuangan.

Pada Saldo Akhir Kas tersebut terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan aktivitas arus kas pada tahun anggaran berikutnya. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat tersebut telah diungkapkan secara rinci dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

## 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

### 5.6.1 Ekuitas Awal

**Tabel 5.6.1.1 Rincian Ekuitas Awal**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| **Ekuitas Awal** | **17.602.612.654.466,05** | **15.648.183.735.009,10** |

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023.

### 5.6.2 Surplus /(Defisit) LO

**Tabel 5.6.2.1 Rincian Surplus / (Defisit) LO**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| **Surplus /(Defisit) LO** | **4.085.325.080.551,39** | **1.966.768.027.608,74** |

Saldo tersebut di atas merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Bali.

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

**Tabel 5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** | **(26.285.490.954,63)** | **(12.339.108.151,79)** |

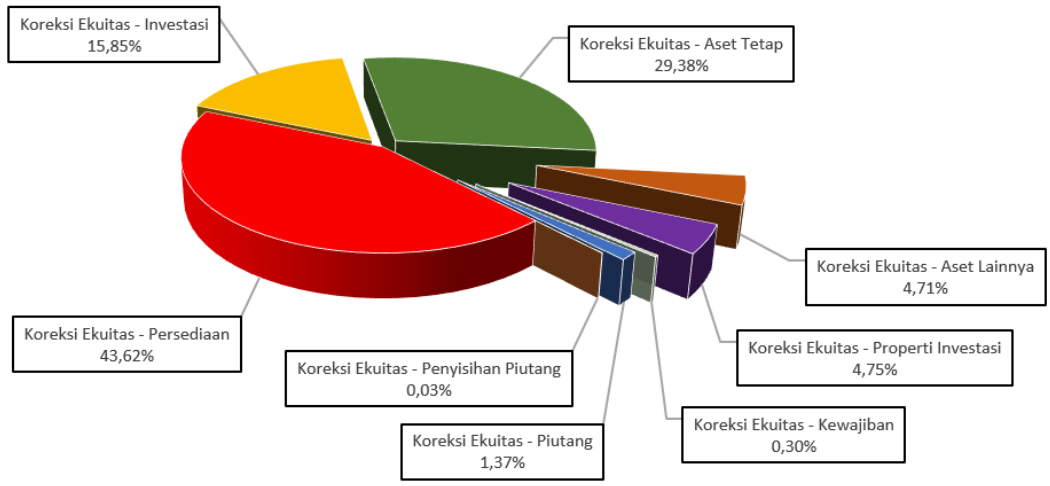
Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.6.3.2 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas | 0,00 | (3.056.472.412,70) |
| Koreksi Ekuitas Persediaan | (40.345.991.347,75) | (5.587.542.695,64) |
| Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | (12.517.851,00) | 2.199.400,00 |
| Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.277.360.883,37 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | (8.193.854,00) |
| Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang | (25.112.690,99) | (10.997,00) |
| Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | (14.661.520.580,50) | (75.000.000.000,00) |
| Koreksi Ekuitas Tanah | 2.455.741.479,00 | 99.574.952.661,03 |
| Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin | 6.119.486.160,99 | 20.811.435.833,00 |
| Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan | 32.109.058.428,00 | 1.912.016.277,41 |
| Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 115.055.000,00 | (78.661.983,06) |
| Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya | 25.043.500,00 | 36.999.999,86 |
| Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (13.652.153.461,01) | (61.655.396.272,39) |
| Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud | (49.300.000,00) | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain | (39.012.000,18) | 2.292.162.120,54 |

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (4.395.162.237,00) | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 127.035.493,03 | (2.521.125.380,50) |
| Koreksi Ekuitas Properti Investasi | 4.393.392.000,00 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka | 2.228.337,87 | (1.113.944.891,03) |
| Koreksi Ekuitas Utang Belanja | 270.877.931,54 | 12.052.674.042,69 |
| Koreksi Ekuitas Utang Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | (200.000,00) |
| **Jumlah** | **(26.285.490.954,63)** | **(12.339.108.151,79)** |

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:




**Gambar 5.17 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2025**

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2025 didominasi oleh Koreksi Ekuitas–Persediaan sebesar 43,62%, yang menunjukkan bahwa penyesuaian terbesar berasal dari pencatatan persediaan. Selanjutnya, Koreksi Ekuitas–Aset Tetap memberikan kontribusi sebesar 29,38%, sedangkan Koreksi Ekuitas–Investasi sebesar 15,85%. Adapun komponen lainnya terdiri atas Koreksi Ekuitas–Properti Investasi sebesar 4,75%, Aset Lainnya sebesar 4,71%, Piutang sebesar 1,37%, Kewajiban sebesar 0,30%, dan Penyisihan Piutang sebesar 0,03%. Dengan demikian, koreksi pada kelompok persediaan, aset tetap, dan investasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dalam LKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

### 5.6.4 Ekuitas Akhir

**Tabel 5.6.4.1 Rincian Ekuitas Akhir**

| Uraian | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| **Ekuitas Akhir** | **21.661.652.244.062,81** | **17.602.612.654.466,05** |

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada catatan atas Neraca pada ***poin 5.2.3.***

# BAB VI
# PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## 6.1. Daftar Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Periode 2020 s.d. 2025

### 1. Sistem *Monitoring* Kemiskinan dan *Stunting* (SiGenting)

**Deskripsi :**

*Dashboard* Kemiskinan dan *Stunting* adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk memonitor data kemiskinan dan *stunting* dengan cara yang terstruktur dan informatif. Aplikasi ini mengumpulkan informasi data agregat dan data detail mengenai *stunting* yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan data keluarga berisiko yang dikelola oleh BKKBN. Data tersebut kemudian ditampilkan secara visual dalam sebuah *dashboard monitoring* yang dapat diakses oleh pimpinan.

Melalui *Dashboard Stunting*, pimpinan dapat melihat gambaran menyeluruh mengenai masalah *stunting* di wilayah yang terkait. Data-data *stunting* yang terkumpul mencakup berbagai aspek, seperti jumlah anak yang teridentifikasi sebagai *stunting*, distribusi geografis, karakteristik keluarga berisiko, dan faktor-faktor risiko yang terkait. Informasi ini membantu pimpinan dalam memahami skala dan lingkup masalah *stunting* yang perlu ditangani.

*Dashboard Stunting* menjadi alat yang sangat berharga dalam membantu pimpinan dalam mengelola program-program kesehatan terkait *stunting*. Dengan informasi yang terstruktur dan terintegrasi, pimpinan dapat melihat gambaran komprehensif, menganalisis data dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang didukung oleh fakta. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan *stunting*, serta mengarahkan sumber daya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

**Akses :**

- Website : https://sigenting.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/1988

### 2. Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA)

**Deskripsi :**

SiGapura merupakan sebuah aplikasi yang didesain untuk mempermudah dan mempercepat penyajian informasi terkait harga dan neraca pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Bali, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Aplikasi ini memiliki fitur peng-*input*-an data harian dan mingguan yang terkait dengan harga pangan utama strategis dan neraca pangan.

Aplikasi SiGapura Provinsi Bali menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang harga pangan utama strategis, yang berasal dari berbagai pasar tradisional dan modern di seluruh kecamatan, kabupaten, dan kota di Bali. Dengan demikian, pengguna aplikasi dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini tentang harga bahan makanan yang strategis dan penting dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi neraca pangan yang memberikan gambaran tentang kebutuhan dan ketersediaan pangan di setiap kabupaten dan kota. Informasi ini penting untuk memonitor dan mengendalikan pasokan pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan pangan di wilayah Provinsi Bali.

Dengan kehadiran aplikasi SiGapura Provinsi Bali, para pengguna, termasuk masyarakat umum, petani, pedagang, dan pihak berkepentingan lainnya, dapat mengakses informasi harga pangan dan neraca pangan dengan cepat dan efisien. Hal ini akan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian inflasi, serta memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi di seluruh wilayah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://sigapura.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/777

**3. Sistem Perizinan Elektronik (PRESTISE)**

**Deskripsi :**

Aplikasi "Prestise" merupakan solusi inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan menggunakan Prestise, proses pengajuan izin dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui *platform online*. Keunggulan mengurus perizinan menggunakan layanan Prestise ini mencakup beberapa fitur unggulan, antara lain:

- Pengajuan Permohonan Izin Secara *Online* : Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin dengan mudah melalui aplikasi ini. Tidak perlu lagi mengurus izin secara konvensional yang memakan waktu dan tenaga.
- Pemantauan Proses Izin Secara *Realtime* : Dengan Prestise, masyarakat dapat memantau proses pengajuan izin secara *realtime*. Mereka akan mendapatkan informasi terkini tentang status dan perkembangan izin yang diajukan.
- Verifikasi Berkas oleh Petugas Secara *Online:* Proses verifikasi berkas dilakukan secara *online* oleh petugas yang berwenang. Hal ini mempercepat proses izin dan menghindari kebingungan atau keterlambatan yang mungkin terjadi.
- Fitur Notifikasi Proses Izin Melalui Email : Prestise juga menyediakan fitur notifikasi melalui email. Masyarakat akan menerima pemberitahuan mengenai perkembangan izin mereka, sehingga mereka tetap terinformasi dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
- Izin Terbit Secara Online Menggunakan Tanda Tangan Elektronik: Izin yang diterbitkan melalui Prestise memiliki keabsahan resmi dan telah ditandatangani secara elektronik. Dengan fitur ini, masyarakat tidak perlu datang ke DPMPTSP Provinsi Bali hanya untuk mengambil izin yang sudah terbit. Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memastikan validitas dan keaslian dokumen elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Dengan adanya aplikasi Prestise, masyarakat Provinsi Bali dapat mengajukan izin dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Proses pengurusan izin yang transparan dan terintegrasi secara *online* memberikan kenyamanan dan kepraktisan bagi masyarakat. Inovasi ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap izin-izin yang diperlukan.

**Akses :**

- Website : https://prestise.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/663

**4. Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana (PIKBS)**

**Deskripsi :**

Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana merupakan sebuah sistem untuk mendata dan mempublikasi terkait dengan data potensial proyek, data potensial asset, data UMKM, Data Desa Wisata, Data Pariwisata Bali, Data Realisasi Investasi, Data Peraturan Investasi dan Berika serta Event Terkait dengan Investasi di Bali. Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk mewujudkan data yang berkualitas.

**Akses :**

- Website : https://invest.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/1625

**5. Sistem Informasi, Pendataan dan Penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing (LOVE BALI)**

**Deskripsi :**

Love Bali merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam melakukan pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing dengan cepat dan efisien, dengan dukungan berbagai metode pembayaran yang memungkinkan pembayaran dalam mata uang asing. Love Bali terdiri dari aplikasi Love Bali berbasis *Website*, Love Bali Mobile (Android & iOS), Love Bali Endpoint berbasis *Website*, serta *Dashboard* admin.

Melalui Love Bali, wisatawan asing dapat memberikan kontribusi mereka dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan pariwisata Bali. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai informasi terkait destinasi wisata (DTW), *event* terbaru, serta berita dan artikel seputar alam dan budaya Bali. Sistem ini juga memberikan informasi yang relevan mengenai kepariwisataan di Bali. Dengan Love Bali, wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi dan memahami keindahan dan keunikan Bali, serta berkontribusi dalam melestarikan dan mempromosikan destinasi wisata di pulau Bali.

Sepanjang tahun 2025, Sistem Love Bali terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat ekosistem digital pariwisata Bali. Pengembangan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan keakuratan data wisatawan, memperluas kanal pembayaran, memperkaya informasi publik, serta memberikan pengalaman digital yang lebih interaktif. Berikut penjelasan dari sejumlah fitur yang dikembangkan pada tahun 2025:

a) Pemisahan *Field Full Name*
   *Field Full Name* kini dipisah menjadi *First/Given Names* dan *Last Name (Surname)* untuk mengikuti standar global penulisan nama wisatawan. Langkah ini meminimalkan potensi kesalahan urutan nama, terutama pada wisatawan mancanegara dengan format nama berbeda.
b) *Country Code* (Kode Kewarganegaraan)
   Penambahan *Country Code* berfungsi sebagai parameter unik dalam membedakan wisatawan antarnegara. Fitur ini penting karena nomor paspor antarnegara bisa sama, sehingga kombinasi passport number dan country code menghasilkan identitas wisatawan yang lebih akurat.
c) *Section Money Changer*
   Menyediakan informasi resmi mengenai *authorized money changer* di Bali. Fitur ini membantu wisatawan menemukan tempat penukaran valuta asing yang terpercaya dan terverifikasi.
d) Love Bali *Partner Platform*
   Sebuah platform integrasi bagi perusahaan atau pihak ketiga yang ingin bekerja sama dengan Love Bali. Melalui platform ini, mitra dapat menghubungkan sistem mereka untuk kebutuhan pembayaran PWA, pengecekan *Levy Voucher*, atau distribusi *voucher* dan promo khusus bagi wisatawan.
e) Mekanisme *Auto Void*
   Mencegah terjadinya double payment atau pembayaran ganda oleh wisatawan asing. Sistem akan otomatis membatalkan transaksi jika ditemukan indikasi duplikasi.
f) *Virtual Destination Tour 360*
   Menyajikan tampilan interaktif lokasi wisata di Bali menggunakan teknologi AR/VR 360°. Fitur ini memberikan gambaran visual yang menarik bagi wisatawan sebelum berkunjung langsung.
g) *New Engine Levy Voucher Generator*
   Pengembangan *engine* baru untuk mempercepat dan menstabilkan proses pembuatan *Levy Voucher*. Dengan optimasi ini, kinerja sistem menjadi lebih efisien dan handal terutama saat volume transaksi tinggi.
h) Penambahan *Channel* Pembayaran *UnionPay*

Memperluas metode pembayaran resmi dengan dukungan kartu *UnionPay,* memudahkan wisatawan dari Tiongkok dan negara lain dengan jaringan *UnionPay.*

i) Integrasi dengan *Collecting Agent PayChat*
Menyediakan alternatif pembayaran PWA melalui *WhatsApp chat* lewat agen kolektor *PayChat.* Inovasi ini menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah dan familiar bagi wisatawan.

j) Fitur *Verify Levy Voucher*
Digunakan untuk memverifikasi keaslian *Levy Voucher* milik wisatawan. Fitur ini memastikan voucher yang digunakan benar-benar resmi dan dikeluarkan dari sistem Love Bali.

k) Fitur *Resend Levy Voucher*
Memungkinkan sistem mengirim ulang *Levy Voucher* ke email wisatawan, berguna bila terdapat kesalahan dalam pengisian alamat email saat pendaftaran.

l) Fitur *Login* dan Riwayat *Voucher*
Menyediakan akses bagi wisatawan untuk masuk *(login)* dan melihat riwayat *Levy Voucher* yang sudah pernah dibeli atau digunakan sebelumnya.

m) Perjanjian Kerja Sama Elektronik oleh *Endpoint*
Memfasilitasi proses penandatanganan dan pengelolaan perjanjian kerja sama secara digital oleh *Endpoint,* mempercepat proses administrasi tanpa perlu dokumen fisik.

n) Pembayaran Imbal Jasa kepada *Endpoint* dan Mitra Manfaat
Menyediakan mekanisme sistematis dan transparan untuk pembayaran imbal jasa kepada para *Endpoint* dan Mitra Manfaat yang berkontribusi dalam ekosistem Love Bali.

**Akses :**

- Website : https://lovebali.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/lovebali-playstore
- App Store : https://balikom.info/lovebali-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/608

**6. Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT)**

**Deskripsi :**

Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) adalah sebuah sistem tata kelola keuangan yang diterapkan di Desa Adat, yang mencakup pengelolaan alokasi keuangan dari pemerintah Provinsi Bali, pendapatan asli Desa Adat, serta sumber pendapatan lain yang sah. SIKUAT dirancang untuk mengelola dan mengawasi keuangan Desa Adat dengan efektif dan transparan.

Salah satu komponen utama dari SIKUAT adalah manajemen perencanaan anggaran tahunan. Setiap tahun, rancangan anggaran disusun terlebih dahulu oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA). Rancangan tersebut mencakup alokasi dana yang akan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan di Desa Adat.

Selanjutnya, rancangan anggaran dan belanja diajukan sesuai dengan penetapan dari Dinas PMA. Setelah persetujuan, pencatatan realisasi keuangan dilakukan dengan seksama. Hal ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta pembukuan yang akurat dan terperinci.

SIKUAT juga melibatkan proses rekapitulasi dan pelaporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan Desa Adat, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan saldo yang tersedia. Laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dan sebagai alat pemantauan bagi pihak terkait.

Dengan adanya Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT), diharapkan pengelolaan keuangan di Desa Adat menjadi lebih teratur dan akuntabel. SIKUAT memastikan bahwa alokasi keuangan yang diterima digunakan dengan tepat sasaran dan diarahkan untuk memajukan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa Adat. Dengan manajemen keuangan yang baik, Desa Adat dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan pemeliharaan nilai-nilai budaya yang kaya.

**Akses :**

- Website : https://sikuat.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/775

**7. Kantor Virtual**

**Deskripsi :**

Merupakan sebuah sistem yang memungkinkan seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, untuk melakukan berbagai aktivitas terkait surat-menyurat dan tugas melalui platform digital. Dalam sistem ini, pegawai dapat mengajukan draf surat kepada pimpinan, menerima disposisi dari pimpinan, melaporkan penugasan, serta mengakses agenda elektronik pegawai dan Unit PD. Sistem juga terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah, Ka. UPTD, dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di seluruh Bali. Dengan *tagline* "Pasti Bisa Kerja", Kantor Virtual memperluas cakupan *e-office* ke seluruh pegawai, dari tingkat staf hingga pimpinan, dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara sistematis, fleksibel, dan kapan saja, dimanapun mereka berada.

**Akses :**

- Website : https://kanal.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/kanal-playstore
- App Store : https://balikom.info/kanal-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2058

**8. Kantor Virtual Publik**

**Deskripsi :**

Masyarakat umum dan instansi publik di luar Pemerintah Provinsi Bali kini dapat melakukan korespondensi dan memantau status surat secara *online* kepada Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya sistem ini, tidak perlu lagi mengirimkan surat fisik atau menghubungi langsung Kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menanyakan status surat.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan surat secara elektronik dan melacak prosesnya secara *realtime*. Pengguna dapat mengisi formulir elektronik, mengunggah dokumen pendukung, dan mengirimkannya melalui *platform* yang disediakan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat status surat mereka, mulai dari proses verifikasi hingga persetujuan akhir.

Dengan adanya sistem ini, interaksi antara masyarakat umum/instansi publik dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih efisien dan transparan. Surat-surat dapat diproses dengan cepat dan secara *online*, menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengirimkan surat secara fisik.

**Akses :**

- Website : https://kanal.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2058

**9. Sistem Layanan Kepegawaian (SIMPEG)**

**Deskripsi :**

Merupakan sistem informasi kepegawaian yang dirancang untuk melakukan pendataan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sistem ini merupakan satu kesatuan yang mencakup pengumpulan dan pengelolaan dokumen elektronik pegawai, seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, pelatihan, kinerja, dan lainnya. Melalui SIMPEG, proses pendataan pegawai

menjadi lebih efisien dan terstruktur, memungkinkan instansi pemerintah untuk mengakses informasi pegawai dengan mudah dan akurat. Dengan adanya SIMPEG, diharapkan dapat tercipta pengelolaan kepegawaian yang lebih terintegrasi, transparan, dan efektif dalam mendukung kebutuhan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://simpeg.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/771

**10. Sistem Absensi berbasis Pengenalan Wajah dan Lokasi**

**Deskripsi :**

Sistem Absensi adalah sebuah platform yang memungkinkan pegawai, termasuk ASN dan Non-ASN di lingkungan Provinsi Bali, untuk melakukan absensi berdasarkan jadwal dinamis yang telah ditentukan. Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah dan juga memungkinkan penentuan radius lokasi khusus untuk setiap pegawai. Selain itu, sistem absensi ini dilengkapi dengan fitur popup yang dapat menampilkan pengumuman penting atau informasi lainnya saat aplikasi dibuka. Dengan menggunakan sistem absensi ini, pegawai dapat secara efisien mencatat kehadiran mereka dan memperoleh informasi terkait dengan mudah.

**Akses :**

- Website : https://hadir-app.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore
- App Store : https://balikom.info/hadir-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/776

**11. Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online (SIKEPO)**

**Deskripsi :**

SIKEPO (Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online) adalah sebuah sistem yang memungkinkan peng-*input*-an dan pemantauan capaian kinerja pegawai secara *online* setiap bulannya. Sistem ini juga menjadi dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan menggunakan SIKEPO, proses pengukuran dan evaluasi kinerja pegawai menjadi lebih efisien dan transparan, serta memudahkan dalam penghitungan TPP sesuai dengan capaian kinerja yang dicapai.

**Akses :**

- Website : https://sikepo.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Strore : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**12. Sistem Antrean Layanan Publik**

**Deskripsi :**

Dalam rangka memenuhi ketentuan PERDA No 6 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan SIK-KBS sebagai sistem informasi yang memberikan akses mudah bagi Krama Bali dan Faskes (Fasilitas Kesehatan) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. SIK-KBS memberikan informasi mengenai lokasi Faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di Faskes, pendaftaran pasien, ketersediaan tempat tidur rawat inap di Faskes, serta riwayat kesehatan Krama Bali. SIK-KBS merupakan Misi Ketiga dari Gubernur Bali dalam percepatan pengembangan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis aplikasi di seluruh Bali.

Untuk mendukung fitur pendaftaran *online* pada setiap Faskes di Bali dan memenuhi kebutuhan SIK-KBS, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali telah merancang dan membangun aplikasi antrean. Aplikasi antrean ini telah terintegrasi dengan sistem BPJS untuk mencari data pasien BPJS, serta terhubung dengan riwayat kesehatan individu pada sistem Mobile JKN BPJS Kesehatan. Saat ini, Aplikasi antrean yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali telah digunakan di Faskes di 9 Kabupaten/Kota di seluruh Bali.

**Akses :**

- Website : https://antrean.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/antrean-playstore
- App Store : https://balikom.info/antrean-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/770

**13. Bali Media Centre (BMC) : Portal Berita, Survei, Konsultasi/HelpDesk, Kontak dan Informasi Publik lainnya**

**Deskripsi :**

BMC (Bali Media Center) adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tujuan utama BMC adalah menyediakan akses berita yang terpercaya serta berfungsi sebagai *helpdesk* atau media konsultasi bagi pengguna layanan dan masyarakat umum. Dengan menggunakan BMC, pengguna dapat menyampaikan pengaduan mereka dengan mudah dan efisien.

Salah satu fitur yang tersedia di aplikasi BMC adalah kemampuan untuk melakukan *survey*. Fitur ini memfasilitasi pelaksanaan *survey* yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali secara mandiri, tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dengan adanya fitur ini, pemerintah dapat mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, serta melakukan analisis data yang lebih terperinci.

BMC memberikan kemudahan akses kepada pengguna dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah dipahami. Selain itu, BMC juga menyediakan berita terkini yang berkaitan dengan pemerintahan dan perkembangan di Provinsi Bali. Dengan adanya BMC, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan aplikasi BMC, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dalam hal komunikasi dengan pemerintah, pelaporan pengaduan, serta berpartisipasi dalam *survey* yang penting bagi pembangunan di Provinsi Bali. Dengan terus mengembangkan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendukung kemajuan dan transparansi pemerintahan.

**Akses :**

- Website : https://bmc.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/bmc-playstore
- App Store : https://balikom.info/bmc-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**14. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)**

**Deskripsi :**

SISNAKER PROVINSI BALI merupakan Layanan Ketenagakerjaan yang diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dimana terdapat beberapa layanan ketenagakerjaan yaitu :

1. Layanan Pendataan PMI Krama Bali : Layanan yang digunakan untuk melakukan pendataan sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) Krama Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

2. Layanan Rekomendasi Pemagangan Luar Negeri (SiKomang Luri) adalah Layanan yang digunakan untuk pembuatan Rekomendasi Pemagangan Ke Luar Negeri dan Perpanjangan Rekomendasi Pemagangan Luar Negeri yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri ini digunakan sebagai salah satu syarat Lembaga Pelatihan Kerja untuk bisa mendapatkan izin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar dapat menyalurkan siswa magang ke luar negeri. Layanan Rekomendasi Pemagangan Luar Negeri, tidak hanya sebatas layanan untuk permohonan rekomendasi baru dan atau perpanjangan rekomendasi pemagangan luar negeri untuk LPKS, akan tetapi output dari Layanan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi LPKS yang memiliki izin untuk melaksanakan magang di luar negeri, sehingga dapat mengurangi kasus penipuan oknum LPKS yang menjanjikan dapat memberangkatkan siswa/peserta didik untuk magang ke luar negeri tetapi tidak kunjung diberangkatkan karena oknum LPKS tersebut bodong tidak memiliki izin.
3. Layanan Pendaftaran Diklat : Layanan yang digunakan untuk memberikan informasi ketersediaan Pelatihan Kerja, dan pendaftaraan serta seleksi calon peserta diklat secara online. Pada Layanan ini, masyarakat umum dapat melihat pelatihan kerja/diklat yang tersedia, serta semua tahapan seleksi baik dari tahapan seleksi Administrasi, Seleksi Pengetahuan Dasar by CAT, dan Seleksi Wawancara dilakukan secara online.

**Akses :**

- Website : https://sisnaker.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/662

**15. Sistem Pelayanan Perikanan (SIMPELKAN)**

**Deskripsi :**

Pengembangan sistem pelayanan publik digital tentu memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat perikanan pada khususnya. Keuntungan bagi pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan akuntabel. Produktivitas pekerja juga akan meningkat. Pelayanan publik digital juga menjadi media promosi pemerintah yang tepat terutama untuk mensosialisasikan kinerja dan program pemerintah. Kepuasan masyarakat yang meningkat atas kinerja pelayanan publik yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bagi masyarakat perikanan, pelayanan publik digital akan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam pengaplikasiannya, pelayanan publik digital akan melahirkan mekanisme layanan dengan kemudahan proses dan ketelusuran. Jangkauan pengguna juga akan semakin besar. Proses transaksi atau pengurusan akan berjalan lebih cepat, dapat diakses dari mana saja dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan beralih ke sistem pelayanan berbasis digital maka seluruh rangkaian proses pelayanan publik akan berjalan dengan lebih lancar.

Sistem layanan SIMPELKAN ini meliputi 6 ruang lingkup layanan, diantaranya layanan pengurusan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP), Surat Tanda Keterangan Andon (STKA), Surat Keterangan Asal (SKA) Produk Kelautan dan Perikanan, Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI Produk Perikanan dan Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI pada Produk Perikanan. Dalam sistem yang diusulkan, akan ada 3 (tiga) entitas yang saling berhubungan, diantaranya Pemohon/*End User*, Administrator dan *Approver*. Pemohon akan diberikan fasilitas informasi layanan dan penelusuran untuk memudahkan dalam memantau permohonan. Baik Administrator maupun *Approver* akan juga diberikan *single access* untuk melakukan verifikasi permohonan dan memberikan persetujuan.

**Akses :**

- Website : https://simpelkan.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/773

**16. Layanan Bali Digital Festival**

**Deskripsi :**

Layanan *Website* Bali Digital Festival telah dirancang sebagai *platform* yang menyediakan informasi lengkap seputar penyelenggaraan Bali Digital Festival. Melalui *website* ini, pengunjung dapat menemukan informasi umum, jadwal kegiatan, daftar acara, profil pembicara, serta informasi terkait lomba dan hal-hal lainnya yang terkait dengan festival ini.

Selain sebagai sumber informasi, *website* ini juga menyediakan fasilitas pendaftaran untuk peserta lomba/kompetisi, pameran, serta *tenant* kuliner. Khusus untuk acara *pre-event* di tahun 2023, terdapat pendaftaran khusus untuk *campus roadshow*. Semua proses pendaftaran dan seleksi peserta Bali Digital Festival dapat dilakukan melalui fitur yang terintegrasi dalam menu admin.

Dengan adanya fitur kurasi dalam menu admin, semua kebutuhan terkait informasi, registrasi, dan seleksi peserta dapat dilakukan secara efisien dan terpusat dalam satu layanan. Hal ini memberikan kemudahan bagi panitia dalam mengelola peserta dan memastikan proses festival berjalan dengan lancar.

*Website* Bali Digital Festival hadir sebagai sarana komunikasi yang efektif antara panitia dan peserta, serta untuk memperluas jangkauan festival ini kepada masyarakat luas. Dengan desain yang *user-friendly* dan informasi yang lengkap, *website* ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman *online* yang memudahkan, menyenangkan, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam Bali Digital Festival.

**Akses :**

- Website : https://digifest.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2218

**17. Sistem Penyelenggaraan Event (EVENTID) : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik**

**Deskripsi :**

EventID adalah layanan inovatif yang memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengelola berbagai acara atau *event*. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan *user-friendly*, sistem ini menyediakan solusi yang efisien dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan acara dengan lancar.

Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah untuk membuat *event* atau acara dengan mudah serta fitur manajemen *event*. Pengguna dapat dengan cepat membuat deskripsi acara, menentukan tanggal, waktu, dan lokasi, serta menyertakan informasi detail seperti jadwal kegiatan. Dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat dengan cepat memasukkan semua detail yang diperlukan untuk acara mereka.

Sistem Pengelolaan Event juga menyediakan fitur registrasi peserta acara yang mudah digunakan. Peserta dapat mendaftar secara *online* dan mengisi formulir pendaftaran. Informasi peserta dapat dengan mudah diakses dan dikelola oleh panitia melalui sistem ini.

Selain itu, sistem ini juga mencakup fitur untuk mengisi daftar hadir dengan mudah. Panitia acara dapat menggunakan sistem ini untuk mencatat kehadiran peserta secara digital, menghemat waktu dan usaha yang diperlukan dalam proses administrasi.

Terakhir, sistem pengelolaan *event* ini juga menawarkan fitur sertifikat elektronik. Setelah acara selesai, peserta yang memenuhi syarat dapat secara otomatis menerima sertifikat elektronik yang dihasilkan melalui sistem. Hal ini memberikan kepraktisan dan efisiensi dalam proses penerbitan sertifikat.

Dengan layanan "EventID", pengguna dapat merencanakan, mengelola, dan melaksanakan acara dengan lebih terstruktur dan efisien. Fitur-fitur yang ada mempermudah proses pengorganisasian acara, mulai dari pembuatan *event*, manajemen acara, registrasi peserta, hingga pengelolaan daftar hadir dan sertifikat elektronik. Dengan platform ini, pengguna dapat fokus pada pengalaman yang tak terlupakan bagi peserta acara mereka.

**Akses :**

- Website : https://undangan.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/undangan-playstore
- App Store : https://balikom.info/undangan-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2217

**18. *Virtual Reality* (VR) Pura Pulaki**

**Deskripsi :**

Merupakan sebuah aplikasi *virtual reality* yang memberikan pengalaman unik dalam mengunjungi Pura Pulaki di Bali. Dengan menggunakan teknologi 3 dimensi, pengguna dapat menjelajahi dan mengunjungi Pura Pulaki secara virtual. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk merasakan suasana dan keindahan Pura Pulaki dengan detail yang mendalam, seperti melihat arsitektur dan ornamen-ornamen pura secara nyata, mendengar suara-suara lingkungan sekitar, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungan virtual tersebut. VR Pulaki menghadirkan sensasi baru dalam menjelajahi dan menghargai keindahan Pura Pulaki, serta memberikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi tempat tersebut secara fisik.

**Akses :**

- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Oculus Store : https://www.meta.com/experiences/pura-pulaki/8520498937982721/

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

**19. *Virtual Reality* (VR) Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll**

**Deskripsi :**

Merupakan sebuah aplikasi yang memberikan pengalaman baru dalam bermain Gamelan Bali Khususnya Rindik Bali, Kecek dan beberapa gamelan lainnya dalam bentuk tiga dimensi. Dengan menggunakan teknologi *virtual reality*, pengguna dapat merasakan sensasi bermain alat musik tradisional secara virtual. Aplikasi ini menghadirkan lingkungan virtual yang menampilkan gambar dan suara yang realistis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan instrumen Rindik dan gamelan lainnya, mengatur irama dan nada, serta mengeksplorasi variasi bunyi yang dihasilkan. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk merasakan keindahan musik Rindik Bali serta gamelan lainnya secara mendalam, bahkan jika mereka tidak memiliki akses langsung ke instrumen fisiknya.

**Akses :**

- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Oculus Store : https://www.meta.com/experiences/pcvr/5882878995056622/

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

**20. *Virtual Reality* (VR) Nyomia Bhutakala**

**Deskripsi :**

Merupakan sebuah *game* VR yang menggabungkan konsep *beat* dan budaya Bali. Dalam *game* ini, pemain akan memasuki dunia virtual yang dipenuhi dengan Bhutakala dan elemen budaya Bali lainnya. Tujuan utama *game* ini adalah untuk mengendalikan bhutakala, entitas spiritual dalam kepercayaan Bali, yang terdapat dalam diri pemain. Pemain akan menggunakan *kontroler* VR sebagai senjata untuk "Nyomia Bhutakala" dan melawan kekuatan jahat yang mewakili bhutakala. Setiap gerakan dan serangan harus dilakukan dengan tepat

mengikuti irama musik yang dimainkan, sehingga menguji ketepatan dan keterampilan pemain dalam mengikuti *beat*. Dengan konsep yang unik dan pengalaman virtual yang mendalam, VR Nyomia Bhutakala memberikan sensasi bermain yang menghibur sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Bali kepada pemain.

**Akses :**
- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Oculus Store : https://www.meta.com/experiences/pcvr/5882878995056622/

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

**21. *Virtual Tour 360 Experience***

**Deskripsi :**

*Website* pameran 360 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebuah platform interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi keindahan dan keberagaman Bali dalam tampilan 360 derajat. Dengan menggabungkan teknologi fotografi panorama dan pengalaman virtual *reality*, *website* ini menawarkan pengalaman mendalam bagi pengguna untuk menjelajahi pameran penuh warna yang mencakup keajaiban alam, budaya, seni, dan kehidupan sehari-hari di Bali.

Dari pantai pasir putih yang indah hingga pura-pura yang megah, *website* ini menghadirkan pandangan menyeluruh tentang kekayaan dan pesona pulau ini kepada pengunjung dari seluruh dunia. Dengan navigasi yang intuitif dan antarmuka yang menarik, pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi berbagai pameran, memperbesar gambar, dan merasakan sensasi berada di tempat-tempat tersebut. *Website* pameran 360 Pemerintah Provinsi Bali adalah jendela digital yang menakjubkan ke dalam keindahan dan keajaiban Bali, memperluas daya tarik pulau ini melalui pengalaman *online* yang menarik dan *imersif*.

**Akses :**
- Website : https://virtualtour360.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2199

**22. *Augmented Reality* (AR) Daerah Tujuan Wisata**

**Deskripsi :**

AR DTW merupakan aplikasi berbasis *Augmented Reality* yang dapat menampilkan informasi seputar DTW yang ada di Bali. Selain itu juga dapat menampilkan *event-event* penting di Bali, seperti festival, konser, atau acara budaya lainnya. Dengan menggunakan teknologi AR, pengguna dapat melihat informasi lengkap seputar daerah tujuan wisata tersebut, termasuk penjelasan/deskripsi, jadwal dan lokasi.

**Akses :**
- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

**23. *Augmented Reality* (AR) Instagram Filter Bali Era Baru**

**Deskripsi :**

Merupakan kumpulan filter Instagram yang terintegrasi dengan mengangkat tema kebudayaan Bali dan program pembangunan pemerintah yang sedang berlangsung. AR ini menawarkan pengalaman visual yang unik dan menyenangkan bagi para pengguna media sosial. Setiap filter dalam AR ini memberikan pengguna kesempatan untuk merasakan keindahan dan keunikan budaya Bali secara langsung melalui *platform* Instagram. Setiap filter dirancang dengan cermat untuk mencerminkan nuansa dan estetika Bali yang khas. Pengguna dapat memilih *filter*

yang sesuai dengan preferensi mereka dan dengan mudah mengaplikasikannya pada foto-foto atau video mereka.

**Akses :**

- Website : https://var.baliprov.go.id/link-tree
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**24. Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali**

**Deskripsi :**

Portal Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Bali atau Bali Satu Data merupakan layanan tata kelola data di Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, terintegrasi dan dapat dibagi pakaikan antar Instansi di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali. Kebijakan ini tertuang dalam Pergub Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Melalui SDI Provinsi Bali, seluruh data Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali (https://balisatudata.baliprov.go.id). Selanjutnya, terintegrasi ke tingkat Nasional dengan Satu Data Indonesia (https://data.go.id/).

Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dikelola oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

Aplikasi Bali Satu Data ini, kini telah digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selain data yang di-*input* secara manual, data yang disajikan pada Aplikasi Bali Satu Data menggunakan data yang diintegrasikan oleh beberapa Aplikasi yang sudah terintegrasi.

**Akses :**

- Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore
- App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2057

**25. *Smart Dashboard***

**Deskripsi :**

Merupakan pengembangan dari Sistem Bali Satu Data yang sudah ada sebelumnya yang dirancang khusus untuk para pimpinan di lingkungan Provinsi Bali. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan satu titik akses terpadu ke semua *dashboard* aplikasi yang ada di Provinsi Bali, serta menyoroti *dashboard* yang terkait dengan isu-isu terkini.

Dengan adanya *Dashboard Monitoring* Pimpinan, para pimpinan di Provinsi Bali dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data dari berbagai sumber melalui satu aplikasi yang terpadu dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan informasi yang terkini dan akurat.

**Akses :**

- Website : https://smart.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2204

**26. Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota**

**Deskripsi :**

Merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengakomodir proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan diseminasi data statistik sektoral beserta metadata indikatornya. Fitur tersebut membantu Walidata untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pergub Bali No. 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Data yang dikelola pun sesuai dengan Prinsip SDI, yaitu : memiliki kode referensi, dilengkapi dengan standar data, disertai metadata, dan memenuhi sifat interoperabilitas. Data yang dikelola di sistem ini disajikan dalam tabulasi yang bersifat fleksibel. Beragam jenis format tabel dapat disajikan di dalam sistem sesuai dengan kebutuhan produsen data.

Setiap produsen data memiliki satu orang perwakilan yang menjadi Operator untuk meng-*input* datanya di sistem. Walidata memberikan akses kepada Operator untuk dapat mengakses data yang ada di instansinya.

Sistem ini juga memfasilitasi Walidata untuk memeriksa dan memvalidasi data dan *metadata* yang telah ter-*input* oleh Operator. Selanjutnya data dan metadata yang telah valid di-*publish* ke Portal Bali Satu Data dengan API.

**Akses :**

- Website : https://datasektoral.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**27. Sistem Pengelolaan Data (CERAKEN) Kebudayaan Bali**

**Deskripsi :**

Ceraken Kebudayaan Bali adalah sistem pengelolaan dan pangkalan data kebudayaan Bali yang terintegrasi secara digital. Sistem ini bertujuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya yang ada di Provinsi Bali dengan melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data kebudayaan Bali, sehingga tercipta pangkalan data yang komprehensif dan terkini mengenai kebudayaan Bali. Dengan adanya Ceraken Kebudayaan Bali, diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan pengelolaan kebudayaan Bali, serta mendukung upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang kaya di Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://ceraken.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/772

**28. Bali *Knowledge Based System* (INSIGHT)**

**Deskripsi :**

Merupakan sebuah sistem *knowledge based system* yang didesain untuk mempermudah mendapatkan informasi yang saat ini sumber informasi pada aplikasi INSIGHT berasal dari surat dan dokumen pada aplikasi yang sudah berjalan pada lingkungan pemerintahan provinsi bali

Selain menjadi sumber informasi , INSIGHT juga menjadi layanan *cloud storage* untuk pegawai pemerintahan provinsi bali yang dimana setiap *user* akan mendapatkan kapasitas *storage* sebesar 2gb per *user* dan bisa di-*upgrade* nantinya.

Dengan menggunakan *design knowledge based*, ini dapat memudahkan *user* untuk mencari dokumen karena bisa mencari dokumen berdasarkan isi dari dokumen tersebut yang sudah di *extract* dengan teknologi OCR.

**Akses :**

- Website : https://insight.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**29. Sistem *Single Sign On* (SSO)**

**Deskripsi :**

SSO (*Single Sign On*) adalah sistem *login* terintegrasi yang menghubungkan berbagai aplikasi yang digunakan di lingkup pemerintah Provinsi Bali menjadi satu login. Dengan SSO, pengguna hanya perlu mengingat satu *login* untuk dapat mengakses semua aplikasi yang sesuai dengan kewenangannya.

Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan aplikasi di lingkup pemerintah Provinsi Bali. Sebelum adanya SSO, pengguna mungkin harus mengingat *login* yang berbeda untuk setiap aplikasi yang digunakan. Namun, dengan SSO, pengguna hanya perlu melakukan *login* sekali dan dapat mengakses semua aplikasi yang terhubung dengan sistem ini.

Selain kemudahan, SSO juga meningkatkan keamanan. Dengan adanya satu login tunggal, pengguna dapat lebih mudah mengelola akses dan izin penggunaan aplikasi. Hal ini membantu mengurangi risiko keamanan seperti kehilangan atau penyalahgunaan informasi *login*.

SSO juga mempercepat proses kerja di lingkup pemerintah Provinsi Bali. Dengan *login* yang cepat dan mudah, pengguna dapat mengakses aplikasi yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya SSO, Pemerintah Provinsi Bali menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi dan efisien dalam penggunaan aplikasi. Sistem ini merupakan solusi yang inovatif dan memberikan nilai tambah dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://sso.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2194

**30. Sistem Manajemen Talenta (SIMATA)**

**Deskripsi :**

SIMATA (Sistem Manajemen Talenta) merupakan sebuah sistem yang menjadi landasan dalam pencarian dan pengelolaan talenta di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam filosofi SIMATA, sistem ini diibaratkan sebagai "mata" yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melihat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Bali. Melalui SIMATA, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menempatkan talenta-talenta yang potensial pada jabatan strategis, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

SIMATA memiliki peran penting dalam proses pencarian dan penempatan talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan menggunakan sistem ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat secara efektif dan efisien melihat dan menganalisis profil serta potensi para ASN. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, SIMATA membantu dalam mengidentifikasi talenta-talenta yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mengisi posisi-strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan adanya SIMATA, diharapkan terwujudnya sinergi antara kebutuhan organisasi dan potensi individu, sehingga dapat menciptakan struktur organisasi yang kuat dan berkinerja tinggi. Melalui pengelolaan talenta yang baik, Pemerintah Provinsi Bali dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi

secara optimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. SIMATA menjadi alat yang efektif dalam mengelola talenta-talenta yang ada, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk memajukan Pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**
- Website : https://simata.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**31. Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali**

**Deskripsi :**

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Pemerintahan Provinsi Bali adalah sebuah solusi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pemerintahan Provinsi Bali dalam mengelola dan melacak aset-aset yang dimiliki. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengelolaan aset-aset pemerintah, termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Lainnya.

**Akses :**
- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/aset-playstore
- App Store : https://balikom.info/aset-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

**Deskripsi :**

E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan sebuah sistem elektronik yang dirancang khusus untuk membantu instansi pemerintah dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dengan adanya E-SAKIP, diharapkan bahwa instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Melalui sistem yang terintegrasi ini, pengguna dapat memantau progres kinerja, mengevaluasi capaian hasil, dan melaporkan kinerja dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, E-SAKIP menjadi alat penting dalam mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan mengoptimalkan penggunaan sistem ini, diharapkan instansi pemerintah dapat mengelola kinerja mereka secara lebih efektif dan menyeluruh.

**Akses :**
- Website : https://esakip.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**33. Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas (SUPERMANKUAT)**

**Deskripsi :**

SUPERMANKUAT atau Sistem Strategi Penguatan Penerapan Manajemen Risiko Berkualitas Melalui Aplikasi Terintegrasi adalah sebuah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan tujuan untuk memperkuat penerapan manajemen risiko dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini mengadopsi kerangka manajemen risiko dan melibatkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam pengelolaan risiko. Tiga lini pertahanan tersebut meliputi pemilik risiko (*risk owner*), pengawas risiko (*risk overseer*), dan penyedia pemastian independen (*independent assurance provider*). Aplikasi Supermankuat diharapkan dapat memudahkan proses pengelolaan risiko bagi tiga lini pertahanan tersebut.

**Akses :**

- Website : https://supermankuat.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**34. Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (PETIEMAS)**

**Deskripsi :**

PETI EMAS atau Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Bali dalam mempermudah melaksanakan pemenuhan dokumen hasil pemeriksaan melalui sistem yang telah dibangun. Aplikasi ini bertujuan memudahkan Perangkat Daerah untuk mengontrol pergerakan dari tindak lanjut atas aduan yang diterima sekaligus mengomentari apakah tindak lanjut yang diberikan sudah sesuai atau belum atau perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan.

**Akses :**

- Website : petiemas.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**35. Layanan *Smartlink***

**Deskripsi :**

Layanan Smartlink "balikom.info" yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk memperpendek dan mengelola *link* atau tautan dengan mudah. Selain itu, platform ini juga memungkinkan pembuatan *microsite* atau halaman khusus yang berisi kumpulan *link* terkait.

Dengan menggunakan Smartlink Pemprov Bali, pengguna dapat membuat tautan yang pendek dan mudah diingat, sehingga dapat dengan cepat diakses oleh pengguna lain. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur *generate* QR *code*, yang memungkinkan tautan tersebut dapat diakses melalui pemindaian QR *code* menggunakan perangkat *smartphone* masing-masing pengguna.

Smartlink Pemprov Bali memberikan solusi praktis dalam mengelola tautan dan mempermudah proses berbagi informasi atau promosi melalui platform digital. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemudahan akses melalui *QR code*, Smartlink Pemprov Bali merupakan alat yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan tautan dan memperluas jangkauan komunikasi digital di Pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://www.balikom.info/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2210

**36. Sistem Notifikasi Terintegrasi**

**Deskripsi :**

Sistem Notifikasi Terintegrasi adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan pengiriman pesan melalui email, SMS, dan pesan WhatsApp secara langsung, serta berfungsi sebagai penghubung atau *gateway* untuk mengirim pesan dari sistem lain yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan integrasi yang baik dengan sistem lainnya, Sistem Notifikasi Terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dengan mudah dari berbagai aplikasi atau sistem yang digunakan di Pemerintah Provinsi Bali, sehingga mempercepat alur komunikasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi serta sudah dimanfaatkan sebagai layanan

pengiriman OTP (*One Time Password*) atau *password* sekali pakai di berbagai sistem yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemampuan untuk mengirim pesan melalui email, SMS, dan WhatsApp, Sistem Notifikasi Terintegrasi menjadi alat yang penting dalam mendukung operasional dan komunikasi yang efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://notifikasi.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2214

**37. Sistem Pendataan Koperasi (*Online* Data Koperasi)**

**Deskripsi :**

Data Koperasi yang tersedia dalam *Online Data System* (ODS) yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI saat ini bersifat umum dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kebijakan perkoperasian di Provinsi Bali. Oleh karena itu, Provinsi Bali merasa perlu memiliki sistem khusus untuk mengumpulkan dan menampilkan data koperasi secara detail baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah mengembangkan Online Data Koperasi (ODK) Provinsi Bali. ODK merupakan sebuah sistem data digital berbasis web yang memuat informasi yang lebih detail mengenai koperasi di Bali. Sistem ini mencakup data koperasi binaan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan juga binaan nasional yang beroperasi di wilayah Bali.

ODK dibangun secara terpisah dari Online Data System (ODS) yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI, namun menjadi pelengkap dengan menawarkan data detail yang belum tersedia di ODS. ODK juga melibatkan koperasi secara aktif dalam proses peng-*input*-an dan pengolahan data, sehingga menjadikannya sebuah sistem yang berpartisipasi aktif dari para pelaku koperasi di Bali.

**Akses :**

- Website : https://koperasi.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**38. Sistem pendataan IKM dan UMKM**

**Deskripsi :**

Sistem yang diberi nama Office UMKM adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk melakukan pendataan UMKM/IKM & Koperasi dengan tujuan membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan UMKM/IKM & Koperasi di Bali.

Melalui Office UMKM, Pemerintah Provinsi Bali dapat secara efisien dan efektif mengumpulkan informasi terkait UMKM/IKM & Koperasi di wilayahnya. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam proses pendataan, termasuk pengumpulan data demografis, data usaha, dan informasi lainnya yang relevan.

Dengan memiliki data yang komprehensif dan terkini, Pemerintah Provinsi Bali dapat menganalisis kondisi UMKM/IKM & Koperasi secara lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sektor tersebut. Office UMKM menjadi alat penting dalam mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan dukungan yang efektif kepada UMKM/IKM & Koperasi di Bali guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

**Akses :**

- Website : https://officeumkm.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
Dalam Proses Pendaftaran.

**39. Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali (Made in Bali)**

**Deskripsi :**

Made in Bali, sebuah aplikasi yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi UMKM, Disperindag dan Diskominfos Provinsi Bali, merupakan *marketplace* digital yang dirancang khusus untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Koperasi di Bali. Aplikasi ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha lokal tersebut untuk memasarkan produk-produk mereka secara lebih luas.

Dengan menggunakan aplikasi Madeinbali, para pelaku UMKM, IKM, dan Koperasi di Bali dapat memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan daya jual produk mereka. Aplikasi ini menyediakan platform yang memudahkan proses pemasaran, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau konsumen potensial tidak hanya di dalam Bali, tetapi juga di luar pulau Bali.

Melalui fitur-fitur yang inovatif, Madeinbali memungkinkan para pengguna untuk membuat toko *online* mereka sendiri di dalam aplikasi. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk memamerkan produk-produk mereka dengan tampilan yang menarik dan profesional. Dengan demikian, mereka dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan secara signifikan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, aplikasi Madeinbali juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menemukan dan membeli produk-produk lokal Bali dengan cepat dan mudah. Konsumen dapat menjelajahi berbagai kategori produk, membandingkan harga, dan melihat ulasan dari pelanggan lain sebelum melakukan pembelian. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya aplikasi Madeinbali, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi para pelaku UMKM, IKM, dan Koperasi di Bali, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal dalam skala nasional maupun internasional. Aplikasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan industri lokal Bali.

**Akses :**

- Website : https://madeinbali.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/madeinbali-playstore
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**40. Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ *One Payment Gateway* (SiPAY)**

**Deskripsi :**

*Single* atau *One Payment Gateway* adalah solusi terbaru yang dikembangkan dengan tujuan utama mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dan mendukung akuntabilitas pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam upaya mempermudah transaksi elektronik, One Payment Gateway berkolaborasi dengan lembaga perbankan terkemuka dan telah melalui serangkaian audit keamanan ketat guna memastikan sistemnya aman dan terpercaya.

Sistem ini telah berhasil terintegrasi dengan berbagai layanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam kerangka integrasi ini, One Payment Gateway menyediakan proses transaksi keuangan yang dapat diakses oleh pengguna melalui platform yang telah dibangun. Sebagai hasilnya, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan transaksi keuangan secara online melalui berbagai layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan keamanan yang terjamin dan integrasi yang komprehensif, One Payment Gateway menjadi solusi yang tangguh dan andal dalam memfasilitasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui penggunaan pembayaran non-tunai, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memungkinkan pengembangan fitur pembayaran yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Akses :**

- Website : https://sipay.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**41. Pameran Virtual Pembangunan Bali**

**Deskripsi :**

Pameran Pembangunan Virtual adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk acara Pameran Pembangunan Bali yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Bali. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi alternatif mengingat tidak mungkin untuk melakukan pameran secara langsung saat pandemi COVID-19. Dengan adanya pameran pembangunan virtual, pengunjung tetap dapat mengakses informasi terkait pembangunan di Bali tanpa perlu berkumpul di satu tempat secara fisik.

Aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan di platform web dengan desain yang responsif, sehingga dapat diakses melalui perangkat mobile dan desktop. Pengunjung dapat merasakan pengalaman yang nyata saat memasuki Pameran Virtual ini berkat adanya grafik 3D yang menawan.

**Akses :**

- Website : https://pameran.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2195

**42. Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data**

**Deskripsi :**

Permohonan Informasi Publik merupakan bagian dari Bali Satu Data, sebuah platform yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan memberikan pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat. Dalam hal ini, Permohonan Informasi Publik di Portal Bali Satu Data menggantikan layanan sebelumnya yang dikenal sebagai "SiKI" (Sistem Keterbukaan Informasi), yang dikembangkan secara mandiri pada tahun 2017. SiKI diciptakan sebagai inovasi dalam manajemen informasi dan koordinasi internal serta sebagai sistem yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara online.

Melalui Bali Satu Data, data dan informasi yang disediakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk grafik statistik, tabel angka, dan pelaporan dokumen yang terintegrasi dengan tingkat nasional melalui Satu Data Indonesia. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan mendalam mengenai berbagai aspek di Provinsi Bali.

Dalam layanan Permohonan Informasi Publik di Bali Satu Data, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui portal yang disediakan. Dengan proses migrasi dari SiKI ke Bali Satu Data, pengajuan permohonan informasi menjadi lebih efisien dan transparan. Data dan informasi yang diminta akan ditindaklanjuti dengan cepat dan secara terperinci, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Platform Bali Satu Data membuktikan komitmen Diskominfos Provinsi Bali dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas dan memenuhi standar transparansi. Dengan akses mudah, presentasi data yang menarik, dan integrasi tingkat nasional, pelayanan informasi publik menjadi lebih terjangkau dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

**Akses :**

- Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore
- App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2057

**43. Sistem Perpustakaan Digital (Pustaka Bali)**

**Deskripsi :**

Pustaka Bali adalah sistem informasi perpustakaan yang menyediakan akses lengkap ke koleksi buku yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan pemanfaatan teknologi terkini, Pustaka Bali mempermudah akses dan memperkaya pengalaman para pengguna dalam menjelajahi dunia literatur yang kaya dan beragam.

Dalam Pustaka Bali, pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan buku-buku yang mereka cari. Pengunjung dapat menjelajahi katalog digital yang terdiri dari berbagai genre, mulai dari fiksi hingga buku referensi, dan dari sastra Bali hingga literatur internasional. Informasi rinci tentang setiap buku, termasuk sinopsis, penulis, dan tahun terbit, disajikan secara komprehensif untuk membantu pengguna membuat pilihan yang tepat.

Selain itu, Pustaka Bali juga menyediakan layanan peminjaman dan reservasi buku secara online. Pengunjung dapat memanfaatkan fitur ini untuk memesan buku yang mereka inginkan, dan dengan cepat mengetahui ketersediaan buku tersebut.

Dengan Pustaka Bali, akses ke pengetahuan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam buku-buku menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat Bali. Sebagai sumber daya informasi yang penting, perpustakaan ini tidak hanya melayani kebutuhan pembaca, tetapi juga memainkan peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Dengan dedikasi untuk memberikan layanan berkualitas, Pustaka Bali berkomitmen untuk menjadi pusat pengetahuan yang memperkaya budaya dan kreativitas di Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://pustakabali.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**44. Kelas Virtual**

**Deskripsi :**

Kelas Virtual merupakan sebuah platform layanan pembelajaran elektronik (e-learning) berbasis web dan mobile yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa pada satuan pendidikan jenjang menengah di Provinsi Bali. Kelas Virtual memiliki 4 tingkat pengguna, yaitu Admin, Operator Sekolah, Guru, dan Siswa. Masing-masing tingkat pengguna tersebut memiliki hak akses dan dashboard masing-masing.

Dengan adanya Kelas Virtual, guru dan siswa pada satuan jenjang pendidikan menengah di Provinsi Bali dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lebih mudah, dimana saja, dan kapan saja.

**Akses :**

- Website : https://kelasvirtual.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/kelasvirtual-playstore
- App Store : https://balikom.info/kelasvirtual-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**45. Website Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno**

**Deskripsi :**

Website Bulan Bung Karno Provinsi Bali adalah platform khusus yang mempromosikan dan mengakomodasi acara Bulan Bung Karno di provinsi Bali. Pengunjung dapat menemukan informasi lengkap tentang lomba, jadwal kegiatan, dan latar belakang kegiatan tersebut. Website ini juga berfungsi sebagai sarana bagi peserta lomba dengan dapat membuat akun dan mengunggah hasil karya mereka, memperlihatkan kreativitas secara online kepada panitia penyelenggara.

Website Bulan Bung Karno Provinsi Bali memastikan acara ini dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan geografis dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengunjung dapat dengan mudah memperoleh informasi, terlibat dalam lomba, dan menyaksikan perkembangan kegiatan melalui platform online yang nyaman dan aman. Website ini menjadi sumber daya berharga bagi semua pihak yang terlibat, memperkaya budaya dan kesenian di provinsi Bali, serta menghormati warisan Bung Karno.

**Akses :**

- Website : https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**46. Layanan Pemanfaatan Aset**

**Deskripsi :**

Merupakan bagian dari sistem aset yang dikembangkan oleh Tim SPBE Diskominfos Provinsi Bali. Modul layanan pemanfaatan aset pada sistem aset ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan sewa Aset Pemprov Bali (khususnya tanah) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan bantuan pengelolaan oleh UPTD. BMD. Dengan adanya platform ini, pengguna dapat melakukan penyewaan aset secara online, bahkan mengetahui dimana saja lokasi aset yang masih kosong atau belum disewakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui aset mana yang tersedia dan dapat dijadikan pilihan untuk keperluan sewa yang mereka butuhkan. Dengan adanya Pemanfaatan Aset, proses penyewaan aset Pemprov Bali menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor atau mengurus secara konvensional, tetapi dapat menggunakan platform ini untuk melakukan proses penyewaan secara online. Hal ini memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu dalam mencari dan menyewa aset yang diperlukan.

Keunggulan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi lengkap tentang aset yang tersedia untuk disewa, termasuk lokasi dan status ketersediaan. Dengan adanya sistem online, proses penyewaan aset menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses konvensional. Selain itu, platform ini juga membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan aset, dengan sistem pengelolaan terintegrasi yang memudahkan pemantauan status penyewaan aset. Seluruh informasi terkait dengan aset, termasuk kontrak penyewaan dan pembayaran, dicatat dan terdokumentasi secara digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Selain itu, platform ini juga memberikan manfaat bagi Pemerintah

Provinsi Bali dalam pengelolaan aset, dengan sistem pengelolaan terintegrasi yang memudahkan pemantauan status penyewaan. Pemanfaatan Aset secara digital juga membawa penghematan dokumen fisik, fleksibilitas aksesibilitas, kemampuan monitoring real-time, kolaborasi efisien, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

**Akses :**

- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/siwa-playstore
- App Store : https://balikom.info/siwa-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**47. Layanan Bug Bounty**

**Deskripsi :**

Bali Bug Bounty adalah sebuah platform aplikasi yang dikembangkan oleh Tim SPBE Diskominfos Provinsi Bali bertujuan untuk memberikan sarana bagi pengguna dalam melaporkan masalah bug, error, dan celah keamanan terkait dengan layanan digital yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya platform ini, pengguna dapat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan sistem digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Salah satu keunggulan dari Bali Bug Bounty adalah kemampuannya untuk memfasilitasi pelaporan atas beberapa jenis masalah keamanan. Pengguna dapat melaporkan pelanggaran data, akses tidak sah ke data, celah keamanan, dan masalah sejenisnya. Hal ini

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan yang ada.

Dengan adanya platform ini, Pemerintah Provinsi Bali dapat mengumpulkan laporan-laporan dari masyarakat secara efisien dan merespon dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan. Ini adalah langkah yang positif dalam memperkuat keamanan dan privasi data dalam lingkungan digital pemerintah.

Bali Bug Bounty memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan data dan sistem digital di Provinsi Bali. Dengan menyediakan platform yang mudah digunakan dan fokus pada laporan masalah keamanan, aplikasi ini menjadi alat yang efektif dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan digital.

**Akses :**

- Website : https://bugbounty.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2207

**48. Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)**

**Deskripsi :**

Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat adalah sebuah aplikasi online yang didesain khusus untuk desa adat di Provinsi Bali. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah menjadi pangkalan data yang komprehensif mengenai produk hukum adat di wilayah tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada Desa Adat dengan menyediakan informasi hukum adat yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan cepat.

Dengan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih efisien dan terorganisir terhadap produk hukum adat. Aplikasi ini mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai informasi hukum adat yang relevan.

Kelebihan utama dari aplikasi ini adalah kemudahan akses dan pencarian informasi. Pengguna dapat dengan cepat mencari dan mengakses informasi yang mereka butuhkan secara spesifik dan terperinci. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat menghemat waktu dan usaha dalam memperoleh informasi hukum adat yang diperlukan.

Selain itu, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat juga memberikan jaminan keakuratan dan kevalidan informasi. Data yang disediakan melalui aplikasi ini telah melalui proses verifikasi, sehingga Desa Adat dapat mengandalkan informasi tersebut sebagai acuan yang sah dalam mengelola urusan hukum adat di wilayah mereka.

Dengan adanya aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat, diharapkan pelayanan hukum adat di Provinsi Bali dapat ditingkatkan secara signifikan. Desa Adat akan merasakan manfaat dalam hal akses informasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan efisiensi dalam administrasi hukum adat. Ini merupakan langkah maju dalam memperkuat dan melestarikan warisan budaya hukum adat di Bali, sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat yang kaya dan beragam.

**Akses :**

- Website : https://jidhat.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/1088

**49. Sistem Sensus Desa Adat**

**Deskripsi :**

Sistem Sensus Desa Adat, yang disebut juga sebagai Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat, merupakan sebuah inisiatif untuk mengembangkan dan memberdayakan desa adat di Bali. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di Bali. Dalam upaya menjaga

keberadaan dan kelestariannya, Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat dilaksanakan untuk mendata kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di setiap desa adat di Bali.

Sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan jumlah penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, serta atribut sosial penduduk dalam suatu wilayah desa adat. Data yang terkumpul dari sensus ini diyakini menjadi dasar dalam menentukan pembangunan dan merumuskan program-program kebijakan oleh berbagai pihak, baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Sensus ini mencakup pemerintahan, kelembagaan, parahyangan, palemahan, dan pawongan di 1.493 desa adat yang ada di Bali.

Dalam rangka mewujudkan visi Nangun Sat Kertih Loka Bali, Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat menjadi langkah penting dalam mendukung program prioritas Gubernur Bali. Melalui sensus ini, diharapkan tercipta pangkalan data berbasis desa adat yang valid dan lengkap guna memperkuat peran, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menjaga kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Dengan tersedianya sistem dan database sumber daya desa adat, data terpadu desa adat yang mencakup Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat diakses dengan mudah. Informasi yang terkumpul dari sensus ini akan memudahkan pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pengembangan potensi desa adat serta pembangunan desa adat di masa depan.

Dalam rangka memenuhi sasaran tersebut, kegiatan sensus ini bertujuan untuk menyusun database akses data terpadu desa adat dan menganalisis hasil Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang komprehensif dan melakukan kajian terhadap data tersebut, yang meliputi aspek Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam desa adat.

**Akses :**

- Website : https://sensusadat.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/774

**50. Sistem Informasi Krama Desa Adat (KRAMA)**

**Deskripsi :**

Sistem Informasi Krama Desa Adat adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait dengan krama (penduduk) desa adat di Bali. Dengan sistem ini, manajemen informasi mengenai krama menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Sistem ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan krama desa adat, seperti data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, meperas, serta pencetakan kartu penduduk krama dan kartu keluarga krama. Data tersebut dikumpulkan dan diintegrasikan secara elektronik, memungkinkan pengelolaan yang lebih baik dan pemrosesan yang cepat.

Melalui sistem ini, pemerintah dan desa adat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai data krama di Bali. Data-data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan kondisi sosial masyarakat desa adat.

Selain itu, sistem ini juga memudahkan penerbitan kartu penduduk krama dan kartu keluarga krama. Dengan adanya kartu-kartu ini, identitas dan hubungan keluarga setiap krama dapat tercatat dengan jelas, serta dapat membantu dalam administrasi desa adat.

Dengan Sistem Informasi Krama Desa Adat, desa adat di Bali memiliki alat yang kuat untuk mengelola data krama dengan efisien dan efektif. Sistem ini memastikan integritas data, meningkatkan kualitas pelayanan kepada krama, dan membantu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan data yang valid. Sebagai hasilnya, kehidupan masyarakat desa adat dapat dikelola dengan lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

**Akses :**

- Website : https://krama.baliprov.go.id/login
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
Dalam Proses Pendaftaran.

**51. Sistem Manajemen Aset Desa Adat (PADRUWEN)**

**Deskripsi :**

Padruwen Desa Adat adalah salah satu modul pada sistem aset yang telah dikembangkan sebelumnya dimana sistem ini dirancang khusus untuk membantu Desa Adat dalam mengelola dan melacak aset-aset yang dimiliki. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengelolaan aset-aset desa adat, termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Lainnya.

**Akses :**

- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**52. Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat (BUPDA)**

**Deskripsi :**

Baga Utsaha Padruwen Masyarakat Adat, atau yang dikenal sebagai BUPDA, merupakan lembaga usaha yang beroperasi dalam sektor riil, jasa, dan/atau Pelayanan Umum. Lembaga ini didirikan berdasarkan hukum adat dan dikelola dengan tata kelola modern, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat. BUPDA menjadi wadah yang memungkinkan masyarakat adat untuk mengembangkan usaha mereka dengan dukungan dan pengelolaan yang baik.

Sistem Pendaftaran dan Monitoring BUPDA adalah sebuah platform yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran BUPDA dari setiap Desa Adat secara online, sehingga tidak diperlukan lagi pendaftaran secara offline dengan datang langsung ke dinas terkait. Melalui sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini meminimalisir hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas bagi Desa Adat.

Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat manajemen dan monitoring BUPDA. Data umum BUPDA, tata kelola lembaga dan pengurus, tata kelola keuangan, serta data terkait usaha yang dimiliki oleh BUPDA dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem ini. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap kinerja dan perkembangan BUPDA secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pendaftaran dan monitoring yang terintegrasi, pihak terkait dapat melacak dan mengelola informasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan BUPDA.

Dengan Sistem Pendaftaran dan Monitoring BUPDA, diharapkan pengelolaan BUPDA menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memberikan kemudahan akses bagi Desa Adat dalam mendaftarkan BUPDA dan memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kinerja lembaga. Dengan tata kelola yang baik, BUPDA dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat, serta menjaga dan memperkaya kekayaan budaya dan warisan adat yang dimiliki oleh Desa Adat.

**Akses :**

- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**53. Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK-KBS)**

**Deskripsi :**

Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK KBS) adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat Bali untuk mengakses informasi kesehatan, memberikan masukan terkait JKN KBS, mendapatkan antrian online, serta mengetahui informasi mengenai tanaman

obat dan akupresur melalui menu kesehatan tradisional. SIK KBS terdiri dari dua antarmuka pengguna, yaitu Web dan Aplikasi Mobile.

Fitur yang tersedia pada Web SIK KBS meliputi Informasi Puskesmas, Informasi Klinik, Informasi Rumah Sakit, Data Riwayat Kesehatan berdasarkan SIKDA Generik dan PIS PK per kecamatan/kabupaten/provinsi, serta Data Antrean pasien. Sementara itu, Aplikasi Mobile SIK KBS menyediakan fitur pendaftaran antrian Puskesmas/Rumah Sakit kesehatan tradisional, penanganan keluhan JKN KBS, dan menampilkan profil Puskesmas dan Rumah Sakit.

**Akses :**

- Website : https://sik-kbs.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/sik-kbs-playstore
- App Store : https://balikom.info/sik-kbs-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
Dalam Proses Pendaftaran.

**54. Sistem Inventori (SIRI)**

**Deskripsi :**

Siri (Sistem Inventori) adalah sebuah aplikasi yang telah dikembangkan untuk mencatat pergerakan barang masuk, barang keluar, dan pengembalian barang di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam aplikasi ini, terdapat penggabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sistem Inventori Covid dan Inventori O2. Hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan terpadu dalam manajemen inventori di berbagai lembaga dan organisasi di Provinsi Bali.

Awalnya, Sistem Inventori Covid dan Inventori O2 dikembangkan khusus untuk digunakan oleh Dinas Kesehatan dalam mengelola inventori terkait dengan penanganan Covid-19. Namun, dengan perkembangan dan perluasan fungsionalitasnya, dikembangkanlah Siri yang tidak hanya digunakan oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan pencatatan stok/inventori.

Dalam Siri, pengguna dapat mencatat dan memantau dengan mudah pergerakan barang, termasuk barang masuk, barang keluar, dan pengembalian barang. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengelola inventori, sehingga pengguna dapat dengan cepat melacak dan memantau ketersediaan barang serta mengoptimalkan penggunaannya.

Dengan adanya Siri, manajemen inventori di Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih teratur, terintegrasi, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan lembaga dan organisasi terkait untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persediaan barang yang dimiliki, serta dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam penggunaan barang dan pengadaan kebutuhan baru.

Siri memberikan solusi yang komprehensif dalam manajemen inventori, menjadikan proses pencatatan dan pengelolaan stok barang lebih efisien dan akurat. Dengan keberadaan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan inventori, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan ketersediaan barang yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

**Akses :**

- Website : https://siri.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**55. Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan**

**Deskripsi :**

SISLABKES (Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan) adalah sebuah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk memudahkan dan mendigitalisasi proses administrasi dan pendataan laporan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Dalam SISLABKES, terdapat berbagai fitur yang tersedia, termasuk Pelayanan Covid dan Pelayanan Umum, yang mencakup proses pendaftaran pasien hingga pengiriman hasil pemeriksaan kepada pasien.

Selain itu, SISLABKES juga dilengkapi dengan fitur Paket Layanan yang memungkinkan Admin CS untuk membuat dan mengelola paket layanan yang digunakan pada pendaftaran pasien. Fitur ini mencakup langkah-langkah seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus paket yang telah dibuat. Terdapat juga fitur Nomor Register yang digunakan untuk mendaftarkan nomor register layanan pemeriksaan manual di luar sistem SISLABKES, sehingga nomor register tetap teratur baik di dalam maupun di luar sistem.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan modul pada SISLABKES yaitu modul SICINTA ALKES (Sistem Informasi Cepat dan Terintegrasi Pendaftaran Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan). Modul ini menjadi salah satu fitur yang dibuat untuk memudahkan pendaftaran, pelayanan dan pemeliharaan alat Kesehatan oleh UPTD. Balai Labkes Kerthi Bali Sadhajiwa yang sebelumnya dilakukan secara Manual.

**Akses :**

- Website : https://labkes.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/1592

**56. Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan (SILEBAH)**

**Deskripsi :**

SILEBAH adalah Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan. Sistem ini dibangun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi dan layanan secara online guna memenuhi kebutuhan yang terkait dengan kesehatan hewan dan bahan pangan asal hewan. Beberapa layanan yang disediakan melalui "Silebah" antara lain:

a. Pengujian Penyakit Hewan:
"Silebah" menyediakan layanan pengujian penyakit hewan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan permohonan pengujian secara online.

b. Pengujian Organoleptik:
Layanan pengujian organoleptik pada "Silebah" memungkinkan pengguna untuk meminta pengujian terhadap produk bahan pangan asal hewan. Pengujian organoleptik ini melibatkan penilaian sensorik terhadap produk, seperti rasa, aroma, tekstur, dan penampilan visual. Dengan menggunakan sistem ini, pihak yang terkait dengan produksi bahan pangan asal hewan dapat memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Pengujian Cemaran Mikroba:
"Silebah" juga menyediakan layanan pengujian cemaran mikroba pada bahan pangan asal hewan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan produk bebas dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Melalui "Silebah", diharapkan proses pengujian laboratorium penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Sistem ini memungkinkan akses yang mudah bagi para pemilik hewan, peternak, dan produsen bahan pangan asal hewan untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan kesehatan dan keamanan produk. Dengan menggunakan teknologi informasi dan layanan online, "Silebah" menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk hewan serta bahan pangan asal hewan.

**Akses :**

- Website : https://silebah.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
Dalam Proses Pendaftaran.

**57. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali**

**Deskripsi :**

JDIH Provinsi Bali merupakan platform elektronik yang menyediakan akses komprehensif ke berbagai dokumen hukum termasuk peraturan, perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan. Layanan ini telah berkembang mulai dari menyediakan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses, hingga menawarkan fitur interaksi seperti pencarian dan pengunduhan dokumen, layanan transaksi termasuk CRUD (Create, Read, Update, Delete) dokumen hukum, analitik data, dan forum diskusi. JDIH Provinsi Bali mengintegrasikan sistemnya dengan layanan elektronik lain, termasuk dashboard Pimpinan Bali Satu Data dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (BPHN) melalui API, mendukung inisiatif Revitalisasi Hukum Jilid II pemerintah. Dengan berbagai peningkatan dan integrasi, termasuk penambahan fitur-fitur baru dan pengembangan aplikasi mobile, JDIH Provinsi Bali tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses informasi hukum bagi pengguna tetapi juga mencerminkan komitmen Provinsi Bali dalam penataan regulasi dan pengembangan sistem informasi hukum yang terpadu, sejalan dengan kebijakan nasional dan mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari BPHN.

**Akses :**

- Website : https://jdih.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/jdihprovbali-playstore
- App Store : https://balikom.info/jdihprovbali-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**

Dalam Proses Pendaftaran.

**58. *Whistleblower System* (WBS) Pemprov Bali**

**Deskripsi :**

*Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Jika terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan pegawai Pemerintah Provinsi Bali, dapat melapor ke Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali melalui *Whistleblowing System* (WBS) Pemprov Bali. Jika laporan anda memenuhi syarat/kriteria, maka laporan Anda akan diproses lebih lanjut.

**Akses :**

- Website : https://wbs.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**

Dalam Proses Pendaftaran.

**59. Website Turyapada**

**Deskripsi :**

Website Turyapada adalah *platform* resmi Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 yang menyediakan informasi lengkap tentang ikon kebanggaan Provinsi Bali. Melalui fitur-fitur modern seperti Virtual 360, informasi fasilitas, jadwal acara, dan reservasi tiket *online*, website ini memadukan teknologi canggih dengan budaya Bali untuk memberikan pengalaman wisata yang informatif dan memukau. Pengunjung dapat menjelajahi keindahan arsitektur, merencanakan kunjungan, serta menikmati kemudahan layanan hanya dalam satu klik.

**Akses :**

- Website : https://turyapada.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**

https://pse.layanan.go.id/sealid/2212

**60. SIAP SWASTISABA**

**Deskripsi :**

Sistem Aplikasi SWASTISABA (SIAP SWASTISABA) Provinsi Bali adalah aplikasi untuk melakukan penginputan, verifikasi, dan penilaian dokumen pendukung penyelenggaraan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS). Aplikasi ini memiliki fitur Penginputan hasil *assessment* indikator KKS oleh Tim Pembina KKS Kab/Kota, Penginputan bukti/ dokumen pendukung indikator setiap tatanan KKS, Verifikasi dan penilaian indikator tatanan dan data dukung. Untuk instrumen penilaian dari KKS sendiri terdiri dari Kelembagaan dan Indikator Tatanan. Tatanan yang dinilai adalah Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Tatanan Permukiman Dan Rumah Ibadat, Tatanan Satuan Pendidikan, Tatanan Pasar, Tatanan Pariwisata, Tatanan Transportasi Dan Tertib Lalu Lintas Jalan, Tatanan Perkantoran Dan Perindustrian, Tatanan Perlindungan Sosial, Tatanan Pencegahan Dan Penanganan Bencana.

**Akses :**

- Website : https://swastisaba.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**61. Sistem Informasi Layanan Cuti Terintegrasi (SILACI)**

**Deskripsi :**

Sistem Pengajuan Cuti Terintegrasi (SILACI) adalah sebuah layanan digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan, persetujuan, dan monitoring cuti pegawai secara lebih efisien dan transparan. SILACI merupakan hasil pengembangan fitur dari tiga sistem berbeda, yaitu Sistem Absensi, Kantor Virtual, dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih terintegrasi bagi pegawai dan manajemen. Dengan adanya SILACI, pegawai dapat mengajukan cuti secara online tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu. Sistem ini secara otomatis akan mengecek data kehadiran pegawai melalui sistem absensi, menyesuaikan dengan kuota cuti dan data personal pegawai dalam SIMPEG, serta memungkinkan pemrosesan persetujuan dan pemantauan status cuti melalui kantor virtual. Dengan SILACI, pengelolaan cuti menjadi lebih efektif, transparan, dan akurat, mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih modern dan profesional.

**Akses :**

- Website : https://hadir-app.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore
- App Store : https://balikom.info/hadir-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/776

**62. Sistem Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi E-KTTP (SIWALATRI E-KTPP)**

**Deskripsi:**

Siwalatri e-KTPP merupakan aplikasi pengawasan dan pelaporan yang melibatkan beberapa perangkat daerah, seperti Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Pelaporan pada aplikasi SIWALATRI meliputi pelaporan pramuwisata yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan pramuwisata dapat berupa pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata serta pelaporan atas pramuwisata ilegal. Pada aplikasi ini diterapkan sistem poin, yang mana secara default poin yang dimiliki oleh pramuwisata pada awalnya adalah 5 poin, selanjutnya akan berkurang sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Pengurangan poin ini akan berpengaruh ketika pramuwisata melakukan perpanjangan Kartu Tanda Pramuwisatanya.

**Akses :**

- Website : https://siwalatri.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/AndroidApp
- App Store : https://balikom.info/IOsApp

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**63. Sistem Informasi Pengelolaan Air Limbah DSDP**

**Deskripsi :**

Sistem Informasi DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) merupakan aplikasi layanan digital yang mendukung pengelolaan air limbah terpusat di wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta. Aplikasi ini berfungsi sebagai media informasi dan pelayanan antara pengelola (UPTD Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali) dengan masyarakat, pelanggan, serta pelaku usaha yang terhubung ke jaringan DSDP. Melalui sistem ini, proses pengelolaan air limbah dilakukan secara lebih transparan, terintegrasi, dan terdokumentasi, mulai dari informasi layanan, kepesertaan pelanggan, hingga operasional pengelolaan air limbah di instalasi pengolahan (IPAL).

Fitur utama dalam aplikasi DSDP mencakup penyajian informasi umum tentang DSDP, pendaftaran dan data pelanggan, informasi tarif per kategori dan kewajiban layanan, serta kanal pengaduan/keluhan terkait saluran perpipaan dan komunikasi lain dengan pengelola layanan. *Channel* pembayaran pengolahan air limbah bagi pelanggan dapat menggunakan portal pelanggan DSDP, dapat melalui seluruh BPD Bali dan Kasir Kantor UPTD. Pengelolaan Air Limbah. Selain itu, sistem ini mendukung pembayaran IPLT (truk jasa kuras), monitoring layanan pengelolaan air limbah, publikasi regulasi dan standar layanan, serta edukasi masyarakat terkait pentingnya sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dengan keberadaan aplikasi ini, DSDP tidak hanya berperan sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai platform digital yang meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan air limbah di Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://dsdp.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2517

**64. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali**

**Deskripsi :**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali merupakan portal layanan digital yang dikembangkan untuk mengelola program TJSL Perusahaan di wilayah Bali. Melalui portal ini, perangkat daerah dapat melakukan pemetaan, pengelolaan serta pemantauan berbagai program dan bentuk kegiatan TJSL, masyarakat dapat mengajukan usulan kesertaan program atau kebutuhan yang berpotensi didanai melalui skema TJSL, serta Perusahaan peserta TJSL dapat berpartisipasi aktif dalam merencanakan, menyalurkan, serta melaporkan realisasi program dan pendanaan TJSL secara sistematis dan terdokumentasi. Portal TJSL Perusahaan Provinsi Bali diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, memastikan keselarasan program TJSL dengan prioritas pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola TJSL yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi pembangunan Bali.

**Akses :**

- Website : https://tjsl.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**65. Bali Digital Hub**

**Deskripsi:**

Bali Digital Hub (DigiHub) merupakan layanan satu pintu berbasis *citizen-centric* yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui portal ini, seluruh aplikasi dan layanan pemerintah, instansi daerah, lembaga pendidikan, hingga *startup* lokal terhubung dalam satu ekosistem digital terpadu, sehingga masyarakat cukup mengunjungi satu portal untuk menemukan dan mengakses berbagai layanan resmi dengan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

**Akses :**
- Website : https://tjsl.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**66. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (JDIH) Provinsi Bali**

**Deskripsi :**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Bali merupakan portal resmi yang menyediakan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Website ini berfungsi sebagai sarana publikasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Bali, mulai dari peraturan daerah, keputusan DPRD, Monografi Hukum, Artikel Hukum hingga dokumen pendukung lainnya.

Website JDIH DPRD Provinsi Bali memiliki landing page yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memperoleh informasi terkait dokumen hukum secara terbuka, cepat, dan transparan. Melalui halaman ini, pengguna dapat menelusuri, mencari, dan mengunduh berbagai dokumen hukum yang tersedia sebagai bentuk pelayanan informasi publik.

Selain itu, website ini juga dilengkapi dengan *dashboard* internal yang hanya dapat diakses oleh admin dan operator, yang berfungsi untuk melakukan manajemen konten pada landing page. *Dashboard* tersebut digunakan untuk pengelolaan data dan dokumen hukum, pengaturan informasi pendukung, serta pemeliharaan konten agar selalu mutakhir, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**Akses :**
- Website : jdih-dprd.baliprov.go.id (Landing Page),
- Dashboard : dashboard-jdihdprd.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**67. Sistem Taman Penangkaran Anjing Kintamani (TEMANI)**

**Deskripsi :**

Sistem Taman Penangkaran Anjing Kintamani (TEMANI) merupakan sistem informasi digital yang mendukung pengelolaan dan pemantauan Ras Anjing Kintamani pada UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Bali. Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim SPBE Pemerintah Provinsi Bali dan digunakan pada Taman Penangkaran Anjing Kintamani yang berlokasi di Baturiti, Kabupaten Tabanan. TEMANI berfungsi sebagai media pengelolaan data, layanan informasi, serta dokumentasi kegiatan penangkaran secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui aplikasi TEMANI, proses pengelolaan Anjing Kintamani dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi, mulai dari pencatatan data anjing, rekam medis, perawatan dan vaksinasi, hingga pengelolaan adopsi. Sistem ini juga mendukung pencatatan kejadian khusus seperti kematian dan kehilangan, serta pengelolaan data kepemilikan Anjing Kintamani baik di dalam maupun di luar taman penangkaran.

Selain aplikasi internal, TEMANI juga didukung oleh website resmi yang dapat diakses melalui *temani.baliprov.go.id*, yang menyajikan informasi publik terkait Anjing Kintamani, profil Taman Penangkaran, edukasi pelestarian ras lokal Bali, serta informasi layanan adopsi. Dengan keberadaan aplikasi dan website TEMANI, pengelolaan Anjing Kintamani tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga menjadi platform digital untuk mendukung pelestarian, edukasi, dan peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Bali.

**Akses** :
- Dashboard : https://temani-dashboard.baliprov.go.id/
- Website : https://temani.baliprov.go.id/
- Play Store : -

- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/2519

**68. Sistem Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)**

**Deskripsi :**

Aplikasi RKBMD Pemerintah Provinsi Bali merupakan sistem informasi digital yang dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Aplikasi ini memfasilitasi seluruh tahapan penyusunan RKBMD, mulai dari pengusulan oleh Perangkat Daerah, penelaahan oleh Pengelola Barang, hingga penetapan RKBMD tahunan. Dengan mengacu pada penggolongan dan kodefikasi barang sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 serta memperhatikan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga, aplikasi ini membantu memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan nilai barang yang diusulkan dengan ketentuan yang berlaku, serta terintegrasi dengan sistem e-SAKIP untuk mengaitkan usulan kebutuhan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan.

Melalui integrasi dengan data BMD existing, sistem pengelolaan aset daerah, dan e-SAKIP, aplikasi RKBMD mampu menampilkan kebutuhan riil secara otomatis serta memastikan keterkaitan antara perencanaan barang dan perencanaan kinerja. Proses kompilasi usulan seluruh Perangkat Daerah menjadi lebih cepat dan akurat, sementara seluruh tahapan terekam sebagai arsip digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, konsistensi perencanaan, serta akuntabilitas penyusunan RKBMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Dashboard : https://aset.baliprov.go.id/
- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**69. Sistem Manajemen Penugasan Terintegrasi (PERI VIRTUAL)**

**Deskripsi :**

Fitur Manajemen Penugasan Terintegrasi pada Layanan Kantor Virtual Bali dikembangkan untuk menjawab kebutuhan efisiensi dalam proses administrasi penugasan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui fitur ini, proses pembuatan, pengajuan, hingga pencatatan Surat Tugas atau Surat Perintah kini dapat dilakukan secara digital dan otomatis, tanpa harus melalui tahapan manual yang berulang.

Sistem ini menghubungkan dua layanan inti, yaitu modul penugasan pada Kantor Virtual Bali dengan Layanan Absensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali. Integrasi ini memungkinkan setiap pegawai yang tercantum dalam Surat Tugas atau Surat Perintah untuk langsung terdaftar di sistem absensi, tanpa perlu melakukan unggahan dokumen secara terpisah.

Dari sisi pengguna, proses pengajuan surat menjadi lebih sederhana dan efisien. Pegawai cukup mengajukan permohonan melalui menu Draft Surat. Sistem kemudian akan secara otomatis menghasilkan berkas draft Surat Tugas atau Surat Perintah dalam format .docx, lengkap dengan data pegawai dan informasi kegiatan yang dibutuhkan. Sebelum diajukan, pegawai yang bersangkutan dapat melakukan review terhadap isi draf untuk memastikan seluruh data sudah benar dan sesuai kebutuhan.

Tahapan selanjutnya mengikuti mekanisme pengajuan berjenjang sebagaimana prosedur administratif yang berlaku. Setelah dokumen disetujui dan ditandatangani secara elektronik melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE), sistem secara otomatis akan mengunggah dokumen final tersebut ke Aplikasi Absensi. Dengan demikian, pegawai tidak perlu lagi mengunggah Surat Tugas secara manual sebagai bukti kehadiran kegiatan dinas luar, karena pencatatan sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Dengan adanya Fitur Manajemen Penugasan Terintegrasi ini, proses birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain menghemat waktu dan tenaga administratif, sistem ini juga meningkatkan akurasi data absensi pegawai yang sedang menjalankan tugas resmi, sekaligus memperkuat ekosistem layanan digital di Pemerintah Provinsi Bali.

**Akses :**

- Dashboard : https://kanal.baliprov.go.id/home
- Website : https://kanal.baliprov.go.id/draft-letter/create-spt
- Play Store : https://balikom.info/kanal-playstore
- App Store : https://balikom.info/kanal-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**70. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (SIPADAS)**

**Deskripsi :**

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (SIPADAS) merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen pengelolaan sampah mulai dari tingkat sumber secara akurat dan berkelanjutan. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pendataan, pemantauan, dan pelaporan yang mengalihkan proses konvensional ke arah digitalisasi yang lebih transparan. Fitur unggulan seperti master data indikator dan pertanyaan survey yang dinamis dan dashboard pemantauan *real-time,* SIPADAS memungkinkan pemerintah untuk memetakan kondisi pengelolaan sampah di berbagai sektor serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat melalui halaman informasi publik yang tersedia.

Operasional SIPADAS melibatkan tiga aktor utama dengan pembagian tugas yang saling terintegrasi, yaitu Admin Provinsi (Tim DKLH Provinsi Bali), Admin Koordinator Sektor (Tim dari masing-masing OPD sesuai sektor yang diampu) dan Surveyor. Admin Provinsi bertanggung jawab sebagai pengelola pusat yang memegang kendali penuh atas manajemen master data, penyusunan indikator dan pertanyaan survei, serta verifikasi akhir akun pengguna. Admin Koordinator Sektor bertugas untuk melakukan pengawasan dan validasi berjenjang terhadap data yang masuk dari wilayahnya masing-masing guna memastikan kualitas data sebelum disetujui. Sementara itu, Surveyor bertugas sebagai garda terdepan di lapangan yang melakukan pengambilan data, mendaftarkan akun secara mandiri, dan mengunggah hasil survei langsung ke dalam sistem aplikasi.

Melalui alur kerja yang sistematis, setiap data yang telah di-*input* oleh Surveyor dan divalidasi oleh Admin Koordinator akan diolah secara otomatis menjadi laporan komprehensif dan grafik pada dashboard dinamis. Hal ini memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan analisis mendalam terkait efektivitas pengelolaan sampah di tiap desa atau instansi yang diampu oleh ASN/Non-ASN. Dengan adanya SIPADAS, koordinasi antar instansi melalui fitur pemetaan OPD menjadi lebih terukur, sehingga kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat diimplementasikan secara lebih efektif demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri (Palemahan Kedas).

**Akses** :

- Dashboard : https://kelolasampah.baliprov.go.id/
- Website : https://kelolasampah.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**71. Sistem Pelayanan Penjualan Benih Ikan Secara Online (SIPULIH)**

**Deskripsi :**

Layanan Penjualan Benih Ikan pada UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Sangeh berfungsi sebagai platform layanan digital yang konsepnya menyerupai *e-commerce* khusus penjualan benih dan induk ikan milik Pemerintah Provinsi Bali. Melalui layanan ini, proses pemesanan benih ikan oleh pembudidaya dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengajuan permintaan jenis dan jumlah komoditas hingga pengambilan benih di UPTD Produksi Perikanan Budidaya. Untuk memudahkan masyarakat, permohonan diawali melalui WhatsApp dan selanjutnya dikelola secara terpusat di SIMPELKAN oleh Admin. Fitur utama modul ini mencakup pencatatan pesanan, verifikasi data dan ketersediaan benih, persetujuan pimpinan, pembayaran non-tunai (QRIS), serta notifikasi status pesanan secara otomatis. Pemohon juga dapat memantau progres permohonan layaknya fitur pelacakan pesanan pada aplikasi belanja online. Dengan pendekatan ini, SIMPELKAN menghadirkan layanan penjualan benih ikan yang lebih mudah,

transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan budidaya.

**Akses :**

- Website : https://simpelkan.baliprov.go.id/benih-ikan
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**
https://pse.layanan.go.id/sealid/662

**72. Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Berbasis Desa Adat)**

**Deskripsi :**

Sistem informasi forum dan pelaporan desa adat terkait kegiatan Sipandu Beradat di setiap desa adat. Sistem pengamanan lingkungan berbasis Desa Adat ini mengupayakan seluruh komponen keamanan yang ada di tingkat desa dalam bentuk forum. Forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat diharapkan dapat bekerja sinergi dalam penanganan berbagai masalah keamanan dan kerawanan sosial yang terjadi di wilayah (wewidangan) Desa Adat sehingga terbentuk pola pengamanan yang efektif dan tidak terjadi arogansi dalam penanganan kasus dan/atau permasalahan di Desa Adat. Laporan forum dan laporan bulanan yang di input oleh desa adat nantinya akan di monitoring oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website Publik: https://sipanduberadat.baliprov.go.id
- Dashboard: https://sipanduberadat.baliprov.go.id/dashboard
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -**

**73. Website DEKRANASDA**

**Deskripsi :**

Website Dekranasda adalah *platform* resmi Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Bali yang berfungsi untuk memperkenalkan berbagai produk kerajinan tangan daerah Provinsi Bali kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar bagi pengrajin lokal. Website ini juga memberikan informasi mengenai berbagai jenis kerajinan Indonesia, teknik pembuatan, serta sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Edukasi ini penting untuk meningkatkan apresiasi terhadap kerajinan tangan di Provinsi Bali.

**Akses :**

- Website : https://dekranasda.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**

**74. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali New Version**

**Deskripsi :**

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali merupakan portal resmi Pemerintah Provinsi Bali yang menyediakan akses terbuka terhadap berbagai produk hukum daerah secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Website ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan informasi hukum serta memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali.

Website JDIH Provinsi Bali telah terintegrasi dengan Portal JDIHN (jdihn.go.id) sebagai wujud implementasi kebijakan nasional dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terstandar, terkoordinasi, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fitur yang ditambahkan pada versi terbaru diantaranya yaitu:

a. Integrasi dengan Single Sign On (SSO) Provinsi Bali untuk akses login dan pengelola user aplikasi.
b. Integrasi dengan Bali Media Center (BMC) untuk portal berita.

c. Integrasi dengan Kantor Virtual, yaitu dokumen produk hukum dapat diajukan untuk TTE dokumen salinan dari dashboard admin JDIH Provinsi Bali ke Kantor Virtual dengan proses verifikasi berjenjang. Riwayat verifikasi dapat dilihat melalui dashboard admin JDIH Provinsi Bali.

Melalui portal ini, pengguna dapat mencari, menemukan, dan mengunduh berbagai jenis data dan dokumen hukum, di antaranya:

- Peraturan Perundang-undangan
- Artikel Hukum
- Monografi Hukum
- Putusan Pengadilan

Tujuan utama dari pengembangan Website JDIH Provinsi Bali adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, akademisi, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi serta produk hukum daerah secara efektif dan terpercaya.

**Akses :**

- Website : https://jdih.baliprov.go.id/
- Dashboard Admin: https://dashboard-jdih.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/jdihprovbali-playstore
- App Store : https://balikom.info/jdihprovbali-appstore

**Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :**

Dalam Proses Pendaftaran.

## BAB VII
## PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah sebagai entitas akuntansi, sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bali, 25 Mei 2026

**GUBERNUR BALI,**




**WAYAN KOSTER**